



**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045**

**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024**



**WALI KOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);





22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh 2020-2034 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai penuh Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 2);





Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALI KOTA SUNGAI PENUH


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN  
2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Wali Kota adalah Wali Kota Sungai Penuh.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- 



11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

### BAB II SISTEMATIKA RPJPD

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH  
BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK  
BAB VI : PENUTUP

- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Desember 2024

**WALI KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**ALPIHAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 8, 75/2024



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045


I. UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah untuk menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh menyusun RPJPD tahun 2025-2045, yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
  5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 

Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 yaitu: "Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan", dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bertakwa; Bagian integral identitas dan kehidupan masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh yang plural, terciptanya keharmonisan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama, memahami perintah dan larangan serta taat menjalankan ajaran agama. Bertakwa sebagai landasan memajukan pembangunan yang berkelanjutan:
  - a. Kemajemukan kearifan lokal Kota Sungai Penuh diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan bertakwa sebagai satu kesatuan identitas dan kebanggaan bersama.
  - b. Kebudayaan dalam pembangunan yang berlandaskan bertakwa sebagai penggerak transformasi masyarakat.
  - c. Bertakwa sebagai landasan dalam melaksanakan 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan jangka panjang daerah. Mengintegrasikan nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, untuk menciptakan karakter yang kuat dan berintegritas tinggi, masyarakat yang maju dengan nilai-nilai ketakwaan dan meraih berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Maju; Mengandung makna terwujudnya kemajuan Kota Sungai Penuh dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, infrastruktur, sosial maupun budaya:
  - a. Kota Sungai Penuh yang unggul, berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
  - b. Kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK dengan tetap menjaga tradisi dan warisan leluhur, namun tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan zaman.
  - c. Perekonomian yang maju dan berkelanjutan.
  - d. Infrastruktur yang modern dan efisien,
  - e. Penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel.
  - f. Kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Berkelanjutan; Pembangunan Kota Sungai Penuh yang ramah lingkungan dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang:
  - a. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
  - b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk keberlanjutan ekologi.
  - c. Pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.






- d. Pengendalian dan pengurangan limbah dan emisi melalui pembangunan yang ramah lingkungan.
- e. Pemberdayaan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal.
- f. Ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim, ketangguhan ekonomi, keadilan dan kesetaraan,
- g. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 terdiri dari 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM yang unggul, bertakwa, dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah.
4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025-2029, RPJMD II Tahun 2030-2034, RPJMD III Tahun 2035-2039, dan RPJMD IV Tahun 2040-2045. Dengan demikian, diharapkan terciptanya kesinambungan pembangunan antar periodisasi RPJMD.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh perlu didukung oleh: (1) komitmen dari pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota; (3) peran aktif partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Sungai Penuh; dan (4) penerapan manajemen risiko pembangunan secara konsisten.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 59





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis dan menjadi panduan menuju Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045, terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu: Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, serta Penutup.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta mendukung dalam penyusunan dokumen RPJPD ini. Selanjutnya diharapkan masukan dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik.

Sungai Penuh, Desember 2024

WALI KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR





DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**DAFTAR TABEL .....vii**

**DAFTAR GAMBAR .....x**

**BAB I PENDAHULUAN..... I.1**

1.1 Latar Belakang..... I.1

1.2 Dasar Hukum ..... I.2

1.3 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan Dokumen  
Perencanaan Lainnya ..... I.6

1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD  
Provinsi Jambi dan RPJPN ..... I.7

1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD  
Kabupaten Perbatasan ..... I.7

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RTRW  
Kota Sungai Penuh, RTRW Provinsi Jambi dan RTRW  
Nasional ..... I.7

1.4 Maksud dan Tujuan ..... I.8

1.5 Sistematika..... I.8

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II.1**

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II.1

2.1.1 Aspek Geografi..... II.1

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah ..... II.1

2.1.1.2 Posisi Strategis Kota Sungai Penuh ..... II.2

2.1.1.3 Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW ..... II.3

2.1.1.4 Penggunaan Lahan..... II.4

2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam..... II.6

2.1.1.6 Kawasan Rawan Bencana ..... II.14

2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan  
Hidup ..... II.16

2.1.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..... II.19

2.1.1.9 Indeks Risiko Bencana ..... II.20

2.1.1.10 Perubahan Iklim ..... II.22

2.1.1.11 Indeks Ketahanan Daerah ..... II.23

2.1.1.12 Indeks Ketahanan Pangan ..... II.24

2.1.2 Aspek Demografi ..... II.25

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... II.25

2.1.2.2 Komposisi Penduduk..... II.26

2.1.2.3 Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .... II.28

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk ..... II.28

2.1.2.5 Masyarakat Adat ..... II.29

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II.30

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II.30

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... II.30

2.2.1.2 Inflasi ..... II.30

2.2.1.3 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita ..... II.32



2.2.1.4	Kemiskinan.....	II.33
2.2.1.5	Ketimpangan Pendapatan.....	II.34
2.2.1.6	Tingkat Pengangguran.....	II.35
2.2.1.7	Pembangunan Manusia.....	II.37
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II.38
2.2.2.1	Keluarga Sehat.....	II.38
2.2.2.2	Kualitas Keluarga.....	II.43
2.2.2.3	Kualitas Anak .....	II.44
2.2.2.4	Pemberdayaan Perempuan .....	II.44
2.2.2.5	Pembangunan Pemuda.....	II.47
2.2.2.6	Pembangunan Kebudayaan .....	II.48
2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	II.49
2.3.1	Daya Saing Ekonomi .....	II.49
2.3.1.1	Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial.....	II.49
2.3.1.2	PDRB Menurut Pengeluaran .....	II.54
2.3.1.3	PDRB Per Kapita .....	II.57
2.3.1.4	Daya Saing Digital.....	II.58
2.3.1.5	Investasi .....	II.59
2.3.1.6	Ekonomi Inklusif.....	II.60
2.3.1.7	Rasio Kewirausahaan .....	II.61
2.3.1.8	Produktivitas Total Daerah .....	II.62
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	II.62
2.3.2.1	Pendidikan.....	II.62
2.3.2.2	Literasi dan Numerasi .....	II.68
2.3.2.3	Pembangunan Literasi Masyarakat .....	II.68
2.3.2.4	Literasi Digital.....	II.69
2.3.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	II.72
2.3.2.6	Kualitas Tenaga Kerja.....	II.74
2.3.2.7	Rasio Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) .....	II.77
2.3.3	Daya Saing Infrastruktur Wilayah.....	II.78
2.3.3.1	Kualitas Layanan Infrastruktur .....	II.78
2.3.3.2	Kemantapan Jalan .....	II.79
2.3.3.3	Konektivitas Antar wilayah .....	II.80
2.3.3.4	Sistem Jaringan Irigasi.....	II.81
2.3.3.5	Sistem Drainase .....	II.82
2.3.3.6	Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II.83
2.3.3.7	Persampahan .....	II.85
2.3.3.8	Energi/Kelistrikan.....	II.86
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi .....	II.87
2.3.4.1	Iklim Demokrasi.....	II.87
2.3.4.2	Ketentraman dan Ketertiban.....	II.87
2.3.4.3	Peraturan Pendukung Iklim Usaha .....	II.88
2.3.4.4	Kerukunan Umat Beragama .....	II.88
2.3.4.5	Indeks Daya Saing Daerah.....	II.89
2.3.4.6	Penataan Wilayah.....	II.91
2.3.4.7	Pembangunan Desa.....	II.91
2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II.92
2.4.1	Reformasi Birokrasi.....	II.92
2.4.2	Pelayanan Publik .....	II.93





2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II.94
2.4.4 Inovasi Daerah.....	II.95
2.4.5 Kemandirian Keuangan Daerah .....	II.95
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II.96
2.5.1 Refleksi Pembangunan .....	II.96
2.5.2 Evaluasi Capaian RPJPD Tahun 2005-2025.....	II.102
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana	
Pelayanan Publik .....	II.104
2.6.1 Proyeksi Demografi .....	II.105
2.6.1.1 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	II.106
2.6.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan	
Jumlah Penduduk.....	II.107
2.6.1.3 Perkembangan Struktur Penduduk .....	II.108
2.6.1.4 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi.....	II.110
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II.113
2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal .....	II.113
2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....	II.116
2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	
Persampahan.....	II.117
2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik.....	II.118
2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	II.119
2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....	II.120
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II.122
2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota	
Sungai Penuh dalam Perspektif Nasional .....	II.122
2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota	
Sungai Penuh dalam Perspektif Provinsi Jambi .....	II.122
2.7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota	
Sungai Penuh dalam Perspektif Kota .....	II.123
2.7.4 Arah Kebijakan Wilayah Sumatera.....	II.129
2.7.5 Arah Kebijakan Transformasi .....	II.131
2.7.6 Indikasi Program/Proyek Strategis.....	II.134

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... III.1**

3.1 Gambaran Indikator Makro Sosial Ekonomi.....	III.1
3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	III.2
3.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Aspek	
Pembangunan.....	III.2
3.2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	III.2
3.2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III.4
3.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah .....	III.7
3.2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	III.12
3.2.2 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah .....	III.13
3.3 Isu Strategis Pembangunan.....	III.19
3.3.1 Isu Global .....	III.19
3.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) .....	III.19
3.3.1.2 Demografi Global dan Bonus Demografi.....	III.20
3.3.1.3 Geopolitik dan Geoekonomi .....	III.20
3.3.1.4 Perkembangan Teknologi.....	III.20



3.3.1.5	Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon.....	III.21
3.3.2	Isu Strategis Nasional.....	III.21
3.3.2.1	Perpindahan IKN.....	III.21
3.3.2.2	Bonus Demografi .....	III.22
3.3.2.3	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru .....	III.22
3.3.2.4	Konektivitas dan Infrastruktur Dasar.....	III.23
3.3.2.5	Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana .....	III.24
3.3.2.6	Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	III.25
3.3.3	Isu dan Potensi Wilayah Sumatera.....	III.25
3.3.4	Isu Strategis RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.....	III.28
3.3.5	Isu dan Tantangan RPJPN Tahun 2025-2045.....	III.30
3.3.6	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052 .....	III.32
3.3.7	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	III.33
3.3.8	Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	III.35
<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....</b>		<b>IV.1</b>
4.1	Visi.....	IV.1
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045 .....	IV.1
4.1.2	Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 .....	IV.2
4.1.3	Sasaran Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.....	IV.4
4.2	Misi.....	IV.8
4.2.1	Misi (Agenda) Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045... ..	IV.8
4.2.2	Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.....	IV.9
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....</b>		<b>V.1</b>
5.1	Arah Kebijakan .....	V.1
5.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	V.1
5.1.1.1	Tahap I Tahun 2025-2029, Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan.....	V.2
5.1.1.2	Tahap II Tahun 2030-2034, Akselerasi Transformasi Pembangunan.....	V.2
5.1.1.3	Tahap III Tahun 2035-2039, Ekspansi Pembangunan ..	V.2
5.1.1.4	Tahap IV Tahun 2040-2045, Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah .....	V.3
5.1.2	Arah Kebijakan pada Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.3
5.1.2.1	Misi 1, Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan .....	V.3
5.1.2.2	Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan .....	V.4
5.1.2.3	Misi 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah .....	V.4
5.1.2.4	Misi 4, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi	





Makro Daerah .....	V.4
5.1.2.5 Misi 5, Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi, dan Konservasi Alam .....	V.5
5.1.2.6 Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas .....	V.5
5.1.2.7 Misi 7, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan .....	V.6
5.1.2.8 Misi 8, Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan ....	V.7
5.2 Sasaran Pokok .....	V.31
5.2.1 Arah Pembangunan .....	V.31
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah .....	V.35
5.2.3 Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana .....	V.47
5.2.4 Indikator Utama Pembangunan Daerah. ....	V.49
5.2.5 Sasaran Pokok pada Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.62
5.2.5.1 Misi 1, Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan .....	V.62
5.2.5.2 Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan .....	V.62
5.2.5.3 Misi 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah .....	V.63
5.2.5.4 Misi 4, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah .....	V.63
5.2.5.5 Misi 5, Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam .....	V.63
5.2.5.6 Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas .....	V.64
5.2.5.7 Misi 7, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan .....	V.65
5.2.5.8 Misi 8, Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan ..	V.65
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI.1</b>
6.1 Kaidah Pelaksanaan .....	VI.1
6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan .....	VI.1
6.1.1.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN dan Dokumen Rencana Lainnya .....	VI.1
6.1.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah .....	VI.3
6.1.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran .....	VI.3
6.1.2 Kerangka Pengendalian .....	VI.4
6.1.3 Sistem Insentif .....	VI.5
6.1.4 Mekanisme Perubahan .....	VI.6
6.1.5 Komunikasi Publik .....	VI.6
6.2 Pendanaan Pembangunan .....	VI.7



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh .....	II.2
Tabel II.2	Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh.....	II.4
Tabel II.3	Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2023 .....	II.6
Tabel II.4	Luas Kawasan Hutan Kota Sungai Penuh .....	II.7
Tabel II.5	Kawasan Potensi Pertambangan Kota Sungai Penuh .....	II.8
Tabel II.6	Lahan Pertanian Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.11
Tabel II.7	Potensi Air Permukaan (Sungai) untuk Air Baku di Kota Sungai Penuh.....	II.13
Tabel II.8	Proyeksi Luas Lahan Fungsi Lindung Kota Sungai Penuh .....	II.18
Tabel II.9	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Kota Sungai Penuh .....	II.19
Tabel II.10	Indeks Ketahanan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.24
Tabel II.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.25
Tabel II.12	Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh menurut Struktur Usia Tahun 2023 .....	II.27
Tabel II.13	Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh 2023.....	II.29
Tabel II.14	Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 .....	II.31
Tabel II.15	Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.32
Tabel II.16	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.32
Tabel II.17	Indeks Keluarga Sehat Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .	II.38
Tabel II.18	Sepuluh Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.42
Tabel II.19	Indeks Ketimpangan Gender Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.46
Tabel II.20	PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.50
Tabel II.21	Distribusi PDRB (ADHB) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.50
Tabel II.22	PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.51
Tabel II.23	Pertumbuhan Sektor PDRB (ADHK) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.52
Tabel II.24	<i>Location Quatient</i> Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2023.	II.53





Tabel II.25	PDRB Menurut Pengeluaran (ADHB) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.55
Tabel II.26	PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.56
Tabel II.27	PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.58
Tabel II.28	Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2022 .....	II.62
Tabel II.29	Akreditasi Sekolah, PAUD dan Pendidikan Nonformal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .....	II.67
Tabel II.30	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.76
Tabel II.31	Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.77
Tabel II.32	Indeks Infrastruktur Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.78
Tabel II.33	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.83
Tabel II.34	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sungai Penuh Tahun 2024 .....	II.84
Tabel II.35	Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.86
Tabel II.36	Status Desa Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.91
Tabel II.37	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .....	II.92
Tabel II.38	Hasil Antara Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .....	II.92
Tabel II.39	Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .....	II.93
Tabel II.40	Indeks Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2022 .....	II.93
Tabel II.41	IKM terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.94
Tabel II.42	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.94
Tabel II.43	Indeks Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.95
Tabel II.44	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	II.106
Tabel II.45	Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Kota Sungai Penuh .....	II.107
Tabel II.46	Komposisi Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	II.108
Tabel II.47	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	II.109



Tabel II.48 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.109

Tabel II.49 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.110

Tabel II.50 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.114

Tabel II.51 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.116

Tabel II.52 Timbulan Sampah Per Kapita (SNI 3242:2008) ..... II.117

Tabel II.53 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.117

Tabel II.54 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... II.119

Tabel II.55 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045..... II.120

Tabel II.56 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045..... II.120

Tabel II.57 Indikasi Program/Proyek Strategis Kota Sungai Penuh. II.135

Tabel III. 1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah ..... III.13

Tabel III. 2 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 . III.39

Tabel IV. 1 Perumusan Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... IV.2

Tabel IV. 2 Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Jambi dan Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .... IV.4

Tabel IV. 3 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jambi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... IV.6

Tabel IV. 4 Perumusan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... IV.9

Tabel IV. 5 Penyelarasan Misi RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Jambi dan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 . IV.12

Tabel IV. 6 Visi, Sasaran Visi dan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... IV.16

Tabel V. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... V.8

Tabel V. 2 Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN, Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... V.32

Tabel V. 3 Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... V.35

Tabel V. 4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN, Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... V.50

Tabel V. 5 Sasaran Pokok RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ..... V.66





## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	I.6
Gambar I.2	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan dan Sektoral Lainnya .....	I.6
Gambar II.1	Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh.....	II.2
Gambar II.2	Posisi Strategis Kota Sungai Penuh.....	II.3
Gambar II.3	Tutupan Lahan Kota Sungai Penuh-Kabupaten Kerinci.....	II.5
Gambar II.4	Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh .....	II.5
Gambar II.5	Peta Kawasan Hutan Kota Sungai Penuh .....	II.7
Gambar II.6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2023 .....	II.9
Gambar II.7	Geologi Kerinci-Sungai Penuh.....	II.10
Gambar II.8	Nilai Tukar Petani Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.11
Gambar II.9	Posisi Kota Sungai Penuh dalam DAS Batang Merao ..	II.12
Gambar II.10	Daerah Aliran Sungai Batang Merao .....	II.13
Gambar II.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Sungai Penuh.....	II.14
Gambar II.12	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Kota Sungai Penuh.....	II.15
Gambar II.13	Peta Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Sungai Penuh.....	II.16
Gambar II.14	Produksi dan Konsumsi Pangan (Beras) Kota Sungai Penuh Tahun 2018-2022 .....	II.17
Gambar II.15	Daya Dukung Air Permukaan Kota Sungai Penuh dengan <i>Metode Supply dan Demand</i> .....	II.17
Gambar II.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.20
Gambar II.17	Indeks Risiko Bencana Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.20
Gambar II.18	Jenis Bencana dan Jiwa Terpapar Kota Sungai Penuh	II.21
Gambar II.19	Peta Kawasan Bencana Banjir Kota Sungai Penuh Tahun 2024 .....	II.21
Gambar II.20	Perubahan Curah Hujan di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2023 .....	II.23
Gambar II.21	Indeks Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.24
Gambar II.22	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.26
Gambar II.23	Komposisi Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2023	II.27
Gambar II.24	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.28
Gambar II.25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.30



Gambar II.26	Inflasi Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.31
Gambar II.27	Indikator Kemiskinan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.33
Gambar II.28	Gini Rasio Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.34
Gambar II.29	TPT Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.35
Gambar II.30	TPT Kota Sungai Penuh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.36
Gambar II.31	TPT Kota Sungai Penuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....	II.36
Gambar II.32	IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.37
Gambar II.33	Indeks Kesehatan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.38
Gambar II.34	Umur Harapan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.39
Gambar II.35	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.40
Gambar II.36	Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.41
Gambar II.37	Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Sungai Penuh Tahun 2022 .....	II.44
Gambar II.38	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.45
Gambar II.39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.46
Gambar II.40	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHB) Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.56
Gambar II.41	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.57
Gambar II.42	Nilai Realisasi Investasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.59
Gambar II.43	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.60
Gambar II.44	Rasio Kewirausahaan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.61
Gambar II.45	Indeks Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.63
Gambar II.46	Harapan Lama Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.64
Gambar II.47	Rata – Rata Lama Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.65
Gambar II.48	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.66



Gambar II.49	Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.66
Gambar II.50	Skor Literasi dan Numerasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2023 .....	II.68
Gambar II.51	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Kota Sungai Tahun 2022 .....	II.69
Gambar II.52	Persentase Penduduk Kota Sungai Penuh yang Menggunakan Teknologi Informasi Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.70
Gambar II.53	Nilai Pilar Masyarakat Digital Kota Sungai Tahun 2023 .....	II.70
Gambar II.54	Nilai Sub Pilar Masyarakat Digital Kota Sungai Tahun 2023 .....	II.71
Gambar II.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.73
Gambar II.56	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.73
Gambar II.57	Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di kota Sungai Penuh Tahun 2015, 2020 dan 2022 .....	II.74
Gambar II.58	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.75
Gambar II.59	Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Kota Sungai Penuh Tahun 2015, 2020 dan 2023.....	II.76
Gambar II.60	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.79
Gambar II.61	Tingkat Kemantapan Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.79
Gambar II.62	Indeks Konektivitas (Antar Wilayah) di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.80
Gambar II.63	Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.81
Gambar II.64	Drainase dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.82
Gambar II.65	Indeks Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 .....	II.90
Gambar II.66	Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.96
Gambar II.67	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023 .....	II.97
Gambar II.68	Struktur PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023 .....	II.98
Gambar II.69	Sektor Utama Penopang Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023.....	II.98
Gambar II.70	IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023.....	II.99
Gambar II.71	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023 .....	II.100





Gambar II.72	Gini Rasio Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023 .....	II.101
Gambar II.73	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023 .....	II.101
Gambar II.74	PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023 .....	II.102
Gambar II.75	Capaian Kinerja Indikator Makro Sosial Ekonomi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 .....	II.103
Gambar II.76	Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	II.106
Gambar II.77	Proyeksi Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2045 .....	II.108
Gambar II.78	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	II.111
Gambar II.79	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Sungai Penuh.....	II.125
Gambar II.80	Rencana Struktur Ruang Kota Sungai Penuh.....	II.126
Gambar II.81	Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh.....	II.127
Gambar II.82	Rencana Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh .....	II.128
Gambar II.83	Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera.....	II.129
Gambar II.84	Kesenjangan Antar Wilayah.....	II.131
Gambar III.1	Indikator Makro Sosial Ekonomi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2023 .....	III.1
Gambar III.2	Diagram Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III.18
Gambar III.3	Peta Potensi Wilayah Sumatera.....	III.26
Gambar III.4	Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh 2025-2045 .....	III.35
Gambar IV.1	Visi Indonesia Emas 2045 .....	IV.1
Gambar IV.2	Sasaran Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	IV.5
Gambar IV.3	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	IV.8
Gambar IV.4	Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ....	IV.13
Gambar V.1	Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.1
Gambar V.2	Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-1 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.3
Gambar V.3	Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-2 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.4
Gambar V.4	Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-3 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.4
Gambar V.5	Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-4 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.5
Gambar V.6	Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-5 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	V.5
Gambar VI.1	Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN dan Dokumen Rencana Lainnya .....	VI.2
Gambar VI.2	Kerangka Pengendalian RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 .....	VI.4



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan daerah untuk menyusun RPJPD sebagai pedoman kerja selama periode jangka Panjang. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPJPD mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani penyusunan dokumen perencanaan terutama untuk penyusunan RPJMD dan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 substansinya memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah yang penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan kondisi, potensi, proyeksi dan sesuai kebutuhan kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun Visi dan Misi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang, dan sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan setiap periode pemerintahan.

Dalam upaya menjamin keberlanjutan pembangunan daerah tahun 2025-2045, maka peran RPJPD menjadi sangat penting bagi daerah, diantaranya: (1) meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah diawali dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan peraturan daerah. Penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik menitikberatkan pada metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, memfokuskan pada identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada tindakan antisipatif. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif semua pemangku kepentingan. Perumusan Visi, Misi dan arah kebijakan merupakan bentuk pendekatan politik, yang diperkuat dengan forum musrenbang RPJPD.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi rencana pembangunan Kota Sungai Penuh kedepannya. Integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJPD Kota Sungai Penuh telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 20. Integrasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan demikian, perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

## 1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang





- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);



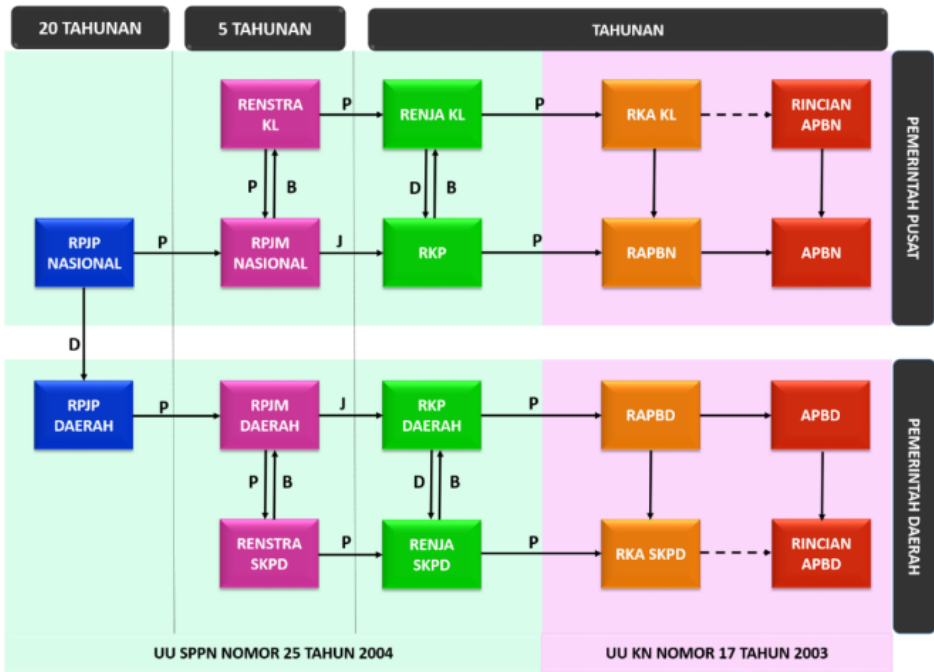
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh 2020-2034 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai penuh Tahun 2022 – 2052 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 2);
33. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
34. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.





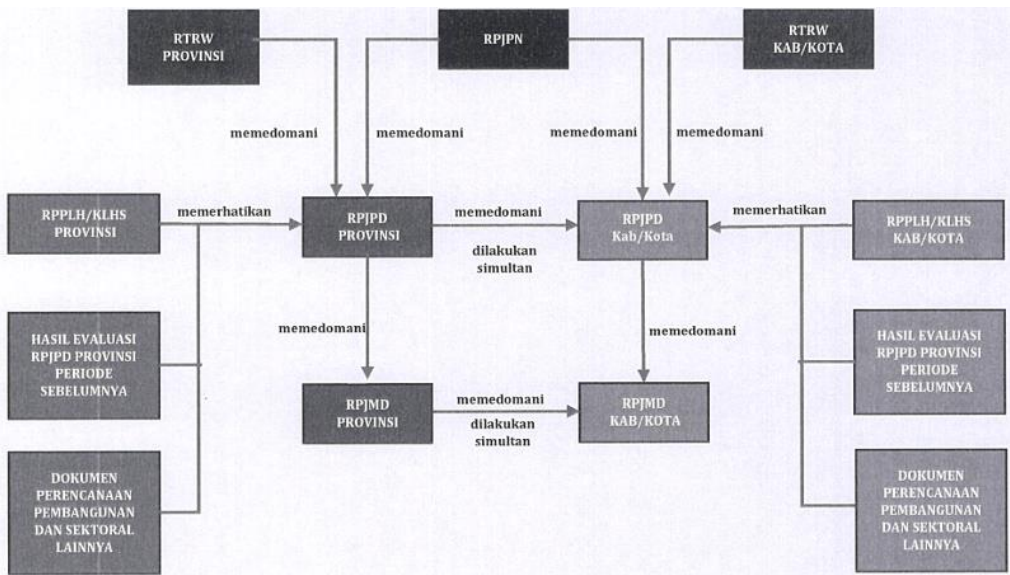
### 1.3 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RPJPD merupakan sebuah dokumen yang memberikan panduan pembangunan jangka panjang dan dioperasionalkan ke dalam dokumen RPJMD.



D=Diacu J=Dijabarkan P=Pedoman B=Bahan  
Sumber: Hasil Modifikasi dari UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004 dan UU KN Nomor 17 Tahun 2003

Gambar I.1  
RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Gambar I.2  
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 dan hasil evaluasi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Adapun substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kebijakan umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis dan rekomendasi. Sedangkan substansi hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu permasalahan dan capaian pembangunan periode RPJPD Tahun 2005-2025.

#### **1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD Provinsi Jambi dan RPJPN**

Secara hierarki RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD Kota Sungai Penuh dan RPJPD Provinsi Jambi harus berkontribusi pada pencapaian Visi RPJPN. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD Kota dan RPJPD Provinsi harus mendukung pembangunan nasional, dan semua tingkatan perencanaan saling terintegrasi.

#### **1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD Kabupaten Perbatasan**

Penelaahan RPJPD kabupaten perbatasan dimaksudkan agar terciptanya keterpaduan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RPJPD kabupaten perbatasan. Sinkronisasi RPJPD kabupaten perbatasan pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu strategis dan arah kebijakan.

Arah kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau tantangan bagi Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah kebijakan RPJPD kabupaten perbatasan harus saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

#### **1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Sungai Penuh dengan RTRW Kota Sungai Penuh, RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Nasional**

RPJPD Kota Sungai Penuh diselaraskan dengan kebijakan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di berbagai tingkatan. RTRW Kota Sungai Penuh mengarahkan lokasi dan tata ruang.

RPJPD Kota Sungai Penuh, RTRW Kota Sungai Penuh, RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Nasional saling terkait dan saling mendukung. RPJPD memberikan arah yang strategis, RTRW Kota mengatur teknis



pemanfaatan ruang, RTRW Provinsi memastikan konsistensi antar daerah, RTRW Nasional memberikan kebijakan umum yang harus diikuti.

Secara keseluruhan, keempat dokumen ini saling mendukung dan harus terintegrasi, untuk menciptakan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan efektif, dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Sinkronisasi yang baik antara semua dokumen perencanaan ini sangat penting untuk mencapai Visi pembangunan yang diinginkan.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh.
2. RPJPD Kota Sungai Penuh disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

#### 1.5 Sistematika

Sistematika penulisan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika dokumen RPJPD.

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah Kota Sungai Penuh yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, tren demografi dan proyeksi dinamika demografi, proyeksi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan untuk memahami permasalahan daerah yang akan dipecahkan hingga akhir periode pembangunan jangka panjang daerah, disertai isu-isu strategis pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau kebijakan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.





#### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Merumuskan dan menjelaskan Visi, sasaran Visi, dan Misi daerah berdasarkan permasalahan pembangunan daerah. Penyelarasan Visi, sasaran Visi dan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi dengan RPJPD Kota Sungai Penuh.

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Menjabarkan tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, tahapan pembangunan, indikator utama pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana serta sasaran pokok.

#### **BAB VI PENUTUP**

Menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, komunikasi publik dan pendanaan pembangunan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pembangunan di Kota Sungai Penuh selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Kota Sungai Penuh juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1 Aspek Geografi**

###### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah**

Kota Sungai Penuh merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Resmi berdiri pada tanggal 8 November 2008, Kota Sungai Penuh lahir sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan pemekaran ini, diharapkan Kota Sungai Penuh dapat lebih fokus dalam mengelola sumber daya, merencanakan pembangunan yang lebih terarah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Secara administratif, Kota Sungai Penuh berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat di sebelah barat. Sementara itu, di sebelah utara, selatan, dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Keberadaan batas-batas administratif ini memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan pengembangan kawasan Kota Sungai Penuh, serta dalam memperkuat kerja sama antar daerah yang berdekatan. Disamping itu, Kota Sungai Penuh memegang peranan penting dalam pembangunan regional.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tersebut, batas wilayah Kota Sungai Penuh ditetapkan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Luas wilayah Kota Sungai Penuh sebesar 36.492,42 ha ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Tahun 1999-2020.

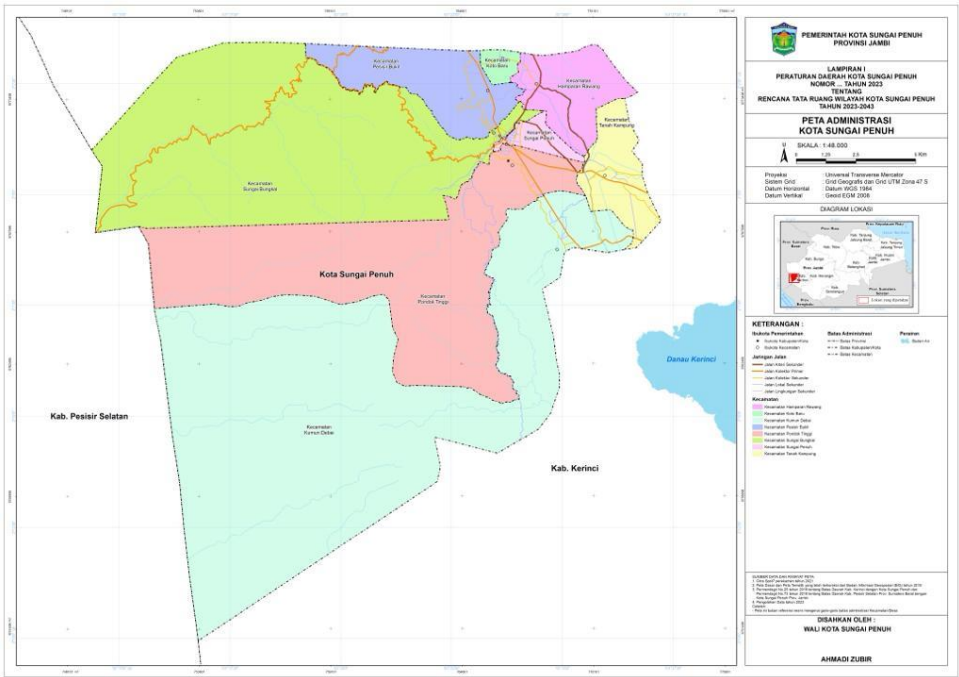


Secara administratif, Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa, dan 4 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kota Sungai Penuh disajikan secara rinci pada Tabel II.1.

Tabel II.1  
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Desa/Kelurahan		Jumlah
		(Ha)	(%)	Desa	Kelurahan	
1.	Kecamatan Hamparan Rawang	1.304,53	3,57	13		13
2.	Kecamatan Koto Baru	191,66	0,53	6		6
3.	Kecamatan Kumun Debai	14.862,39	40,73	9		9
4.	Kecamatan Pesisir Bukit	1.808,27	4,96	9		9
5.	Kecamatan Pondok Tinggi	7.387,13	20,24	7	1	8
6.	Kecamatan Sungai Bungkal	9.510,43	26,06	5	1	6
7.	Kecamatan Sungai Penuh	313,81	0,86	3	2	5
8.	Kecamatan Tanah Kampung	1.114,21	3,05	13		13
Total		36.492,42	100,00	65	4	69

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044



Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

Gambar II.1  
Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

2.1.1.2 Posisi Strategis Kota Sungai Penuh

Secara astronomis, Kota Sungai Penuh terletak antara 101°14'0" sampai dengan 101°28'0" Bujur Timur dan 2°0'0" sampai dengan 2°16'0" Lintang Selatan. Posisi ini menunjukkan Kota Sungai Penuh yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kota Sungai Penuh berdekatan dengan Pusat





Kegiatan Nasional (PKN) Kota Padang melalui PKL Kerinci dan PKL Padang Aro atau PKL Painan, PKN Kota Jambi melalui PKL Kerinci, PKL Bangko atau PKW Muaro Bungo, dan PKN Bengkulu melalui PKW Muko-muko; sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.2.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2024–2044; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.2**  
**Posisi Strategis Kota Sungai Penuh**

Kota Sungai Penuh juga menjadi daerah pusat kegiatan beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Dengan posisi yang strategis, Kota Sungai Penuh menjadi pusat kegiatan bagi daerah sekitarnya.

**2.1.1.3 Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW**

Pola ruang Kota Sungai Penuh telah ditetapkan dengan Perda Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan berdasarkan strategi penataan ruang dan mempertimbangkan alokasi ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang juga mengacu pada rencana pola ruang wilayah nasional dan provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.

Kota Sungai Penuh terdiri dari kawasan lindung seluas 25.405,10 ha (69,62%) dan kawasan budidaya seluas 11.087,32 ha (30,38%). Rencana pola ruang dalam dua kelompok kawasan tersebut dirinci pada Tabel II.2 dibawah ini.



Tabel II.2  
Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh

Rencana Pola Ruang	Fungsi	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	Badan Air	40,77
	Kawasan Perlindungan Setempat	31,15
	Taman Kota	1,47
	Taman Kecamatan	1,60
	Taman Kelurahan	1,91
	Taman RW	0,45
	Taman RT	0,08
	Pemukaman	38,52
	Taman Nasional	25.288,81
	Kawasan Cagar Budaya	0,33
Jumlah		25.405,10
Kawasan Budi Daya	Badan Jalan	5,03
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	782,18
	Kawasan Tanaman Pangan	3107,61
	Kawasan Hortikultura	3849,83
	Kawasan Perkebunan	1547,56
	Kawasan Pariwisata	39,33
	Kawasan Perumahan	1371,62
	Kawasan Fasum dan Fasos	78,27
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	263,78
	Kawasan Perkantoran	38,65
	Kawasan Transportasi	2,12
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,35
Jumlah		11.087,32
Total		36.492,42

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044

Kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang memperlihatkan seberapa besar luasan wilayah yang sesuai dengan rencana peruntukannya. Pada tahun 2023 persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Sungai Penuh sebesar 98%. Sebagian besar ketidaksesuaian terdapat di sempadan sungai, terutama di Sungai Batang Merao, Sungai Bungkal, dan Sungai Batang Sangkir. Objek di sempadan sungai tersebut merupakan rumah penduduk yang sudah terbangun sebelum ditetapkan RTRW Kota Sungai Penuh.

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Kota Kota Sungai Penuh telah mengalami pertumbuhan aktivitas yang cukup pesat hingga saat ini. Secara administrasi, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh tercatat lebih dari 100 ribu penduduk. Namun secara fungsional, jumlah tersebut dapat terhitung lebih besar. Terbentuknya wilayah secara fungsional bukan hanya sebagai bentuk proses yang alami karena unsur kesamaan entitas pada satu wilayah, namun juga dapat muncul karena pergerakan aktivitas.

Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan mengikuti rencana pola jaringan jalan. Struktur Kota Sungai Penuh yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan

perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota.



**Gambar II.3**  
**Tutupan Lahan Kota Sungai Penuh-Kabupaten Kerinci**

Berdasarkan analisis citra satelit, tutupan lahan di Kota Sungai Penuh didominasi oleh hutan TNKS, pertanian hortikultura, sawah, dan permukiman. Penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh ditunjukkan pada Gambar II.4.



**Gambar II.4**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh**

Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2020-2023, alih fungsi lahan dapat diidentifikasi melalui persentase penambahan atau pengurangan luasan lahan dari tahun ke tahun. Justifikasi terhadap perubahan yang terjadi tetap berpedoman pada RTRW Kota Sungai Penuh.



dengan mempertimbangkan perkembangan kota akibat pembangunan, dinamika penduduk, faktor alam, dan sebagainya.

Pada tahun 2020 dan 2021, masih terjadi peningkatan luasan lahan tidak produktif seperti semak belukar sebesar 23% di tahun 2020 dan 4% di tahun 2021. Selain itu, luasan tanah terbuka selalu berkurang 16% di tahun 2021, 19% di tahun 2022 dan 14% di tahun 2023. Selengkapnya, penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2023 dirinci pada Tabel II.3 sebagai berikut.

Tabel II.3  
Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2023

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (ha)						
		2020	% *	2021	% *	2022	% *	2023
1.	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	25.035,41	0%	25.035,41	0%	25.035,41	0%	25.035,41
2.	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	759,67	0%	759,67	0%	759,67	0%	759,67
3.	Hutan Pinus	277,01	0%	277,01	0%	277,01	0%	277,01
4.	Kebun Campuran	5.723,10	0%	5.718,57	0%	5.732,72	0%	5.736,43
5.	Lapangan Olahraga	9,65	-22%	7,53	-13%	6,57	0%	6,57
6.	Makam	4,50	-9%	4,11	0%	4,13	0%	4,14
7.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1.141,81	-13%	995,78	-7%	926,74	0%	929,96
8.	Rawa	0,48	-1%	0,48	1%	0,48	0%	0,48
9.	Sawah	3.221,74	0%	3.221,29	1%	3.245,71	0%	3.247,71
10.	Semak Belukar	670,89	23%	826,42	4%	859,67	-1%	851,67
11.	Sungai Permanen	41,44	0%	41,28	0%	41,28	0%	41,28
12.	Taman	3,03	0%	3,03	-8%	2,79	0%	2,79
13.	Tanah Terbuka	10,22	-16%	8,54	-19%	6,90	-14%	5,95
14.	Terminal	2,12	-6%	1,99	0%	1,99	0%	1,99

Keterangan: \*) persentase penambahan (+) atau pengurangan (-) luasan.  
Sumber: Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2024

Di Kota Sungai Penuh, terdapat Rawa Arah Seratus, sebuah lahan cekungan seluas 773,86 ha yang dipenuhi air saat musim hujan. Ekosistem ini dinamis dan terus berubah, terletak di bagian timur kota, serta dikenal sebagai ekosistem marginal yang beradaptasi dengan fluktuasi kondisi lingkungan.

Namun, pengembangan lahan di Rawa Arah Seratus menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah genangan air yang terjadi hampir sepanjang tahun. Selain itu, meluapnya air sungai yang terjadi sekitar 3 hingga 4 kali setahun menambah kompleksitas, dengan genangan berlangsung selama sekitar satu minggu setiap kali. Kondisi ini membuat lahan rawa ini sulit untuk dimanfaatkan secara optimal, meskipun potensi dan peran ekologisnya sangat penting bagi lingkungan sekitar.

2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam

A. Kawasan Hutan

Sektor kehutanan memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis, sekaligus menyimpan potensi ekonomi yang





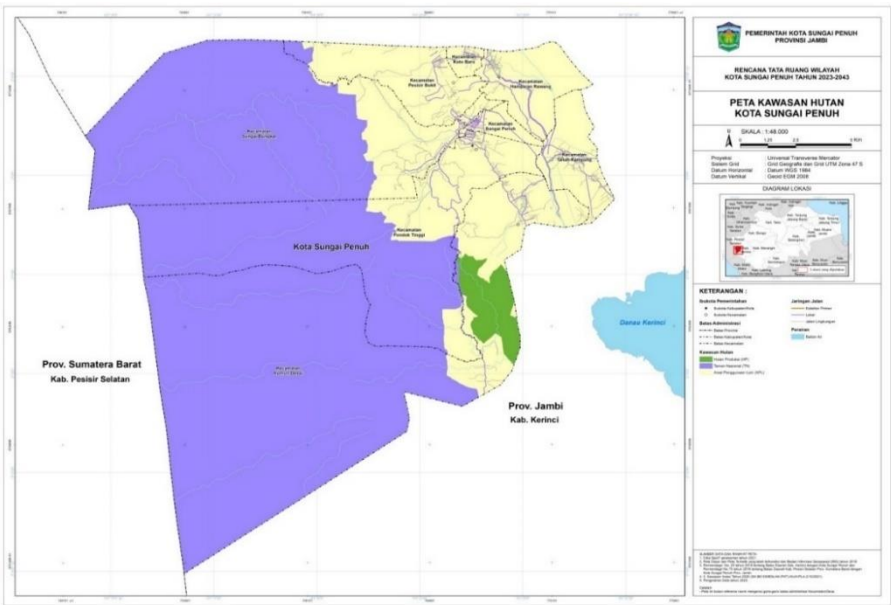
signifikan. Di Kota Sungai Penuh, hutan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga sebagai potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bernilai tinggi.

Kawasan hutan di Kota Sungai Penuh ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-2/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Pada tahun 2021, terjadi perubahan batas kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi hingga tahun 2020. Perubahan luas kawasan hutan dan peta kawasan hutan di Kota Sungai Penuh dirinci pada Tabel II.4 dan Gambar II.5.

Tabel II.4  
Luas Kawasan Hutan Kota Sungai Penuh

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	
		SK.863/Menhut-2/2014	SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
1.	Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	24.560,42	25.288,81
2.	Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)	940,13	782,18
3.	Areal Penggunaan Lain (APL)	10.991,88	10.421,43

Sumber: SK.863/Menhut-2/2014  
SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

Gambar II.5  
Peta Kawasan Hutan Kota Sungai Penuh

Perubahan penetapan batas kawasan hutan di Kota Sungai Penuh berdampak pada berkurangnya luas kawasan budidaya yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat (areal penggunaan lain) seluas 570,45 ha. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Sungai



Penuh untuk mengusulkan perubahan atau mengembalikan batas kawasan hutan sesuai dengan SK.863/Menhut-2/2014.

Taman Nasional Kerinci Seblat memainkan peran krusial dalam pelestarian ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan melindungi sumber daya plasma nutfah yang tak ternilai. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan tata air lingkungan, tetapi juga sebagai area tangkapan air. Dengan kemampuannya mengurangi risiko banjir, erosi dan longsor, terutama di daerah perbukitan, Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi pelindung alami yang sangat berharga bagi stabilitas lingkungan.

Di sisi lain, Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat berperan sebagai zona penyangga yang penting, menghubungkan kawasan budi daya dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Fungsi hutan ini adalah untuk menyaring dampak kegiatan budidaya terhadap ekosistem, sehingga memastikan bahwa interaksi antara penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan tetap harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kedua kawasan ini bekerja sama untuk mendukung keberlanjutan ekologis sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

**B. Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral**

Di Kota Sungai Penuh, terdapat kawasan strategis yang memiliki potensi pertambangan dengan luas sekitar 11.833,77 ha. Kawasan ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu kawasan mineral bukan logam, kawasan batuan, dan kawasan pencadangan negara, yang mencerminkan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kota Sungai Penuh.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai potensi yang ada, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kawasan potensi pertambangan di Kota Sungai Penuh.

**Tabel II.5**  
**Kawasan Potensi Pertambangan Kota Sungai Penuh**

No	Kecamatan	Kawasan Potensi Pertambangan	Luas (Ha)
1.	Hamparan Rawang	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	9,47
2.	Kumun Debai	WPN	1.081,18
		WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	33,42
3.	Pesisir Bukit	WPN	251,19
4.	Pondok Tinggi	WPN	1.916,45
5.	Sungai Bungkal	WPN	8.539,94
6.	Tanah Kampung	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	2,10
Total			11.833,77

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

Kota Sungai Penuh menyimpan potensi pertambangan yang sangat menjanjikan. Namun banyak di antaranya yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya potensi

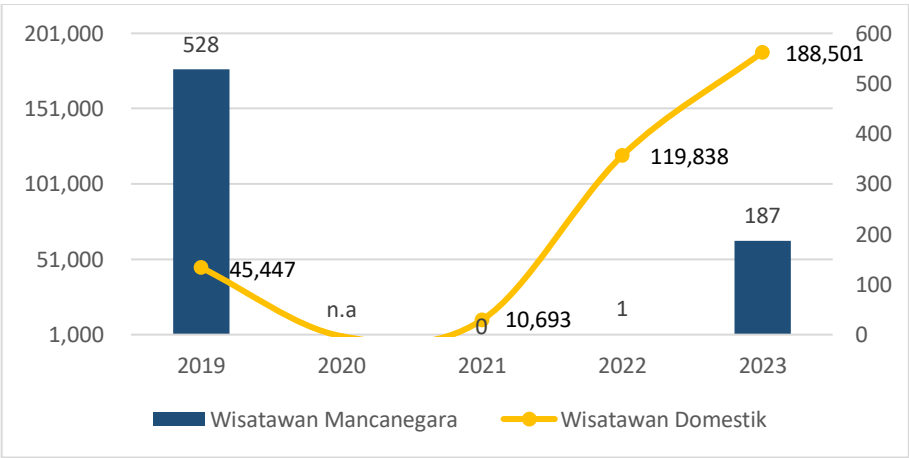


yang dimiliki. Selain itu, seluruh kecamatan di kota ini telah menikmati akses kelistrikan yang memadai, baik melalui layanan PLN maupun PLTMH, yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan sektor-sektor penting lainnya.

C. Potensi Wisata Daerah

Potensi wisata merupakan salah satu sektor ekonomi andalan Kota Sungai Penuh selain sektor jasa. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kota Sungai Penuh telah mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 (Gambar II.6). Hingga tahun 2023 terdapat 187 kunjungan wisatawan mancanegara dan 188.501 kunjungan wisatawan domestik. Meskipun angka kunjungan mancanegara relatif kecil dibandingkan dengan wisatawan domestik, pertumbuhan jumlah kunjungan secara keseluruhan menandakan adanya pemulihan dan potensi yang menjanjikan sektor pariwisata ini.



Sumber: BPS, diolah oleh Bappeda, 2024

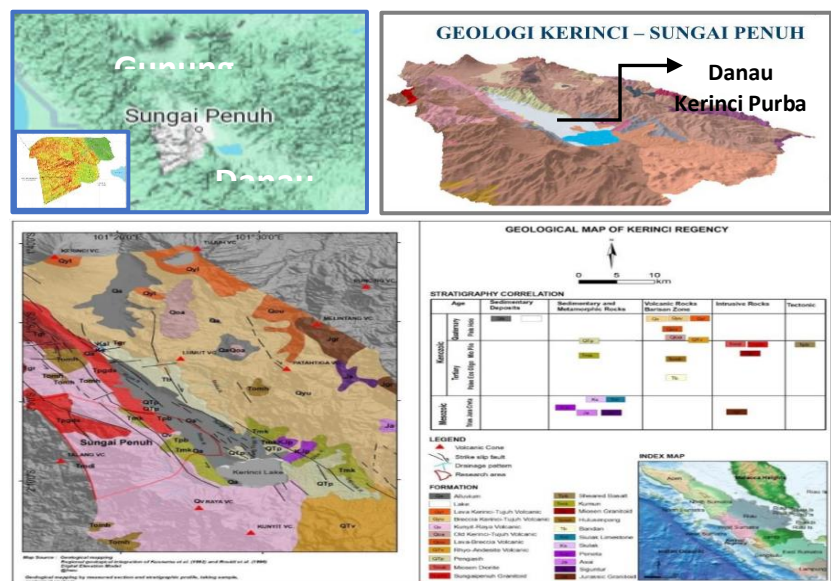
Gambar II.6  
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2019-2023

Dengan adanya kecenderungan masyarakat global, regional dan nasional untuk kembali ke alam (*back to nature*), maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih alami semakin besar. Adanya minat tersebut merupakan faktor pendorong bagi dikembangkannya pariwisata yang berorientasi pada lingkungan alam atau yang kita kenal sebagai ekoturisme atau wisata ekologi termasuk wisata minat khusus yang menekankan unsur tantangan, rekreasi dan pencapaian keinginan wisatawan melalui keterlibatan atau interaksi dengan unsur alam.

Dengan strategi yang tepat, Kota Sungai Penuh dapat mengoptimalkan daya tarik wisatanya, menarik lebih banyak pengunjung dan tumbuh sebagai destinasi yang kaya akan pesona dan keragaman. Strategi yang berfokus pada peningkatan promosi global, pengembangan infrastruktur, dan paket wisata dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara.

D. Potensi Geopark

Keberadaan kondisi alam di Kota Sungai Penuh memiliki berbagai potensi berkaitan dengan Hutan Lindung, Batuan Mineral dan lainnya. Dari sisi keragaman hayati, Kota Sungai Penuh menjadi rumah bagi hewan-hewan dan tumbuhan endemik. Kemudian dari sisi keragaman budayanya, Kota Sungai Penuh sangat kaya dengan tradisi dan tinggalan budaya, peninggalan prasejarah dan lainnya. Beragam potensi pariwisata tersebut perlu dilestarikan keberadaannya agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.



Sumber: Dinas ESDM Prov. Jambi, 2024

Gambar II.7  
Geologi Kerinci-Sungai Penuh

Pengembangan Geopark merupakan salah satu program prioritas nasional (Keputusan Presiden Republik Indonesia, 2019). Pengembangan Geopark didasarkan pada tiga pilar: konservasi, ekonomi pariwisata, dan pendidikan. Ketiga pilar ini membentuk kerangka kerja untuk kemajuan regional jangka panjang, dengan tujuan akhir menjaga keanekaragaman, melestarikan lingkungan, dan memperluas pendidikan ilmu bumi.

Keanekaragaman hayati terhubung dengan proses geologi yang unik untuk tujuan pendidikan dan konservasi, serta penggunaan ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2023, Site Geodiversity di Kota Sungai Penuh, diantaranya: (1) Bukit Khayangan; (2) Air Terjun Tigo Beradik Kumun; (3) Lembah Danau Kerinci Purba; (4) Puncak Panorama Depati; dan (5) Granitoid Sungai Penuh.





E. Sektor Pertanian dan Perkebunan

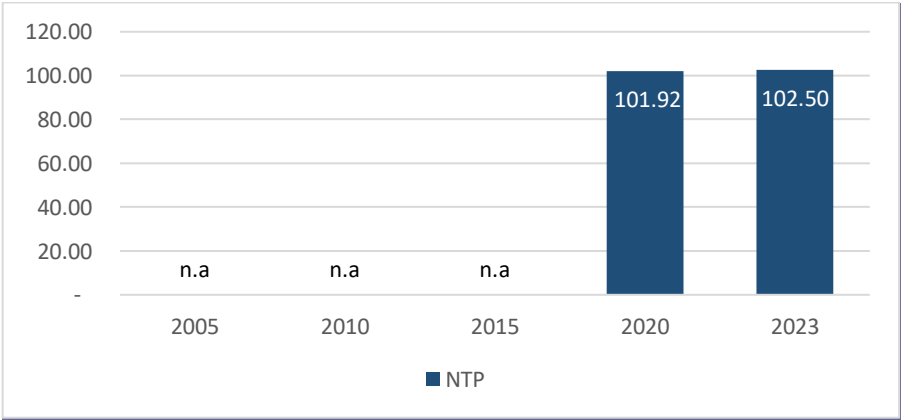
Pertanian di Kota Sungai Penuh secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian. Sektor pertanian tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, penyerap tenaga kerja, penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk lebih jelasnya, luas lahan pertanian di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel II.6 sebagai berikut.

Tabel II.6  
Lahan Pertanian Kota Sungai Penuh Tahun 2023

No	Kecamatan	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1.	Hamparan Rawang	Sawah	1.058,20
2.	Koto Baru	Sawah	87,97
3.	Kumun Debai	Hortikultura	603,41
		Perkebunan	801,41
		Sawah	438,24
4.	Pesisir Bukit	Hortikultura	1.003,63
		Perkebunan	234,70
		Sawah	136,62
5.	Pondok Tinggi	Hortikultura	1.000,57
		Perkebunan	493,31
		Sawah	237,61
6.	Sungai Bungkal	Hortikultura	1.251,79
		Perkebunan	20,91
		Sawah	62,37
7.	Sungai Penuh	Sawah	216,33
8.	Tanah Kampung	Sawah	870,27
Total			8.517,34

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani (IT) dan indeks harga yang dibayar oleh petani (IB). NTP adalah indikator *proxy* kesejahteraan petani, merupakan gabungan dari NTP sektor tanaman pangan, sektor hortikultura, sektor perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.



Sumber: Dinas TPHP Kota Sungai Penuh, 2024

Gambar II.8  
Nilai Tukar Petani Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

NTP Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang meningkat, pada tahun 2020 sebesar 101,92 meningkat menjadi 102,5 di tahun 2023, yang berarti petani mengalami surplus, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; nilai yang diperoleh petani dari usaha pertaniannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemenuhan biaya hidupnya. Harga produksi meningkat lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

## F. Potensi Peternakan dan Perikanan

Pembangunan peternakan dan perikanan merupakan salah satu bagian dari strategi nasional yang pada dasarnya untuk penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maupun kuantitas dan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak (daging, telur dan susu) dan ikan. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

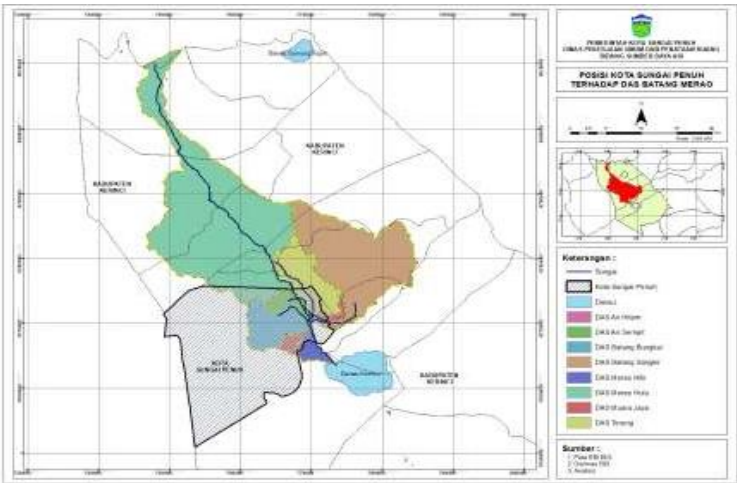
Produktivitas peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, serta penerapan teknologi pakan, reproduksi, dan pengolahan hasil peternakan serta perikanan. Selain itu, pengembangan inovasi kampung peternakan dan perikanan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai ekonomi, baik dari hasil produksi maupun limbahnya.

### G. Potensi Air Baku

Dalam kajian *masterplan* potensi air baku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berbagai sumber air baku diidentifikasi dan wilayah pelayanan dibagi berdasarkan lokasi sumber tersebut.

## 1. Air Permukaan

Secara umum sumber air permukaan di Kota Sungai Penuh adalah Sungai Batang Merao (DAS Batang Merao) bagian dari DAS Batanghari Hulu dan merupakan kewenangan Badan Wilayah Sungai Sumatera VI.



Sumber: Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2024

**Gambar II.9**  
**Posisi Kota Sungai Penuh dalam DAS Batang Merao**

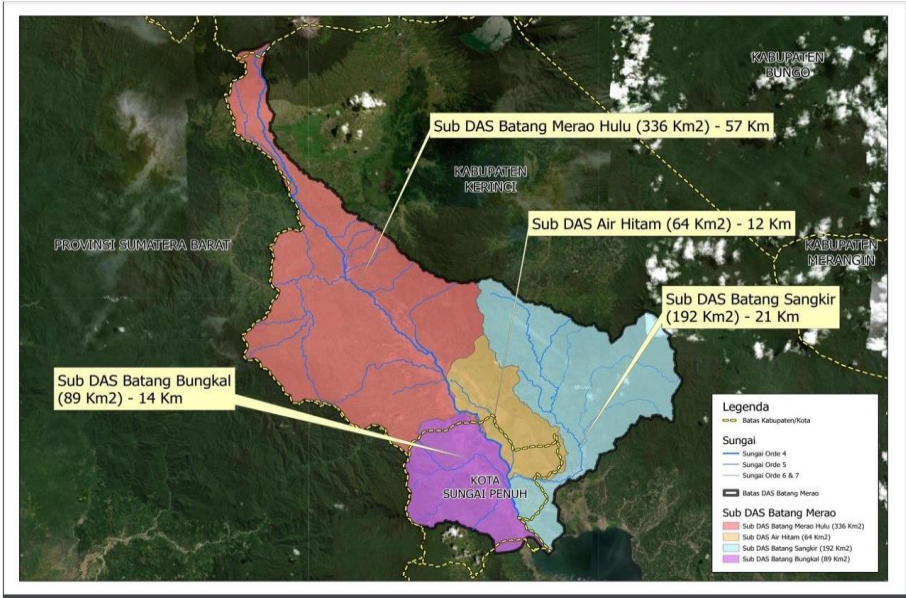


Potensi air permukaan (sungai) di Kota Sungai Penuh meliputi 2 (dua) DAS yaitu DAS Batang Merao dan DAS TNKS – RKE – Pulau Tengah (Tabel II.7).

Tabel II.7  
Potensi Air Permukaan (Sungai) untuk Air Baku di Kota Sungai Penuh

No	Nama sungai	Panjang (m)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m³/dtk)	
			Permukaan	Dasar		Maks.	Min.
I.	DAS BATANG MERAO						
1.	Sungai Ning	3.480	10	8	1,5	120	1,5
2.	Sungai Pengasah	3.624	8	7	2	80	0,9
3.	Sungai Air Sesat	1.140	6	4	2	95	0,95
4.	Sungai Air Sempit	5.041	7	5	3	96	0,98
5.	Sungai Terung	4.943	20	18	2	115	1,3
6.	Sungai Air Hitam	2.793	10	8	3	90	0,8
7.	Sungai Batang Sangkir	2.802	15	13	3	130	4
8.	Sungai Jernih	2.988	8	6	1,5	170	2,5
9.	Sungai Ampuh	6.180	6	4	1,5	70	1,1
10.	Sungai Ulu Air	1.795	6	4	1,5	85	1
11.	Sungai Batang Bungkal	9.062	15	13	3	100	2
12.	Sungai Batang Merao	10.247	20	16	5	270	6
13.	Sungai talang Lindung	-	-	-	-	-	-
II.	DAS TNKS - RKE - Pulau Tengah						
1.	Sungai Lebo	-	-	-	-	-	-
2.	Sungai Lebo Popo	-	-	-	-	-	-
3.	Sungai Muara Lebo Popo	-	-	-	-	-	-
4.	Sungai Pisang	-	-	-	-	-	-
5.	Sungai Kunyit	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, 2024



Sumber: BWSS VI Jambi, 2024

Gambar II.10  
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Merao

2. Mata Air

Berdasarkan data dari PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, bahwa potensi mata air untuk air baku di Kota Sungai Penuh belum bisa dimanfaatkan untuk PDAM dikarenakan debit yang sangat kecil, seperti sumur pulai di Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh.

3. Air Tanah

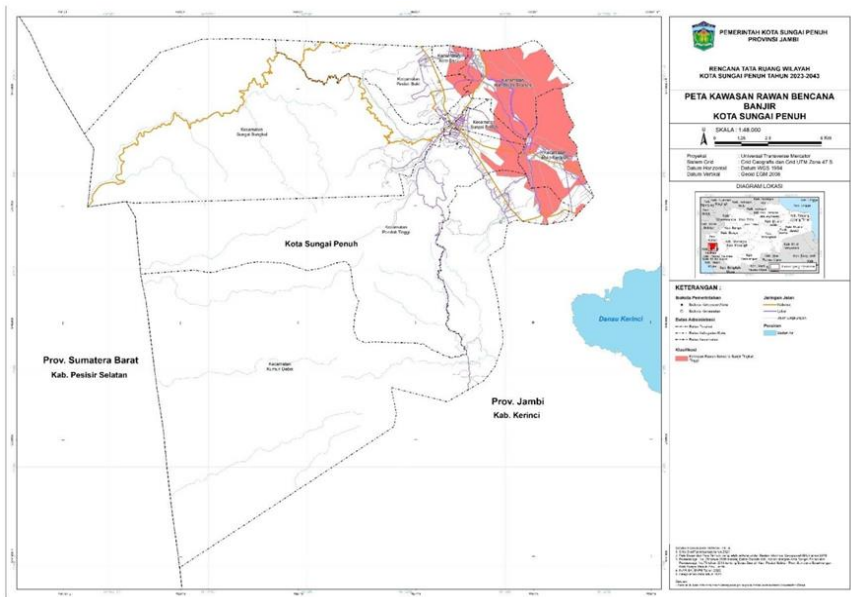
Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah umumnya relatif dalam, sekitar >60 meter. Potensi air tanah untuk air baku belum bisa dimanfaatkan untuk PDAM, disebabkan debit yang kecil dan sangat dalam.

2.1.1.6 Kawasan Rawan Bencana

Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi (gempa bumi, likuifaksi) dan bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan).

1. Banjir

Wilayah di Kota Sungai Penuh memiliki risiko rentan terhadap bahaya bencana banjir pada wilayah yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS beserta anak sungainya, terutama pada kawasan sekitar Sungai Batang Merao, Sungai Batang Sangkir dan Sungai Terung.

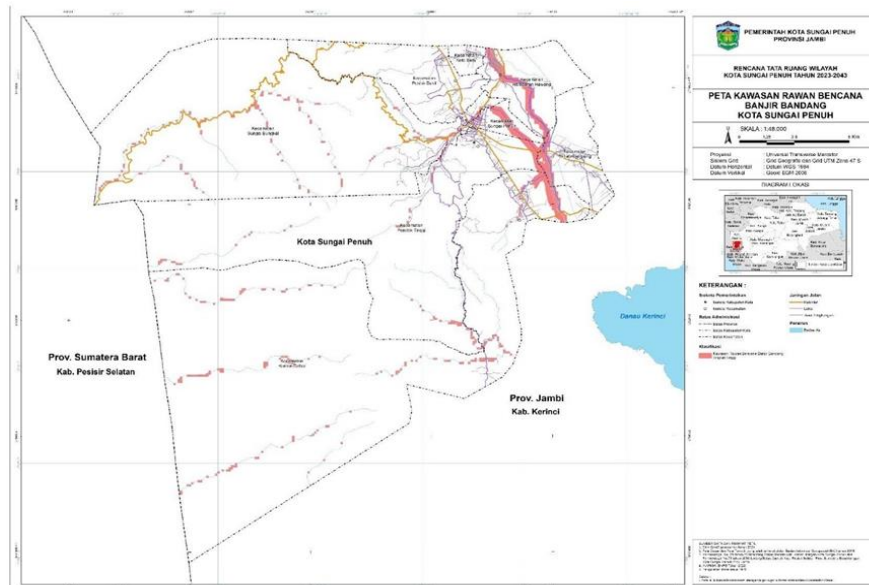


Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

Gambar II.11  
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Sungai Penuh

Bencana banjir bandang juga berpotensi terjadi di wilayah Sungai Penuh yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama di bagian hulu DAS. Peresapan air hujan di bagian hulu yang kurang baik menyebabkan air langsung menjadi limpasan.





Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

**Gambar II.12**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Kota Sungai Penuh**

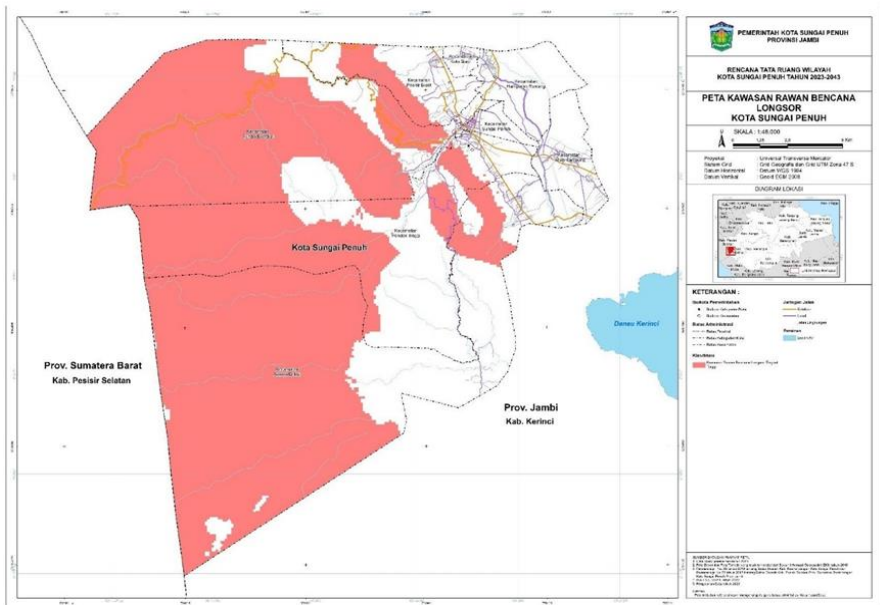
## 2. Gempa Bumi

Berdasarkan Peta Seismotektonik Daerah Sungai Penuh dan sekitarnya yang disusun oleh M. Firdaus, A. Soehaemi, dan kawan-kawan Tahun 2002 (Pusat Survei Geologi, Badan Geologi), bahwa wilayah Kota Sungai umumnya termasuk kedalam zona gempa bumi berskala V, VI dan VII MMI. BMKG mencatat Gempa Kerinci pada 7 Oktober 1995 dengan magnitudo 6,7 SR mengakibatkan 84 orang meninggal. Lebih dari 1.800 orang dilaporkan luka berat dan ringan, dan tidak kurang 17.600 rumah penduduk rusak, tanah longsor juga terjadi di sekitar pusat gempa.

## 3. Gerakan Tanah

Wilayah Kota Sungai Penuh dapat dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah potensi gerakan tanah, yaitu potensi gerakan tanah sangat rendah, potensi gerakan tanah rendah, potensi gerakan tanah sedang dan potensi gerakan tanah tinggi, sebagai berikut:

- Potensi gerakan tanah sangat rendah, wilayah yang umumnya menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan aluvium pantai dan rawa. Gerakan tanah di wilayah ini tidak pernah terjadi, sehingga cukup stabil terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah.
- Potensi gerakan tanah rendah, wilayah yang cukup luas menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng terjal hingga sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini masih sangat jarang terjadi.
- Potensi gerakan tanah menengah, wilayah yang menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini umumnya pada zona lapukan batuan yang cukup tebal dengan tutupan lahan (vegetasi) yang jarang.



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044

**Gambar II.13**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kota Sungai Penuh**

- d. Wilayah ini memiliki potensi gerakan tanah tinggi akibat bentang alam perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang terjal. Terakumulasinya material tanah pelapukan di lokasi ini dapat memicu gerakan tanah baru jika terjadi perubahan kondisi. Potensi ini banyak ditemukan di sekitar jalan raya Sungai Penuh menuju Tapan, dipengaruhi oleh struktur geologi dan patahan.

**4. Letusan Gunung Api**

Kabupaten Kerinci bersebelahan dengan Kota Sungai Penuh, memiliki Gunung Kerinci setinggi 3.805 m, yang dikenal sebagai "*peak of Inderapura*" dan merupakan *stratovolcano*. Gunung ini termasuk dalam 18 gunung berapi aktif di Indonesia.

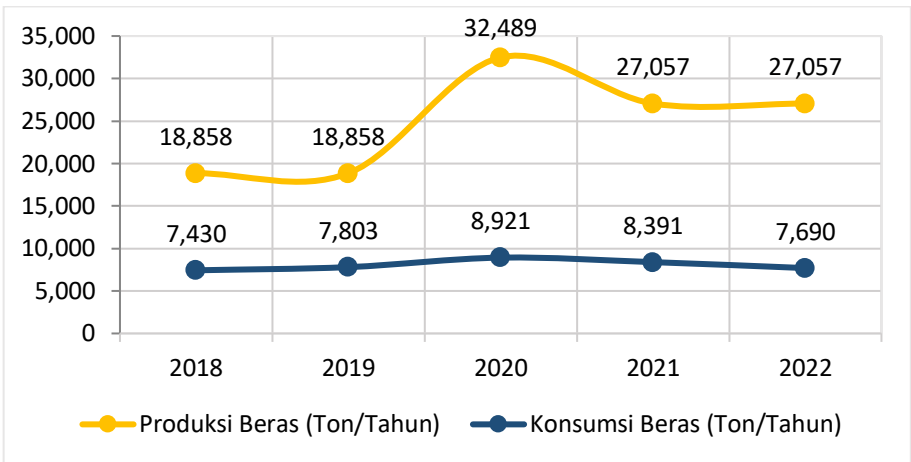
**2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

**A. Analisis DDDTLH: Supply dan Demand (Daya Dukung Riil)**

**1. Daya Dukung Pangan**

Berdasarkan KLHS RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 daya dukung pangan (padi) di Kota Sungai Penuh surplus, dengan produksi melebihi konsumsi. Pada tahun 2018-2022 surplus produksi beras berkisar antara 18.000 hingga 32.000 ton per tahun.

Secara umum daya dukung pangan Kota Sungai Penuh dapat dikategorikan surplus dan tidak rentan dalam penyediaan pangan, hanya terdapat 1 (satu) kecamatan daya dukung pangannya defisit, yaitu Kecamatan Sungai Bungkal. Prediksi konsumsi pangan (beras) di Kota Sungai Penuh tahun 2045 diperkirakan mencapai 10.468 ton per tahun, sedangkan prediksi produksi diperkirakan 27.362 ton per tahun (Gambar II.14).

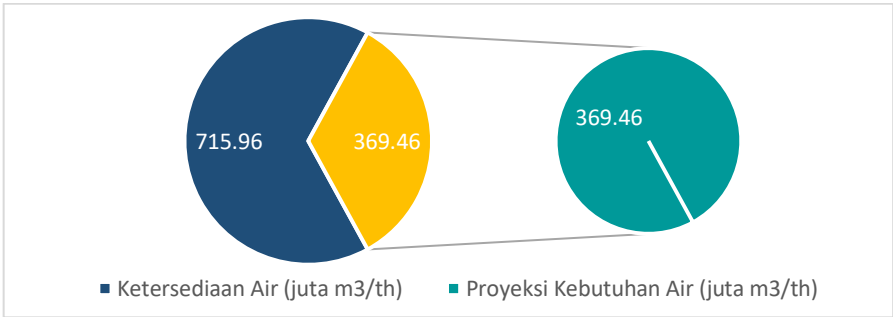


Sumber: KLHS RPJPD Kota Sungai Penuh 2025-2045

**Gambar II.14**  
**Produksi dan Konsumsi Pangan (Beras) Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2018-2022**

**2. Daya Dukung Air**

Proyeksi kebutuhan air di Kota Sungai Penuh tahun 2045 untuk kebutuhan domestik mencapai 214 juta m<sup>3</sup> per tahun, dan kebutuhan pertanian dan perkebunan sebesar 149 juta m<sup>3</sup> per tahun, dengan total kebutuhan air mencapai 369,46 juta m<sup>3</sup> per tahun.



Sumber : KLHS RPJPD Kota Sungai Penuh 2025-2045

**Gambar II.15**  
**Daya Dukung Air Permukaan Kota Sungai Penuh**  
**dengan Metode Supply dan Demand**

Potensi penyediaan air bersih Kota Sungai Penuh saat ini sebagian berasal dari DAS Batang Merao dengan total potensi ketersediaan air 715,96 juta m<sup>3</sup> per tahun (Ningsih, Sri Rahayu; Putra, Eri Gas Eka; dan Goembira, Fadjar, 2020). Kondisi daya dukung air permukaan Kota Sungai Penuh adalah surplus, karena potensi ketersediaan air lebih besar dari proyeksi kebutuhan.

**3. Daya Dukung Fungsi Lindung**

Dari total luas lahan Kota Sungai Penuh 36.492,42 ha, sekitar 30.139,16 ha mempunyai fungsi lindung. Fungsi lindung terluas terdapat pada Taman Nasional Kerinci Seblat, yang mencapai kurang lebih 69,30 %. Daya dukung lahan dihitung berdasarkan rasio kawasan fungsi lindung dibandingkan total peruntukan lahan berdasarkan RTRW Kota Sungai Penuh atau sebesar 0,825 (sangat baik).



Tabel II.8  
Proyeksi Luas Lahan Fungsi Lindung Kota Sungai Penuh

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan dengan Fungsi Lindung (ha)
1.	Badan Air	40,77	0,98	39,96
2.	Badan Jalan	5,03	0,18	0,91
3.	Kawasan Cagar Budaya	0,33	0,18	0,06
4.	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	78,21	0,18	14,08
5.	Kawasan Hortikultura	3.852,54	0,42	1.618,07
6.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	782,18	0,68	531,88
7.	Kawasan Pariwisata	39,33	0,18	7,08
8.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	263,78	0,18	47,48
9.	Kawasan Perkantoran	39,20	0,18	7,06
10.	Kawasan Perkebunan	1.547,56	0,54	835,68
11.	Kawasan Perlindungan Setempat	28,64	0,98	28,07
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,85	0,18	0,15
13.	Kawasan Perumahan	1.371,42	0,18	246,86
14.	Kawasan Tanaman Pangan	3.107,61	0,46	1.429,50
15.	Kawasan Transportasi	2,12	0,18	0,38
16.	Pemukaman	38,52	0,98	37,75
17.	Taman Kecamatan	1,60	0,98	1,57
18.	Taman Kelurahan	1,91	0,98	1,87
19.	Taman Kota	1,47	0,98	1,44
20.	Taman Nasional	25.288,81	1,00	25.288,81
21.	Taman RT	0,08	0,98	0,08
22.	Taman RW	0,45	0,98	0,44
TOTAL		36.492,42		30.139,16

Sumber: KLHS RPJPD Kota Sungai Penuh 2025-2045

B. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup: Jasa Ekosistem

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Jasa ekosistem penyediaan: Kota sungai penuh memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi baik air bersih, serat, bahan bakar, maupun sumber daya genetik. Hanya jasa penyediaan pangan kategori sedang.
2. Jasa ekosistem regulasi: Kota Sungai Penuh secara umum memiliki daya dukung yang keseluruhannya adalah sangat tinggi dan tinggi baik iklim, tata aliran air dan banjir, perlindungan bencana, pemurnian air, penguraian limbah, kualitas udara, penyerbukan alami, dan pengendalian hama.
3. Jasa ekosistem budaya: Kota Sungai Penuh memiliki daya dukung jasa kultural rekreasi dan estetika (alam) sangat tinggi dan tinggi. Namun jasa kultural tempat tinggal memiliki daya dukung yang rendah dan sangat rendah. Jasa ini dipengaruhi oleh ekoregion dataran fluvio gunung api serta tutupan lahan permukiman dan sawah.
4. Jasa ekosistem pendukung: Kota Sungai Penuh memiliki daya dukung yang keseluruhannya adalah sangat tinggi dan tinggi baik jasa pendukung pembentukan lahan, siklus hara, produksi primer, maupun biodiversitas.





Tabel II.9  
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem  
Kota Sungai Penuh

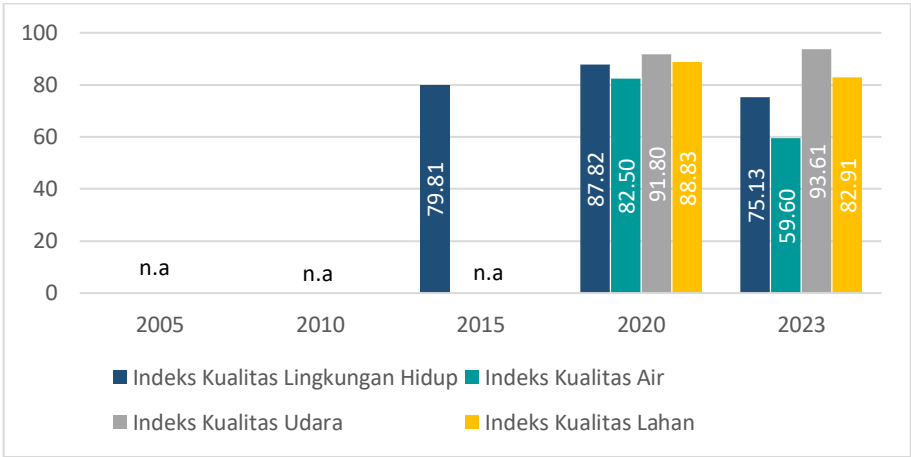
No	Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
I.	Penyediaan	74,04%	22,23%	3,73%
1.	Pangan	11,75%	83,41%	4,83%
2.	Air Bersih	79,56%	18,38%	2,05%
3.	Serat	97,43%	0,15%	2,42%
4.	Bahan Bakar	84,04%	7,51%	8,46%
5.	Sumber Daya Genetik	97,43%	1,67%	0,90%
II.	Pengaturan	88,88%	9,15%	1,97%
1.	Iklm	87,88%	9,70%	2,41%
2.	Tata Aliran Air dan Banjir	77,89%	18,37%	3,73%
3.	Perlindungan Bencana	82,18%	16,08%	1,74%
4.	Pemurnian Air	97,43%	0,00%	2,57%
5.	Penguraian Limbah	82,93%	16,17%	0,90%
6.	Kualitas Udara	89,65%	7,94%	2,41%
7.	Penyerbukan Alami	96,68%	2,23%	1,09%
8.	Pengendalian Hama	96,37%	2,73%	0,90%
III.	Kultural	58,93%	4,79%	36,28%
1.	Tempat Tinggal	10,91%	1,32%	87,77%
2.	Rekreasi	79,24%	10,23%	10,53%
3.	Estetika (Alam)	86,63%	2,82%	10,55%
IV.	Pendukung	86,90%	9,45%	2,14%
1.	Pembentukan Tanah	82,33%	15,60%	2,07%
2.	Siklus Hara	87,26%	10,97%	1,77%
3.	Produksi Primer	80,66%	15,60%	3,73%
4.	Biodiversitas	97,34%	1,76%	0,90%

Sumber: KLHS RPJPD Kota Sungai Penuh 2025-2045

Menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengoptimalkan pemanfaatan serta pengendalian ruang adalah tantangan penting yang dihadapi banyak daerah saat ini. Pertumbuhan penduduk yang pesat sering kali membawa dampak negatif, seperti penurunan kualitas hidup, peningkatan kemacetan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, langkah strategis perlu diambil untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pengelolaan ruang yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan yang terencana. Perencanaan tata ruang yang efektif harus mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Zonasi yang jelas akan memastikan bahwa lahan digunakan secara optimal.

2.1.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. IKLH Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang menurun dari 87,82 di tahun 2020 menjadi 75,13 di tahun 2023. Hal ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas air. Di sisi lain, kualitas udara dan lahan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.



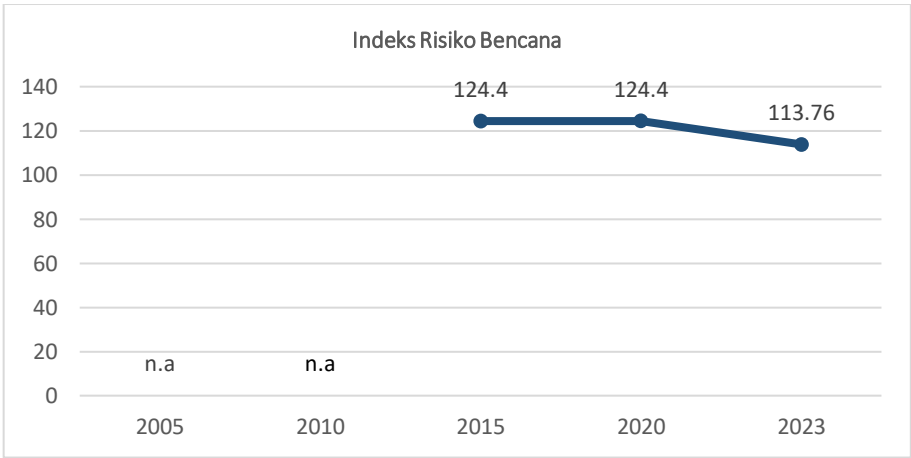
Sumber: Dinas LH Kota Sungai Penuh; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.16**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat berupa pengelolaan limbah rumah tangga dan industri, pengelolaan persampahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

**2.1.1.9 Indeks Risiko Bencana**

Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi (gempa bumi, tanah longsor). Selain jenis bencana ini, Kota Sungai Penuh juga rawan terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim). Tingkat risiko bencana diukur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).



Sumber: BNPB; diolah oleh Bappeda, 2024

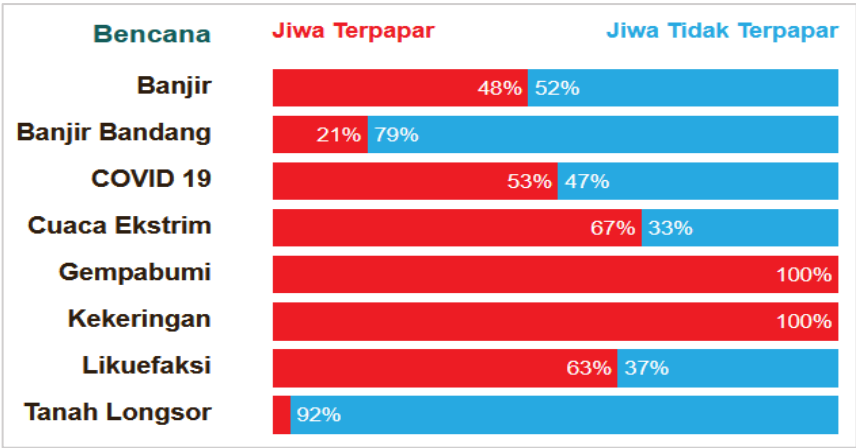
**Gambar II.17**  
**Indeks Risiko Bencana Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Pada Gambar II.17, Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kota Sungai Penuh memperlihatkan tren penurunan dari tahun 2020-2023.



Pemerintah daerah berhasil menurunkan tingkat risiko bencana dari 124,4 di tahun 2020 menjadi 113,76 di tahun 2023 (kelas risiko sedang).

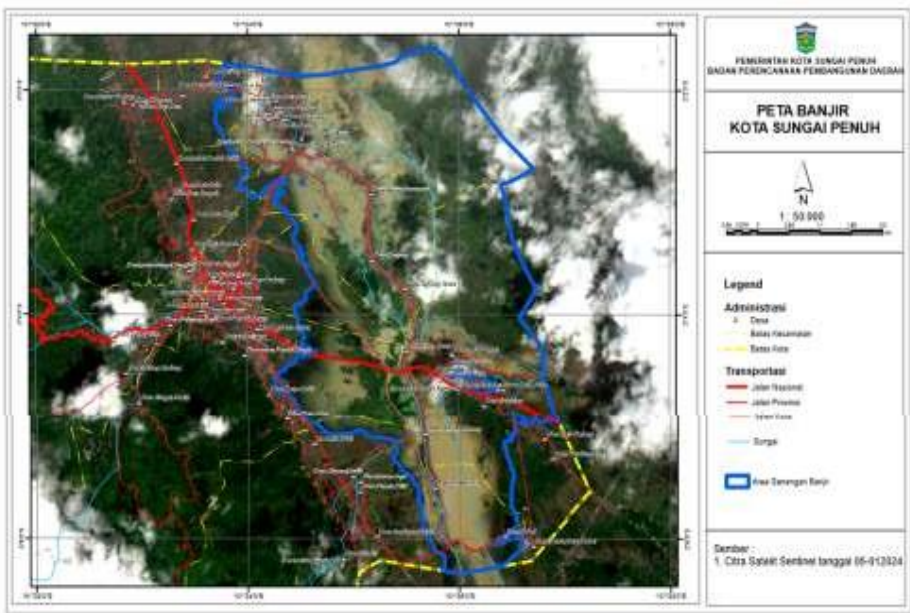
Berdasarkan perbandingan jenis bencana, bencana gempa bumi dan kekeringan memiliki persentase terpapar terbesar (100%), sedangkan yang terkecil adalah bencana tanah longsor yang sebesar 8%. Perbandingan lebih rinci ditunjukkan pada Gambar II.18.



Sumber: BNPB, 2024

Gambar II.18  
Jenis Bencana dan Jiwa Terpapar Kota Sungai Penuh

Di awal tahun 2024, terjadi bencana banjir di Kota Sungai Penuh yang merupakan banjir terbesar dibandingkan kejadian bencana sebelumnya. Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah dalam Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mengalami banjir; sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.19.



Sumber: Bappeda Kota Sungai Penuh, 2024

Gambar II.19  
Peta Kawasan Bencana Banjir Kota Sungai Penuh Tahun 2024



Peristiwa banjir terjadi di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Kumun Debai. Banjir menggenangi beberapa ruas jalan dalam wilayah Kota Sungai Penuh, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kecamatan dan jalan desa. Meskipun rata-rata ketinggian air 1,5 m, ketinggian air di sebagian daerah pinggir Sungai Batang Merao mencapai 2,5 m. Dari arah barat, luapan air terjadi melalui Sungai Batang Merao, dari arah Selatan air meluap melalui Sungai Bungkal dan anak sungai di sepanjang kawasan perbukitan. Dari bagian timur air meluap melalui Sungai Batang Sangkir, dari arah Utara air meluap melalui Sungai Terung, dan dari wilayah tengah air sungai meluap melalui Sungai Air Sempit.

Pada kejadian banjir di Kota Sungai Penuh Tahun 2024, meliputi 8 kecamatan, 43 Desa, sebanyak 24.300 Jiwa dan 7.902 KK terpapar banjir. Jumlah rumah yang terdampak banjir sebanyak 6.182 unit, dimana yang tertinggi berada di Kecamatan Hamparan Rawang sebanyak 3.793 unit dan Kecamatan Tanah Kampung sebanyak 1.281 unit. Dari jumlah yang terdampak, terdapat 320 unit yang mengalami rusak ringan, 750 unit yang mengalami rusak sedang dan 207 unit yang mengalami rusak berat. Total Areal persawahan yang terendam banjir mencapai 2.168,681 ha, dan Kebun Campuran seluas 39,89 ha. Persawahan di Kec. Hamparan Rawang terpapar banjir terluas (906,51 ha) dan Kecamatan Tanah Kampung seluas 670,97 ha.

Berdasarkan hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, penyebab banjir di Kota Sungai Penuh adalah: (1) intensitas curah hujan yang tinggi; (2) perubahan tata guna lahan; (3) sedimentasi; (4) longsor tebing sungai dan penyempitan arus sungai; (5) sampah; (6) galian C; (7) bendungan liar; (8) belum adanya infrastruktur pengendali banjir; dan (9) belum optimalnya koordinasi dan integrasi program/kegiatan dalam penanganan banjir Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Penanganan banjir Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terkait dengan lintas kewenangan dan lintas daerah. Pengendalian banjir tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan terpadu antara hulu dan hilir yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh, pemerintah desa dan masyarakat).

#### **2.1.1.10 Perubahan Iklim**

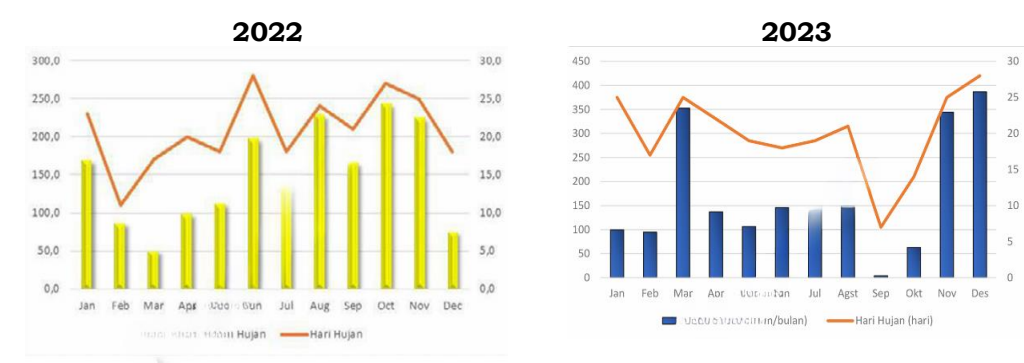
Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai rentan terhadap resiko perubahan iklim. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, diperkirakan Indonesia telah mengalami sekitar 30.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut, diperkirakan sekitar 50% merupakan bencana yang berkaitan dengan iklim seperti banjir (sekitar 30%), dan selebihnya diperkirakan akibat bencana longsor, angin puting beliung dan kekeringan. Tingginya frekuensi intensitas kejadian bencana ini, diperkirakan disebabkan oleh pemanasan global. Berdasarkan KLHS RPJPD, ekosistem Kota Sungai





Penuh mampu memberikan jasa pengaturan iklim dengan kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 32.064,85 ha atau 87,88% dari luas kategori yang sama. Luas wilayah dengan sedang 3.540,67 ha atau 9,70% dan kategori rendah seluas 880,80 ha atau 2,41%.

Sungai Penuh memiliki suhu rata-rata 22,9 °C selama tahun 2023. Pada bulan Januari merupakan kondisi dengan rata-rata suhu terendah yaitu antara 17 °C sampai dengan 31,3 °C. Sedangkan rata-rata suhu tertinggi terjadi pada bulan Maret (32,8 °C). Pada bulan Desember tercatat sebanyak 28 hari terjadi hujan yang merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 386,5 mm. Bulan dengan curah hujan terendah adalah bulan September yaitu 3,9 mm/bulan dengan 7 hari hujan dalam sebulan. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2023 adalah 166,7 mm/bulan.



Sumber: BPS, diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.20  
Perubahan Curah Hujan di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2023

Salah satu penyebab kejadian bencana (banjir, tanah longsor) di Kota Sungai Penuh yang telah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan beserta kejadian hujan (hari) di tahun 2022 dan 2023 ditunjukkan pada Gambar II.20. Peningkatan curah hujan signifikan terjadi di bulan November sampai Desember 2023. Bahkan, curah hujan dan hari hujan selama dua bulan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Kesiapan Kota Sungai Penuh untuk menghadapi perubahan iklim ini menjadi faktor penentu seberapa besar dampak kejadian bencana banjir dan longsor.

2.1.1.11 Indeks Ketahanan Daerah

Berdasarkan data dari BPBD Kota Sungai Penuh, indeks ketahanan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 0,44 (kategori sedang). Penguatan kebijakan dan kelembagaan memiliki indeks prioritas tertinggi (0,72). Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana memiliki indeks prioritas terendah (0,39).

Meskipun IRB dan IKD Kota Sungai Penuh berada pada tingkat sedang, bukan berarti terbebas dari ancaman bencana yang ada. Upaya-upaya penanggulangan bencana tetap harus diperhatikan dalam setiap fase, baik pra-bencana, kejadian/darurat, maupun pasca bencana. Selengkapnya, perbandingan indeks prioritas ketahanan daerah Kota Sungai Penuh ditunjukkan pada Tabel II.10.



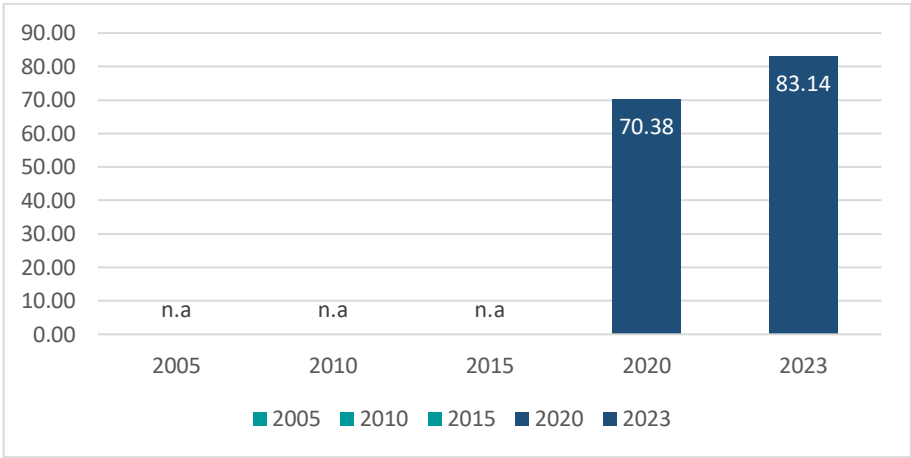
Tabel II.10  
Indeks Ketahanan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,72	0,44	Sedang
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,46		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,40		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,39		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan & Penanganan Darurat Bencana	0,42		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45		

Sumber: BPBD Kota Sungai Penuh, 2024

2.1.1.12 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan pangan (IKP) merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan pada suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ukuran ketahanan pangan (0–100) mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Perbandingan indeks ketahanan pangan Kota Sungai Penuh sampai tahun 2023, ditunjukkan pada Gambar II.21 berikut.



Sumber: Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan (FSVA), Badan Pangan Nasional, 2024 (<https://fsva.badanpangan.go.id/>).

Gambar II.21  
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Ketahanan pangan Kota Sungai Penuh cenderung meningkat dari 70,38 di tahun 2020 menjadi 83,14 di tahun 2023. Sebagai angka komposit ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan perlu diperhatikan sebagai dampak pembangunan lintas sektor yang mencakup:

1. Aspek Ketersediaan Pangan: Rasio Konsumsi Normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari.



- 2. Aspek Keterjangkauan Pangan: (a) Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan; (b) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran; dan (c) Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik.
- 3. Aspek Pemanfaatan Pangan: (a) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (b) Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih; (c) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; (d) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*Stunting*); dan (e) Angka Harapan Hidup pada saat lahir.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan. Sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sebagai subjek pembangunan, penduduk sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sebesar apapun modal finansial dan fisik yang tersedia, jika penduduk tidak mempunyai nilai lebih dalam melaksanakan pembangunan, maka pembangunan tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan guna lahan, baik secara alamiah maupun urbanisasi sebagai akibat ketidakmampuan dalam mengantisipasi perkembangan perkotaan yang demikian pesat dapat menimbulkan berbagai isu-isu permasalahan kawasan perkotaan seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan kawasan kumuh, kebutuhan perumahan, kemacetan lalu lintas, akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan masalah persampahan.

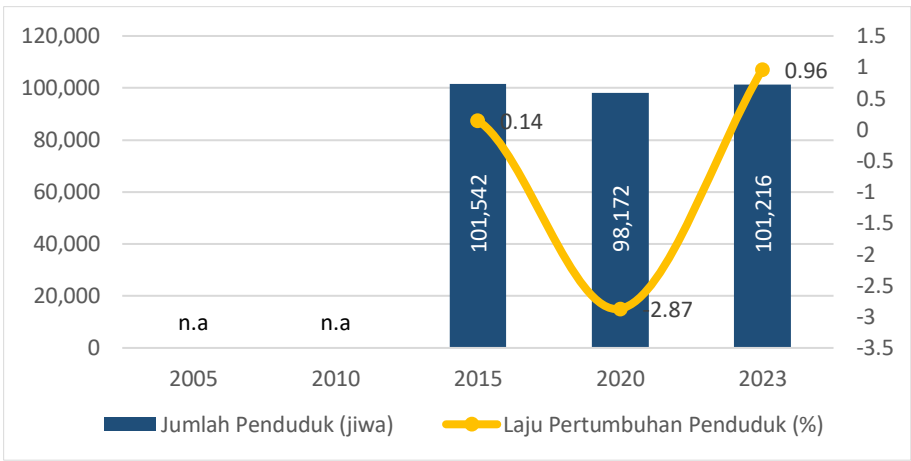
Tabel II.11  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Sungai Penuh	n.a	n.a	11.929	10.624	10.505
2.	Pesisir Bukit	n.a	n.a	12.939	12.067	12.861
3.	Hamp. Rawang	n.a	n.a	15.236	15.252	15.928
4.	Kumun Debai	n.a	n.a	11.588	11.141	11.004
5.	Tanah Kampung	n.a	n.a	11.586	10.330	10.995
6.	Pondok Tinggi	n.a	n.a	18.447	18.631	18.806
7.	Sungai Bungkal	n.a	n.a	10.699	9.304	11.230
8.	Koto Baru	n.a	n.a	9.128	10.823	9.887
Total		n.a	n.a	101.542	98.172	101.216

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2023

Modal penduduk dalam pembangunan Kota Sungai Penuh tahun 2023 berjumlah sekitar 101.216 jiwa atau ekuivalen dengan 2,75% dari jumlah total penduduk Provinsi Jambi. Wilayah di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2015, 2020 dan 2023 adalah Kecamatan Pondok Tinggi diikuti Kecamatan Hamparan

Rawang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 0,96% jika dibandingkan tahun 2022 (100.249 jiwa).



Sumber: Dinas Dukcapil; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.22**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Mencermati dinamika penduduk Kota Sungai Penuh yang cenderung bertambah dan dalam rangka memanfaatkan peluang bonus demografi, maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan. Argumentasinya adalah tingkat fertilitas yang rendah sebenarnya bukan disebabkan oleh keberhasilan program perencanaan keluarga, namun juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pendidikan yang semakin membaik.

Menghadapi bonus demografi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menjadi fokus penguatan, beberapa faktor tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia berbasis pada tiga komponen, yaitu kesehatan indikatornya Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan indikatornya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran yaitu standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran rata-rata per kapita. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian.

**2.1.2.2 Komposisi Penduduk**

Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II.12 berikut ini.

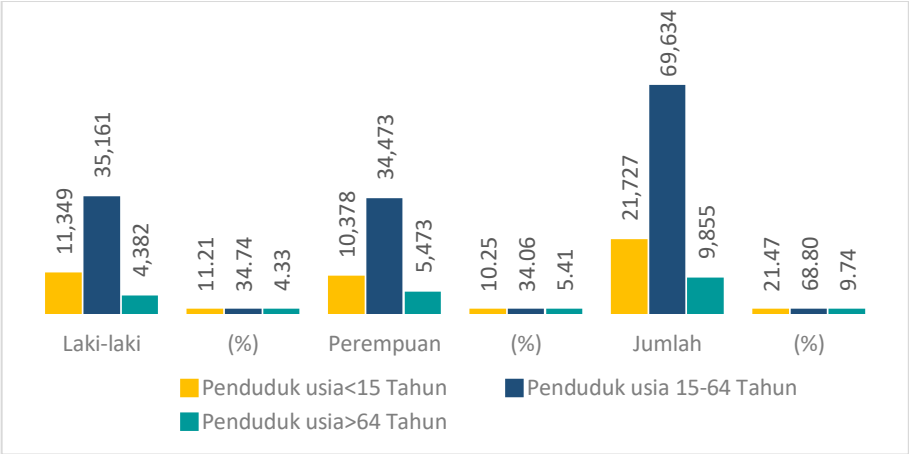




Tabel II.12  
Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh  
Menurut Struktur Usia Tahun 2023

Struktur Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	3.330	3.027	6.357
5-9	3.922	3.656	7.578
10-14	4.097	3.695	7.792
15-19	4.465	4.054	8.519
20-24	4.262	4.224	8.486
25-29	3.812	3.619	7.431
30-34	3.325	3.266	6.591
35-39	3.517	3.366	6.883
40-44	4.078	4.013	8.091
45-49	3.945	3.919	7.864
50-54	3.249	3.102	6.351
55-59	2.460	2.569	5.029
60-64	2.048	2.341	4.389
65-69	1.770	2.058	3.828
70-74	1.251	1.436	2.687
75+	1.361	1.979	3.340
Total	50.892	50.324	101.216

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2024



Sumber: Dinas Dukcapil; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.23  
Komposisi Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2023 didominasi usia produktif yang mencapai 69,63 ribu jiwa (68,80%), sedangkan penduduk tidak produktif 31,58 ribu jiwa (31,20%). Penduduk Kota Sungai Penuh sudah menuju *aging population*, yang ditunjukkan jumlah penduduk lansia mencapai 9,86 ribu jiwa (9,74%). Kondisi ini memerlukan dukungan terhadap kualitas individu, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan ekonomi untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan; jika tidak, hal ini dapat memperburuk pengangguran, mengurangi pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan, yang berdampak negatif pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

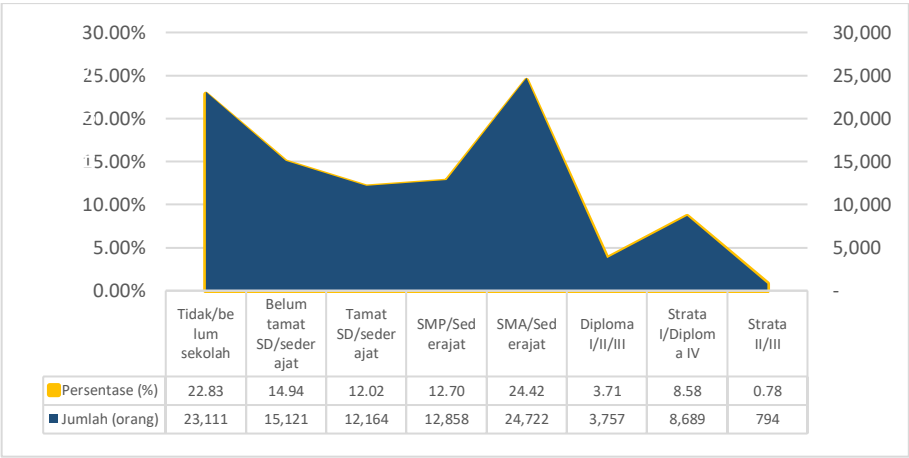


Komposisi ini juga menunjukkan Kota Sungai Penuh berada pada periode jendela kesempatan atau *window opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Aspek penting dari komposisi penduduk adalah *sex ratio*, yaitu perbandingan jumlah laki-laki terhadap 100 perempuan. Pada tahun 2023, *sex ratio* di Kota Sungai Penuh adalah 101,13, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak. Hal ini diharapkan mendorong perekonomian, karena laki-laki umumnya adalah pencari nafkah utama. Namun, komposisi ini juga mempengaruhi kesetaraan gender, sehingga tantangan bagi Kota Sungai Penuh adalah memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan.

2.1.2.3 Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tahun 2023, jumlah penduduk yang tidak atau belum bersekolah mencapai 22,83% (23.111 orang). Sementara itu, tingkat pendidikan SMA/ sederajat merupakan yang tertinggi, dengan persentase sebesar 24,42% (24.722 orang), untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat pada Gambar II.24 di bawah ini. Tingkat pendidikan penduduk di Kota Sungai Penuh masih perlu ditingkatkan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu diintensifkan di masa mendatang.



Sumber: Dinas Dukcapil; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.24  
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  
Kota Sungai Penuh 2023

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh mencapai 277,58 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Koto Baru memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 5.158,61 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Kumun Debai memiliki kepadatan terendah, yakni 74,04 jiwa per km<sup>2</sup> (Tabel II.13).



Tabel II.13  
Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh 2023

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jw)	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk (jw/km <sup>2</sup> )
1.	Sungai Penuh	10.505	3,14	3.347,57
2.	Pesisir Bukit	12.861	18,08	711,23
3.	Hamp. Rawang	15.928	13,05	1.220,98
4.	Kumun Debai	11.004	148,62	74,04
5.	Tanah Kampung	10.995	11,14	986,80
6.	Pondok Tinggi	18.806	73,87	254,58
7.	Sungai Bungkal	11.230	95,10	118,08
8.	Koto Baru	9.887	1,92	5.158,61
Total		101.216	364,92	277,36

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, 2024

2.1.2.5 Masyarakat Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun (Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat).

Masyarakat Kota Sungai Penuh masih sangat mempertahankan adat istiadatnya, hal ini terbukti keberadaan lembaga adat tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kota. Keberadaan lembaga adat ini masih sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Kondisi ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat Kota Sungai Penuh bahwa “Adat itu tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang karena panas”, bahwa adat itu tidak akan tergerus oleh zaman, keberadaannya akan terus dipertahankan sepanjang hayat dikandung badan. Bagi masyarakat Kota Sungai Penuh, adat memiliki makna sakral sebagai implementasi agama, tercermin dalam ungkapan: “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.” Lembaga adat, terutama pemangku adat di tingkat desa, sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah orang-orang bijak yang cerdas, yang memegang lantak tidak goyah, cermin tidak kabur, diangkat dengan sumpah karang setio yaitu sumpah kesetiaan menjalan aturan adat dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

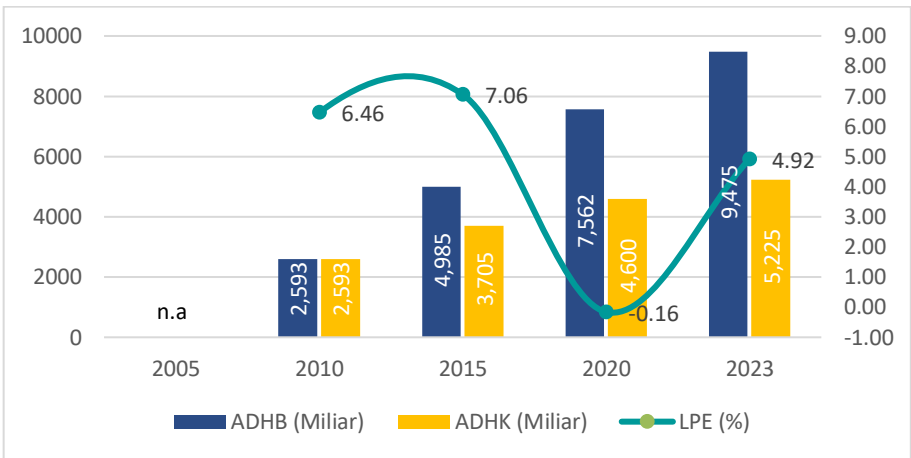
Globalisasi menghadirkan perubahan dan tantangan bagi masyarakat adat, yang dapat mengancam keberlangsungannya. Untuk mengatasi ini, penting untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan perannya dalam pembangunan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Jika ketiga faktor ini berfungsi dengan baik, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan tercapai, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.25**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2023 tumbuh 4,92%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi minus 0,16%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan adanya perbaikan penanganan pandemi, yang didukung meningkatnya kinerja ekonomi khususnya sektor jasa di tengah ketidakpastian global.

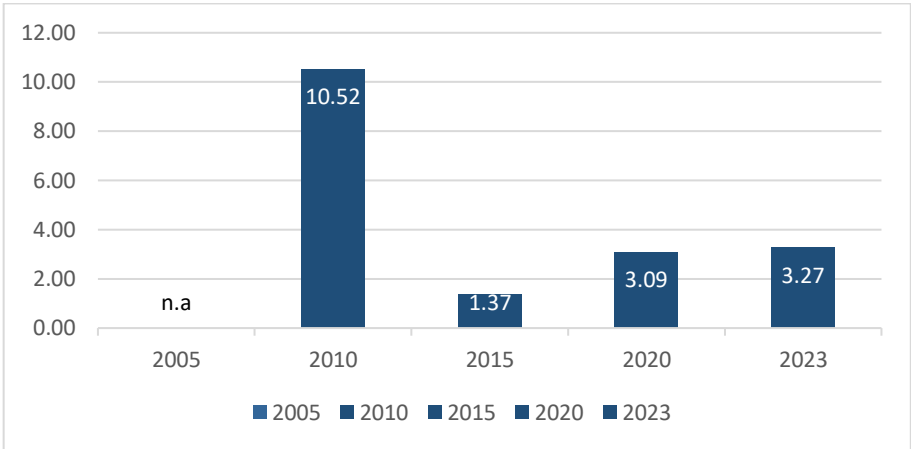
Upaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi Kota Sungai Penuh memerlukan peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder*, penyesuaian program kerja, serta dorongan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, penting untuk mendorong investasi, menjaga kinerja ekonomi agar dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan tingkat inflasi.

2.2.1.2 Inflasi

Laju inflasi adalah faktor ekonomi penting untuk mengevaluasi kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pemerintah daerah berperan dalam menekan inflasi dengan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, mencegah gejolak harga di pasaran. Inflasi juga dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, dan spekulasi di sektor keuangan, yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dalam penanggulangannya.

Sampai tahun 2023 inflasi di Kota Sungai Penuh merujuk pada inflasi di Kota Jambi. Perkembangan inflasi di Kota Jambi ditunjukkan pada Gambar II.26 di bawah ini.





Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
Catatan: Data Inflasi Kota Jambi

Gambar II.26  
Inflasi Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Pada tahun 2023, tingkat inflasi mencapai 3,27%, meningkat dibandingkan dengan 3,09% pada 2020 dan 1,37% pada 2015. Inflasi didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 7,97%, diikuti oleh kelompok kesehatan 1,86%, serta kelompok perlengkapan rumah tangga dan transportasi masing-masing sebesar 1,66%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya komoditi tersebut cukup tinggi, dan membatasi daya beli masyarakat.

Tabel II.14  
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023

Kelompok Pengeluaran (Persen)	Inflasi Tahun Kalender
Umum	3,27
Makanan, Minuman dan Tembakau	7,97
Pakaian dan Alas Kaki	0,42
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,25
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	1,66
Kesehatan	1,86
Transportasi	1,66
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,33
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,31
Pendidikan	0,82
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,70

Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
Catatan: Data Inflasi Kota Jambi

Daya beli masyarakat di Kota Sungai Penuh rentan terhadap inflasi barang dan jasa. Harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor stabilitas pasokan pangan, sistem rantai pasok dan keterjangkauan pangan. Oleh karena itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pengendalian inflasi agar peningkatan ekonomi menumbuhkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.



2.2.1.3 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi Rumah Tangga, maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan.

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Sungai Penuh menurut kelompok komoditas dapat dilihat pada Tabel II.15 di bawah ini.

Tabel II.15  
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Sungai Penuh  
Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Kelompok Komoditas	Pengeluaran per Kapita Sebulan									
	Rata-rata (rupiah)					Persentase (%)				
	2005	2010	2015	2020	2023	2005	2010	2015	2020	2023
Jumlah makanan	n.a	n.a	468.859	697.670	747.205	n.a	n.a	52,32	51,31	49,66
Jumlah bukan makanan	n.a	n.a	427.295	662.176	757.517	n.a	n.a	47,68	48,69	50,34
Jumlah pengeluaran	n.a	n.a	896.154	1.359.847	1.504.722	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2023 nilai pengeluaran bukan makanan (50,34%) lebih tinggi dari nilai pengeluaran makanan (49,66%). Hal ini berarti bahwa konsumsi masyarakat Kota Sungai Penuh lebih banyak pengeluaran untuk non makanan daripada makanan, adanya perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat untuk pengeluaran sekunder dan tersier.

Tabel II.16  
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Golongan  
Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Golongan pengeluaran	Persentase penduduk				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	< 150.000	n.a	n.a	n.a	-	n.a
2.	150.000-199.999	n.a	n.a	n.a	-	n.a
3.	200.000-299.999	n.a	n.a	n.a	0,24	n.a
4.	300.000-499.999	n.a	n.a	n.a	2,57	n.a
5.	500.000-749.999	n.a	n.a	n.a	20,39	n.a
6.	750.000-999.999	n.a	n.a	n.a	19,78	n.a
7.	1.000.000-1.499.999	n.a	n.a	n.a	26,61	n.a
8.	>1.500.000	n.a	n.a	n.a	30,41	n.a

Sumber : BPS, 2024

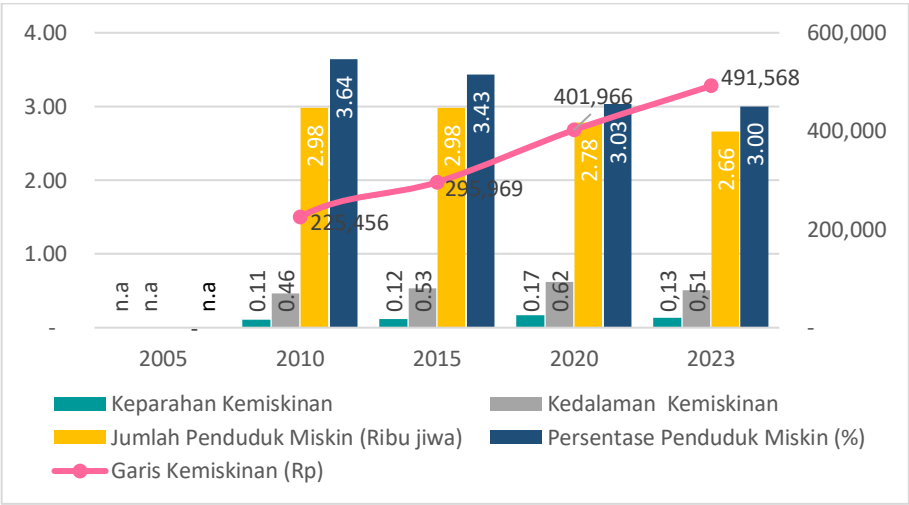
Dilihat dari persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, tampak bahwa distribusi pengeluaran tahun 2020 tertinggi berada pada golongan pengeluaran >Rp 1.500.000 (30,41%) diikuti oleh golongan



pengeluaran 1.000.000-1.499.999 (26,61%) dan golongan pengeluaran 500.000-749.999 (20,39%).

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; dan (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak diukur dengan garis kemiskinan.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.27  
Indikator Kemiskinan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Perkembangan kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2010 sebesar 3,64% dengan jumlah penduduk miskin 2,98 ribu jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2015, 2010 dan 2020. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan turun menjadi 3,00% dengan jumlah penduduk miskin 2,66 ribu dari tahun 2020.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dari tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2023 yaitu dari Rp. 401.966 menjadi Rp. 491.568. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga bahan pokok. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 0,62

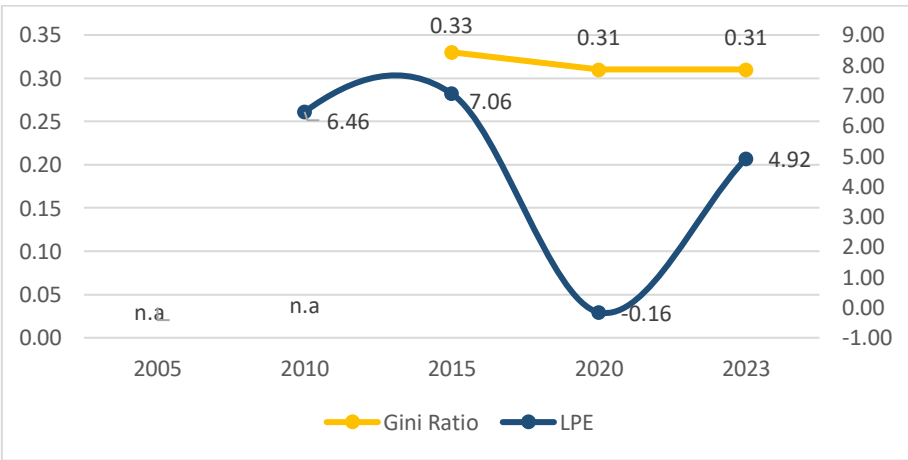


tahun 2020 menjadi 0,51 di tahun 2023. Penurunan P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sungai Penuh juga mengalami penurunan di tahun 2023 dari tahun 2020. Penurunan nilai P2 menggambarkan kondisi penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Sungai Penuh.

Turunnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh sudah baik, sehingga mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan serta kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

2.2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio (indeks gini). Nilai indeks gini merupakan ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilainya maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Perkembangan indeks gini Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Gambar II.28 di bawah ini.



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.28  
Gini Rasio Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Indeks gini Kota Sungai Penuh berada dibawah 0,4 ( $GR < 0,4$ ), yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Sungai Penuh dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Grafik diatas menunjukkan indeks gini Kota Sungai Penuh cenderung menurun dan lebih rendah dibanding indeks gini Provinsi Jambi dan Nasional.

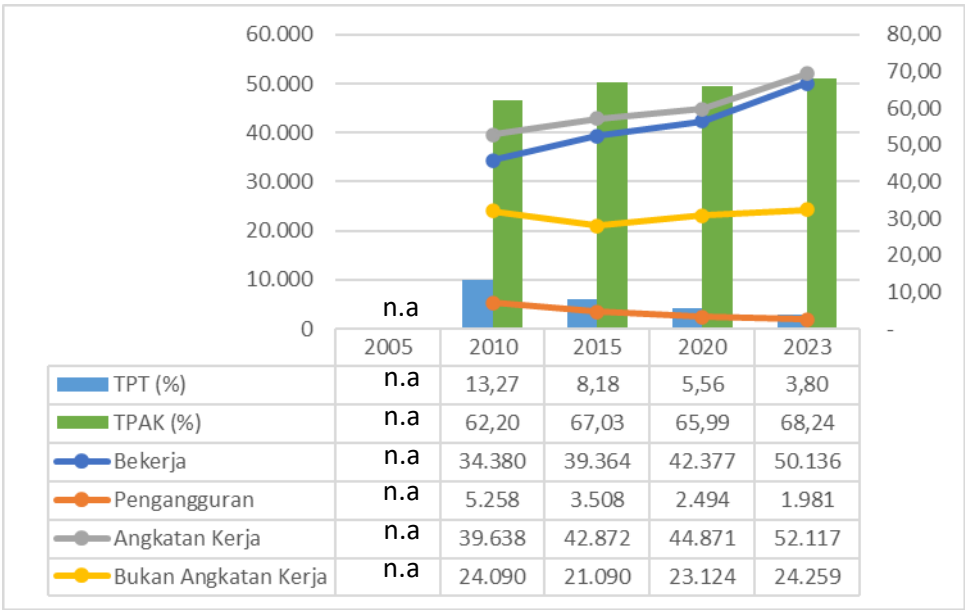




Indeks gini Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 0,31 (ketimpangan sedang). Meskipun indeks gini Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 dalam kategori rendah, diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Sungai Penuh cenderung menurun, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,80% dibandingkan dengan tahun 2010 (13,27%). Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja sudah cukup baik, dipengaruhi oleh kondisi dan status pekerjaan yang ada. Namun, pekerjaan sektor informal rentan terjadi perubahan akibat dinamika perekonomian.

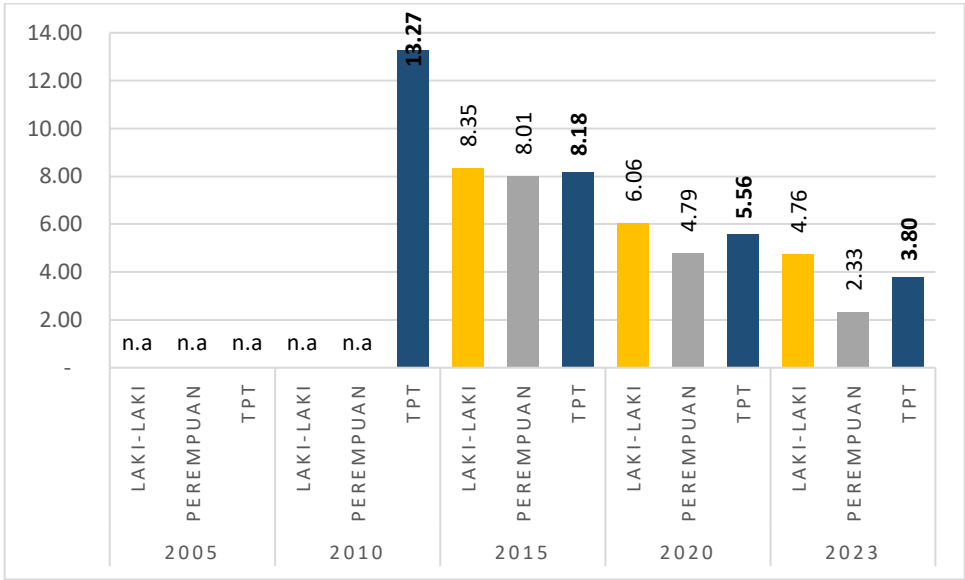


Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.29  
TPT Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja di Kota Sungai Penuh yaitu dari 39,64 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 52,12 ribu orang tahun 2023. Demikian halnya penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan dari 24,09 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 24,26 ribu orang tahun 2023.

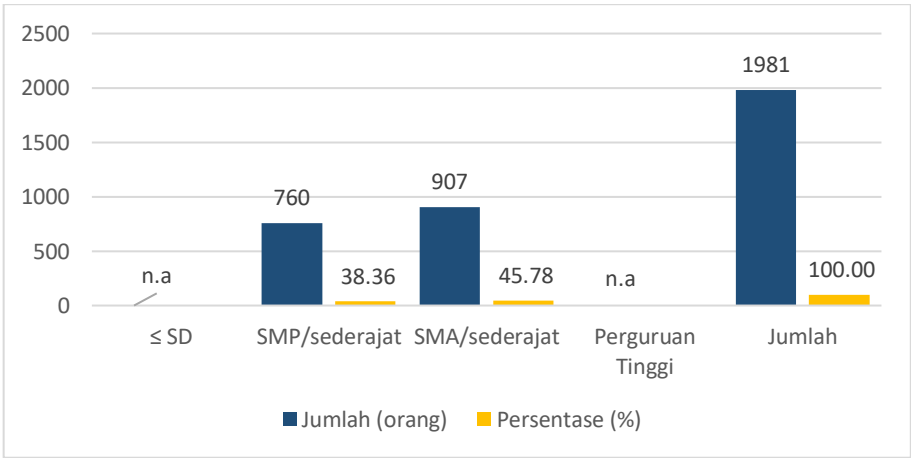
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Gambar II.30 sebagai berikut.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.30**  
**TPT Kota Sungai Penuh Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

TPT laki-laki di Kota Sungai Penuh lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan dan cenderung menurun. Pada tahun 2023 TPT laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 4,76% dan 2,33 %.



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

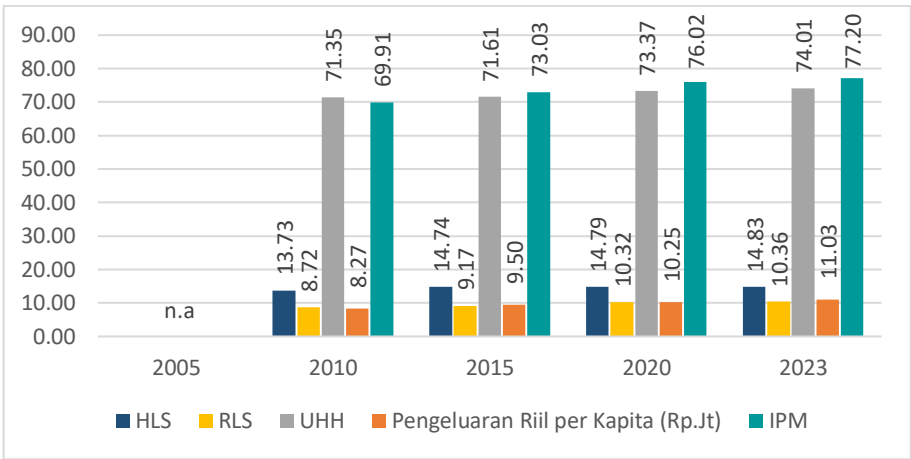
**Gambar II.31**  
**TPT Kota Sungai Penuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2023**

TPT dari tamatan SMA/ sederajat merupakan TPT tertinggi dibandingkan TPT tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu 45,78%, diikuti tamatan SMP/ sederajat 38,36%. Sisanya 15,85% merupakan tamatan ≤SD dan tamatan perguruan tinggi. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, kerjasama dengan perusahaan, sistem informasi pencari kerja, serta kualifikasi tenaga kerja yang belum sesuai dengan pasar tenaga kerja.

2.2.1.7 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik, menjadikan faktor produksi mampu dimaksimalkan, berinovasi mengembangkan faktor produksi yang ada. Selain itu, angka IPM juga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

IPM Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan dari 69,91 pada tahun 2010 menjadi 77,20 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas, pemerataan, akses terhadap sumber daya dan pemberdayaan masyarakat di Kota Sungai Penuh terus pulih seiring proses pemulihan ekonomi. IPM Kota Sungai Penuh berada pada IPM kelompok tinggi karena nilainya lebih dari 70 (Gambar II.32).



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
(IPM Tahun 2023 : UHH Hasil Long Form SP2020)

**Gambar II.32**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Peningkatan IPM di Kota Sungai Penuh di tahun 2023 didorong oleh peningkatan nilai semua komponen pembentuknya, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Pada dimensi kesehatan, ditunjukkan capaian indikator umur harapan hidup sebesar 74,01 tahun. Dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk berusia lebih dari 25 tahun sebesar 10,36 tahun. Dari sisi harapan lama sekolah bagi anak usia 7 tahun sebesar 14,83 tahun. Dimensi ekonomi yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yaitu Rp. 11,03 juta.

Namun demikian, terdapat tantangan sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Kota Sungai Penuh, antara lain peningkatan angka harapan hidup masyarakat menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh sehingga kelompok lansia tidak hidup menderita dalam kemiskinan. Disamping itu kenaikan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah haruslah mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

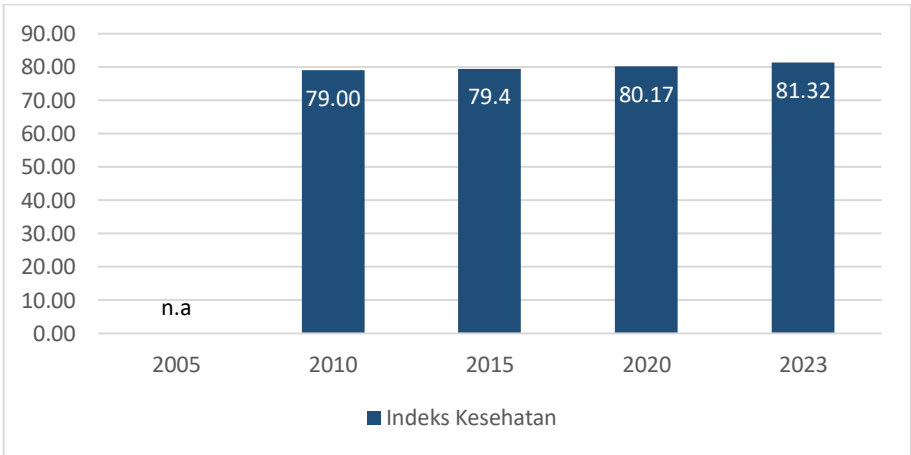


2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya  
2.2.2.1 Keluarga Sehat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari indeks kesehatan, indeks keluarga sehat, umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, balita gizi buruk, balita gizi kurang, angka kesakitan dan prevalensi stunting.

A. Indeks Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat

Peningkatan kualitas hidup merupakan tujuan utama pembangunan yang mencakup berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan dan keamanan. Kota Sungai Penuh dihadapkan pada permasalahan yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu kualitas pelayanan kesehatan, akses terhadap air bersih dan sanitasi.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.33  
Indeks Kesehatan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Indeks kesehatan Kota Sungai Penuh tahun 2010-2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 indeks kesehatan Kota Sungai Penuh 79,00 meningkat menjadi 81,32 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Indeks keluarga sehat Kota Sungai Penuh tahun 2022 dan dimensi pembentuknya dapat dilihat pada Tabel II.17 di bawah ini.

Tabel II.17  
Indeks Keluarga Sehat Kota Sungai Penuh Tahun 2022

NO	INDIKATOR	% CAKUPAN
1.	Keluarga mengikuti program KB	31,51%
2.	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	97,78%
3.	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	90,34%
4.	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	86,16%
5.	Pertumbuhan Balita dipantau	80,96%
6.	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	26,53%
7.	Penderita hipertensi yang berobat teratur	23,98%





NO	INDIKATOR	% CAKUPAN
8.	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	61,76%
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	36,26%
10.	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	59,73%
11.	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	96,57%
12.	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	92,28%
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,169

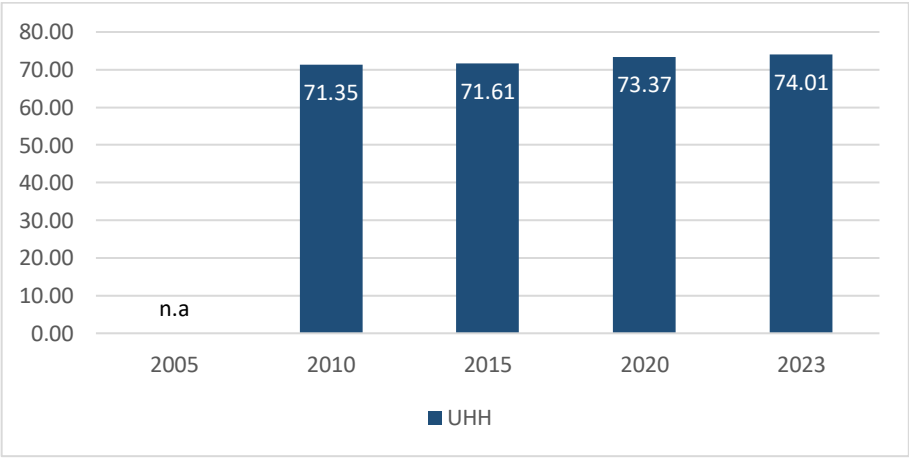
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebesar 0,169 dibawah angka Provinsi Jambi (0,204). Jika ditelusuri lebih dalam, dimensi pembentuk IKS Kota Sungai Penuh tahun 2022 tertinggi adalah indikator persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan yang mencapai 97,78% dan terendah indikator penderita hipertensi yang berobat teratur (23,98%).

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menggencarkan program-program kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses layanan kesehatan dasar. Peningkatan infrastruktur dan akses terhadap air bersih dan sanitasi, meningkatkan kesehatan lingkungan serta melaksanakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik.

B. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup penduduk Kota Sungai Penuh terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 71,35 tahun meningkat menjadi 74,01 tahun di tahun 2023.



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.34  
Umur Harapan Hidup Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

UHH penduduk Kota Sungai Penuh dipengaruhi beberapa faktor, kondisi lingkungan yang mendukung derajat kesehatan yaitu akses

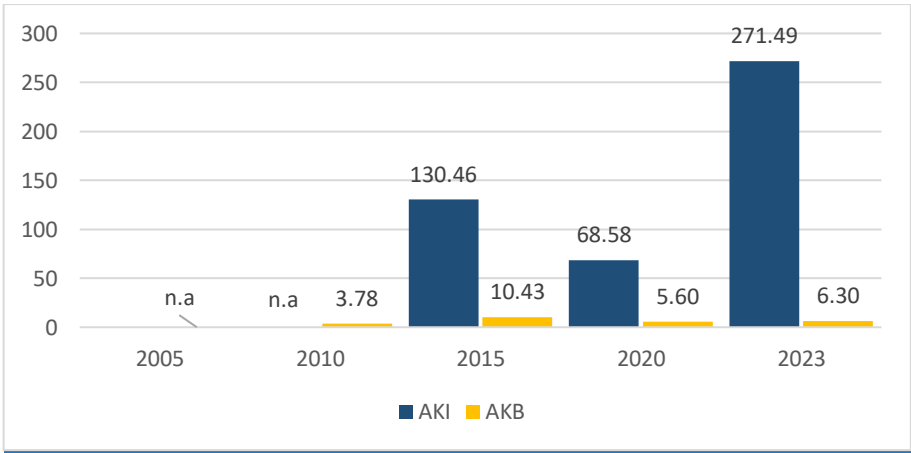


terhadap sanitasi layak, kepemilikan tempat buang air besar, akses terhadap air minum layak, perilaku hidup bersih dan sehat serta kualitas pelayanan kesehatan.

C. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Maternal (MMR) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun tertentu. Beberapa penyebab kematian maternal dapat dicegah dengan adanya penanganan profesional dalam pemeliharaan antenatal dan kelahiran serta peningkatan gizi ibu hamil.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Angka Kematian Ibu di Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 AKI mencapai 130,46 per 100.000 KH selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 271,49 per 100.000 KH. Perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan, mengencakan vaksinasi kepada ibu hamil, meningkatkan pelayanan pada ibu berisiko tinggi dan sangat tinggi. Selain itu meningkatkan pengetahuan petugas tentang deteksi risiko tinggi, meningkatkan sosialisasi tentang faktor risiko tinggi pada ibu hamil melahirkan dan nifas serta meningkatkan kerja sama lintas sektor.



Sumber: Dinas Kesehatan; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.35  
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Mosley dan Chen (dalam SDKI 2007) menerangkan bahwa terdapat berbagai faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kematian bayi antara lain yaitu: karakteristik ibu, seperti umur, paritas, ataupun selang kelahiran; pencemaran lingkungan; gizi; kecelakaan; dan penyakit.

Angka kematian bayi Kota Sungai Penuh tahun 2015 mencapai 10,43 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH), tahun 2020 menurun menjadi 5,6 per 1000 KH, namun mengalami kenaikan menjadi 6,30 per 1000 KH di tahun 2023. Upaya peningkatan pengetahuan petugas dalam mengenali

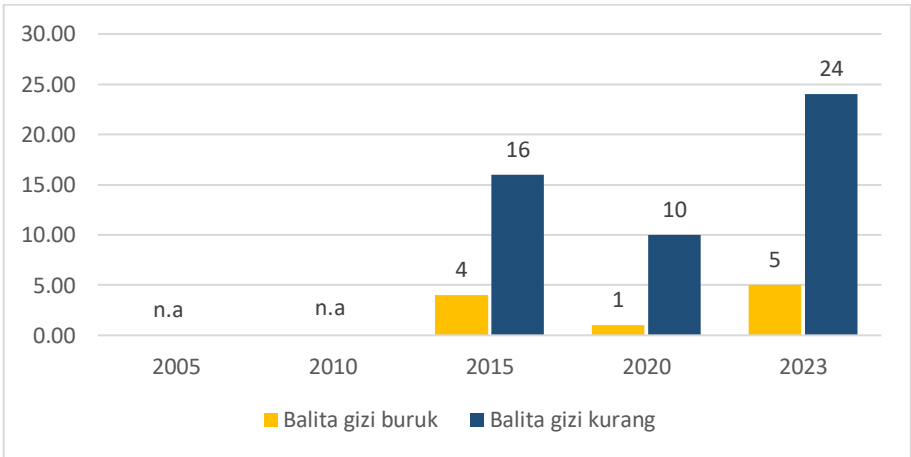


faktor resiko pada bayi baru lahir serta peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi perlu menjadi perhatian.

D. Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang

Tingkat kesehatan gizi terbaik adalah kesehatan gizi optimum (*eunutritional state*). Dalam kondisi ini jaringan jenuh oleh semua zat gizi tersebut, tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya kerja dan efisiensi yang sebaik-baiknya serta mempunyai daya tahan yang setinggi-tingginya.

Gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan (Permenkes 29/2019). Perkembangan gizi buruk di Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 balita gizi buruk sebanyak 4 balita, menurun menjadi 1 balita di tahun 2020 dan meningkat menjadi 5 balita di tahun 2023.



Sumber: Dinas Kesehatan; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.36  
Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Gizi kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada anak usia 6-59 bulan(Permenkes 29/2019). Perkembangan gizi kurang Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 juga menunjukkan angka yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 mencapai 16 balita, tahun 2020 turun menjadi 10 balita, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 24 balita.

Kasus gizi balita dapat teridentifikasi lebih dini melalui kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan secara rutin. Namun kondisi yang ditemui belum semua ibu yang mempunyai balita melakukan penimbangan balita secara rutin. Peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi menjadi hal penting. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan



pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Program yang dilakukan harus menyeluruh, mulai dari penurunan angka kematian bayi, peningkatan gizi, jaminan kesehatan ibu hamil serta pelatihan tenaga medis.

E. Angka Kesakitan

Morbiditas (angka kesakitan) menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Tabel II.18 dibawah ini menunjukkan tiga besar penyakit yang mendominasi di Kota Sungai Penuh tahun 2023 yaitu influenza (24,71%), gastritis (21,04%) dan hipertensi (14,00%). Berikut adalah 10 kejadian morbiditas yang terjadi di Kota Sungai Penuh.

Tabel II.18  
Sepuluh Penyakit Terbesar di Kota Sungai Penuh Tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	Influenza	3.637	24,71
2.	Gastritis	3.097	21,04
3.	Hipertensi	2.061	14,00
4.	ISPA	1.642	11,16
5.	Faringitis	1.064	7,23
6.	Dermatitis Kontak Alergik (DKA)	856	5,82
7.	Folimialgia Reumatik	769	5,23
8.	Gastroenteritis	627	4,26
9.	Tension Headache	537	3,65
10.	Arthritis Reumatoid	427	2,90
Total		14.717	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, 2024

Selain 10 penyakit terbesar yang ditemukan di Kota Sungai Penuh tahun 2022 seperti pada Tabel II.18 di atas, Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). *Treatment Coverage* (TC) adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibandingkan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, TC Kota Sungai Penuh tahun 2022 mencapai 37,28% urutan ke-4 (keempat) tertinggi kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Diperlukan peningkatan upaya memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat, dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ini juga diikuti dengan memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan dukungan program infrastruktur yang berbasis masyarakat.

F. Prevalensi Stunting

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Badan Kebijakan pembangunan Kesehatan (BKPK) kemenkes tahun 2023, prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) balita di Kota Sungai



Penuh tahun 2023 mencapai 4,10%, menurun dibandingkan tahun 2022 (26,00%). Capaian ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jambi (13,50%) dan nasional (21,50%).

*Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa, anak *stunted* bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya dan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah serta produktivitas dan kreativitas di usia produktif.

Secara spesifik intervensi *stunting* dilakukan melalui skrining anemia, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani bagi daduta, tatalaksana balita, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi ibu hamil dan keluarga serta tidak bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

#### 2.2.2.2 Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (pasal 1).

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga:

- Dimensi ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga;
- Dimensi kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain; dan
- Dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40.
- iBangga cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70.
- iBangga baik (tangguh) nilainya di atas 70.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), indeks pembangunan keluarga Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 mencapai 55,72 (kategori berkembang) dibawah capaian Provinsi Jambi (56,67). Pembangunan manusia yang berkelanjutan memerlukan pendekatan berbasis keluarga, kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Semua aspek ini saling terkait

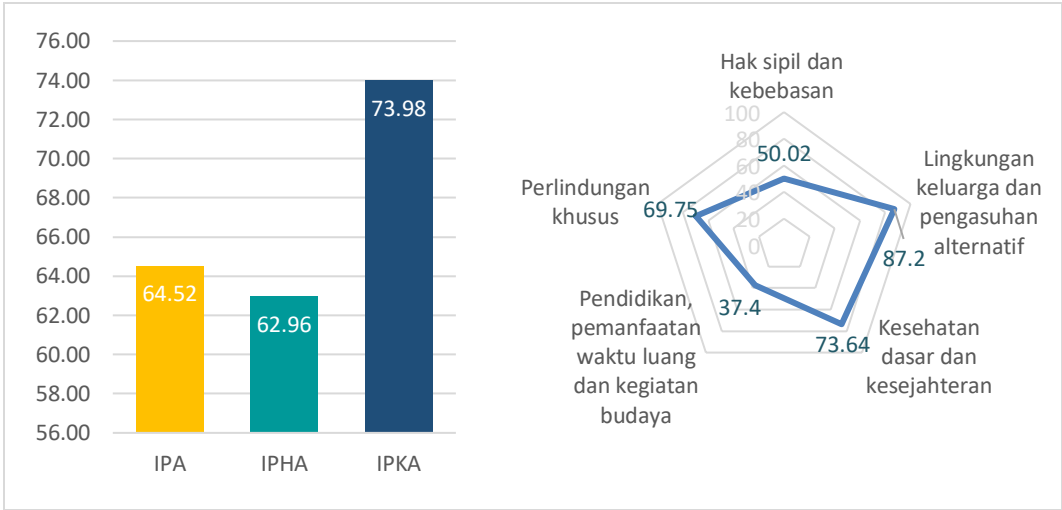




dan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan..

2.2.2.3 Kualitas Anak

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini, hal tersebut penting agar kualitas SDM semakin meningkat. Perwujudan SDM yang berkualitas tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Sumber: Kementerian PPPA; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.37**  
**Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

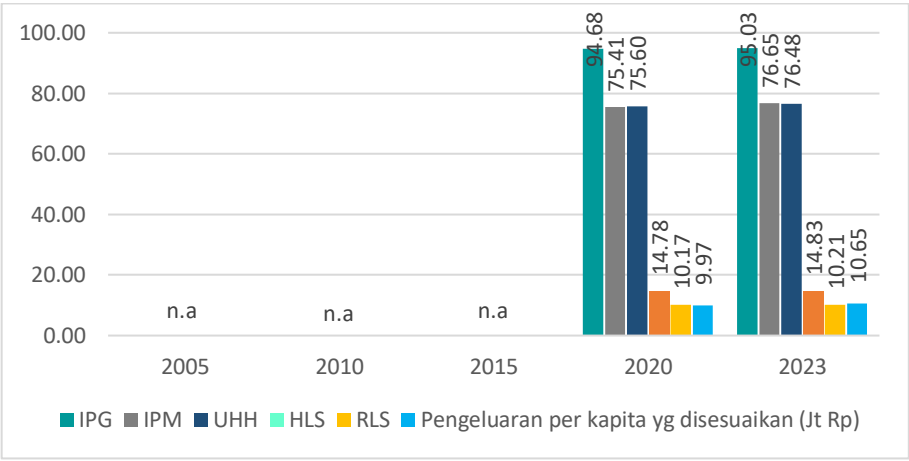
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Sungai Penuh tahun 2022 mencapai 64,52 (Gambar II.37). Dari 5 klaster pembentuknya, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak memiliki nilai yang paling rendah yaitu 37,40. Sedangkan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki nilai yang tertinggi yaitu 87,20.

IPA juga menjadi indikator yang mampu menggambarkan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang selanjutnya diukur dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA dan IPKA Kota Sungai Penuh di tahun 2022 mencapai 62,96 dan 73,98. Meskipun ada beberapa area yang menunjukkan hasil positif, seperti lingkungan keluarga dan kesehatan dasar, terdapat urgensi untuk memperkuat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak sipil dan kebebasan, di mana kerjasama antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan kondisi yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.4 Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan

evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender. Indikator tersebut yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

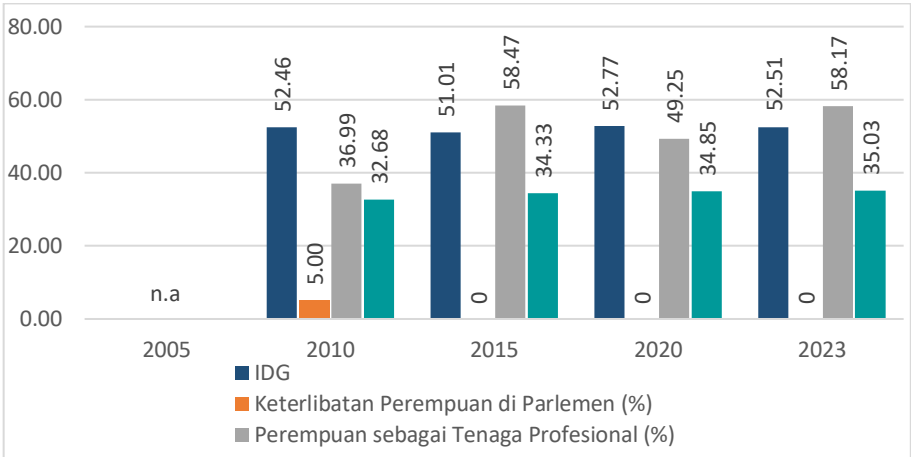


Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.38**  
**Indeks Pembangunan Gender Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan turunan dari IPM, melalui angka IPG kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100), maka semakin rendah *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG Kota Sungai Penuh tahun 2023 mencapai 95,03 meningkat dari tahun 2020 (94,68). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender semakin diperhatikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, capaian IPG menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan, terutama IPM dan pengeluaran per kapita. Namun, peningkatan yang kecil HLS dan RLS menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi (Gambar II.38). Memperkuat pendidikan dan pelayanan kesehatan akan sangat penting untuk melanjutkan tren positif dan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.39  
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Angka IDG Kota Sungai Penuh menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dari 2010 hingga 2023 (Gambar II.39), dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 (52,51) dibandingkan tahun 2020 (52,77). Capaian ini mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap pemberdayaan gender secara keseluruhan.

Persentase perempuan dalam tenaga profesional meningkat dari 36,99% pada tahun 2010 menjadi 58,17% pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan sedikit di tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang lebih profesional. Sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan peningkatan yang stabil dari 32,68% pada tahun 2010 menjadi 35,03% pada tahun 2023. Meskipun kenaikannya tidak drastis, yang menunjukkan bahwa perempuan mulai berkontribusi lebih besar dalam aspek ekonomi.

Meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan, masih terdapat tantangan yang dihadapi, terutama dalam keterlibatan perempuan di parlemen. Data ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan representasi perempuan di semua bidang, terutama dalam politik. Peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap perempuan di tempat kerja dan dalam politik dapat membantu mencapai kesetaraan yang lebih baik di masa depan.

Tabel II.19  
Indeks Ketimpangan Gender Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

	2005	2010	2015	2020	2023
IKG	n.a	n.a	n.a	0,794	0,758
Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 th melahirkan anak lahir hidup terakhir kurang	n.a	n.a	n.a	0,089	0,034



	2005	2010	2015	2020	2023
dari 2 tahun tidak di fasilitas kesehatan (MTF)					
Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 th saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 th (MHPK20)	n.a	n.a	n.a	0,239	0,207
Persentase anggota legislatif perempuan	n.a	n.a	n.a	0,00	0,00
Persentase penduduk perempuan umur 25 th ke atas dengan pendidikan minimal SMA/ sederajat	n.a	n.a	n.a	53,31	52,15
TPAK perempuan	n.a	n.a	n.a	50,93	53,69

Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah matrik gabungan ketidaksetaraan gender yang menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) kesehatan reproduksi; (2) pemberdayaan; dan (3) pasar tenaga kerja. Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2020 IKG Kota Sungai Penuh 0,794 menurun menjadi 0,758 di tahun 2023 (Tabel II.19). Tingginya angka IKG Kota Sungai Penuh terutama disebabkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen (DPRD).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan pada beberapa dimensi, seperti akses kesehatan dan partisipasi angkatan kerja. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, terutama dalam representasi politik dan pendidikan. Masih kurangnya representasi perempuan dalam politik (persentase anggota legislatif perempuan 0%), dan persentase penduduk perempuan umur 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA sedikit menurun dari 53,31% pada tahun 2020 menjadi 52,15% di tahun 2023.

2.2.2.5 Pembangunan Pemuda

Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, pemuda terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebesar 31.027 jiwa atau 30,65% dari jumlah penduduk 101.216 jiwa. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, maupun atas inisiasi masyarakat dari berbagai organisasi kepemudaan.

Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas para generasi muda yang merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan salah satu aktor dalam pembangunan. Namun demikian, keberadaan pemuda tidak dapat dipungkiri bagaikan dua sisi mata uang, yaitu dapat menjadi potensi namun juga dapat menjadi tantangan bagi pembangunan. Apabila dapat dikelola dengan baik, maka



potensi tersebut dapat menjadi salah satu modal dasar pembangunan sekaligus dapat meleburkan tantangan tersebut. Perubahan cara pandang terhadap pemuda harus segera ditanamkan kepada seluruh pihak di Kota Sungai Penuh, bahwa kunci keberhasilan pembangunan pemuda yang paling dasar adalah tingginya kepedulian terhadap masa depan pemuda agar memiliki pengetahuan yang inovatif serta kreativitas yang tinggi.

#### **2.2.2.6 Pembangunan Kebudayaan**

Keberagaman budaya merupakan modal dasar yang kuat dalam pembangunan, sebab kebudayaan merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Berdasarkan beberapa penelitian, pembangunan kebudayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Semakin tinggi pembangunan kebudayaan suatu daerah maka semakin tinggi pula IPM daerah tersebut. Dengan demikian, semakin baik tingkat kebudayaan suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Kota Sungai Penuh yang merupakan bagian dari alam Kerinci menggambarkan kesaktian atau keajaiban, potensi ini merupakan sebuah anugerah yang tiada ternilai yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Kota yang berada di “Puncak Andalas” merupakan daerah yang memiliki satu kesatuan kultur dan satu kesatuan hukum adat. Potensi dan keragaman wisata alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Kota Sungai Penuh telah mendapat pengakuan dari organisasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Dengan dikukuhkannya Kota Sungai Penuh sebagai anggota JKPI ke 41 pada Rakernas III JKPI tanggal 20 Juni 2013 di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Sungai Penuh termasuk yang bercorak heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku Kerinci yang merupakan suku bangsa asli Kota Sungai Penuh. Kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh tak pernah lepas dari pengaruh budaya Kerinci. Secara turun temurun, nilai kehidupan tradisional khas Kerinci itu telah mewarnai pola kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Nilai kehidupan tradisional khas Kota Sungai Penuh ini kemudian berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan suku bangsa lain yang semakin membuat kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh semakin berwarna dan khas sekaligus menjadikan kota ini sebagai kota multikultural dan multi suku bangsa. Ini pula yang kemudian semakin memperkaya khasanah budaya Kota Sungai Penuh. Kekayaan khasanah budaya Kota Sungai Penuh yang lain tercermin pula dari keberadaan benda cagar budaya berupa gedung bersejarah yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, Kota Sungai Penuh dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak kesenian daerah khas seperti tari rangguk, tari rantak kudo, dll. Ini pula yang menambah warna-warni khasanah budaya Kota Sungai Penuh.

Untuk meningkatkan upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan Kota Sungai Penuh, dimensi ekonomi budaya yaitu aktivitas ekonomi yang



tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, dan dimensi ekspresi budaya yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat perlu menjadi perhatian.

### 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berfokus pada potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah, agar mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun global untuk mencapai kesejahteraan. Aspek daya saing daerah mencakup kemampuan ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur dan iklim investasi.

#### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

##### 2.3.1.1 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

###### A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meminimalkan ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi berjalan efektif dan efisien manakala berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan indikator pembangunan ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam perencanaan pembangunan guna mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini. PDRB menurut harga berlaku juga digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel II.20 di bawah ini.



Tabel II.20  
PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Sektor PDRB	PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n.a	169,38	328,83	379,55	428,30
2.	Pertambangan dan Penggalian	n.a	23,84	46,66	58,60	71,00
3.	Industri Pengolahan	n.a	18,58	33,22	46,41	56,20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	n.a	0,58	1,12	1,96	2,50
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	n.a	11,89	16,75	23,11	23,90
6.	Konstruksi	n.a	323,23	599,12	810,64	1018,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n.a	609,75	1340,59	2216,32	2948,30
8.	Transportasi dan Pergudangan	n.a	102,02	157,7	216,1	354,80
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	n.a	28,45	60,29	81,4	104,90
10.	Informasi dan Komunikasi	n.a	367,27	668,78	1118,57	1302,50
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	n.a	110,2	245,11	374,93	481,70
12.	Real Estate	n.a	89,69	146,13	215,92	252,60
13.	Jasa Perusahaan	n.a	181,24	282,4	428,16	586,30
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	n.a	152,51	364,43	501,51	520,90
15.	Jasa Pendidikan	n.a	271,21	467,69	749,85	886,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	n.a	64	117,22	183,9	229,70
17.	Jasa lainnya	n.a	69,09	108,64	155,31	206,80
PDRB		n.a	2.592,93	4.984,68	7.562,25	9.475,10

Sumber: BPS, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa PDRB (ADHB) Kota Sungai Penuh meningkat dari Rp. 2.592,93 miliar tahun 2010 menjadi Rp. 9.475,10 miliar di tahun 2023. Sedangkan struktur lapangan usaha di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2023 tidak bergeser dari sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (31,12%); informasi dan komunikasi (13,75%) serta konstruksi (10,75%), yang terlihat dominansi perannya terhadap pembentukan PDRB Kota Sungai Penuh (Tabel II.21).

Tabel II.21  
Distribusi PDRB (ADHB) Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Sektor PDRB	Distribusi PDRB (ADHB)				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n.a	6,53	6,6	5,02	4,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	n.a	0,92	0,94	0,77	0,75
3.	Industri Pengolahan	n.a	0,72	0,67	0,61	0,59



No	Sektor PDRB	Distribusi PDRB (ADHB)				
		2005	2010	2015	2020	2023
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	n.a	0,02	0,02	0,03	0,03
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	n.a	0,46	0,34	0,31	0,25
6.	Konstruksi	n.a	12,47	12,02	10,72	10,75
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n.a	23,52	26,89	29,31	31,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	n.a	3,93	3,16	2,86	3,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	n.a	1,1	1,21	1,08	1,11
10.	Informasi dan Komunikasi	n.a	14,16	13,42	14,79	13,75
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	n.a	4,25	4,92	4,96	5,08
12.	Real Estate	n.a	3,46	2,93	2,86	2,67
13.	Jasa Perusahaan	n.a	6,99	5,67	5,66	6,19
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	n.a	5,88	7,31	6,63	5,5
15.	Jasa Pendidikan	n.a	10,46	9,38	9,92	9,35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	n.a	2,47	2,35	2,43	2,42
17.	Jasa lainnya	n.a	2,66	2,18	2,05	2,18
PDRB		n.a	100	100	100	100

Sumber: BPS, 2024

Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari Rp. 2.592,93 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp. 5.225,30 miliar di tahun 2023. Sektor yang paling besar menunjang PDRB Kota Sungai Penuh tahun 2023 adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencapai Rp. 1,36 triliun. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas hanya menyumbang Rp. 1,4 miliar (terkecil). Perkembangan PDRB dasar harga konstan (ADHK 2010) menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.22 di bawah ini.

Tabel II.22  
PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK) Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Sektor PDRB	PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n.a	169,38	218,71	242,93	246,60
2.	Pertambangan dan Penggalan	n.a	23,84	31,58	36,57	41,20
3.	Industri Pengolahan	n.a	18,58	26,17	31,34	34,40
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	n.a	0,58	0,97	1,14	1,40
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	n.a	11,89	13,41	16,08	15,30
6.	Konstruksi	n.a	323,23	496,63	577,86	663,60



No	Sektor PDRB	PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2005	2010	2015	2020	2023
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n.a	609,75	949,87	1.189,95	1.363,70
8.	Transportasi dan Pergudangan	n.a	102,02	136,72	169,12	229,90
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	n.a	28,45	42,80	50,2	62,50
10.	Informasi dan Komunikasi	n.a	367,27	538,31	732,59	833,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	n.a	110,20	185,77	246,54	273,60
12.	Real Estate	n.a	89,69	104,06	123,96	130,80
13.	Jasa Perusahaan	n.a	181,24	212,93	269,73	329,70
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	n.a	152,51	218,94	248	252,40
15.	Jasa Pendidikan	n.a	271,21	342,39	431,84	474,30
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	n.a	64,00	97,39	125,17	147,40
17.	Jasa lainnya	n.a	69,09	88,71	107,22	125,40
PDRB		n.a	2.592,93	3.705,36	4.600,23	5.225,30

Sumber: BPS, 2024

Sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 yaitu sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 11,92%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh mengalami perlambatan, dari 1,98% dan 6,57% di tahun 2020 menjadi minus 0,5% dan minus 8,31% di tahun 2023 (Tabel II.23).

Tabel II.23  
Pertumbuhan Sektor PDRB (ADHK) Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Sektor PDRB				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	n.a	n.a	1.39	1.98	-0.50
2.	Pertambangan dan Penggalian	n.a	n.a	5.78	-0.32	2.01
3.	Industri Pengolahan	n.a	n.a	4.97	0.01	5.98
4.	Pengadaan Listrik & Gas	n.a	n.a	9.27	10.89	7.24
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	n.a	n.a	3.24	6.57	-8.31
6.	Konstruksi	n.a	n.a	3.59	-1.04	4.42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	n.a	n.a	10.66	-3.70	6.69
8.	Transportasi dan Pergudangan	n.a	n.a	6.31	-5.38	11.92
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	n.a	n.a	9.26	-5.16	7.49
10.	Informasi dan Komunikasi	n.a	n.a	9.56	5.85	4.85



No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan Sektor PDRB				
		2005	2010	2015	2020	2023
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	n.a	n.a	1.04	8.72	1.01
12.	Real Estate	n.a	n.a	2.67	-1.40	2.32
13.	Jasa Perusahaan	n.a	n.a	3.78	-3.81	9.61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	n.a	n.a	7.43	-1.55	0.96
15.	Jasa Pendidikan	n.a	n.a	9.30	0.56	3.41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	n.a	n.a	9.49	6.00	3.76
17.	Jasa lainnya	n.a	n.a	6.55	-2.36	4.68
PDRB		n.a	6,46	7.06	-0.16	4.92

Sumber: BPS, 2024

Dalam lingkup ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan sektor ekonomi di daerah tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai basis ekonomi ketika sektor itu mampu memenuhi kebutuhan internal daerah kemudian mengekspor sektor tersebut ke luar daerah penghasil. Sebaliknya ada sektor non basis yaitu sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam suatu daerah. Kontribusi sektor basis terhadap perekonomian suatu daerah membuat sektor basis ini sering disebut sebagai sektor unggulan.

Analisis *Location Quotient* merupakan teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di setiap daerah (kota) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ yang disajikan pada Tabel II.24 menunjukkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) sektor merupakan sektor basis ( $LQ > 1$ ), yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Tabel II.24  
*Location Quotient* Kota Sungai Penuh Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata	Sektor Basis/Sektor Non Basis
		2019	2020	2021	2022	2023		
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20	0,20	0,19	0,19	0,17	0,19	Sektor Non Basis
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Sektor Non Basis
C.	Industri Pengolahan	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	Sektor Non Basis





No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata	Sektor Basis/Sektor Non Basis
		2019	2020	2021	2022	2023		
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	0,45	0,44	0,43	0,42	0,43	Sektor Non Basis
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,46	2,56	2,50	2,51	2,25	2,46	Sektor Basis
F.	Konstruksi	1,71	1,67	1,65	1,73	1,67	1,69	Sektor Basis
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,72	2,70	2,61	2,62	2,56	2,64	Sektor Basis
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,30	1,33	1,29	1,33	1,28	Sektor Basis
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01	1,02	1,03	1,02	1,01	1,02	Sektor Basis
J.	Informasi dan Komunikasi	3,98	3,87	3,89	3,80	3,69	3,85	Sektor Basis
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,28	2,29	2,41	2,40	2,33	Sektor Basis
L.	Real Estate	1,84	1,81	1,76	1,75	1,72	1,77	Sektor Basis
M,N.	Jasa Perusahaan	5,80	5,88	5,89	5,51	5,15	5,64	Sektor Basis
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,58	1,66	1,64	1,66	1,62	1,63	Sektor Basis
P.	Jasa Pendidikan	2,80	2,70	2,74	2,80	2,82	2,77	Sektor Basis
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,11	2,01	2,14	2,12	2,10	Sektor Basis
R,S,T,U.	Jasa lainnya	2,30	2,28	2,37	2,37	2,28	2,32	Sektor Basis

Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Sedangkan, sisanya 4 (empat) sektor memiliki nilai  $LQ < 1$  adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ( $LQ = 0,19$ ), sektor pertambangan dan penggalian ( $LQ = 0,03$ ), sektor Industri pengolahan ( $LQ = 0,07$ ), dan sektor pengadaan listrik dan gas ( $LQ = 0,43$ ). Artinya sektor ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan masih belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan angkatan kerja. Berbagai sektor perekonomian perlu dikembangkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (sektor pertanian, serta industri pengolahan, IKM, UMKM dan sektor ekonomi kreatif).



2.3.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI) serta komponen ekspor barang dan jasa.

Seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi akibat pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Sungai Penuh juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada tahun 2023, perekonomian Kota Sungai Penuh tumbuh 4,92%. Hal ini mencerminkan sudah mulai membaiknya perekonomian Kota Sungai penuh pasca pandemi *Covid-19* yang sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun dari sisi permintaan akhir (*demand side*). Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

PDRB menurut pengeluaran (ADHB) Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 disajikan pada Tabel II.25 berikut ini.

Tabel II.25  
PDRB Menurut Pengeluaran (ADHB) Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Komponen Pengeluaran PDRB	PDRB (ADHB) Menurut Pengeluaran (Miliar Rp)				
	2005	2010	2015	2020	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	n.a	1.461,09	2.415,33	3.358,07	4.208,20
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	n.a	16,30	28,17	46,40	64,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	n.a	228,29	417,60	518,71	614,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	n.a	880,44	1.571,59	1.891,33	2.467,90
Perubahan Inventori	n.a	(28,90)	126,03	110,28	185,20
Ekspor Barang dan Jasa	n.a	2.632,02	4.498,34	5.725,65	6.587,10
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	n.a	2.596,32	4.072,37	4.088,17	4.651,90
PDRB	n.a	2.592,93	4.984,68	7.562,25	9.475,10

Sumber: BPS, 2024



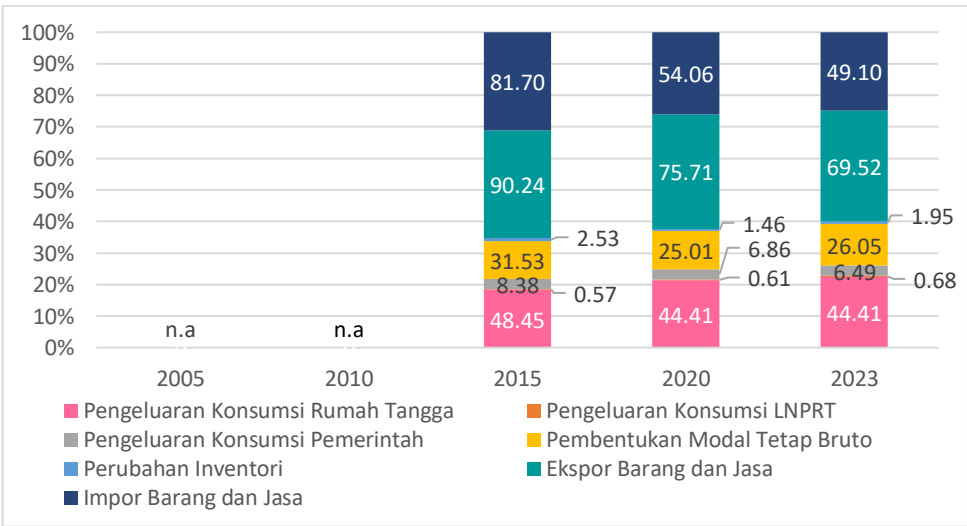
PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel II.26 berikut ini.

**Tabel II.26**  
**PDRB Menurut Pengeluaran (ADHK) Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Komponen Pengeluaran PDRB	PDRB (ADHK) Menurut Pengeluaran (Miliar Rp)				
	2005	2010	2015	2020	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	n.a	1.461,09	1.825,07	2.160,65	2.463,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	n.a	16,30	22,54	31,98	40,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	n.a	228,29	287,28	319,00	340,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	n.a	880,44	1.246,72	1.315,08	1.532,10
Perubahan Inventori	n.a	(28,90)	93,33	80,63	122,30
Ekspor Barang dan Jasa	n.a	2.632,02	3.630,44	4.135,71	4.415,60
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	n.a	2.596,32	3.400,01	3.442,82	3.689,00
<b>PDRB</b>	<b>n.a</b>	<b>2.592,93</b>	<b>3.705,36</b>	<b>4.600,23</b>	<b>5.225,30</b>

Sumber: BPS, 2024

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang meliputi komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.



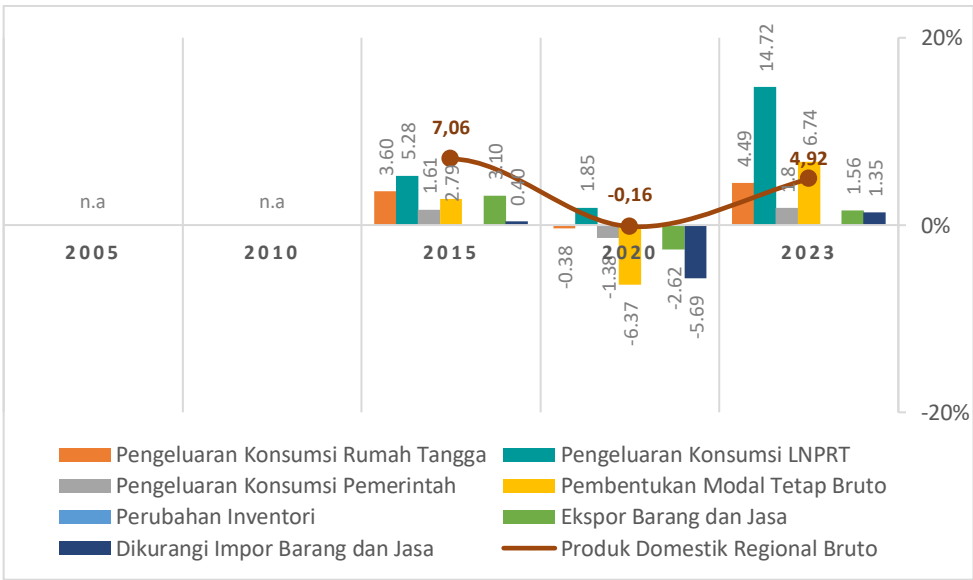
Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.40**  
**Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (ADHB) Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**



Terlihat bahwa pada tahun 2023 (Gambar II.40) PDRB Kota Sungai Penuh sebagian besar digunakan untuk memenuhi Kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) yang mencapai 44,41%. Pengeluaran untuk aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni 26,05%. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 69,52%, namun komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 49,10%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah. Kontribusi Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) 6,49%, menurun jika dibandingkan tahun 2020 (6,86%) dan 2015 (8,38%), yang menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015, 2010 dan 2023 perdagangan antar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor menunjukkan ekspor lebih tinggi dari impor (dalam kondisi “surplus” atau menguntungkan).

Terlihat pada Gambar II.41 dibawah ini, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2023 pasca pandemi Covid-19. Terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (peningkatan komponen pengeluaran), pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,92%. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga tumbuh signifikan 14,72%, diikuti pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga 6,74% dan 4,49%.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.41**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

2.3.1.3 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per



kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan per kapita menunjukan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.

Meskipun nilai PDRB per kapita tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang merata, namun nilai ini dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum di suatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB per kapita Kota Sungai Penuh tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel II.27 berikut ini.

**Tabel II.27**  
**PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

PDRB	2005	2010	2015	2020	2023
PDRB Per kapita (Jt.Rp)					
ADHB	n.a	31,40	57,21	78,53	94,97
ADHK (2010)	n.a	31,40	42,53	47,77	52,37
PDRB ADHB (Miliar)	n.a	2.593	4.985	7.562	9.475
PDRB ADHK (Miliar)	n.a	2.593	3.705	4.600	5.225
LPE (%)	n.a	6,46	7,06	-0,16	4,92
<b>Inflasi(%)</b>				3,09	3,27

Sumber : BPS, 2024

Perkembangan PDRB per kapita dari tahun ke tahun menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Bila tingkat pendapatan per kapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada Tahun 2020 PDRB per kapita Kota Sungai Penuh (ADHB) mencapai 78,53 juta rupiah dengan inflasi 3,09%, selanjutnya meningkat di tahun 2023 menjadi 94,97 juta rupiah, namun diiringi dengan inflasi 3,27%. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan yang positif PDRB per kapita, meskipun ada tantangan seperti dampak pandemi. Inflasi yang relatif stabil mendukung kestabilan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.

**2.3.1.4 Daya Saing Digital**

Ekonomi digital di Indonesia dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada.

Digitalisasi ekonomi yang telah terakselerasi oleh pandemi Covid-19 dalam perjalanannya cenderung mengalami perlambatan



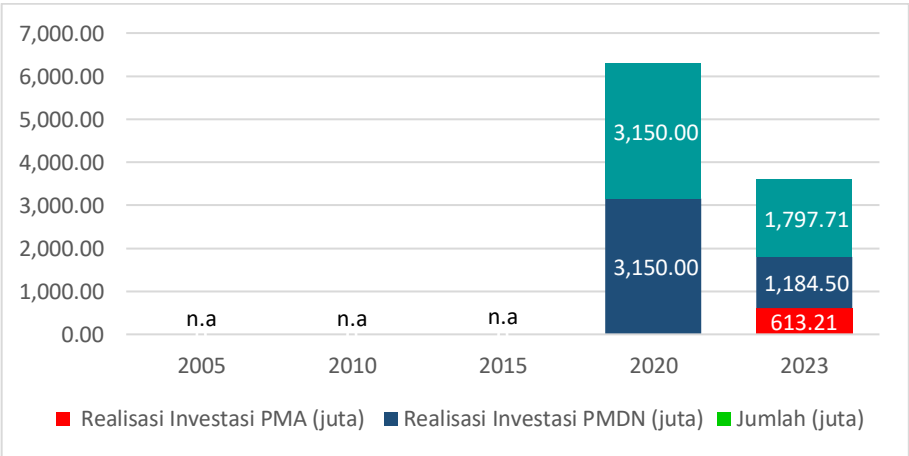


pertumbuhan, diindikasikan oleh penurunan pertumbuhan sektor lapangan usaha informatika dan komunikasi dari 5,85% pada tahun 2020 menjadi 4,85% di tahun 2023, yang diikuti dengan penurunan distribusi dari 14,79% di tahun 2020 menjadi 13,75% di tahun 2023. Di sektor UMKM, digitalisasi masih belum optimal disebabkan oleh infrastruktur digital yang belum merata dan literasi digital yang belum sepenuhnya berkembang di kalangan pelaku UMKM.

Kota Sungai Penuh dengan kondisi demografis tahun 2023 yang didominasi oleh generasi produktif 68,80% (69,63 ribu jiwa), menjadikan masyarakatnya semakin akrab dengan teknologi, digitalisasi menemukan lahan suburnya untuk terus tumbuh. Penguatan ekosistem digital untuk meningkatkan perekonomian digital perlu dilakukan secara berkesinambungan. Elemen dasar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu ekosistem perlu untuk terus diperkuat, yaitu penguatan infrastruktur digital yang diiringi dengan penguatan aplikasi pendukung, peningkatan *skills* dan kapabilitas sumber SDM dalam pemanfaatan teknologi digital dan riset, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang pro dan ramah terhadap proses transformasi digital.

2.3.1.5 Investasi

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Dengan investasi akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sumber: Dinas PMPTSP; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.42  
Nilai Realisasi Investasi di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global yang berpengaruh besar terhadap komponen investasi, potensi perlambatan ekonomi, inflasi tinggi dan kebijakan pengetatan moneter, realisasi investasi di Kota Sungai penuh tahun 2020 sebesar 3,15 miliar, namun



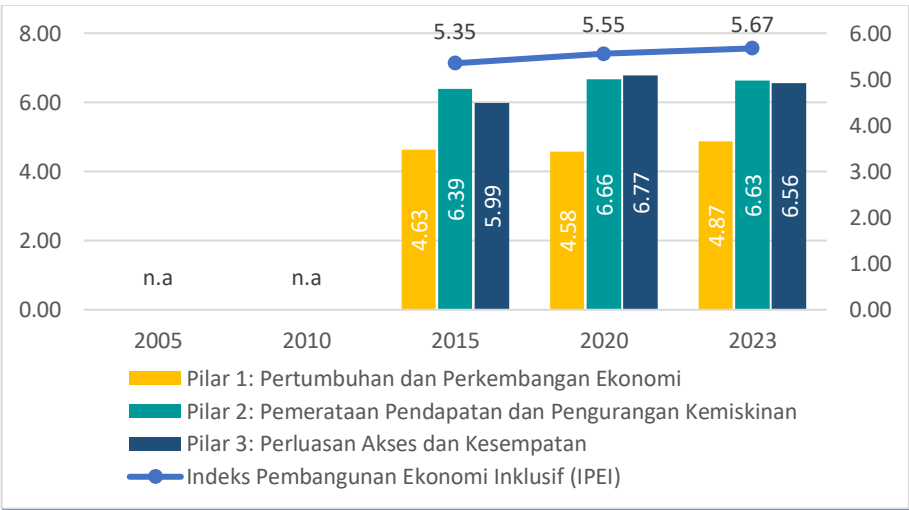
tahun 2023 menurun menjadi 1,80 miliar (Gambar II.42). Sementara itu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Sungai Penuh tahun 2023 masih tumbuh positif 6,74%.

Untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif bagi penanaman modal serta dalam rangka terwujudnya percepatan dan peningkatan realisasi investasi, perlu dilakukan upaya yang intensif dalam mengendalikan pelaksanaan penanaman modal. Pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, promosi investasi serta optimalisasi peta investasi yang sinergi dengan rencana tata ruang wilayah.

2.3.1.6 Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan baik pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 sub pilar serta 21 indikator. Skala nilai IPEI dari 1-10. Skala 1-3: kurang memuaskan, skala 4-7: memuaskan dan skala 8-10: sangat memuaskan.



Sumber: Bappenas; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.43  
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Sungai Penuh menunjukkan tren positif dari tahun 2015 hingga 2023, meningkat dari 5,35 menjadi 5,67. Pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi: Meningkat dari 4,63 di tahun 2015 menjadi 4,87 tahun 2023. Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan: Menunjukkan perbaikan, dari 6,39 tahun 2015 menjadi 6,63 tahun 2023, sedikit menurun di tahun 2023. Pilar akses dan kesempatan: mengalami

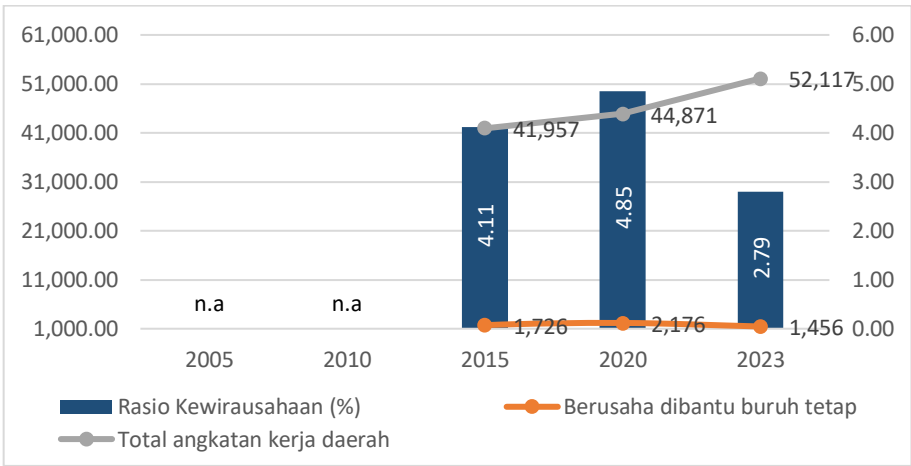


peningkatan yang signifikan dari 5,99 tahun pada 2015 menjadi 6,56 di tahun 2023, sedikit menurun dari tahun 2020 (6,77). Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan ekonomi inklusif, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam pemerataan pendapatan.

Dalam pengembangan ekonomi Kota Sungai Penuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) kapasitas, mencakup kapasitas SDM, sumber daya modal, akses dan resiliensi terhadap perubahan yang cepat; (2) daya saing daerah, meliputi promosi daerah dan keterkaitan antar daerah; dan (3) iklim usaha dan investasi serta kualitas komoditas.

2.3.1.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.44  
Rasio Kewirausahaan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Rasio kewirausahaan Kota Sungai Penuh Tahun 2023 mencapai 2,79%, menurun dari tahun 2020 (4,85%) dan tahun 2015 (4,11%). Kondisi ini menunjukkan menurunnya penyerapan tenaga kerja tetap dan kapasitas wirausaha (Gambar II.44).

Peningkatan angkatan kerja di daerah tidak diikuti dengan penciptaan peluang usaha yang memadai. Meskipun jumlah angkatan



kerja meningkat dari 41.957 tahun 2015 menjadi 52.117 tahun 2023, rasio kewirausahaan justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan untuk menciptakan usaha, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada upaya strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan investasi.

2.3.1.8 Produktivitas Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian berdasarkan kontribusi nilai dan serapan tenaga kerja. Produktivitas total diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja di tiga lapangan usaha utama dan PDRB yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut, yaitu pertanian manufaktur, dan jasa. Sektor pertanian mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufaktur meliputi pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, serta konstruksi. Sedangkan sektor jasa mencakup perdagangan, reparasi kendaraan, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi, keuangan, *real estate*, dan jasa lainnya.

Tabel II.28  
Produktivitas Total Daerah Kota Sungai Penuh  
Tahun 2021-2022

Nilai PDRB ADHK			
Lapangan Usaha	Satuan	2021	2022
<i>agriculture</i>	Juta Rp	242.930,00	238.840,00
<i>Manufacture</i>	Juta Rp	701.720,00	726.780,00
<i>Service</i>	Juta Rp	3.828.280,00	4.006.240,00
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja			
Lapangan Usaha	Satuan	2021	2022
<i>agriculture</i>	Jiwa	9.233	9.662
<i>Manufacture</i>	Jiwa	5.764	6.049
<i>Service</i>	Jiwa	28.052	26.514
Total Produktivitas			
Lapangan Usaha	Satuan	2021	2022
<i>agriculture</i>	Juta Rp/Jiwa	26,31	24,72
<i>Manufacture</i>	Juta Rp/Jiwa	121,74	120,15
<i>Service</i>	Juta Rp/Jiwa	136,47	151,10

Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Sektor jasa merupakan lapangan usaha paling produktif dengan produktivitas mencapai 151,10 juta rupiah per jiwa tahun 2022, meningkat dari tahun 2021 (136,47 juta rupiah per jiwa) dan menyerap tenaga kerja tertinggi, diikuti oleh sektor manufaktur dan pertanian. Pencapaian ini menunjukkan peran penting sektor jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

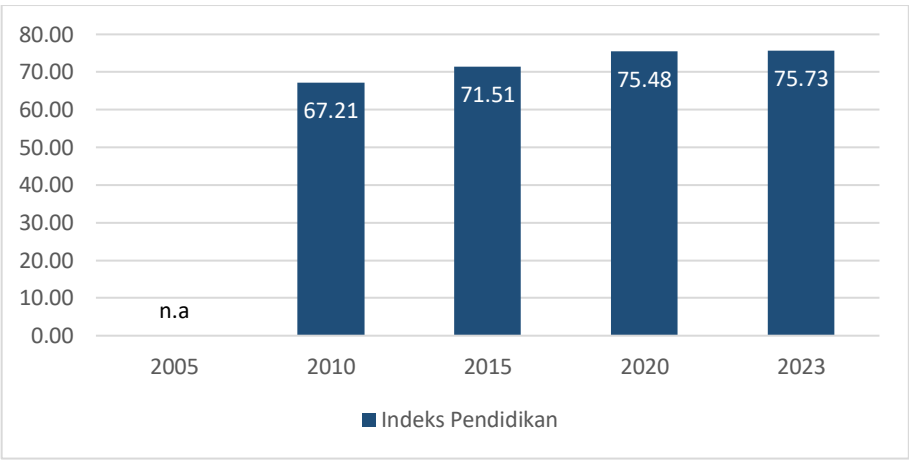
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah/bangsa di masa yang akan datang. Di era



persaingan bebas saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM yang unggul agar daerahnya tidak tertinggal dengan daerah lain. Salah satu ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu daerah yaitu angka Indeks Pendidikan. Menurut BPS, Indeks Pendidikan merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.45**  
**Indeks Pendidikan Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

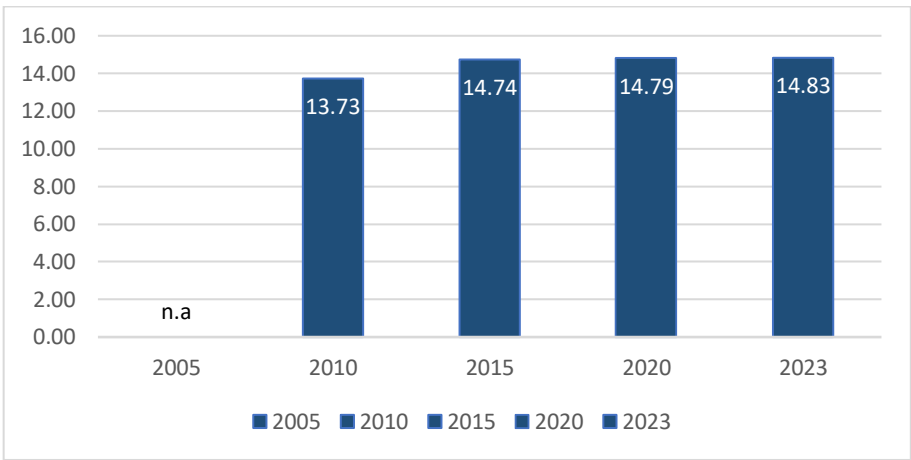
Setiap tahun, indeks pendidikan di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan dalam memajukan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi seluruh masyarakat (Gambar II.45).

Kota Sungai Penuh menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama terkait dengan kualitas tenaga pendidik dan akses terhadap teknologi. Fokus peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan dan program pengembangan profesional sangat penting, begitu pula integrasi teknologi pendidikan dengan penyediaan perangkat dan akses internet di sekolah. Selain itu, pelatihan pemanfaatan teknologi untuk guru perlu diperkuat guna memaksimalkan potensi pembelajaran digital.

**A. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebesar 14,83 tahun, meningkat dari tahun tahun 2020(14,83 tahun). Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun pada jenjang pendidikan formal tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,83 tahun atau hampir setara dengan Diploma III (Gambar II.46).





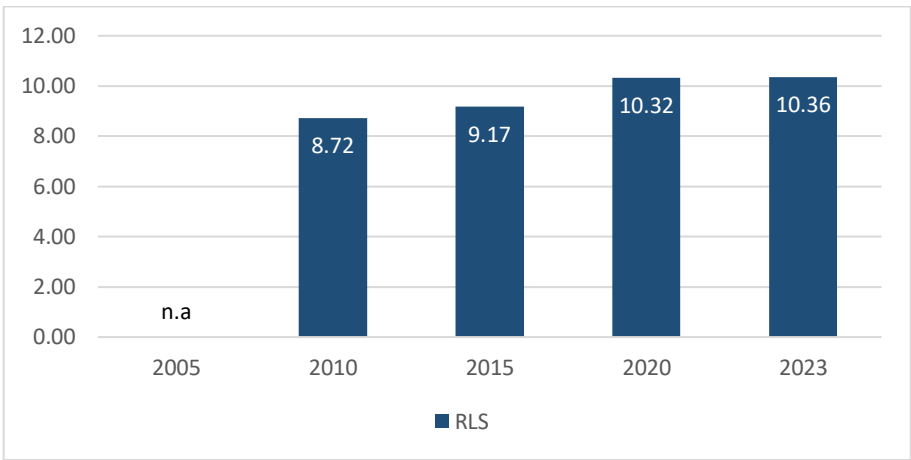
Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.46**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan harapan lama sekolah adalah: (1) penerapan pendidikan inklusif yang memastikan akses setara bagi semua individu; (2) pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; (3) bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan; (4) dukungan sosial dan psikologis untuk siswa; (5) pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis dan komunikasi; (6) pemanfaatan teknologi dalam pendidikan; (7) peningkatan peran orang tua; (8) penghapusan diskriminasi dalam sistem pendidikan; (9) penghargaan dan insentif untuk pencapaian siswa; dan (10) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran efektif.

**B. Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai Jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebesar 10,36 tahun, meningkat dari tahun 2020(10,32 tahun). Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Sungai Penuh yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,36 tahun atau hampir menamatkan kelas XI (Gambar II.47).



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.47**  
**Rata – Rata Lama Sekolah Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

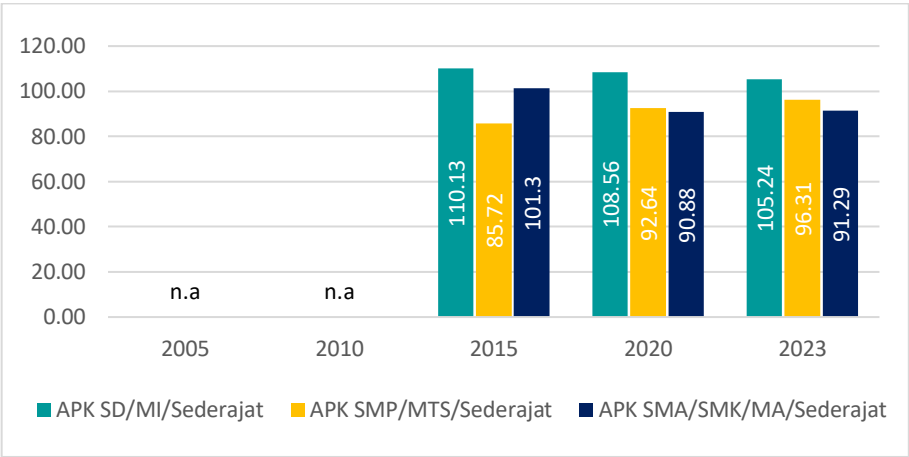
Untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sungai Penuh, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal: (1) peningkatan akses pendidikan yang setara, terutama di daerah pedesaan; (2) program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa yang membutuhkan; (3) pengembangan kurikulum yang relevan dan diakui oleh industri; (4) penyediaan guru berkualitas melalui pelatihan; (5) pemanfaatan teknologi dalam pengajaran; (6) pengawasan dan evaluasi rutin terhadap perkembangan siswa; dan (7) kolaborasi dengan organisasi pendidikan untuk mendapatkan dukungan tambahan.

**C. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100% karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan.

APK untuk kelompok umur SD/MI/ sederajat di Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 105,24% dan kelompok umur SMP/MTS/ sederajat 96,31%. Secara rata-rata APK SD/MI/ sederajat lebih besar dibandingkan APK SMP/MTS/ sederajat dan APK SMA/SMK/MA/ sederajat.

Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh tahun 2005-2023 dapat dilihat pada Gambar II.48 di bawah ini.

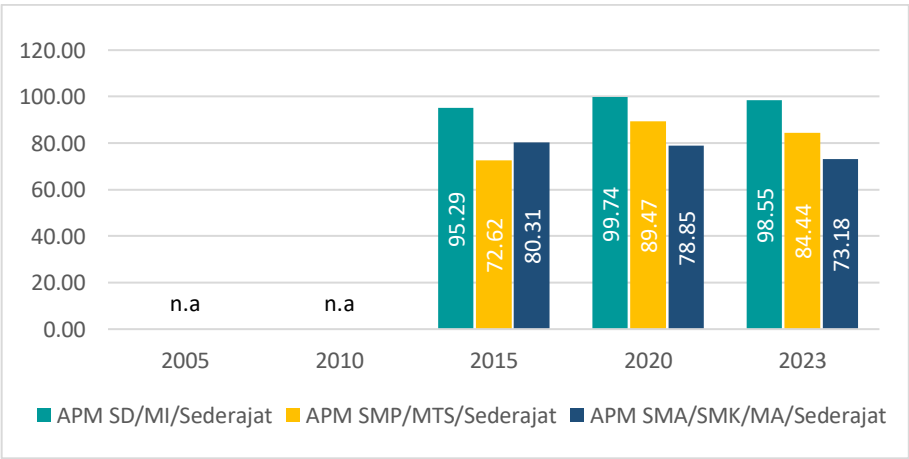


Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.48**  
**Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

**D. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/MI/Sederajat tahun 2023 sebesar 98,55% menurun dari tahun 2020 yang mencapai 99,74%. Penurunan APM juga terjadi di tingkat SMP/MTS/Sederajat dari 89,47% di tahun 2020 menjadi 84,44 % di tahun 2023 (Gambar II.49).



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.49**  
**Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Kesetaraan akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan dukungan finansial untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga semua anak dapat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

**E. Akreditasi Sekolah, PAUD dan Pendidikan Nonformal**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan bahwa akreditasi adalah



kegiatan penilaian kelayakan program di satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini, serta pendidikan nonformal, berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk menjamin mutu pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi 8 (delapan) standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Akreditasi satuan pendidikan dasar, menengah, PAUD dan pendidikan nonformal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 disajikan pada Tabel II.29 di bawah ini.

**Tabel II.29**  
**Akreditasi Sekolah, PAUD dan Pendidikan Nonformal**  
**Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

Sekolah/ PAUD/PNF	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Terakreditasi		Total
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
SD	13	17,57	51	68,92	8	10,81	2	2,70	74
SMP	6	42,86	4	28,57	4	28,57	0	0	14
SMA	4	66,67	1	16,67	1	16,67	0	0	6
SMK	0		4	80,00	1	20,00	0	0	5
PAUD	3	2,42	19	15,32	70	56,45	32	25,81	124
SLB	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1
PKBM+SKB	n.a	n.a	n.a	33,33	n.a	22,22	n.a	44,45	n.a
LKP	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	40,74	n.a	59,26	n.a

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud; diolah oleh Bappeda, 2024

Berdasarkan neraca pendidikan daerah kemendikbud tahun 2022, sebanyak 8 SD (10,81%) akreditasinya masih C (Cukup) dan 2 SD (2,70%) belum terakreditasi. Pada tingkat SMP sebanyak 4 SMP (28,57%) akreditasinya masih C (Cukup). Selanjutnya 70 PAUD (56,45%) akreditasinya masih C (Cukup) dan 32 PAUD belum terakreditasi (25,81%). Pusat kegiatan belajar masyarakat dan sanggar kegiatan belajar hanya 33,33% yang terakreditasi B (Baik), selebihnya memiliki akreditasi C dan belum terakreditasi. Sedangkan lembaga kursus dan pelatihan baru mencapai akreditasi C (40,74%) dan sisanya belum terakreditasi. Hasil akreditasi tersebut menggambarkan sejauh mana SNP terpenuhi serta kelayakan dan mutu sekolah di Kota Sungai Penuh.

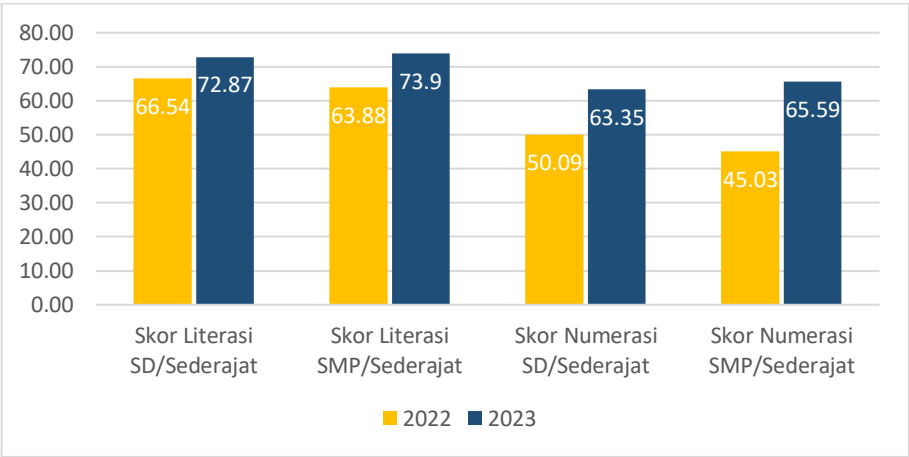
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan arah dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, adalah peningkatan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik. Karena itu pendidikan



yang membangun nilai-nilai moral atau karakter di kalangan peserta didik harus selalu mendapatkan perhatian.

2.3.2.2 Literasi dan Numerasi

Kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi meliputi literasi dan numerasi, yang merupakan dua pilar penting dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang kompleks. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi, sedangkan numerasi melibatkan pemahaman dan penerapan angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks. Kombinasi kemampuan literasi dan numerasi dikenal sebagai literasi numerasi. Ini mencakup pemahaman, penggunaan, dan penerapan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara, serta kemampuan matematika yang meliputi pemahaman angka, konsep matematika, statistik, dan penggunaan informasi kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: Dinas Pendidikan; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.50  
Skor Literasi dan Numerasi Kota Sungai Penuh  
Tahun 2022-2023

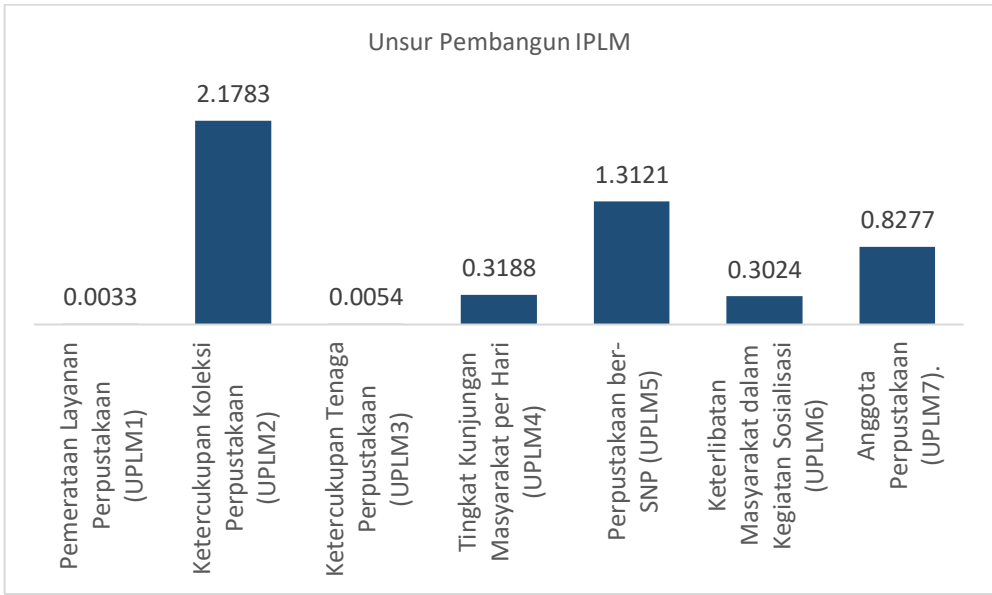
Skor literasi di Kota Sungai Penuh untuk SD/ sederajat dan SMP/ sederajat meningkat dari 66,54 dan 63,88 pada tahun 2022 menjadi 72,87 dan 73,90 pada tahun 2023. Demikian pula, skor numerasi untuk SD/ sederajat dan SMP/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 50,09 dan 45,03 di tahun 2022 menjadi 63,35 dan 65,59 di tahun 2023. (Gambar II.50).

2.3.2.3 Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi merupakan tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penyediaan layanan terbaik dan akses literasi yang luas sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat. Dengan demikian, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dapat terwujud, menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Salah satu indikator perkembangan pembangunan literasi adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang terdiri dari beberapa unsur, meliputi:



1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1);
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2);
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3);
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4);
5. Perpustakaan ber-SNP (UPLM5);
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6);
7. Anggota Perpustakaan (UPLM7).



Sumber: Perpustnas; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.51**  
**Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

IPLM Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebesar 70,69 (kategori sedang). Terdapat beberapa unsur pembangun literasi masyarakat Kota Sungai Penuh yang masih perlu ditingkatkan (Gambar II.51). Pemerataan layanan perpustakaan baru mencapai 0,0033, tenaga perpustakaan 0,0054, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan 0,3024 dan kunjungan masyarakat 0,3188.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, maka perlu untuk menghadirkan perpustakaan-perpustakaan yang bersifat digital. Hal tersebut penting untuk menunjang kemudahan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Inovasi perpustakaan digital merupakan bentuk nyata transformasi layanan digital yang dapat dijangkau dimanapun dan kapanpun.

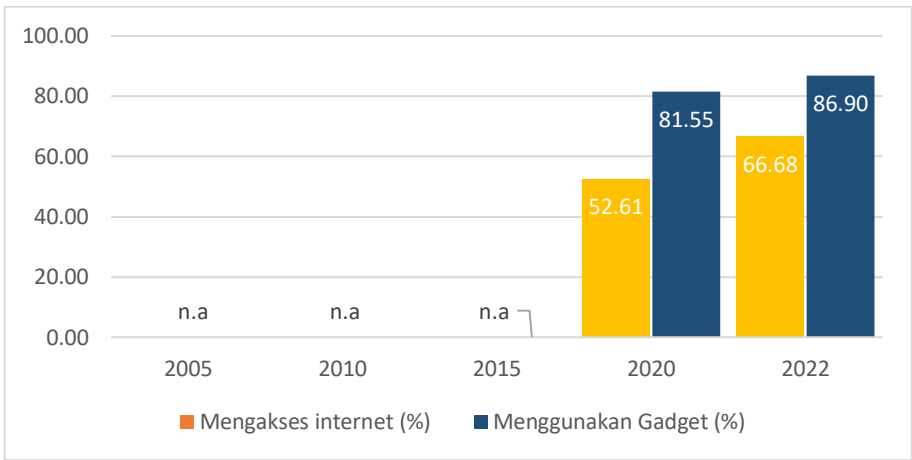
**2.3.2.4 Literasi Digital**

**A. Akses Internet dan Penggunaan Gadget**

Saat ini digitalisasi erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari dan memiliki peran strategis bagi seluruh lapisan masyarakat. Digitalisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing baik secara mikro di tatanan pribadi/keluarga/unit bisnis dan secara makro di tatanan wilayah. Pada tahun 2020 sebesar 52,61% penduduk Kota Sungai Penuh yang mengakses internet meningkat menjadi 66,68% di tahun 2022.



Demikian halnya yang menggunakan gadget meningkat menjadi 86,90% di tahun 2022 dari tahun 2020 (81,55%).

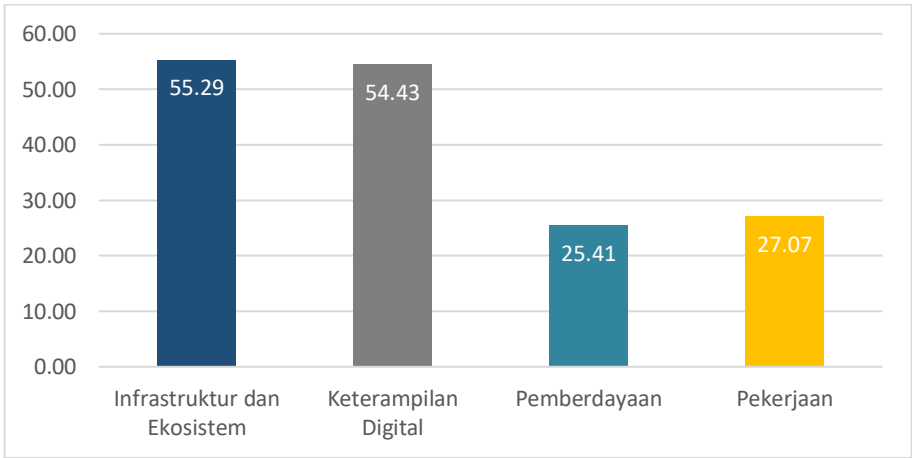


Sumber: <https://sungaipenuhkota-bps.shinyapps.io>

**Gambar II.52**  
**Persentase Penduduk Kota Sungai Penuh yang Menggunakan TI**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2022**

Digitalisasi sangat erat kaitannya dengan literasi digital masyarakat. Semakin baik literasi digital masyarakat akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Literasi digital di Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang meningkat, yang ditandai dengan meningkatnya penduduk Kota Sungai Penuh yang memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).

**B. Indeks Masyarakat Digital**



Sumber: <https://indi.sdmdigital.id>

**Gambar II.53**  
**Nilai Pilar Masyarakat Digital Kota Sungai Penuh Tahun 2023**

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*). Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, semua lini



kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.

Indeks Masyarakat Digital Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 41,07 (klasifikasi C) dibawah capaian Provinsi Jambi (42,78) dan nasional (43,18). Masyarakat Digital terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. **Infrastruktur dan Ekosistem**

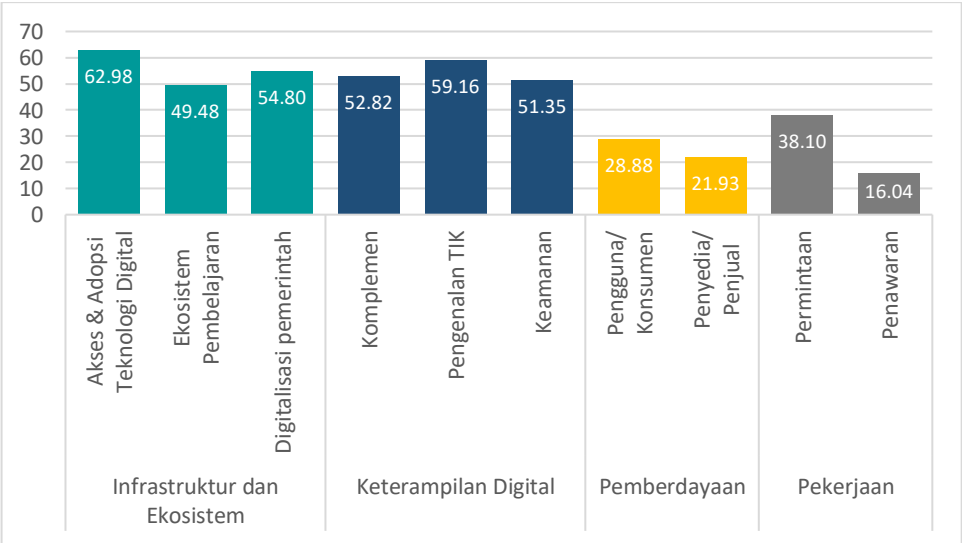
Infrastruktur digital merupakan pondasi utama kualitas ekosistem masyarakat digital. Pada tahun 2023, infrastruktur dan ekosistem digital Kota Sungai Penuh mencapai 55,29, dengan tiga sub pilar: (1) akses dan adopsi teknologi digital (62,98); (2) ekosistem pembelajaran (49,48); dan (3) digitalisasi pemerintah daerah (54,80).

2. **Keterampilan Digital**

Keterampilan digital di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 54,43, terdiri dari tiga sub pilar: (1) komplementaritas (52,82): Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi menggunakan teknologi digital serta berpikir kritis terhadap informasi digital; (2) pengenalan TIK (59,16): Kemampuan dalam mengidentifikasi dan menggunakan perangkat TIK, serta mengelola data dan informasi digital; (3) keamanan (51,35): Pemahaman risiko dan perlindungan terhadap perangkat, konten digital, dan data pribadi saat menggunakan perangkat digital.

3. **Pemberdayaan**

Pemberdayaan digital di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 25,41, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui aktivitas digital. Pilar ini fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peran *sharing economy*. Terdiri dari dua sub pilar: (1) pengguna/konsumen (28,88): menunjukkan tingkat partisipasi dalam layanan keuangan, *e-commerce*, dan media sosial; (2) penyedia/penjual (21,93): menunjukkan partisipasi dalam kegiatan jual beli digital.



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id>

Gambar II.54  
Nilai Sub Pilar Masyarakat Digital Kota Sungai Penuh Tahun 2023

#### 4. Pekerjaan

Pilar Pekerjaan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 27,07, berfokus pada keahlian digital yang diperlukan akibat digitalisasi. Pilar ini terdiri dari dua sub pilar: (1) permintaan (38,10), mencakup keterampilan digital yang dibutuhkan, pelatihan dari perusahaan, serta tingkat otomatisasi dan pekerjaan jarak jauh; (2) penawaran (16,04), menggambarkan proporsi pekerja yang menggunakan internet, tingkat keterampilan digital, dan pelatihan yang diikuti.

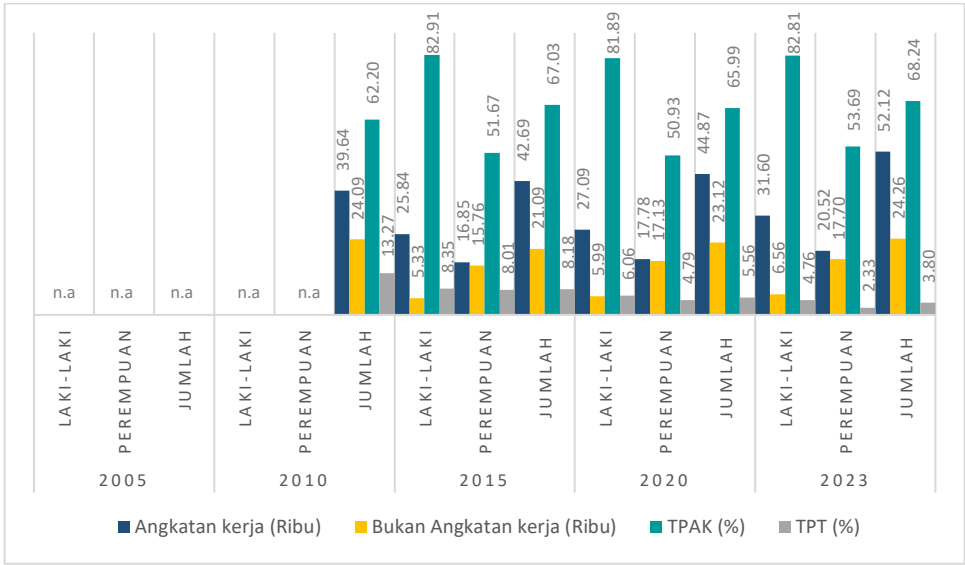
Budaya digital di Kota Sungai Penuh merupakan pilar yang berkontribusi besar dalam pencapaian Literasi Digital. Namun demikian, pilar keamanan digital yang merupakan kemampuan pengguna dalam mengenali, merancang, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari perlu menjadi perhatian. Data penetrasi pengguna internet dan gadget dan indeks masyarakat digital di Kota Sungai Penuh beserta pilar dan sub pilar menjadi pertimbangan dan acuan pemerintah daerah dalam mengukur kesiapannya menghadapi era *Internet of Things (IoT)* untuk kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi di Kota Sungai Penuh sudah cukup baik, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kemampuan *digital skill* masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya SDM yang kompeten juga disebabkan oleh keterbatasan BLK yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih yang kompeten, serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.

##### 2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah/negara. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

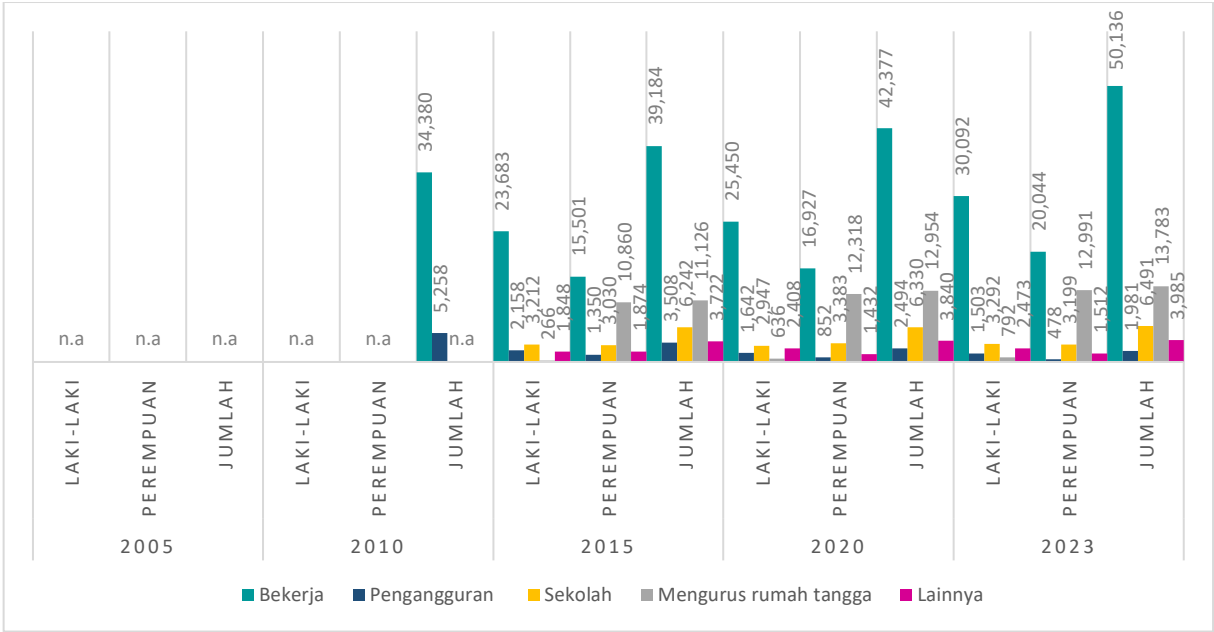
Pada Gambar II.55 dapat dilihat, bahwa TPAK Kota Sungai Penuh tahun 2015 sebesar 67,03%, menurun di tahun 2020 menjadi 65,99%, selanjutnya meningkat menjadi 68,24% di tahun 2023. TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, TPAK laki-laki pada tahun 2023 mencapai 82,81%, sedangkan TPAK perempuan 53,69%. Nilai TPAK tahun 2023 tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 83 orang yang masuk dalam angkatan kerja dan 100 perempuan usia kerja, sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.55**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 76,38 ribu orang. Dari 76.376 orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 52,12 ribu orang (68,24%) merupakan angkatan kerja (bekerja dan pengangguran), sedangkan sisanya 24,26 ribu orang (31,76%) tergolong bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Komposisi angkatan kerja sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja yaitu 96,20% atau 50,14 ribu orang. Sisanya adalah pengangguran yang mencapai 3,80% atau 1,98 ribu orang (Gambar II.56).



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

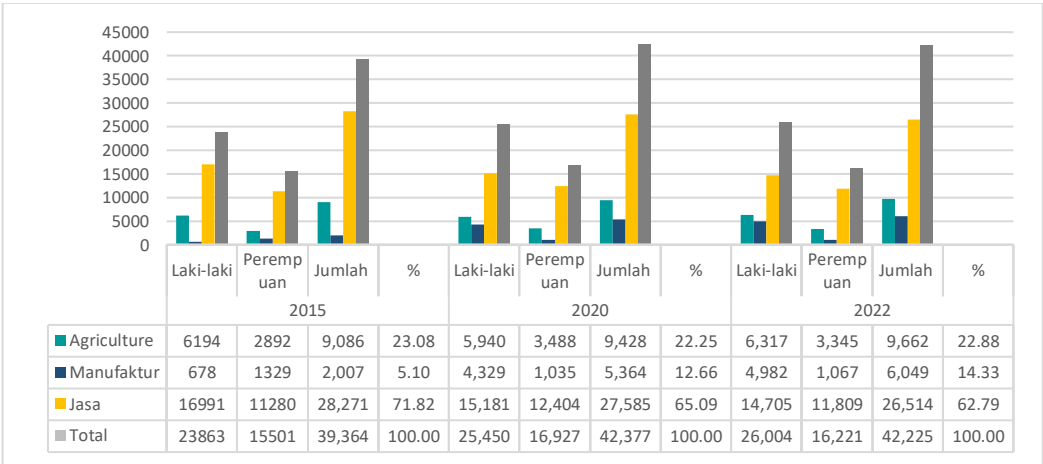
**Gambar II.56**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**





Jumlah perempuan yang berperan dalam pengelolaan rumah tangga meningkat dari 10,86 ribu orang pada tahun 2015 menjadi 12,99 ribu orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya potensi ibu rumah tangga untuk berkontribusi terhadap perekonomian belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama karena akses yang terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan memberdayakan ibu rumah tangga, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Struktur lapangan pekerjaan utama di Kota Sungai Penuh menunjukkan pola yang didominasi oleh pekerjaan pada kategori jasa. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja pada kategori jasa mencapai 62,79%. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 22,85% dan kategori industri pengolahan 14,33% (Gambar II.57).



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
Keterangan: Data 2023 tidak tersedia

**Gambar II.57**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Sungai Penuh Tahun 2015, 2020 dan 2022**

Jumlah penduduk yang semakin bertambah membawa dampak terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja dan semakin besar pula jumlah pencari kerja atau menganggur. Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dibutuhkan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

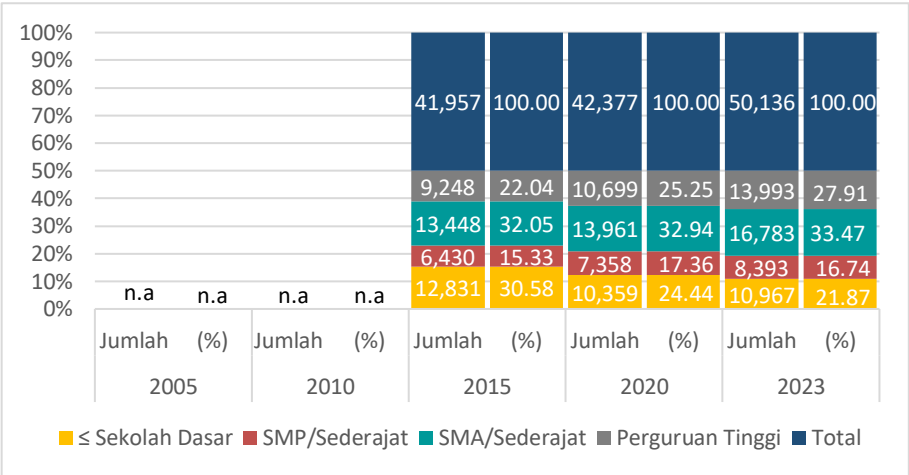
2.3.2.6 Kualitas Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi serta berjiwa kreatif dan inovatif. Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator



kualitas SDM dalam peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

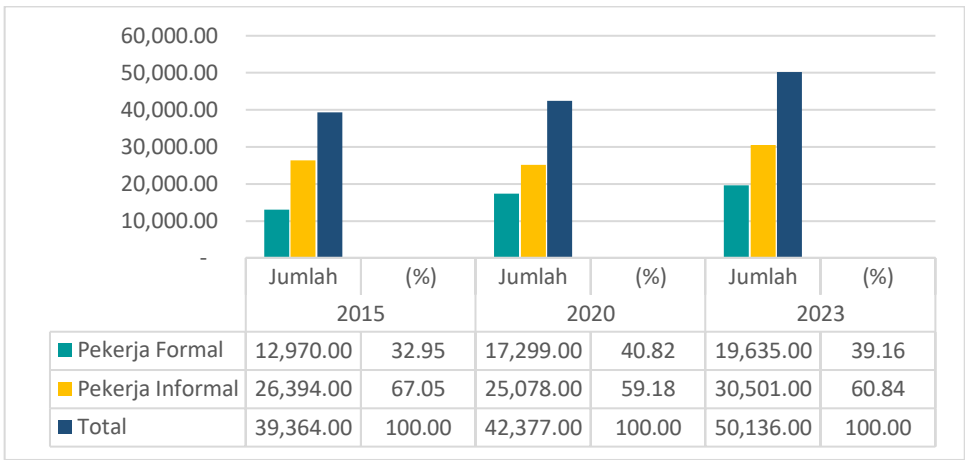


Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.58**  
**Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Sumber daya manusia yang bekerja di Kota Sungai Penuh tahun 2015 paling banyak lulusan SMA/ sederajat yaitu 13,44 ribu orang (32,05%), sedangkan pada tahun 2023 penduduk yang bekerja lulusan SMA/ sederajat 16,78 ribu orang (33,47%). TPT dari tamatan SMA/ sederajat tahun 2023 mencapai 45,78%, juga merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kapasitas dan keterampilan angkatan kerja. Selain itu, keterkaitan yang lemah (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Penyebabnya antara lain kurikulum pendidikan belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan belum adanya BLK yang tersifikasi. Munculnya lapangan usaha baru berbasis digitalisasi pada gilirannya menuntut SDM yang lebih berkualitas sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.

Status pekerjaan penduduk dapat memberikan informasi mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Status pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua kategori besar yakni: (1) pekerja formal: buruh/ karyawan/ pegawai, berusaha dibantu buruh tetap; dan (2) kategori pekerja informal: berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Tingginya persentase penduduk yang bekerja disektor formal dapat memacu pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.59  
Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2015, 2020 dan 2023

Berdasarkan Gambar II.59 di atas, pekerja informal di Kota Sungai Penuh tahun 2023 berjumlah 30,50 ribu orang (60,84%) lebih banyak dari pekerja formal yang berjumlah 19,64 ribu orang (39,16%), median upah pekerja formal lebih tinggi dibandingkan pekerja informal. Disamping itu, sektor pertanian merupakan lapangan usaha banyak menyerap tenaga kerja, namun *output* yang dihasilkan relatif rendah. Perdagangan merupakan sektor yang menghasilkan *output* tertinggi dan banyak menyerap tenaga kerja.

Mayoritas penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2023 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 18,18 ribu orang (36,26%), meningkat dari tahun 2020 (35,69%). Berusaha sendiri tahun 2023 sebesar 14,22 ribu orang (28,37%) meningkat dari tahun 2020 (23,25%). Namun, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, menurun menjadi 1,46 ribu orang (2,90%) di tahun 2023 dari tahun 2020 (5,13%). Kondisi ini mengindikasikan investasi belum dapat menciptakan lapangan kerja secara optimal (Tabel II.30).

Tabel II.30  
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Sungai  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Status Pekerjaan	2005		2010		2015		2020		2023	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Berusaha sendiri	n.a	n.a	n.a	n.a	10.208	25,93	9.854	23,25	14.223	28,37
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	n.a	n.a	n.a	n.a	5.840	14,84	6.344	14,97	7.141	14,24
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	n.a	n.a	n.a	n.a	1.726	4,38	2.176	5,13	1.456	2,90
Buruh/karyawan/pegawai	n.a	n.a	n.a	n.a	11.244	28,56	15.123	35,69	18.179	36,26
Pekerja bebas	n.a	n.a	n.a	n.a	5.435	13,81	4.387	10,35	4.277	8,53
Pekerja keluarga/tidak dibayar	n.a	n.a	n.a	n.a	4.911	12,48	4.493	10,60	4.860	9,69
Jumlah	n.a	n.a	n.a	n.a	39.364	100,00	42.377	100,00	50.136	100,00

Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024



Dalam menghadapi persaingan tenaga kerja, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi, pengembangan inkubator bisnis, pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pelaksanaan hubungan industrial, upaya mengedepankan sekolah kejuruan dan pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah, peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, pengembangan sekolah kejuruan berbasis bioindustri/agroindustri dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan berbasis penelitian dan IPTEK.

2.3.2.7 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan sangat erat kaitannya dengan produktivitas penduduk suatu wilayah untuk mengetahui tingkat beban ketergantungan penduduk. Apabila rasio ketergantungan tinggi, maka beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula.

Tabel II.31  
Rasio Ketergantungan di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Indikator	2005	2010	2015	2020	2023
1.	Penduduk usia <15th + usia >64th (jiwa)	n.a	n.a	30.455	29.657	31.582
2.	Penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	n.a	n.a	71.087	68.515	69.634
3.	Rasio Ketergantungan (%)	n.a	n.a	42,84	43,29	45,35

Sumber: Dinas Dukcapil; diolah oleh Bappeda, 2024

Dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebesar 45,35%, meningkat dari tahun 2020 dan 2015 yang sebesar 43,29% dan 42,84% (Tabel II.31).

Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Sungai Penuh memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan, akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Untuk mengurangi angka beban ketergantungan, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kota Sungai Penuh.



2.3.3 Daya Saing Infrastruktur Wilayah  
2.3.3.1 Kualitas Layanan Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor dan antarwilayah. Indeks infrastruktur Kota Sungai Penuh didefinisikan berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.32 dibawah ini.

Tabel II.32  
Indeks Infrastruktur Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses	2005	2010	2015	2020	2023
1.	Air bersih (perpipaan & non-perpipaan)*	n.a	n.a	n.a	94,19	90,74
2.	Sanitasi*	n.a	n.a	n.a	81,56	83,54
3.	Listrik	n.a	n.a	n.a	99,98	100,00
4.	Telepon**	n.a	n.a	n.a	81,55	86,9 ***
Rata-Rata		n.a	n.a	n.a	89,32	90,29

Sumber: BPS, 2024; diolah Bappeda, 2024.  
Keterangan:  
\*) Data akses air minum layak dan sanitasi layak  
\*\*) Data akses telepon menggunakan data akses gadget (Sub bab 2.3.2.4) sebagai proxy.  
\*\*\*) Data 2023 tidak tersedia; diasumsikan sama dengan 2022.

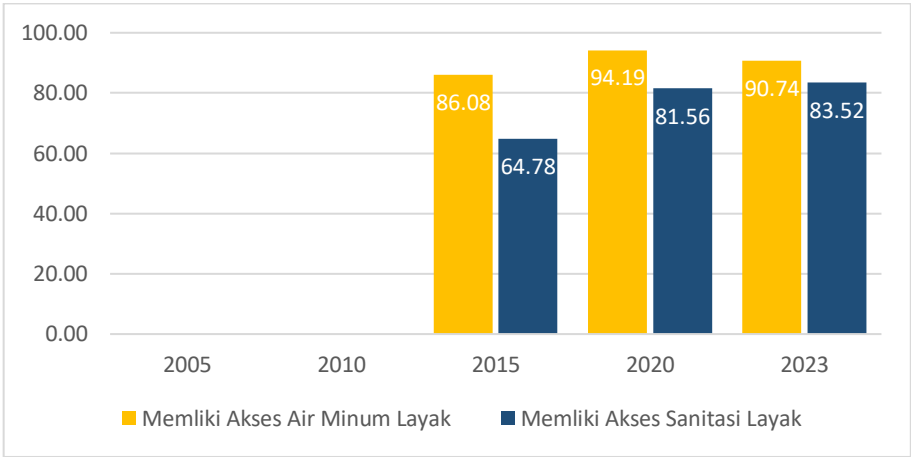
Ketersediaan dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang harus terus diupayakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan pelayanan air minum. Sampai tahun 2023 kapasitas instalasi pengolahan air minum PDAM di Kota Sungai Penuh sebesar 170 l/dtk.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat kehilangan air dan alternatif sumber air baku untuk mengantisipasi kekurangan air baku terutama pada musim kemarau. Peningkatan kapasitas pengolahan perlu diupayakan untuk mengoptimalkan instalasi pengolahan air minum eksisting. Selain itu, manajemen pelayanan dan operasional PDAM Tirta Khayangan juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, dari sistem pengelolaan air limbah di Kota Sungai Penuh masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Disisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai.

Rumah tangga di Kota Sungai Penuh tahun 2023 telah memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 90,74%, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 (94,19%). Pada tahun 2023 sebesar 83,52% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, sedangkan 16,48% sisanya belum memiliki akses sanitasi yang layak (Gambar II.60).





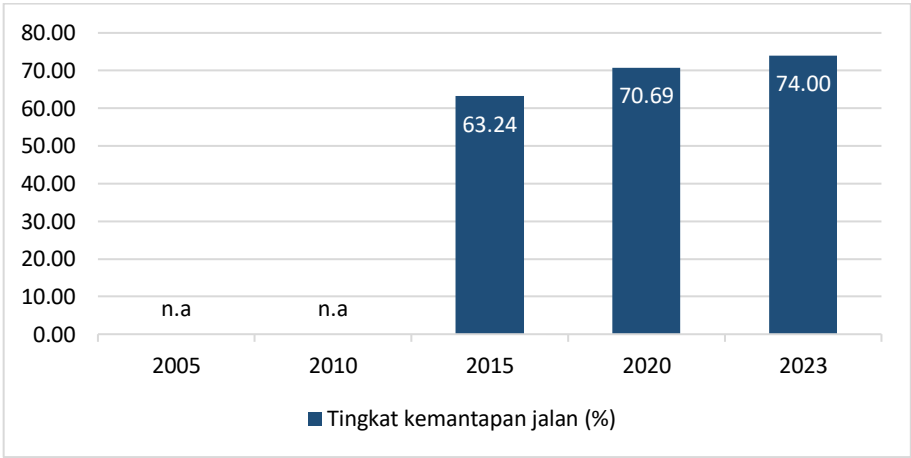
Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.60**  
**Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat dan perkembangan perkotaan. Keselarasan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kegiatan ekonomi masih perlu ditingkatkan.

2.3.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem jaringan jalan di wilayah Kota Sungai Penuh terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan kota. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik.



Sumber: Dinas PUPR; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.61**  
**Tingkat Kemantapan Jalan Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Kondisi jalan kota dalam wilayah Kota Sungai Penuh tahun 2015, 2020 dan 2023 semakin membaik (Gambar II.61). Tingkat kemantapan



jaringan jalan kota dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 63,24% meningkat menjadi 74,00% di tahun 2023. Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik sampai tahun 2023 sepanjang 150,08 km dari total panjang jaringan jalan kota 202,812 km.

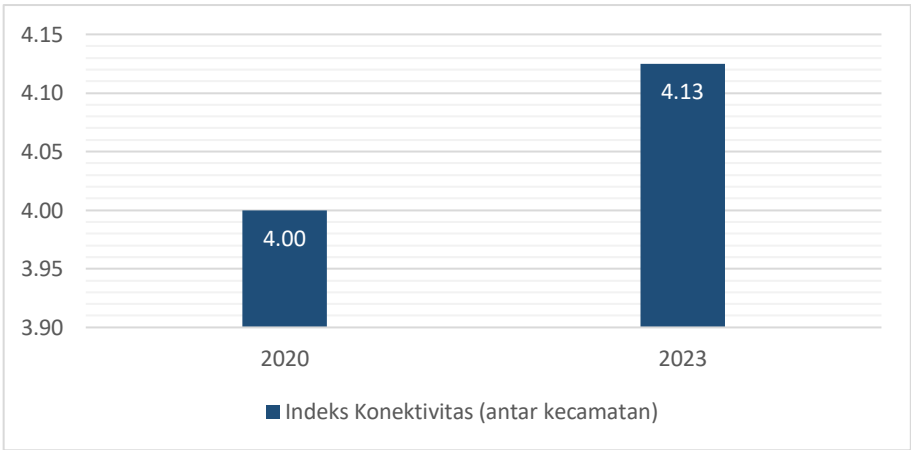
2.3.3.3 Konektivitas Antar Wilayah

Jalan dan jembatan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang mobilitas orang dan barang. Konektivitas jaringan jalan yang menghubungkan Kota Sungai Penuh dengan wilayah di luarnya, yaitu:

- 1. Ruas Sungai Penuh-Kerinci-Bangko (Jalan Nasional)
- 2. Ruas Sungai Penuh-Kerinci-Muara Labuh (Jalan Nasional)
- 3. Ruas Sungai Penuh-Tapan/Pesisir Selatan (Jalan Nasional)
- 4. Ruas Sungai Penuh-Jujun/Kerinci-Lempur/Kerinci (Jalan Provinsi)
- 5. Ruas Sungai Penuh-Koto Lanang/Kerinci (Jalan Kota)

Interpretasi indikator konektivitas antar wilayah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konektivitas maka semakin baik aksesibilitas antar wilayah di Kota Sungai Penuh. Semakin banyak sistem jaringan jalan yang tersedia maka semakin mudah aksesibilitas yang dapat dijangkau dan meningkatkan keterkaitan serta interaksi antar wilayah dalam sistem pergerakan dan moda transportasi.

Ketersediaan sarana dan prasarana jalan di Kota Sungai Penuh dibandingkan dengan peningkatan jumlah kendaraan menunjukkan tingkat kepadatan yang semakin tinggi. Meskipun indeks konektivitas antar wilayah di Kota Sungai tahun 2023 mencapai 4,13 (>1), namun, Kota Sungai Penuh tidak hanya membutuhkan pelebaran ataupun penambahan panjang jalan tetapi juga peningkatan kualitas dan pengelolaan jalan, agar dapat meningkatkan mobilitas untuk mendorong perkembangan dan daya saing daerah.



Sumber: Dinas PUPR; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.62  
Indeks Konektivitas (Antar Wilayah) di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2020 dan 2023

Permasalahan konektivitas saat ini juga terkait mobilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Terminal sebagai titik simpul jaringan



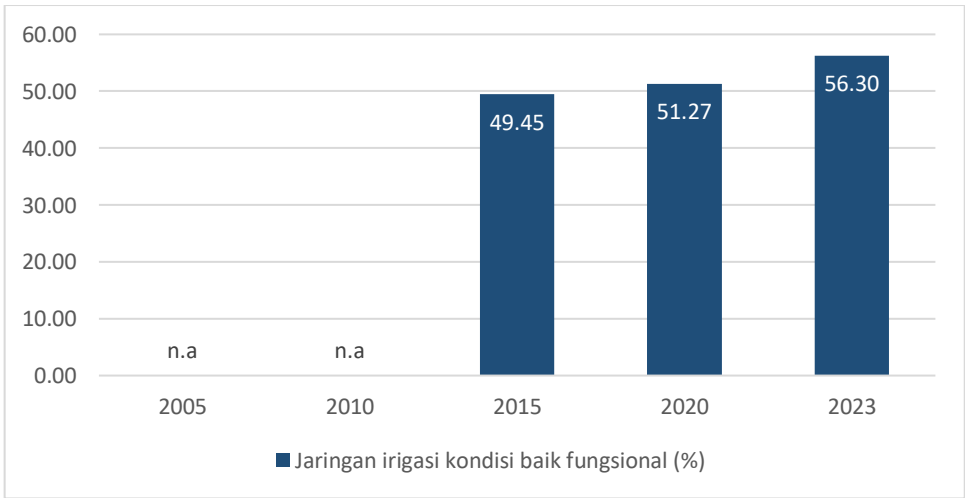
transportasi jalan menjadi barometer dari pesatnya pertumbuhan jumlah perjalanan dari dan ke Kota Sungai Penuh, sehingga memerlukan landasan perencanaan yang terarah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044, sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan jalan diantaranya terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe B yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh dan terminal barang terdapat di Kecamatan Kumun Debai.

2.3.3.4 Sistem Jaringan Irigasi

Langkah pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian yaitu dengan menjalankan suatu kebijakan irigasi sebagai pendukung ketahanan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani. Irigasi merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan produktivitas pangan di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Lampiran III), luas layanan irigasi kewenangan Kota Sungai Penuh mencapai 4.348 ha. Namun, dari aspek infrastruktur sumber daya air, kinerja layanan jaringan irigasi belum sepenuhnya menopang peningkatan produktivitas pertanian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain intensitas kejadian bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi serta operasional/pengelolaan dan pemeliharaan, umur bangunan jaringan irigasi yang telah melewati umur konstruksi, serta alih fungsi lahan.

Pada gambar II.63 dapat dilihat kondisi jaringan irigasi Kota Sungai Penuh tahun 2015, 2020 dan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jaringan irigasi dalam kondisi baik 49,45% meningkat menjadi 56,30% di tahun 2023 (66 Daerah Irigasi).



Sumber: Dinas PUPR; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.63  
Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023



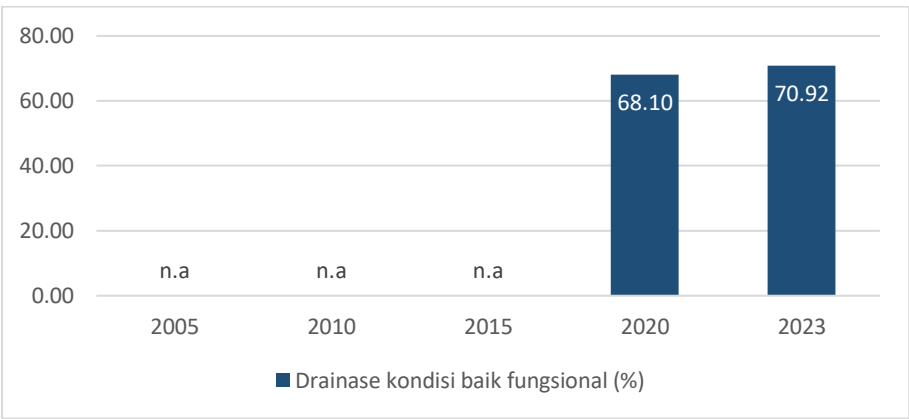
Sistem irigasi yang baik memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan meningkatkan sistem irigasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

### 2.3.3.5 Sistem Drainase

Saluran drainase bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk drainase buatan maupun drainase alami. Namun dalam pengelolaan dan pemeliharannya masih belum optimal, hal ini ditandai dengan meluapnya air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan.

Kondisi drainase dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 70,92% atau 21,32 km dari total drainase 30,06 km. Kondisi saluran secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi saluran pada lingkungan perumahan pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama, pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase yang cukup baik.
2. Letak Kota Sungai Penuh yang konturnya berbukit, sehingga air mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
3. Drainase kota pada umumnya menggunakan saluran tertutup.
4. Masih adanya genangan air pada saat musim hujan pada beberapa tempat yang disebabkan belum optimalnya kinerja drainase dan terjadinya sedimentasi.
5. Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya air hujan ke jalan.
6. Masih adanya aktivitas masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase.



Sumber: Dinas PUPR; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.64**  
**Drainase dalam Kondisi Baik Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan perdagangan, industri, jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan/atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun mengakibatkan banyak kawasan bertopografi rendah berfungsi sebagai tempat



penampungan air, sementara bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kemampuan drainase dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke sungai.

2.3.3.6 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah dalam Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, sampai dengan tahun 2023 rasio rumah layak huni mencapai 91,85% atau sebesar 23.242 unit hunian layak dari 25.304 unit, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 91,60%. Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 sebesar 2.062 unit yang tersebar di 8 Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.33  
Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sungai Penuh Tahun 2023

No	Kecamatan	RTLH (Unit)
1.	Kecamatan Tanah Kampung	394
2.	Kecamatan Kumun Debai	287
3.	Kecamatan Sungai Penuh	26
4.	Kecamatan Pondok Tinggi	193
5.	Kecamatan Sungai Bungkal	79
6.	Kecamatan Hampanan Rawang	530
7.	Kecamatan Pesisir Bukit	262
8.	Kecamatan Koto Baru	291
Jumlah		2.062

Sumber : Pendataan Rumah Sewa dan RTLH  
Kota Sungai Penuh Tahun 2023.

Pada cakupan analisis yang lebih luas, kualitas kawasan permukiman mencakup kualitas bangunan gedung (termasuk rumah), jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran; atau disebut sebagai 7 (tujuh) indikasi permukiman kumuh. Kualitas permukiman tidak hanya dengan mengatasi permasalahan permukiman kumuh, tetapi juga mencegah terjadinya atau berkembangnya permukiman kumuh baru. Hal ini dapat terjadi karena dinamika penduduk, perkembangan kota, perilaku masyarakat, dan faktor alam seperti bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi. Upaya penanganan dan pencegahan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga penguatan regulasi terkait pengendalian perkembangan perumahan dan permukiman sampai pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan rumah dan permukiman.





Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh No. 100.3.3.3/Kep. 134/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, total luas kawasan kumuh di Kota Sungai Penuh sebesar 207,06 ha tersebar dalam 11 kawasan. Unit terkecil kawasan kumuh ini adalah RT dengan kategori kumuh ringan 204,05 ha (98,55%) dan kumuh sedang 3,01 ha (1,45%). Profil kekumuhan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemerintah, baik melalui APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru. Selengkapnya, daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Sungai Penuh (Tabel II.34).

**Tabel II.34**  
**Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**  
**Kota Sungai Penuh Tahun 2024**

PROFIL KUMUH KOTA SUNGAI PENUH (SK No. 100.3.3.3/Kep.134/2024)					
11 Kawasan			7 Kecamatan		
1. BATANG MERAU	68.62	33.14%	1. HAMPARAN RAWANG	66.08	31.91%
2. KUMUN DEBAI	34.77	16.79%	2. TANAH KAMPUNG	52.88	25.54%
3. TANAH KAMPUNG	23.86	11.52%	3. KUMUN DEBAI	41.93	20.25%
4. HAMPARAN RAWANG	21.43	10.35%	4. PONDOK TINGGI	20.75	10.02%
5. SUNGAI JERNIH	20.75	10.02%	5. SUNGAI BUNGKAL	11.95	5.77%
6. SUNGAI NING	11.95	5.77%	6. PESISIR BUKIT	9.17	4.43%
7. PENDUNG HIANG	8.63	4.17%	7. SUNGAI PENUH	4.3	2.08%
8. KOTO RENAH	5.67	2.74%	Grand total	207.05	100%
9. PASAR BARU	4.3	2.08%	24 Desa		
10. BARU DEBAI	3.57	1.72%	1. Paling Serumpun	23.41	11.31%
11. KOTO TENGAH	3.5	1.69%	2. Sungai Jernih	20.75	10.02%
Grand total	207.05	100%	3. Sandaran Galeh	15.25	7.37%
POKJA PKP KOTA SUNGAI PENUH - Tahun 2024			4. Sungai Ning	11.95	5.77%
			5. Kumun Hilir	11.46	5.53%
			6. Tanjung Muda	10.72	5.18%
			7. Tanjung	10.52	5.08%
			8. Tanjung Bunga	10.35	5%
			9. Larik Kemahan	9.74	4.71%
			Grand total	207.05	100%

Status RT		Luas (Ha)		% ▾
KUMUH RINGAN		204.05		98.55%
KUMUH SEDANG		3		1.45%
Grand total		207.05		100%
Desa	RT	Kumuh	Luas (Ha)	% ▾
1. Larik Kemahan	001	RINGAN	5.83	2.82%
2. Koto Pudung	003	RINGAN	5.15	2.49%
3. Sungai Jernih	003	RINGAN	5.12	2.47%
4. Sungai Jernih	006	RINGAN	4.96	2.4%
5. Paling Serumpun	011	RINGAN	4.73	2.28%
6. Paling Serumpun	001	RINGAN	4.67	2.25%
7. Sungai Jernih	005	RINGAN	4.27	2.06%
8. Pendung Hiang	004	RINGAN	3.92	1.89%
9. Larik Kemahan	003	RINGAN	3.91	1.89%
10. Koto Tuo	002	RINGAN	3.1	1.5%
11. Ulu Air	002	RINGAN	2.94	1.42%
Grand total		207.05		100%
1 - 50 / 127 < >				

Sumber: SK Walikota Sungai Penuh No. 100.3.3.3/Kep. 134/2024; diolah oleh Pokja PKP Kota Sungai Penuh, 2024 ([https://s.id/SK\\_KUMUH\\_SUNGAI\\_PENUH\\_2024](https://s.id/SK_KUMUH_SUNGAI_PENUH_2024)).

Infrastruktur Permukiman dan Perumahan menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam periode RPJPD 2005-2025 infrastruktur pelayanan dasar permukiman dan perumahan menjadi salah satu arah kebijakan setiap tahapan pembangunan 5 tahunan dengan berbagai fokus pengembangan. Terdapat beberapa infrastruktur pelayanan dasar permukiman dan perumahan yang dikembangkan diantaranya: (1) sektor air minum melalui pengembangan SPAM berbasis masyarakat; (2) sektor Sanitasi melalui fasilitasi pengembangan SPALD kab/kota dan pengembangan



Sanitasi Berbasis Masyarakat; (3) sektor perumahan melalui fasilitasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni dalam Kota Sungai Penuh terhadap jumlah rumah dalam Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Sungai Penuh, sampai dengan tahun 2023 rasio rumah layak huni mencapai 23.242 rumah hunian layak atau sebesar 91,85% dari 25.304 rumah, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 91,60%. Sedangkan untuk luas lingkungan permukiman kumuh di tahun 2023 mencapai 2,5% dari luas kawasan budidaya.

Pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang seimbang, efisien, dan berdaya tahan. Kota Sungai Penuh dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam upaya mencapai pengembangan permukiman yang berkelanjutan yaitu keterbatasan akses terhadap perumahan sehat dan layak huni dan terjangkau, belum meratanya fasilitas air bersih dan sanitasi, pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, keterbatasan ruang terbuka hijau dan taman kota serta infrastruktur dan pelayanan yang belum optimal.

#### **2.3.3.7 Persampahan**

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh cakupan wilayah pelayanan pengelolaan sampah perkotaan saat ini sudah menjangkau seluruh kecamatan Sumber sampah di Kota Sungai Penuh berasal dari sampah permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, hotel, penyapuan jalan, penyapuan taman serta sampah dari fasilitas umum lainnya. Produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2023 mencapai 50,43 ton/hari meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 44,97 ton/hari.

Penanganan persampahan di Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 71,39%, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,77%. Permasalahan adalah belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang permanen sedangkan timbunan sampah meningkat. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir sampah regional di Kabupaten Kerinci mencakup pelayanan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Pada tahun 2023 desa dengan sarana dan prasarana sampah (TPS3R) dalam kondisi baik fungsional sebesar 23,19%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pengurangan sampah melalui 3R dari tahun 2020 sebesar 180 ton/tahun atau 0,49 ton/hari (1,01% dari total timbunan sampah) menjadi 2.544,97 ton/tahun atau 6,97 ton/hari di tahun 2023 (13,83% dari total timbunan sampah). TPS3R skala desa dan kawasan dalam tahapan dimulainya operasional serta sebagian lainnya dalam proses pembangunan.



Tabel II.35  
Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

	2005	2010	2015	2020	2023
Timbulan Sampah (ton/thn)	n.a	n.a	n.a	16.414,78	18.405,31
Pengurangan Sampah melalui 3R (ton/thn)	n.a	n.a	n.a	180,00	2.544,97
Pengurangan Sampah melalui 3R (%)	n.a	n.a	n.a	1,01	13,83
Penanganan Sampah (ton/thn)	n.a	n.a	n.a	14.709,50	13.140,00
Penanganan Sampah (%)	n.a	n.a	n.a	82,77	71,39

Sumber : Dinas LH, 2024

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mencari lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Renah Kayu Embun. Namun demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah yang sesuai standar dan *establish* dalam praktek. Pengelolaan sampah yang dilakukan bukan hanya untuk memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota.

Jika memperhatikan kondisi di atas, maka harus dilakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir secara komprehensif, dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta penegakan peraturan tentang pengelolaan persampahan. Penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah pada tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Penangan sampah masih harus ditingkatkan dan memfokuskan pendekatan berbasis masyarakat atau dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dapat memberikan keuntungan dalam mereduksi sampah, mengurangi biaya pengangkutan, mengurangi pencemaran air, tanah dan udara serta menghasilkan kompos/bahan daur ulang bernilai ekonomis.

2.3.3.8 Energi/Kelistrikan

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Aspek perumahan yang perlu memperhatikan ketersediaan penerangan yang cukup. Dengan penerangan yang cukup, masyarakat bisa hidup sehat dan nyaman dalam beraktivitas.

Jaringan ketenagalistrikan di Kota Sungai Penuh terdiri dari jaringan tegangan tinggi, menengah dan rendah. Seluruh wilayah Kota Sungai Penuh telah terlayani jaringan listrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 100% di tahun 2023. Upaya pemenuhan kebutuhan listrik secara berkelanjutan sebagai sumber energi dalam aktivitas sosial ekonomi di Kota Sungai Penuh perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas listrik di masa yang akan datang melalui interkoneksi jaringan listrik Kota Sungai Penuh dan pemanfaatan energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan, dengan mulai mempersiapkan proses peralihan menuju energi alternatif.



### **2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi**

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Pertumbuhan suatu daerah sangat sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan, pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

#### **2.3.4.1 Iklim Demokrasi**

Iklim demokrasi yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Iklim demokrasi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi dini dalam mengatasi gejala pelemahan atau penguatan demokrasi.

Demokrasi Indonesia dikombinasikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Iklim demokrasi Kota Sungai Penuh relatif kondusif dan tetap memerlukan upaya peningkatan yang berkesinambungan. Iklim demokrasi yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi di Kota Sungai Penuh.

Kegiatan lima tahunan Pemilihan Umum digelar serentak seluruh Indonesia seperti pada tanggal 14 Februari 2024. Pelaksanaan Pemilu di Kota Sungai Penuh berjalan dengan aman, tertib dan lancar tidak ditemukan kendala yang berarti. Keberhasilan ini dinilai menunjukkan kedewasaan demokrasi serta kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses pemilu. Harapan semangat kebersamaan dan perdamaian diharapkan terus dijaga di masa depan untuk kemajuan Kota Sungai Penuh.

#### **2.3.4.2 Ketentraman dan Ketertiban**

Iklim berinvestasi juga sangat dipengaruhi oleh rasa aman, masalah ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu hambatan untuk meningkatkan iklim investasi. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh, persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman tahun 2023 mencapai 100%. Namun, tantangan dalam penegakan Perda dan penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sungai Penuh adalah belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan belum optimalnya peran dan fungsi linmas desa/kelurahan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum.

Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu

ditumbuhkembangkan. Angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 233 kasus meningkat menjadi 367 kasus di tahun 2023. Angka kriminalitas tersebut meliputi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama satu tahun.

Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin dan hukum berjalan dengan baik, berdampak bagi kenyamanan berinvestasi, dan mendukung kelancaran pembangunan. Artinya, semakin kondusif Kota Sungai Penuh, maka gangguan pelaksanaan pembangunan semakin kecil. Untuk menjaga kondusifitas di Kota Sungai Penuh perlu adanya kolaborasi dari berbagai *stakeholder*.

#### **2.3.4.3 Peraturan Pendukung Iklim Usaha**

Peraturan pendukung iklim usaha mencakup kebijakan yang memfasilitasi perizinan, memberikan insentif fiskal, mengatur perlindungan konsumen, serta mengatur ketenagakerjaan dan perlindungan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan menarik investasi. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, untuk menarik dan mendorong investasi di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Perizinan adalah instrumen penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana lama proses dan persyaratan pelayanan perizinan dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lama proses perizinan di Kota Sungai Penuh tahun 2023 selama 3 hari.

#### **2.3.4.4 Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu : (1) toleransi; (2) kesetaraan; dan (3) kerja sama.

Toleransi menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan sikap atau sifat menenggang yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Kesetaraan menggambarkan kondisi masyarakat bahwa setiap individu diperlakukan setara, memiliki kesempatan yang sama, dan mendapatkan perlindungan tanpa memandang perbedaan agama. Sedangkan kerja sama menggambarkan kondisi berkenaan tindakan saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan.





Kota Sungai Penuh yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama (*bonum commune*) ini diejawantahkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045, ketahanan sosial budaya dapat tercapai melalui kebijakan diantaranya diarahkan pada terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan sangat penting, melalui: (1) peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; (2) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama.

Kemajemukan kearifan lokal Kota Sungai Penuh diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan ketakwaan, membentuk satu kesatuan identitas dan kebanggaan bersama. Kebudayaan yang berlandaskan ketakwaan menjadi pendorong utama dalam transformasi sosial dan pembangunan masyarakat, sesuai falsafah: “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”.

#### **2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah**

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam persaingan global.

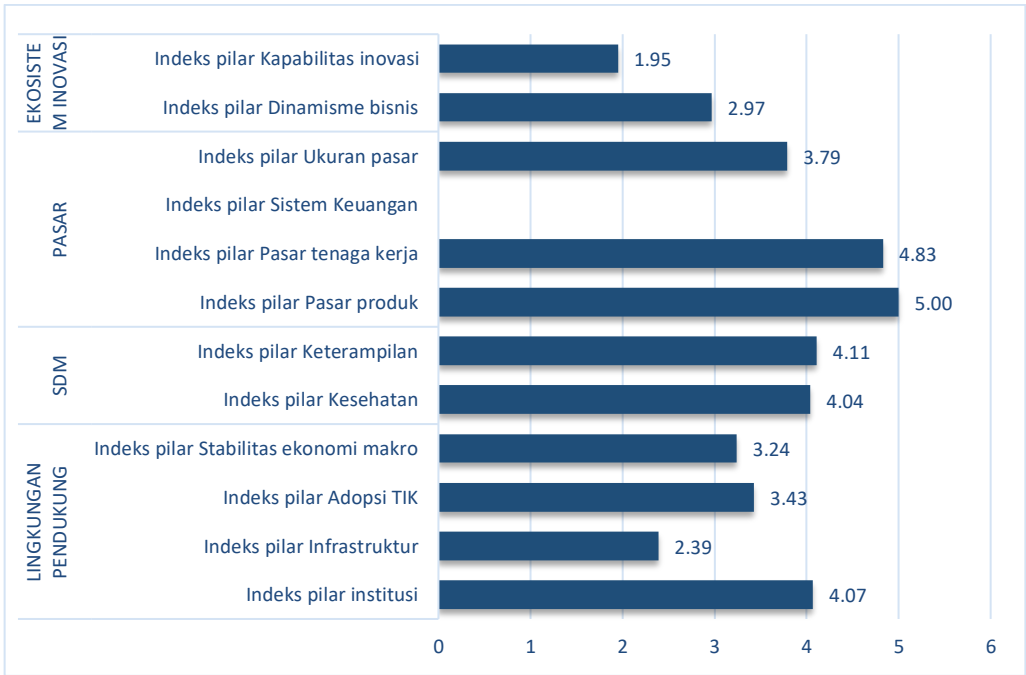
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari 4 (empat) komponen yang dielaborasi ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang



meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan keterampilan hidup yang dan erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.



Sumber: BRIN; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.65**  
**Indeks Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023**

Berdasarkan Data Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indeks Daya Saing Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 tidak tersedia data, dikarenakan tidak adanya data indeks pilar sistem keuangan. Daya Saing Daerah Kota Sungai Penuh yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah masih perlu ditingkatkan, terutama:

1. Kapabilitas inovasi : 1,95 (Ekosistem Inovasi);
2. Infrastruktur: 2,39 (Lingkungan Pendukung); dan
3. Dinamisme Bisnis : 2,97 (Ekosistem Inovasi).



2.3.4.6 Penataan Wilayah

Ruang sebagai sumber daya pembangunan lokal merupakan input yang selalu tersedia, dengan fokus perencanaan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 berfungsi sebagai pedoman pembangunan wilayah, mengakomodasi perubahan kebijakan serta dinamika pembangunan. Dengan demikian, RTRW mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah, menciptakan *multiplier effect* seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah memegang peranan penting dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Sungai Penuh. RTRW bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dalam pemanfaatan ruang, yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi para investor dalam menanamkan investasinya. Kebijakan penataan ruang selanjutnya diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dapat diterbitkan satu hari kerja melalui proses Konfirmasi KKPR.

2.3.4.7 Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap perdesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa yang memiliki ketahanan dan daya saing.

Tabel II.36  
Status Desa Kota Sungai Penuh Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

No	Uraian	Tahun				
		2005	2010	2015	2020	2023
1.	Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	38	64
2.	Desa Maju	n.a	n.a	n.a	26	1
3.	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	1	0
4.	Desa Tertinggal	n.a	n.a	n.a	0	0
5.	Desa Sangat Tertinggal	n.a	n.a	n.a	0	0
Jumlah		n.a	n.a	n.a	65	65

Sumber : Kemendes, 2024

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155. Berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, IDM Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 0,8733, yang meliputi 64 desa berstatus mandiri, dan 1 desa berstatus maju yaitu Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai.



Desa di Kota Sungai Penuh memiliki potensi sebagai pusat inovasi, memanfaatkan sumber daya alam dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dan mengadopsi teknologi hijau yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Investasi strategis di desa, melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan investor, penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur, akses pasar, dan pendampingan yang memadai.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya pembaruan dan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan dapat berkembang menjadi lebih efektif dan responsif. Reformasi birokrasi kini berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta isu prioritas nasional seperti penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Reformasi birokrasi di Kota Sungai Penuh dalam 5 tahun terakhir beralih dari birokrasi kolaboratif ke digital. Indeks reformasi meningkat dari 43,14 pada 2022 menjadi 46,37 pada 2023 (Kategori C), namun masih perlu perbaikan untuk lebih adaptif terhadap perubahan global dan tuntutan masyarakat.

Tabel II.37  
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2022
<b>A Komponen Pengungkit</b>			
I.	Pemenuhan	20,00	5,00
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,03
III.	Reform	30,00	3,02
Total Komponen Pengungkit		60,00	13,05
<b>B Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,57
3.	Pemerintahan yg bersih dan bebas KKN	10,00	7,77
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,06
Total Komponen Hasil		40,00	30,09
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	43,14

Sumber: Kemenpan&RB, 2023

Tabel II.38  
Hasil Antara Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	
			2021	2022
1.	Kualitas Kebijakan	0-100	45,15	35,26
2.	Profesionalitas ASN	0-100	45,15	27,69
3.	Implementasi SPBE	1-5	1,44	1,97
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 92	0-100	31,73	24,00



No	Hasil Antara	Skala	Nilai	
			2021	2022
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,53	3,53
6.	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2+	Level 2
7.	Maturitas SPIP	0-5	Level 2	Level 3
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	90,40	86,05
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	27,23	57,69

Sumber: Kemenpan&RB, 2023

Komponen hasil Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.39**  
**Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai
1.	Opini BPK	Opini	WTP
2.	Nilai SAKIP	0-100	67,05
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	85,70
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	77,69
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	71,02

Sumber: Kemenpan&RB, 2023

Reformasi birokrasi harus adaptif terhadap dinamika global yang cepat dan responsif terhadap perubahan di masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk mempercepat pelaksanaannya di Kota Sungai Penuh.

**2.4.2 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik di Kota Sungai Penuh selalu menjadi perhatian utama. Meski beberapa unit kerja telah mencapai kategori pelayanan prima, peningkatan kualitas belum merata di seluruh perangkat daerah. Secara keseluruhan, pelayanan publik Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 berada pada peringkat B (Baik) dengan indeks 3,53.

**Tabel II.40**  
**Indeks Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2022**

No	Komponen Hasil	Skala	2021	2022
1.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,53	3,53

Sumber: Kemenpan&RB, 2023

Sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam melayani masyarakat, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Penilaian IKM dari tahun 2018 hingga 2022 mengikuti Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel II.41  
IKM terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Tahun	Nilai Rata-rata IKM Perangkat Daerah	Kategori
2005	n.a	-
2010	n.a	-
2015	n.a	-
2020	81,94	Baik
2023	81,82	Baik

Sumber . Sekretariat Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rata-rata IKM perangkat daerah mencapai 81,94. Pada tahun 2023, nilai ini sedikit menurun menjadi 81,82 dibandingkan tahun 2020.

2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kota Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data serta sistem pemerintahan, yang pada gilirannya akan memperbaiki pelayanan publik. Upaya ini tercermin dari capaian Indeks SPBE yang meningkat pada tahun 2023. Berdasarkan evaluasi Kemenpan RB, indeks SPBE Kota Sungai Penuh tahun 2023 mencapai 2,38, meningkat dari 1,5 pada tahun 2020.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE memerlukan tata kelola terpadu yang mencakup Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Tabel II.42  
Indeks SPBE Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Tahun	Indeks SPBE	Kategori
2005	n.a	-
2010	n.a	-
2015	n.a	-
2020	1,5	kurang
2023	2,38	cukup

Sumber: Kemenpan&RB, 2023

Penerapan SPBE di Kota Sungai Penuh masih perlu ditingkatkan. Tata kelola SPBE belum sepenuhnya terintegrasi hingga unit kerja terkecil, baik untuk manajemen internal maupun pelayanan kepada *stakeholder*. Saat ini, indeks SPBE Kota Sungai Penuh hanya didukung oleh kebijakan internal dan aplikasi layanan umum dari pemerintah pusat yang bersifat wajib. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerapan SPBE perlu difokuskan pada aspek internal, perencanaan teknis, dan



pembangunan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kontekstual pelayanan di Kota Sungai Penuh.

2.4.4 Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi memberikan harapan besar untuk meningkatkan kemandirian daerah, yang berdampak positif pada pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Agar pemerintah daerah dapat mandiri dan sejahtera, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya secara profesional dan mempercepat pelaksanaan di semua aspek melalui kebijakan kreatif dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Tabel II.43  
Indeks Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh  
Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023

Tahun	Indeks Inovasi	Kategori
2005	n.a	-
2010	n.a	-
2015	n.a	-
2020	n.a	-
2023	42,96	Inovatif

Sumber : Kemendagri, 2024

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah.

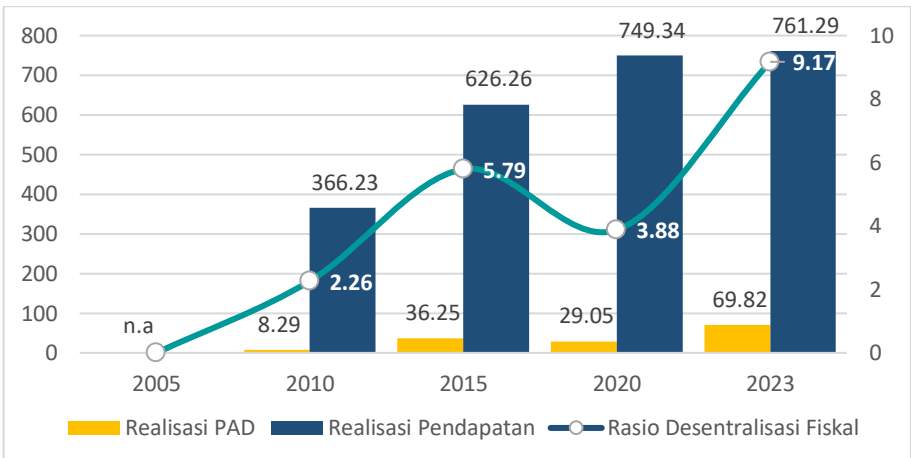
Capaian indeks inovasi daerah Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 42,96 (inovatif). Capaian inovasi Kota Sungai Penuh sejauh ini masih perlu ditingkatkan, perlu terus diupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak sebatas berbicara tentang memunculkan ide-ide baru dan kreatif, tidak terbatas pada regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus ada peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Inovasi dan teknologi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan keterlibatan sektor swasta yang belum optimal.

2.4.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan baik. Otonomi daerah diadakan dan dilaksanakan untuk kepentingan daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan

kemandirian daerah. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber: Badan Keuangan Daerah; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.66**  
**Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2023**

Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, salah satunya dapat diukur dengan indikator Rasio desentralisasi fiskal. Rasio desentralisasi fiskal dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio desentralisasi fiskal Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang meningkat meskipun terjadi penurunan di tahun 2020. Hingga tahun 2023 mencapai 9,17%. Masih rendahnya rasio desentralisasi fiskal ini, berdampak dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pemerintahan daerah.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

### 2.5.1 Refleksi Pembangunan

Perkembangan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh sejak tahun 2009 telah menunjukkan kemajuan, meskipun dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang cukup kompleks sebagai dampak dari kondisi di daerah, nasional dan global. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memajukan pembangunan daerah, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

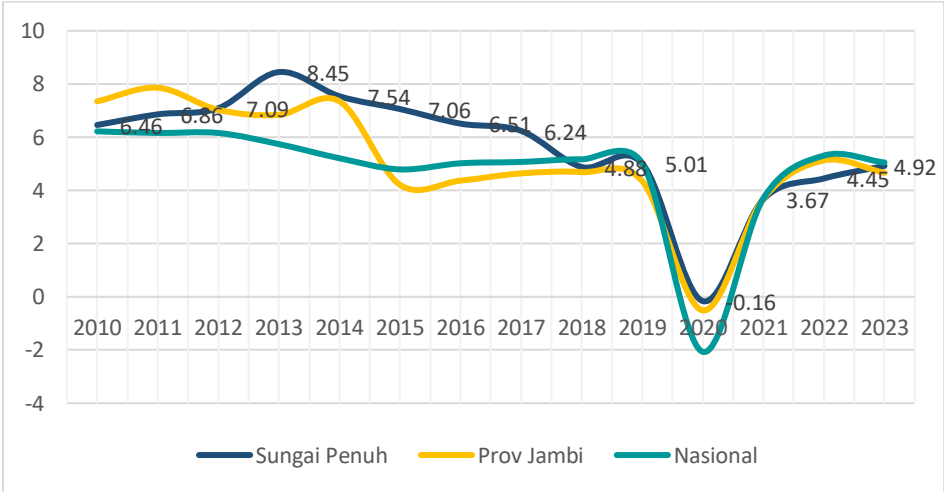
Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 yang diterjemahkan dalam pembangunan lima tahunan (RPJMD) dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, stabilitas politik dan keamanan, SDM dan infrastruktur, serta berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini pada dasarnya mengalami dinamika, namun respon yang tepat Pemerintah Kota Sungai Penuh dan para pemangku kepentingan melalui penyesuaian strategi membuat



pembangunan yang dilakukan membawa keberhasilan. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kota Sungai Penuh direfleksikan dengan indikator makro sosial ekonomi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

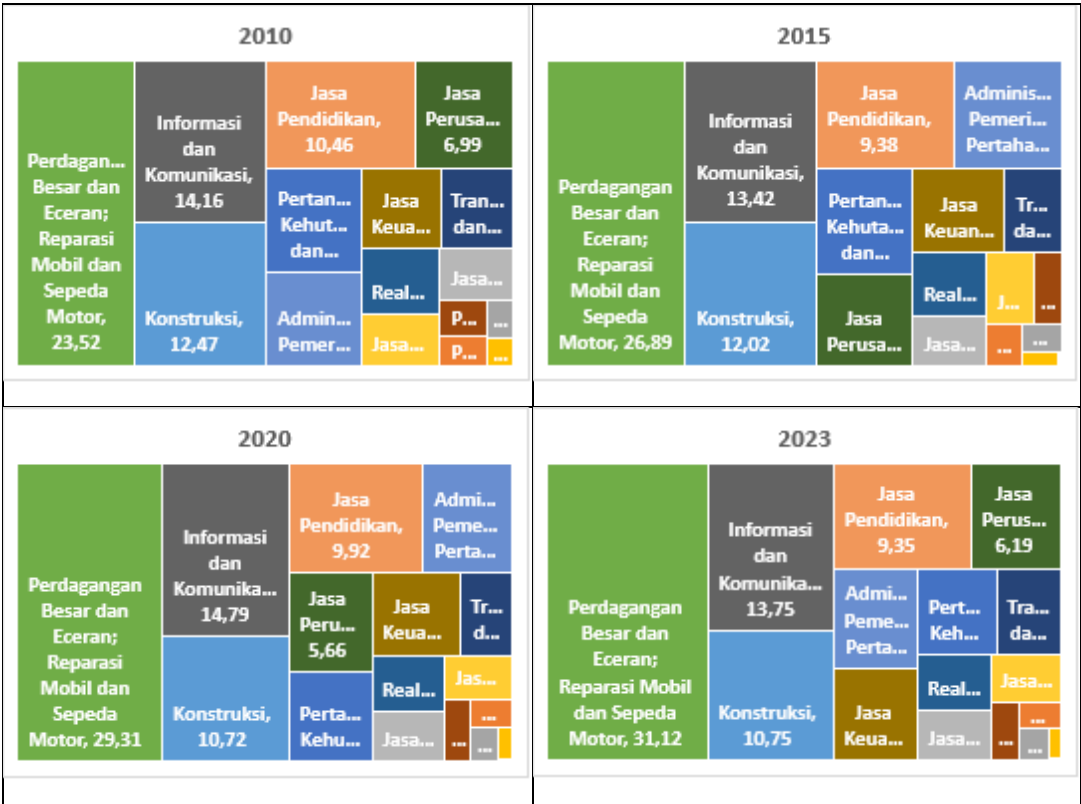
Pada Gambar II.67, terlihat bahwa perekonomian Kota Sungai Penuh tumbuh 4,92% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jambi yang sebesar 4,66%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,92%, sementara dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 14,72%. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh selama tahun 2010-2023 mencapai 5,64%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi (5,12%) dan nasional (4,75%). Sementara itu, perlambatan ekonomi tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat. Diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan daya saing daerah, produktivitas, ekosistem investasi, serta inovasi dan teknologi perlu menjadi perhatian. Semua aspek ini saling terkait dan perlu dikelola dengan baik agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.67**  
**LPE Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023**

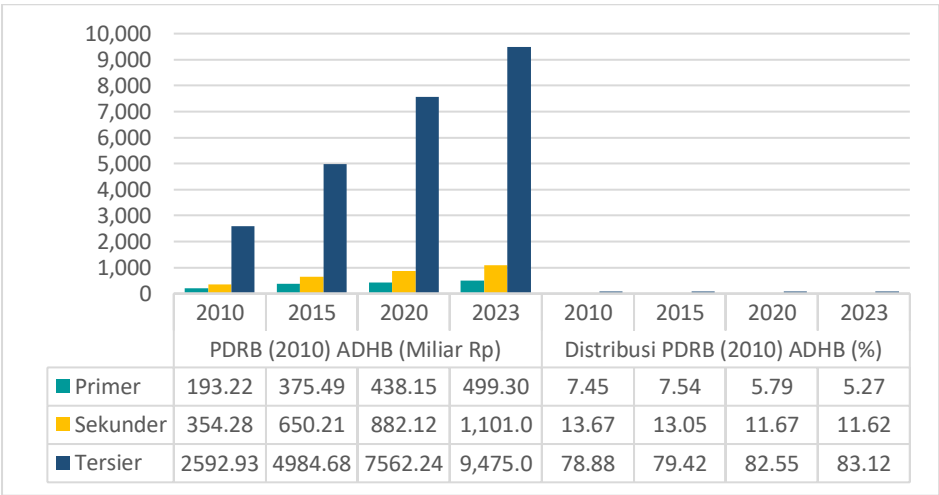
Selama periode tahun 2010-2023 struktur perekonomian Kota Sungai Penuh didominasi oleh 3 sektor yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Konstruksi. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara konsisten meningkat hingga mencapai 31,12% di tahun 2023 (Gambar II.68).



Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.68  
Struktur PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023

Sektor jasa telah menjadi dominan dalam perekonomian Kota Sungai Penuh antara tahun 2010 dan 2023, dengan peningkatan signifikan di berbagai subsektor, sementara sektor primer dan sekunder mengalami penurunan. Sektor utama penopang ekonomi Kota Sungai Penuh tahun 2010-2023 dapat dilihat pada Gambar II.69.



Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.69  
Sektor Utama Penopang Ekonomi Kota Sungai Penuh  
Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023

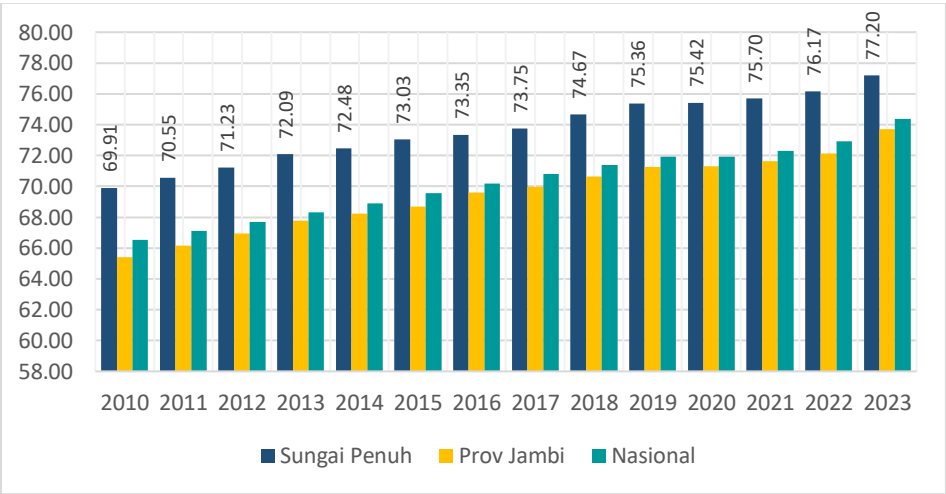
Pada tahun 2010, kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian Kota Sungai Penuh mencapai 78,88% dan terus meningkat menjadi 83,12%



pada tahun 2023. Sementara itu, sektor primer mengalami penurunan, dari 7,45% pada tahun 2010 menjadi 5,27% di tahun 2023. Begitu pula dengan sektor sekunder, yang menurun dari 13,67% menjadi 11,62% dalam periode yang sama. Perubahan ini menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

2. **Pembangunan SDM**

Pada Gambar II.70, terlihat tren positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh yang mencapai 77,20 pada tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini berada dalam kategori tinggi dan lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jambi (73,73) dan IPM Nasional (74,39). Peningkatan ini mencerminkan upaya yang kuat dalam memperbaiki kinerja sektor-sektor kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

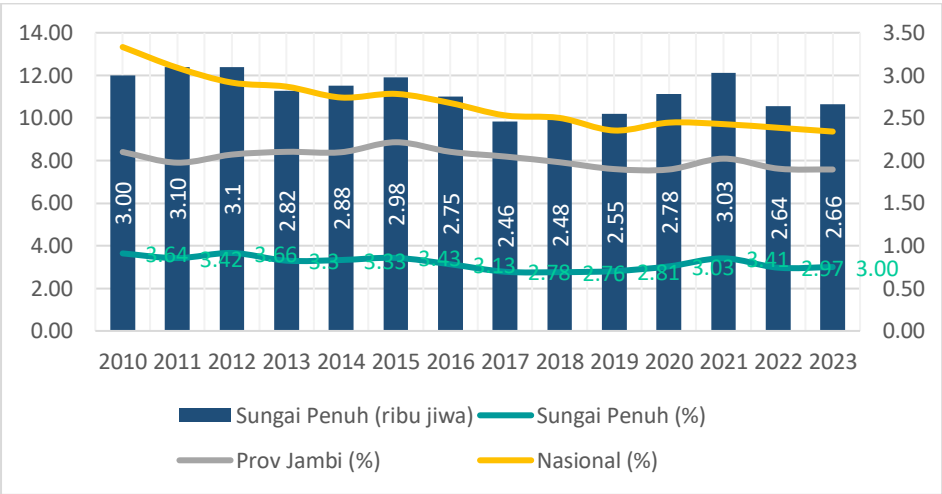


Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.70**  
**IPM Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023**

3. **Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh menunjukkan penurunan yang gradual, seperti terlihat pada Gambar II.71. Hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan sebesar 3,00%, lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jambi (7,58%) dan nasional (9,36%). Meskipun sudah berada di bawah angka tersebut, masih diperlukan strategi yang melibatkan berbagai sektor, serta memperhatikan basis data kemiskinan, agar upaya pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Upaya diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non formal serta perlindungan sosial yang terintegrasi dan adaptif juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

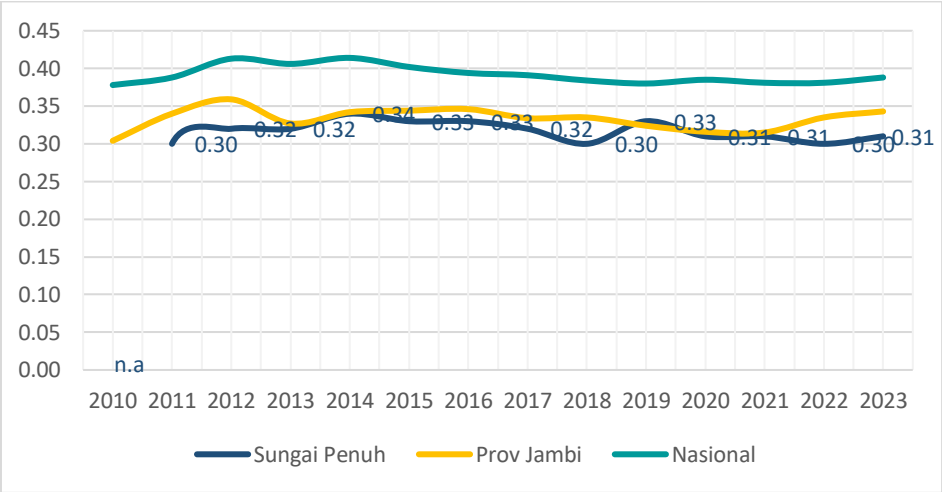
**Gambar II.71**  
**Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023**

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 dipicu oleh kondisi ekonomi global yang mempengaruhi kebijakan moneter negara mitra dagang, pelemahan nilai tukar rupiah yang mengurangi nilai ekspor, serta tekanan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Sementara itu, peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin antara tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan penurunan pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat.

**4. Ketimpangan**

Pada Gambar II.72, terlihat bahwa Indeks Gini Kota Sungai Penuh mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2023, dengan nilai yang berkisar antara 0,30 hingga 0,34. Pada tahun 2011, indeks ini berada di 0,30, meningkat menjadi 0,34 pada tahun 2014, dan kemudian cenderung stabil, dan mencapai 0,31 di tahun 2023.

Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan aksesibilitas bagi semua individu agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan peluang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat secara luas melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, juga menjadi perlu menjadi perhatian.

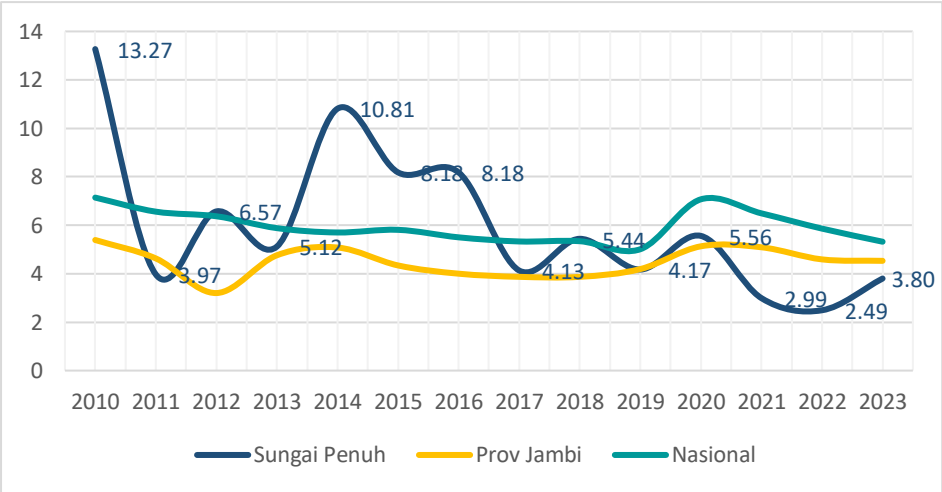


Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.72**  
**Gini Ratio Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023**

**5. Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Sungai Penuh menunjukkan tren yang menurun, sampai tahun 2023 mencapai 2,49%. TPT Kota Sungai Penuh berada dibawah TPT Provinsi Jambi (4,53%) dan nasional yang sebesar 5,32% (Gambar II.73).



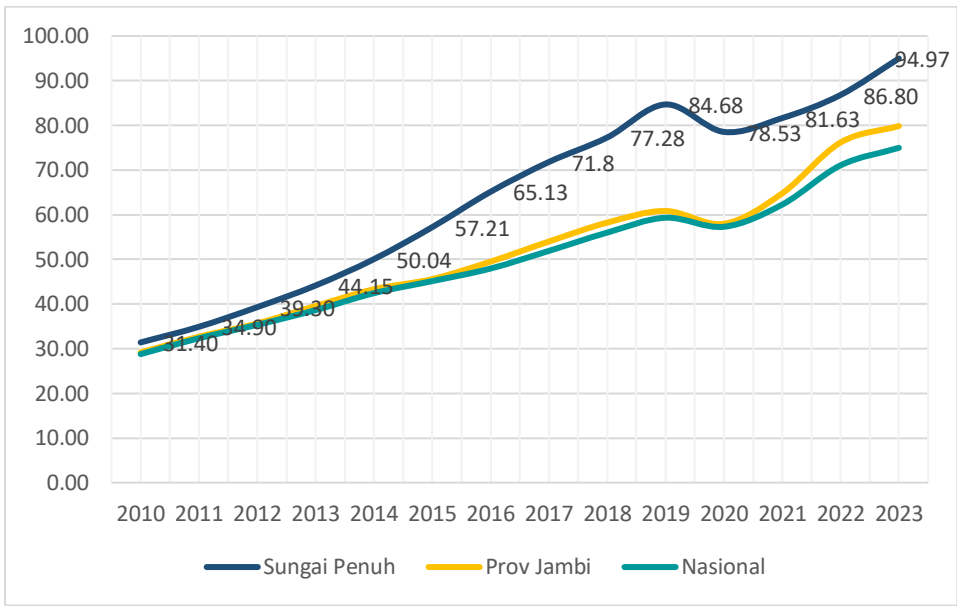
Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.73**  
**TPT Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023**

Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja meliputi penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal, peningkatan inklusivitas dalam penyerapan tenaga kerja, serta penyiapan tenaga kerja yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perlu fokus pada pengembangan tenaga kerja berbasis hijau, dan menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (*link and match*).

6. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan signifikan antara tahun 2010 hingga 2023, dari Rp 31,40 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 94,97 juta pada tahun 2023 (Gambar II.74). Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 akibat pandemi *Covid-19* yang mengurangi pendapatan, tren peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.



Sumber:BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.74  
PDRB Per Kapita Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2023

Untuk meningkatkan PDRB per kapita, penting untuk menjaga produksi dan investasi. Kestabilan inflasi juga harus diperhatikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk perlu menjadi perhatian, mengingat PDRB per kapita sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk.

2.5.2 Evaluasi Capaian RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah pada tahun 2012. Visi pembangunan jangka panjang tersebut adalah: “Kota Sungai Penuh sebagai Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan, dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan”.

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

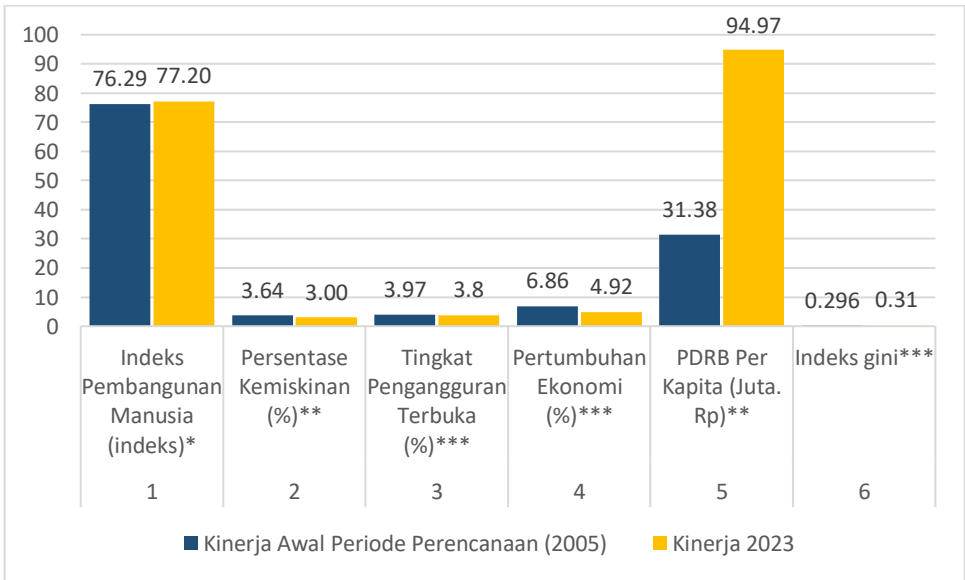
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;
2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat dan berbudaya;
3. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan



4. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang.

Pelaksanaan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dibagi menjadi empat tahapan. Tahapan Pertama (2005-2009) fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tahapan Kedua (2010-2014) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan, sementara Tahapan Ketiga (2015-2019) menekankan pencapaian hasil. Tahapan Keempat (2020-2025) berfokus pada mempertahankan dan memantapkan capaian yang telah diraih. Mengingat periode pemerintahan saat itu dimulai pada tahun 2009 dan masih dijabat oleh Penjabat Walikota, RPJMD tahap pertama tidak dimulai dari tahun 2009, melainkan pada tahun 2011 (Tahapan Kedua RPJPD).

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025, rata-rata capaian kinerja Tahap Kedua mencapai 49,84%, Tahap Ketiga 73,81%, dan Tahap Keempat 69,89%. Selama periode RPJPD 2005-2025, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh tetap terjaga di atas 4% pada setiap akhir periode lima tahunan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh juga mengalami peningkatan setiap tahun.



Sumber: BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
Catatan: )\* Data tahun awal (2008), )\*\* data tahun awal (2010), )\*\*\* data tahun awal (2011)  
(IPM Tahun 2023 : UHH Hasil Long Form SP2020)

**Gambar II.75**  
**Capaian Kinerja Indikator Makro Sosial Ekonomi**  
**RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025**

Analisis kinerja makro sosial ekonomi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa aspek kesejahteraan masyarakat dan perekonomian (Gambar II.75), yaitu:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 76,29 menjadi 77,20. Mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat.





- Persentase kemiskinan menunjukkan penurunan yang positif dari 3,64% menjadi 3,00%. Menunjukkan keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan.
- Tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari 3,97% menjadi 3,8%. Meskipun angka ini relatif rendah, adanya fluktuasi dalam pengangguran mengindikasikan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
- Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 6,86% menjadi 4,92%. Menunjukkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, dan perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing.
- PDRB Per Kapita meningkat signifikan dari Rp. 31,38 juta menjadi Rp. 94,97 juta. Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meskipun perlu diimbangi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.
- Indeks gini menunjukkan sedikit peningkatan dari 0,296 menjadi 0,31, yang mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang masih harus diperhatikan dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa indikator, tantangan tetap ada khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa permasalahan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah dan perlu ditindaklanjuti dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045, yaitu: (1) daya saing perekonomian; (2) pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia; (3) tingkat kemiskinan dan pengangguran; (4) pengelolaan kesehatan; (5) pembangunan kesejahteraan sosial; (6) penanganan persampahan; (7) banjir dan genangan; (8) ketersediaan, cakupan, serta kualitas sarana dan prasarana; (9) kualitas lingkungan hidup, tata ruang, dan kebencanaan; (10) permukiman kumuh; dan (11) tata kelola pemerintahan.

## **2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dan mengakses layanan maupun infrastruktur dasar

Aspek demografi serta kebutuhan sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dalam perumusan kebijakan dan rencana pembangunan. Kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik memerlukan proyeksi demografi untuk dapat

menangkap dinamika perkembangan kebutuhan yang perlu direncanakan pada masa mendatang. Kedua aspek ini dapat memberikan manfaat bagi suatu wilayah, yaitu:

**1. Manfaat proyeksi demografi:**

- a. Perencanaan ekonomi: Proyeksi demografi membantu pemerintah dan lembaga lainnya merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang. Dengan mengetahui perkiraan jumlah penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien.
- b. Perencanaan pendidikan: Proyeksi demografi membantu dalam merencanakan kebutuhan pendidikan di masa depan. Hal ini membantu lembaga-lembaga pendidikan mempersiapkan diri untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas berdasarkan perkiraan jumlah siswa.
- c. Perencanaan kesehatan: Proyeksi demografi dapat membantu sektor kesehatan merencanakan kapasitas fasilitas kesehatan, memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan, dan mengidentifikasi kelompok-kelompok risiko.
- d. Perencanaan pasar tenaga kerja: Dengan memahami proyeksi demografi, perencanaan pasar tenaga kerja menjadi lebih efisien. Pemerintah dan sektor bisnis dapat merencanakan pelatihan, pendidikan, dan kebijakan penyerapan tenaga kerja.

**2. Manfaat pemenuhan sarana prasarana/infrastruktur publik:**

- a. Peningkatan kualitas hidup: Infrastruktur yang memadai meningkatkan kualitas hidup penduduk. Akses mudah ke air bersih, sanitasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan mendasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pendorong pertumbuhan ekonomi: Infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik, transportasi umum, dan konektivitas internet memudahkan perdagangan dan bisnis.
- c. Peningkatan aksesibilitas: Infrastruktur yang memadai meningkatkan aksesibilitas ke pasar, peluang pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.
- d. Dengan memadukan proyeksi demografi dan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur, pemerintah dan organisasi terkait dapat merencanakan investasi jangka panjang yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk.

**2.6.1 Proyeksi Demografi**

Proyeksi demografi adalah perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk struktur usia dan karakteristik lainnya akan berubah di masa depan berdasarkan tren dan pola yang terjadi di masa lalu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Distribusi penduduk di masa depan berdasarkan tren demografi saat ini.



Proyeksi demografi umumnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

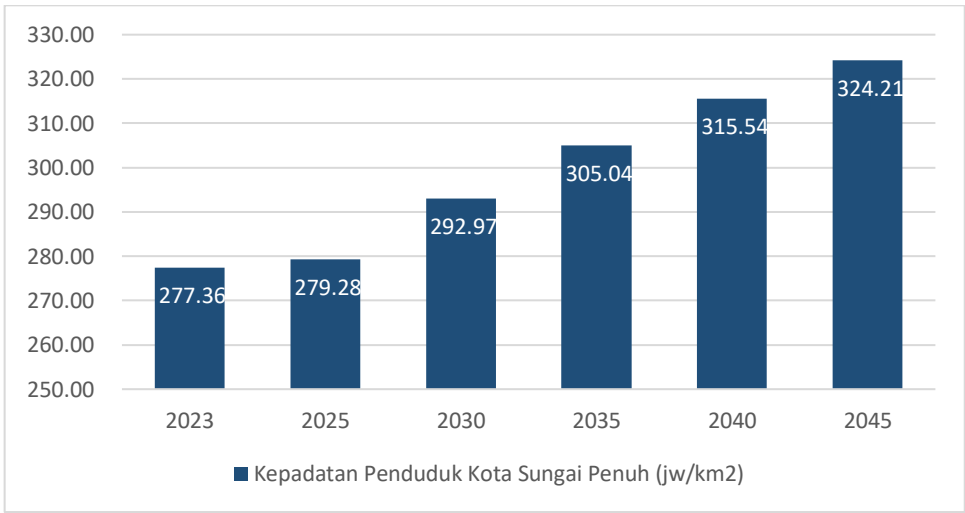
Proyeksi jumlah penduduk adalah suatu gambaran terkait ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel II.44  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)*	Proyeksi Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
101.216	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311

Sumber: )\* Dinas Dukcapil 2023, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020

Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota diproyeksikan terus mengalami peningkatan, sampai pada tahun proyeksi maksimum yaitu tahun 2045 mencapai 118.311 jiwa (Tabel II.44).



Sumber : BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020; diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.76  
Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan besaran jumlah penduduk terhadap luasan wilayah kota (jumlah penduduk/luas wilayah) yang menghasilkan kepadatan kumulatif terhadap luasan wilayah Kota Sungai Penuh. Pada Gambar II.76 di atas, terlihat bahwa proyeksi kepadatan penduduk di Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Hal ini menjelaskan bahwa daya tampung di Kota Sungai Penuh yang tetap, sedangkan kebutuhan lahan sendiri terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk sampai tahun 2045.



2.6.1.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk

Berdasarkan Mantra (Demografi Umum, 2012), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk, yaitu:

1. Kelahiran (fertilitas), termasuk didalamnya adalah peristiwa bayi yang terlahir dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Sehingga apabila bayi yang lahir tidak berhasil hidup, maka tidak dihitung sebagai kelahiran. Fertilitas juga memiliki faktor yang mempengaruhinya yang disebut dengan istilah pronatalitas. Pronatalitas dapat dipicu oleh pernikahan usia dini, dan anggapan baik yang dipercaya akan terjadi ketika sudah menikah. Adapun yang bersifat sebagai penghambat kelahiran disebut anti natalitas. Contohnya adalah kasus-kasus kelahiran rendah karena mengikuti program KB, aturan batasan usia menikah, penghasilan serta pola pikir tentang penundaan pernikahan.
2. Kematian (mortalitas), ditandai dengan hilangnya tanda-tanda kehidupan dalam diri seseorang. Tingkat mortalitas penduduk juga dapat menjadi salah satu indikator kualitas kesehatan.
3. Migrasi penduduk, meliputi keluar dan masuknya penduduk untuk menetap pada suatu wilayah. Dapat dikatakan pula bahwa migrasi adalah tempat tinggal mobilitas penduduk secara geografis yang meliputi semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu.

Perhitungan perkembangan penduduk, baik dari segi jumlah maupun penambahan dan/atau perubahan penduduk, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pengaruhnya menggunakan indikator-indikator yang sesuai. Untuk angka kelahiran, digunakan indikator *Total Fertility Rate (TFR)*; angka kematian diukur melalui *Infant Mortality Rate (IMR)* dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir; sedangkan angka migrasi menggunakan indikator *Age Specific Net Migration Rate (ASNMR)*.

Tabel II.45  
Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas, Migrasi Kota Sungai Penuh

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS					
Total Fertility Rate (TFR)	2,13	2,10	2,07	2,04	2,01
MORTALITAS					
Infant Mortality Rate (IMR)	13,97	12,42	10,61	9,77	9,05

Sumber : BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020

Dilihat dari hasil proyeksi indikator penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2025-2045, aspek fertilitas dan mortalitas terjadi penurunan, yaitu:

- Total Fertility Rate (TFR) diproyeksikan turun dari 2,13 di tahun 2025 menjadi 2,01 di tahun 2045.
- Infant Mortality Rate (IMR) diproyeksikan turun dari 13,97 di tahun 2025 menjadi 9,05 di tahun 2045.



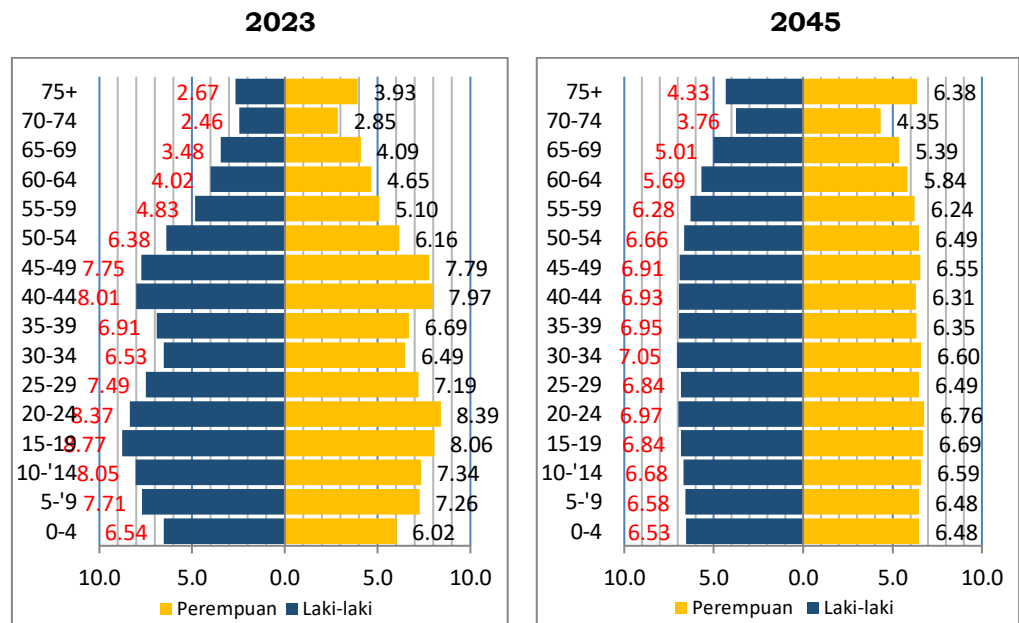
2.6.1.3 Perkembangan Struktur Penduduk

BPS telah memproyeksikan penduduk selama 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020-2045. Struktur penduduk Kota Sungai Penuh akan mengalami perubahan, terutama pada kelompok usia lanjut yang semakin meningkat. Dilihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok usia, proyeksi komposisi penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2045 akan didominasi oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-59 tahun (59,97%), disusul oleh kelompok usia lanjut produktif dan tidak produktif yakni usia 60 tahun ke atas (20,35%), dan terakhir kelompok usia muda/belum produktif rentang usia 0-14 tahun (19,67%).

Tabel II.46  
Komposisi Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Komposisi Penduduk (%)	2023*	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	21,47	23,26	22,26	21,41	20,41	19,67
15 - 59	64,46	63,96	63,12	61,92	60,84	59,97
60 - 64	4,34	4,49	4,96	5,45	5,83	5,76
65+	9,74	8,29	9,66	11,22	12,93	14,59

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020, diolah oleh Bappeda, 2024



Sumber :Dinas Dukcapil, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020, diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar II.77  
Proyeksi Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2045

A. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk analisis dari sudut pandang gender. Informasi ini diperlukan, mengingat pembangunan seringkali memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Kondisi tersebut sebetulnya terlihat dari sejumlah indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).





Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (Tabel II.47) menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan tahun 2045 cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2045 memiliki rasio 102,40, yang artinya jumlah laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah perempuan.

**Tabel II.47**  
**Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2025-2045**

Jenis Kelamin	2023*	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	50.892	51.292	53.953	56.255	58.239	59.857
Perempuan	50.324	50.624	52.959	55.061	56.910	58.454
Rasio	101,13	101,32	101,88	102,17	102,34	102,40

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020

Berdasarkan proyeksi penduduk ini, pembangunan di Kota Sungai Penuh perlu memastikan kesetaraan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur bagi seluruh penduduk, terutama bagi kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak).

**B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Pengelompokan usia penduduk salah satunya didasari oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) yang mengkategorikan masyarakat kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok usia muda (<15 tahun), kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun), dan masyarakat usia non produktif (>65 tahun). Pada rentang usia 15-64 tahun tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, membangun karir, membangun keluarga, aktif terlibat dalam pembangunan dan sebagainya. Dalam konsep ekonomi, usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa.

**Tabel II.48**  
**Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2025-2045**

Kelompok Umur	2023*	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	21.727	23.706	23.797	23.829	23.497	23.272
15-64	69.634	69.759	72.790	74.993	76.762	77.773
>65 Tahun	9.855	8.451	10.325	12.494	14.890	17.266
Angka	45,35	46,10	46,88	48,44	50,01	52,12

Keterangan

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020-2045 yang mendasarkan pada hasil sensus penduduk tahun 2020, didapatkan angka bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Sungai Penuh tahun 2045 sebesar 65,74% dari proyeksi jumlah penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2045 yang sebesar 118.311 penduduk (Tabel II.48).



C. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah di Kota Sungai Penuh didefinisikan penduduk yang berusia antara 5-24 tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020-2045, jumlah penduduk usia sekolah di Kota Sungai Penuh tahun 2045 sebesar 31.701 jiwa atau sekitar 26,79% dari jumlah penduduk Kota Sungai Penuh hasil proyeksi tahun 2045 (Tabel II.49), dengan rincian sebagai berikut:

- Proyeksi penduduk usia sekolah kelompok 5-9 tahun menurun sampai tahun 2025, meskipun terjadi peningkatan di tahun 2030, namun selanjutnya menurun sampai tahun 2045; dan
- Proyeksi penduduk usia sekolah kelompok 10-14 tahun dan 15-19 tahun dan 20-24 tahun, berfluktuatif selama periode tahun 2025-2045.

Tabel II.49  
Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	2023*	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5-9	7.578	7.769	8.064	7.942	7.802	7.725
10-14	7.792	7.891	7.810	8.107	7.988	7.848
15-19	8.519	7.706	7.905	7.824	8.126	8.004
20-24	8.486	7.665	7.701	7.905	7.823	8.124

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020

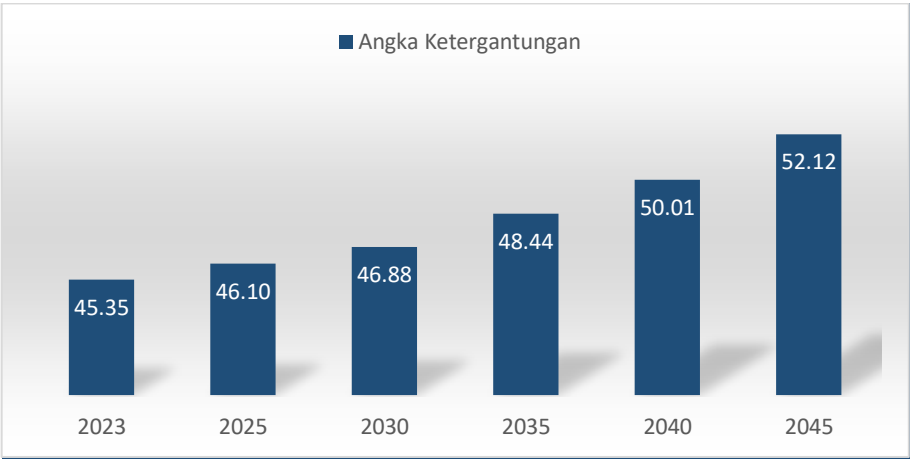
Kebijakan pendidikan khususnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) perlu dipertimbangkan dalam rangka memadainya jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kota Sungai Penuh.

2.6.1.4 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

A. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada diluar usia angkatan kerja. Selain itu, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit untuk berkembang, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi.

Proyeksi rasio ketergantungan penduduk Kota Sungai Penuh sampai tahun 2035 di bawah 50%, artinya penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Hal ini menjadi kesempatan bagi Kota Sungai Penuh untuk dapat mengoptimalkan penduduk usia produktif dalam pembangunan. Namun pada sisi lain, gambar di atas juga menunjukkan tren rasio ketergantungan penduduk Kota Sungai Penuh terus meningkat yang mana beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif semakin tinggi, bahkan proyeksi tahun 2045 mencapai 52,12% (Gambar II.78).



Sumber: Dinas Dukcapil (2023), BPS; Hasil Pengolahan Data Long Form, SP 2020; diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar II.78**  
**Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Sungai Penuh untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk usia produktif sebagai pelaku pembangunan yang berkualitas. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga perlu mendorong terciptanya penduduk lanjut usia yang produktif (lansia produktif) sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif dan terciptanya penduduk lanjut usia produktif (lansia produktif) diperlukan berbagai infrastruktur pendukung.

**B. Bonus Demografi (*Demographic Dividend*)**

Bonus demografi diartikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran struktur usia penduduk, terutama ketika jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk non-usia kerja (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) dan lebih tua (*UNFPA/United Nations Population Fund*). Di Indonesia, fenomena bonus demografi terjadi karena proses transisi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan yang menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan.

Bonus demografi merupakan masa emas bagi suatu negara dimana provinsi dan kab/kota yang berada didalamnya akan berdampak baik positif maupun negatif. Secara positif, bonus demografi akan sangat mendukung upaya untuk mencapai target generasi emas di tahun 2045 dengan pilar pembangunan Indonesia 2045. Di sisi lain, bonus ini dapat berubah menjadi bencana besar apabila tidak dipersiapkan dalam menghadapi tantangan dan isu permasalahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, diantaranya *megatrend* dunia 2045 sebagai isu global, *megathrust* dan kemajuan teknologi serta geopolitik dan geoekonomi. Bonus demografi ini ditentukan oleh sejumlah indikator demografis yang mencerminkan distribusi usia penduduk suatu negara atau wilayah,



berikut ini beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur bonus demografi, meliputi: (1) persentase penduduk usia produktif; (2) rasio ketergantungan atau *dependency ratio*; (3) laju pertumbuhan penduduk; (4) Usia Harapan Hidup (UHH); (5) fertilitas (tingkat kelahiran); dan (6) migrasi.

Periode bonus demografi Indonesia dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2041. Puncak dan akhir bonus demografi ini memerlukan kebijakan khusus yang dapat memanfaatkan momen bonus demografi dimaksud. Adapun tantangan dalam menghadapi bonus demografi antara lain:

- Penyesuaian pergeseran lapangan kerja ke arah informal dan kemunculan bentuk kerja baru yang bersifat sangat fleksibel.
- Menciptakan pasar kerja yang fleksibel mengikuti perubahan lapangan kerja yang cepat.
- Menciptakan tenaga kerja dengan keahlian tinggi (*high-skilled*) dan menengah (*semi-skilled*) yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Sistem pengembangan keahlian (*skill development system*) kita masih parsial dan belum berbasis kebutuhan pasar kerja.
- Perlindungan pekerja masih parsial, belum banyak menjangkau sektor informal.
- Masalah kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam mengantisipasi kondisi bonus demografi dan menangkap peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan wilayah, diperlukan strategi dan arah kebijakan terkait ketenagakerjaan yang memperhatikan investasi SDM penduduk usia muda dan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan produktif dengan masa kerja yang lebih panjang. Angkatan kerja yang tangguh, inovatif, adaptif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global harus dipersiapkan dari sekarang.

Pembangunan kependudukan di Kota Sungai Penuh disusun untuk mengatur populasi penduduk sesuai dengan kemampuan wilayah serta daya dukung dan daya tampung wilayah, infrastruktur dan infrastruktur digital yang mampu memberikan aksesibilitas dan komunikasi antar warga masyarakat yang berdampak pada ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berjalan dengan efektif dan efisien, produksi pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan pangan serta kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan jaminan kegiatan ekonomi serta layanan dasar bagi masyarakatnya. Faktor lain adalah kemampuan wilayah dalam menjamin keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, rumah tinggal, pangan yang layak sehingga daerah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi penduduknya dengan pengarusutamaan gender. Adapun cara memanfaatkan bonus demografi, adalah:

- Meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi kesehatan dan pendidikan seperti program intervensi gizi pada ibu hamil, 1.000 hari pertama kehidupan anak dan balita untuk meningkatkan kualitas

penduduk, peningkatan akses lulusan sekolah menengah/ sederajat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi.

- Mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi serta meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas penduduk.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat kemiskinan.

### 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kota Sungai Penuh merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Sungai Penuh dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Sungai Penuh. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif bagi aspek kehidupan masyarakat.

Sarana prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana prasarana dalam pembangunan bervariasi, tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan dan konteks geografis. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana memuat kebutuhan hunian, air bersih, energi/kelistrikan, pengelolaan persampahan, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan.

Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh secara efektif. Penambahan kebutuhan sarana prasarana disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang sudah ada (eksisting).

#### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah. Sementara itu, data *backlog* dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah.

Berdasarkan metode perhitungan kebutuhan rumah perspektif memiliki yang digunakan oleh BPS, kebutuhan rumah yang disebut sebagai *backlog* rumah adalah selisih antara jumlah rumah tangga (KK) dan rumah milik yang ada di suatu wilayah. Metode ini tidak mengasumsikan jumlah jiwa dalam satu rumah tangga seperti asumsi 5 jiwa/KK dalam SNI 03-1733-2004. Metode ini lebih tepat digunakan karena data demografi rumah tangga tidak dapat dilakukan secara *top*





down (nasional). Data demografi harus dilakukan secara *bottom up* karena karakter rumah tangga dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat kabupaten/kota. Selain itu, rumah sewa, dinas atau lainnya tidak diperhitungkan dalam metode ini karena diasumsikan sebagai tempat tinggal sementara. Hal ini penting bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman karena setiap warga negara berhak memiliki rumah hunian yang layak.

Tabel II.50  
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah				
			2025	2030	2035	2040	2045
A.	Jumlah Penduduk (jiwa)	101.216	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
B.	Rumah Milik (unit)	20.899 (diasumsikan tetap)	4 (diasumsikan tetap sebagai karakteristik rumah tangga di Kota Sungai Penuh)				
C.	Rumah Sewa (unit)	932					
D.	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga	4 (diasumsikan tetap sebagai karakteristik rumah tangga di Kota Sungai Penuh)					
E.	Jumlah Rumah Tangga (A/D)	25.304	25.479	26.728	27.829	28.787	29.578
F.	Proyeksi Kebutuhan Rumah Backlog (E – B)	4.405	4.580	5.829	6.930	7.888	8.679

Sumber: Pendataan Rumah Sewa dan RTLH Kota Sungai Penuh, 2023; RTRW Kota Sungai Penuh 2024-2044; diolah oleh Bappeda, 2024.

Berdasarkan hasil pendataan rumah sewa dan RTLH oleh Dinas PKPP Kota Sungai Penuh tahun 2023, terdapat 20.899 unit rumah milik dari 25.304 rumah tangga di Kota Sungai Penuh, sehingga *backlog* (kebutuhan rumah milik yang belum tersedia) berjumlah 4.405 unit. Hasil pendataan ini menunjukkan rasio 4 jiwa/KK di tahun 2023 sebagai karakteristik rumah tangga di Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, kebutuhan rumah dapat diproyeksikan berjumlah 4.580 unit di tahun 2025 dan terus meningkat menjadi 8.679 unit di tahun 2045.

Terdapat 1.334,23 Ha luas kawasan perumahan dalam RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044. Luas ini belum mempertimbangkan kebutuhan atau luas minimum peruntukan PSU (berkisar antara 20% - 50% dari luas permukiman) yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, perbedaan preferensi pembangunan hunian secara swadaya oleh masyarakat dan faktor pengurang lainnya. Di samping itu, kawasan perumahan tersebut juga tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan kepadatan penduduk yang bervariasi antar-kecamatan. Oleh karena itu, hasil proyeksi kebutuhan rumah di Kota Sungai Penuh sampai tahun 2045 juga menjadi indikasi munculnya urgensi kebutuhan alternatif hunian, tidak hanya disebabkan keterbatasan lahan, harga tanah yang semakin tinggi dan tingkat keterjangkauan rumah yang semakin rendah, tetapi juga pola penyebaran yang dapat menimbulkan kepadatan penduduk.



Hasil proyeksi ini menunjukkan pentingnya penataan kawasan perumahan dan permukiman di samping penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terus diupayakan. Upaya ini tentu tidak hanya pada pengendalian tata ruang dan pemanfaatan ruang. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga perlu memperkuat kelembagaan dan meningkatkan peran Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan PKP. Selain itu, kerja sama dengan pihak pengembang perumahan, sosialisasi kepada masyarakat dan upaya konkrit lainnya juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap kualitas perumahan dan permukiman.

Rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) merupakan alternatif hunian yang belum tersedia dan patut diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berdasarkan kriteria dalam SNI 03-1733-2004, Rusun dapat dibangun di:

1. Pusat kegiatan kota;
2. Kawasan padat penduduk atau berpotensi melebihi ambang batas kepadatan penduduk 200 jiwa/Ha; dan/atau
3. Kawasan khusus yang membutuhkan rumah susun seperti pencegahan dan/atau penanganan kawasan permukiman kumuh, relokasi untuk masyarakat terdampak program pemerintah dan korban bencana.

Penerima manfaat penyediaan Rusus juga telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 Pasal 9 ayat 1, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara;
2. Masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
3. Masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional (bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial);
4. Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
5. Masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat;
6. Pekerja industri atau masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
7. Pekerja pariwisata atau masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata, yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;
8. Transmigran atau masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
9. Masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
10. Masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar



budaya, petugas medis, atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengelolaan sumber daya alam.

Perencanaan alternatif hunian seperti Rusun dan Rusus mencakup penyiapan lahan atau aset pemerintah, kerja sama dengan pengembang perumahan dan alternatif sumber pendanaan baik untuk pembangunan maupun subsidi bagi penghuni. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pergeseran preferensi terkait kepemilikan rumah sesuai dengan karakteristik sosial budaya di Kota Sungai Penuh.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial berupa industri, perkantoran dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Kebutuhan non domestik diasumsikan 20% dari kebutuhan domestik. Proyeksi kebutuhan air total merupakan penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik ditambah sejumlah air untuk kehilangan yang tidak dapat ditanggulangi baik secara teknis maupun ekonomis.

Tabel II.51  
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	101.216*	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/dtk)	258,10	290,46	320,74	333,95	345,45	354,93

Sumber: \*) Dinas Dukcapil, BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Sungai Penuh (Tabel II.51). Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Sungai Penuh mencapai 290,46 liter/detik dengan jumlah penduduk 101.916 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Sungai Penuh 354,93 liter/detik dengan jumlah penduduk 118.311 jiwa.

Pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut dilakukan melalui kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan SPAM, terdiri dari SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang dikelola PDAM/Pengembang/Kelompok Masyarakat ataupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) yang dikelola oleh masyarakat.



Tuntutan penyelenggaraan SPAM di masa depan diamanatkan dalam SDGs yakni air yang dikonsumsi masyarakat adalah air minum aman yang memiliki prinsip pemenuhan kebutuhan air minum 4K yakni: Kuantitas (sesuai dengan standar kebutuhan air minum), Kualitas (sesuai dengan standar kesehatan), Kontinuitas (mencukupi kebutuhan air selama 24 jam), dan Keterjangkauan (mudah diakses dengan biaya yang terjangkau).

Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sangat bergantung kepada ketersediaan air baku baik dari air permukaan (sungai, danau, waduk), air tanah, mata air dan air tadah hujan. Perencanaan penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi dengan ketersediaan air baku menjadi suatu keharusan, sehingga diperlukan sinkronisasi program SPAM dengan program pengelolaan sumber daya air di Kota Sungai Penuh.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan

Kebijakan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Namun sebelumnya pengelolaan persampahan lebih banyak bertumpu pada konsep lama/konvensional yang bersifat “kumpul – angkut – buang” yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir.

Tabel II.52  
Timbulan Sampah Per Kapita (SNI 3242:2008)

Timbulan sampah per kapita	volume	berat	Berat jenis sampah
Merupakan sampah yang dihasilkan oleh setiap orang per hari. Nilai ini didapatkan dari hasil sampling sampah (dalam Master Plan Persampahan atau studi terkait lainnya). Apabila sampling tidak dilakukan, silakan gunakan SNI 3242-2008 (Kota Besar 3 l/orang/hari, Kota Kecil 2,5 l/orang/hari).	2.50 liter / orang / hari	0.50 kg / orang / hari	didapatkan dari hasil sampling sampah (dalam Master Plan Persampahan atau studi terkait lainnya). Apabila sampling tidak dilakukan, silahkan gunakan 200-300 kg/m3 (0.2-0.3 kg/L).
			0.2 kg/liter

Sumber: SNI 3242:2008

Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Dengan mempertimbangkan standar proyeksi kebutuhan, Proyeksi kebutuhan sarana prasarana persampahan Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel II.53 dibawah ini.

Tabel II.53  
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	101.216*	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
Proyeksi Timbulan Sampah	50.608	50.958	53.456	55.658	57.575	59.156
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional	1	1	1	1	1	1



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	1	1	1	1	1	1
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	1	1	1	1	1	1

Sumber: )\* Dinas Dukcapil, BPS; diolah oleh Bappeda, 2024 (0,5 kg/org/ hr : SNI 3242:2008); RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044; (Sarana dan prasarana persampahan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan/standar)

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang” yang memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengolahan Akhir Sampah (TPAS). Dalam paradigma ini, sampah yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu. Penting bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk segera mengatasi permasalahan TPAS dalam infrastruktur persampahan. Diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan baru TPAS. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kampanye edukasi dan promosi tentang pengurangan sampah serta pemisahan sampah di tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem pengelolaan sampah. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat penting. Pembangunan infrastruktur persampahan yang memadai akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan Kota Sungai Penuh, melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan





faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

**Tabel II.54**  
**Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	101.216*	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
Jumlah Rumah	25.304	25.479	26.728	27.829	28.787	29.578
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Juta VA)	63,77	64,21	67,35	70,13	72,54	74,54

Sumber: )\* Dinas Dukcapil, BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
Penyediaan kebutuhan daya listrik untuk sarana lingkungan perumahan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga, dimana standar minimal pelayanan daya listrik per jiwa untuk setiap unit rumah tangga adalah 450 VA (SNI 03-1733-2004)

Hasil proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan di Kota Sungai Penuh (Tabel II.54), pada tahun 2025 mencapai 63,77 Juta VA atau 63.770 kilowatt dengan jumlah penduduk 101.916 jiwa dan 25.304 rumah tangga. Apabila diproyeksikan hingga tahun 2045, diperoleh proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan di Kota Sungai Penuh 74,54 Juta VA atau 74.540 kilowatt dengan jumlah penduduk 118.311 jiwa dan 29.578 rumah tangga.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan listrik di Kota Sungai Penuh, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, diperlukan alternatif sumber penyediaan energi listrik yang lebih ramah lingkungan sekaligus lebih ekonomis untuk jangka panjang. Penyediaan tenaga listrik di Kota Sungai Penuh tahun 2023 ini merupakan interkoneksi Sumbagsel.

**2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan**

Untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang diproyeksi bertambah setiap tahunnya, diperlukan rencana proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Penyediaannya berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani, sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini mempertimbangkan jangkauan radius area layanan.

Pada tahun 2023 terdapat 2 rumah sakit milik Pemerintah Kota Sungai Penuh. Namun terkait pelayanan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan perlu menjadi perhatian termasuk klasifikasi dan pengembangannya yang perlu menjadi fokus utama. Dibutuhkan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.



Tabel II.55  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	101.216*	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3
- Puskesmas	11	11	11	11	11	11
- Posyandu	78	82	86	89	92	95

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; diolah oleh Bappeda, 2024  
(Fasilitas kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan/ standar)

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan di Kota Sungai Penuh (Tabel II.55), pada tahun 2025 Posyandu diproyeksikan sebanyak 82 unit dan klinik bersalin 3 unit dengan jumlah penduduk 101.916 jiwa. Apabila diproyeksikan hingga tahun 2045, diperoleh proyeksi kebutuhan Posyandu 95 unit dan klinik bersalin 4 unit dengan jumlah penduduk 118.311 jiwa. Untuk rumah sakit dan puskesmas hasil proyeksi sampai tahun 2045 sudah melebihi standar (1 puskesmas untuk 120.000 jiwa penduduk), dimana sudah terdapat 3 rumah sakit dan 11 unit puskesmas (2 rumah sakit merupakan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh).

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan sebagai upaya untuk merencanakan dan mempersiapkan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Untuk itu, proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat diartikan sebagai perkiraan mengenai infrastruktur fisik dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung sistem pendidikan di masa depan. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kota Sungai Penuh tahun 2025-2045 disajikan pada Tabel II.56 dibawah ini.

Tabel II.56  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	101.216*	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	37	82	86	89	92	95
- SD/MI	84	64	67	70	72	74
- SMP/MTs	19	21	22	23	24	25
- SMU/SMK/MA	15	21	22	23	24	25

Sumber : )\* Dinas Dukcapil, BPS; diolah oleh Bappeda, 2024

Penempatan penyediaan fasilitas ini mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan fasilitas yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Dalam merencanakan fasilitas pendidikan harus memperhatikan:

1. Berapa jumlah siswa/anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
2. Optimalisasi daya tampung dengan satu *shift*;
3. Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
4. Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; dan
5. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Proyeksi ini penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa dan staf pengajar/tenaga pendidik serta untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat terus berlanjut. Hal tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sistem pendidikan, usia sekolah dan tingkat pelayanannya.

Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh berkaitan langsung dengan pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP. Dalam proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan karena dapat berpengaruh terhadap hasil proyeksi tersebut, yaitu:

1. Pertumbuhan populasi; berpengaruh terhadap peningkatan permintaan untuk fasilitas pendidikan yang mencakup kebutuhan sekolah baru, ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Teknologi pendidikan dan pendekatan pembelajaran; adopsi teknologi dan pengembangan metode atau pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran *online* akan mempengaruhi cara pembelajaran dan memerlukan investasi dalam infrastruktur lainnya yang berpengaruh dalam proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan.
3. Kebutuhan khusus; terkait kebutuhan untuk fasilitas khusus dan fasilitas pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Kualitas fasilitas; dalam menjaga kualitas fasilitas pendidikan diperlukan peremajaan atau pemeliharaan fasilitas di masa mendatang.
5. Kebijakan pendidikan; kemungkinan perubahan dalam hal kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi kebutuhan infrastruktur, seperti peningkatan durasi wajib belajar atau peningkatan dalam program tertentu dan perubahan kebijakan lainnya. Perubahan kebijakan ini bisa juga terjadi diakibatkan oleh dampak dari suatu krisis atau perubahan lingkungan seperti halnya pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020.
6. Ketersediaan sumber daya; ketersediaan sumber daya untuk proyek infrastruktur pendidikan akan sangat berpengaruh dalam menentukan sampai sejauh mana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.



## **2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

### **2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Nasional**

Kota Sungai Penuh memiliki kedudukan penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagai bagian dari Provinsi Jambi dan berfungsi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Salah satu aspek utama adalah keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), merupakan kawasan lindung yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kota Sungai Penuh berdekatan dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Padang melalui PKL Kerinci dan PKL Padang Aro atau PKL Painan, PKN Kota Jambi melalui PKL Kerinci, PKL Bangko atau PKW Muaro Bungo, dan PKN Bengkulu melalui PKW Muko-muko. Dengan posisi yang strategis, Kota Sungai Penuh menjadi daerah pusat kegiatan beberapa PKL di Kabupaten Kerinci (Sanggaran Agung, Siulak dan Batang Sangir) dan Provinsi Sumatera Barat (Tapan) serta Provinsi Bengkulu (Muko-muko). Oleh sebab itu, meskipun sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kota Sungai Penuh menjadi pusat kegiatan bagi daerah sekitarnya.

Namun, meskipun Kota Sungai Penuh terletak pada posisi strategis antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jambi, PKN Padang, dan PKN Bengkulu, tantangan yang dihadapi adalah konektivitas, aksesibilitas, serta infrastruktur logistik dan rantai pasok, terutama jalan nasional belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, Kota Sungai Penuh juga rentan terhadap bencana geologi dan hidrometeorologi. Sehingga dapat disebutkan Kota Sungai Penuh memiliki karakteristik daerah yang terisolir dan rawan bencana.

### **2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Provinsi Jambi**

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 memberikan arahan dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah, yaitu:

1. Sistem Pusat Permukiman  
Wilayah Kota Sungai Penuh merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
2. Sistem jaringan transportasi, meliputi:
  - a. Sistem jaringan jalan berupa jalan kolektor primer, meliputi:
    - 1) Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh);
    - 2) Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata);
    - 3) Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan);
    - 4) Sungai Penuh – Siulak Deras/Letter W;
    - 5) Jujun-Bts. Kota Sungai Penuh/Bts.Kota Sei Penuh;
    - 6) Sekungkung – Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik);
    - 7) Simp. Debai – Dusun Baru Debai Batas Kota Sungai Penuh – Simp.4 Sebukar.



- b. Terminal penumpang tipe B di Kota Sungai Penuh
- c. Pengembangan terminal barang Kota Sungai Penuh.
4. Sistem jaringan energi: Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
5. Sistem jaringan telekomunikasi: Pengembangan jaringan mikro analog dan jaringan serat optik.
6. Sistem jaringan sumber daya air: Pengembangan sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir berupa kolam retensi.
7. Sistem jaringan prasarana lainnya: Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Sungai Penuh dan Kab Kerinci.
8. Sistem jaringan persampahan: Tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kabupaten Kerinci untuk pelayanan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh, meliputi: (1) kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat; (2) kawasan hutan produksi; dan (3) kawasan pariwisata Bukit Khayangan. Sedangkan pengembangan kawasan strategis di Kota Sungai Penuh, meliputi: (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) berupa Taman Nasional Kerinci Seblat; dan (2) kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa perkotaan Sungai Penuh.

### **2.7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Kota**

Rencana struktur ruang menjadi pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan wilayah dan berdampak bagi peningkatan pembangunan Kota Sungai Penuh untuk 20 tahun mendatang. Rencana sistem permukiman secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antara pusat-pusat permukiman dan/atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukungnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044, wilayah perencanaan RTRW Kota terdiri atas 5 (lima) Sub Wilayah Perencanaan, meliputi:

1. Sub Wilayah Perencanaan Sungai Penuh, meliputi:
  - a. Kecamatan Sungai Penuh;
  - b. Kecamatan Sungai Bungkal; dan
  - c. Kecamatan Pondok Tinggi.
2. Sub Wilayah Perencanaan Pesisir Bukit, meliputi:
  - a. Kecamatan Pesisir Bukit; dan
  - b. Kecamatan Koto Baru.
3. Sub Wilayah Perencanaan Hampan Rawang meliputi Kecamatan Hampan Rawang;
4. Sub Wilayah Perencanaan Kumun Debai meliputi Kecamatan Kumun Debai; dan
5. Sub Wilayah Perencanaan Tanah Kampung meliputi Kecamatan Tanah Kampung.





Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing Sub Wilayah Perencanaan, meliputi:

1. Sub Wilayah Perencanaan Sungai Penuh sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
2. Sub Wilayah Perencanaan Pesisir Bukit sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
3. Sub Wilayah Perencanaan Hamparan Rawang sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan perikanan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
4. Sub Wilayah Perencanaan Kumun Debai sebagai pusat pengembangan agropolitan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan; dan
5. Sub Wilayah Perencanaan Tanah Kampung sebagai pusat pengembangan olahraga, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan.

#### **A. Sistem Pusat Pelayanan**

Rencana sistem pusat pelayanan di Kota Sungai Penuh, terdiri dari:

##### **1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

Merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sungai Penuh terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.

##### **2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)**

Merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, yaitu:

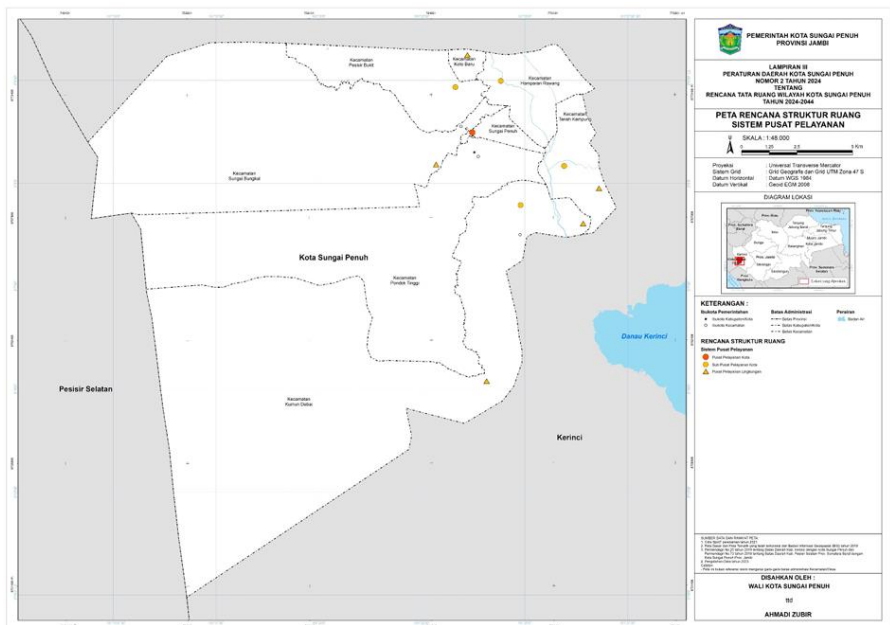
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Hamparan Rawang di Kecamatan Hamparan Rawang;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Kumun Debai di Kecamatan Kumun Debai;
- c. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Pesisir Bukit di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Tanah Kampung di Kecamatan Tanah Kampung.

##### **3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Dujung Sakti di Kecamatan Koto Baru;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Debai di Kecamatan Kumun Debai;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Renah Kayu Embun di Kecamatan Kumun Debai;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Talang Lindung di Kecamatan Sungai Bungkal; dan

- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Koto Padang di Kecamatan Tanah Kampung.



Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044

**Gambar II.79**  
**Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Sungai Penuh**

**B. Sistem Jaringan Prasarana**

**1. Sistem Jaringan Transportasi**

Sistem jaringan transportasi di Kota Sungai Penuh berupa sistem jaringan jalan, meliputi:

- a. Jalan umum;
- b. Terminal penumpang tipe B yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh
- c. Terminal barang di Kecamatan Kumun Debai; dan
- d. Jembatan.

**2. Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Sungai Penuh, meliputi:

- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

**3. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Sungai Penuh, meliputi:

- a. Infrastruktur jaringan tetap;
- b. Jaringan tetap; dan
- c. Jaringan bergerak.

**4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

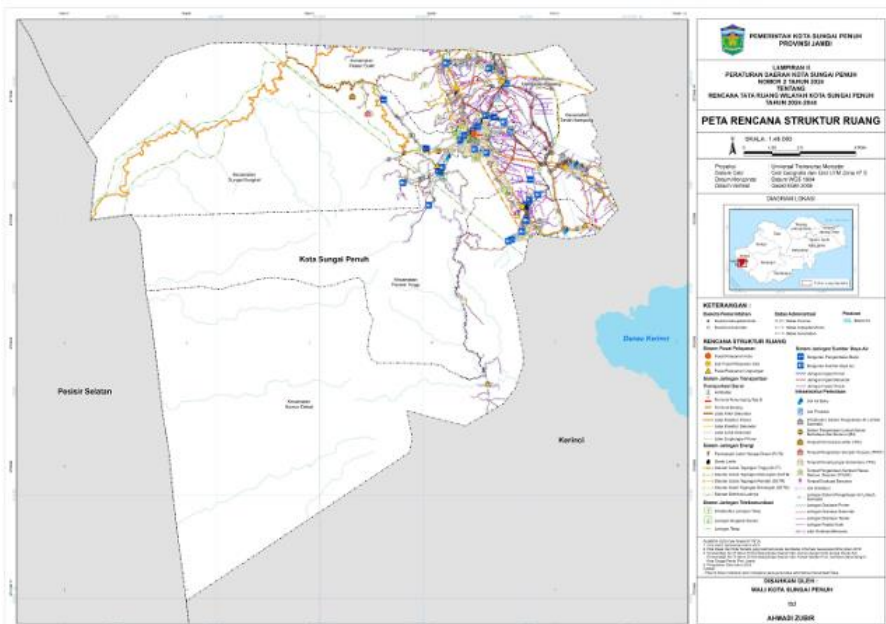
Sistem jaringan sumber daya air di Kota Sungai Penuh, meliputi:

- a. Sistem jaringan irigasi;
- b. Sistem pengendalian banjir; dan
- c. Bangunan sumber daya air.

5. **Infrastruktur Perkotaan**

Infrastruktur perkotaan di Kota Sungai Penuh, meliputi:

- a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Sistem jaringan persampahan, yaitu:
  - 1) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) di seluruh kecamatan;
  - 2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh kecamatan;
  - 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Sungai Bungkal; dan
  - 4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sungai Bungkal.
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. Sistem drainase; dan
- g. Jaringan pejalan kaki.



Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044

**Gambar II.80**  
**Rencana Struktur Ruang Kota Sungai Penuh**

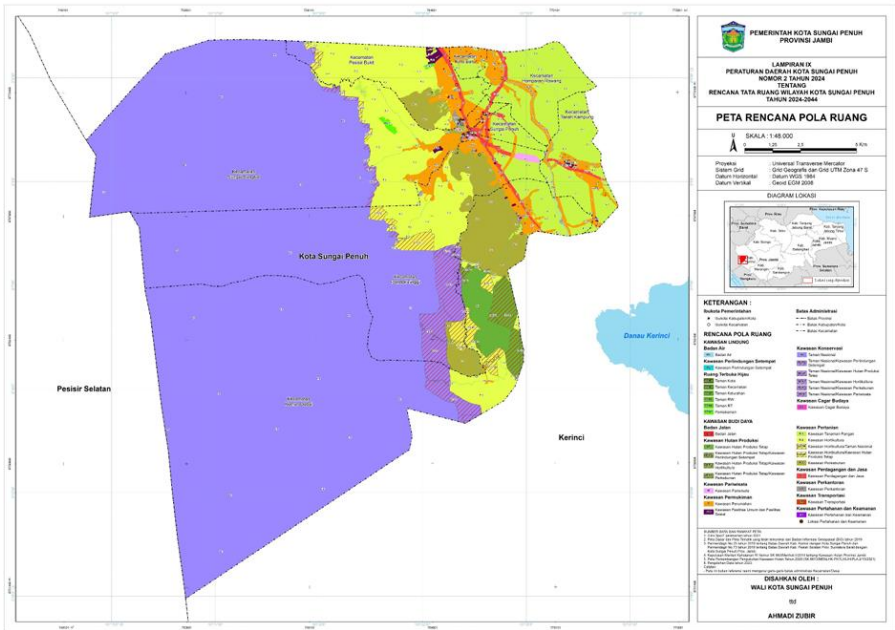
Sistem pusat pelayanan dirancang agar memiliki interkoneksi yang sinergis dengan prasarana wilayah, termasuk jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pemerataan kesejahteraan secara proporsional, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang merata. Selain itu, perlu adanya pembatasan terhadap pengembangan kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan, agar tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.



C. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kota meliputi: (1) kawasan lindung; dan (2) kawasan budi daya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, meliputi:
- a. Badan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan cagar budaya.
2. Kawasan budi daya, meliputi:
- a. Badan jalan;
- b. Kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan permukiman;
- f. Kawasan perdagangan dan jasa;
- g. Kawasan perkantoran;
- h. Kawasan transportasi; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.



Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044

Gambar II.81  
Rencana Pola Ruang Kota Sungai Penuh

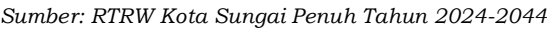
D. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting. Kawasan strategis Kota Sungai Penuh meliputi Kawasan strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: (1) kawasan pusat kota terdapat di Kecamatan Pondok

Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, dan Kecamatan Sungai Penuh; dan (2) kawasan pariwisata terdapat di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi. Arah pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (1) mengembangkan kota pengembangan Kawasan Pusat Kota Sungai Penuh sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota yang terpadu; (2) penataan kawasan yang aman dan nyaman; (3) pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pusat kota meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau, sistem transportasi yang memadai, ruang sektor informal dan pemenuhan standar pelayanan minimum sarana prasarana; (4) pengembangan kawasan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan; dan (5) peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan rekreasi di kawasan rekreasi alam untuk mewujudkan kawasan yang aman dan nyaman.

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: (1) kawasan cagar budaya terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Penuh; (2) kawasan pendidikan terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit; dan (3) kawasan rumah adat terdapat di Kecamatan Sungai Penuh. Arah pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: (1) perlindungan dan pelestarian kawasan cagar budaya; (2) pemanfaatan kegiatan sekitar kawasan yang tidak mengganggu kelayakan pandang bangunan cagar budaya; (3) penataan kawasan dengan peningkatan fasilitas dan kualitas kawasan; (4) pengembangan kegiatan pariwisata cagar budaya; (5) penataan dan pengembangan kawasan pendidikan terpadu; (6) pemenuhan fasilitas pendukung kawasan; dan (7) pengendalian kegiatan sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu kawasan pendidikan.



**Gambar II.82**  
**Rencana Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh**

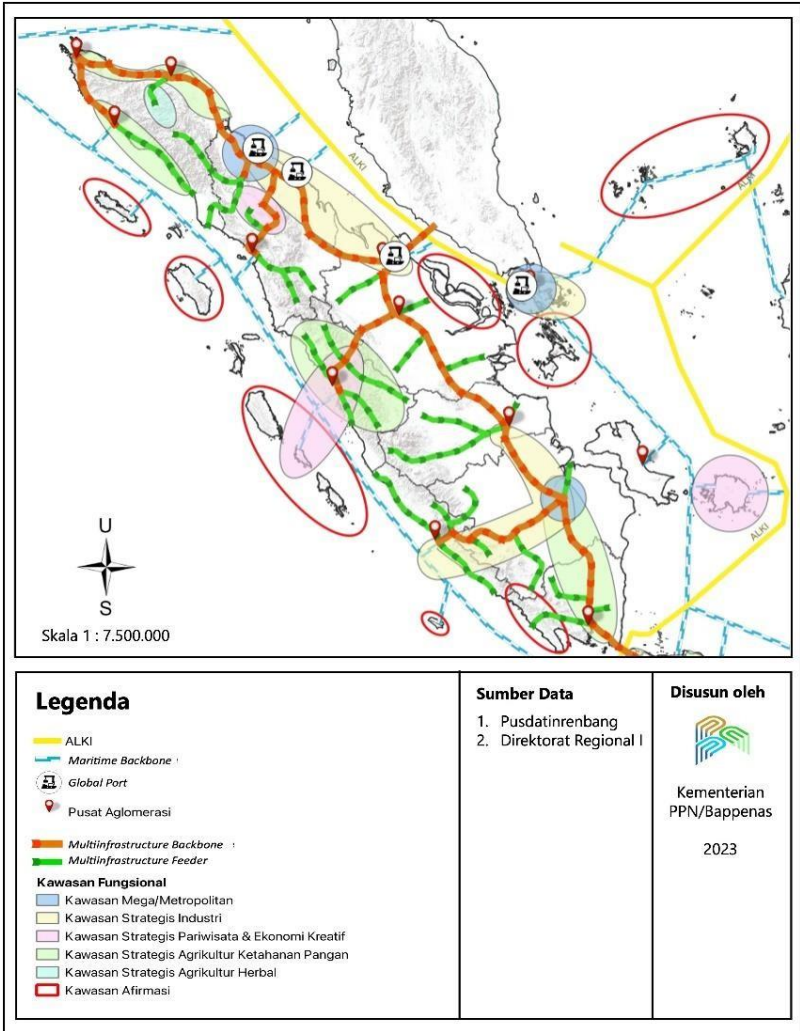




2.7.4 Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22,0% pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 23,2% apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,7-6,7% per tahun.

Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (*silk road*) dan wilayah ALKI I serta *SLoC* (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit ekonomi baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian- agroindustri, pariwisata, perkotaan, dan kawasan konservasi strategis. Termasuk, optimalisasi beberapa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan (WM), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar II.83  
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera



Untuk mendukung ini, backward dan forward linkage serta konektivitas untuk efisiensi biaya produksi perlu terus ditingkatkan. Pusat-pusat pertumbuhan harus lebih diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi melalui upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya, serta kereta api terutama untuk angkutan barang. Sementara itu, pada beberapa wilayah di Sumatera telah diterapkan rintisan smart city, creative financing, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

**Pertama**, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;

**Kedua**, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energi*;

**Ketiga**, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;

**Keempat**, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multi-infrastructure backbone dan feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

**Kelima**, meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan

**Keenam**, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Sistem wilayah fungsional Jambi, meliputi: (1) Provinsi Jambi (9 kabupaten dan 2 kota); dan (2) beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Agroindustri sawit dan karet dengan pemanfaatan energi batu bara dan gas alam dapat dirancang menjadi generator kekuatan regional

jambi. Percepatan infrastruktur logistik menjadi pendukung utama dalam pengembangan potensi yang besar di Jambi menjadi energi industri dan agroindustri. Jambi memiliki keunggulan dari sisi jalur logistik melalui sungai, adanya Pelabuhan Talang Duku dapat menjadi *gateway* bagi pertambangan batu bara serta *direct gateway* bagi komoditas agrikultur dan aktivitas perindustrian di Jambi menuju pasar ekspor.

Adapun rancangan pengembangan Provinsi Jambi, meliputi:

1. *West Jambi*: Taman Nasional Kerinci Seblat, mempertahankan fungsi ekologis dan biodiversitas. *Unesco Global Geopark* Merangin, mempertahankan situs geologi, biologi, dan budaya serta mengembangkan *eco-geotourism*.
2. *Center Jambi*: Kawasan sentra produksi hasil SDA, pertanian sebagai penghasil sawit dan karet serta pertambangan berupa batu bara, gas alam, dan minyak bumi.
3. *East Jambi*: Kawasan strategis, kawasan sentra kegiatan ekonomi produktif industri dan jasa lainnya serta hilirisasi *agro industry & circular economy*. Dapat dikembangkan Pelabuhan Ujung Jabung untuk mendukung jalur logistik komoditas Provinsi Jambi.

2.7.5 Arah Kebijakan Transformasi

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan Luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar II.84  
Kesenjangan Antar Wilayah



Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan kerangka implementasi, termasuk kaidah pelaksanaan sebagai panduan.

**Transformasi Sosial**, bertujuan untuk pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan memastikan pelaksanaan transformasi sosial; mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi; pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar; serta penerapan perlindungan sosial adaptif.

**Transformasi Ekonomi**, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (superhub ekonomi nusantara), serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju dan menyejahterakan.

**Transformasi Tata Kelola**, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum; penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi pemerintah serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan penindakan tindak pidana korupsi menuju *zero corruption*; penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (*meaningful participation*); penerapan tata kelola partai politik akuntabel dan kaderisasinya efektif yang disertai dengan penerapan sistem integritas partai politik.

**Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**, bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh, baik di tataran nasional maupun daerah dengan penciptaan stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi; penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk memperluas dukungan akses bantuan hukum; ketahanan nasional dan demokrasi substansial.

**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**, bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut; mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitasnya; serta meningkatkan implementasi *climate smart agriculture* yang tahan terhadap perubahan iklim.



Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), yaitu:

### **Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia**

#### **Transformasi Sosial:**

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

#### **Transformasi Ekonomi:**

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
7. Industrialisasi: Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
9. *Super platform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

#### **Transformasi Tata Kelola:**

12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
13. Penguatan integritas partai politik.

### **Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Landasan Transformasi**

#### **Landasan Transformasi**

#### **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:**

14. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*.
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
16. Transformasi perencanaan dan fiskal: Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.





17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:**

18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW nexus (food, energy, water)*.

**2.7.6 Indikasi Program/Proyek Strategis**

Indikasi program pembangunan Kota Sungai Penuh ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada dan potensi pengembangan wilayah. Indikasi program/proyek strategis berdasarkan RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 disajikan pada Tabel II.57 sebagai berikut.



**Tabel II.57**  
**Indikasi Program/Proyek Strategis Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
<b>A Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota</b>			
<b>1 Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan</b>			
a.	Penetapan Rencana Tata Ruang		
1	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah		
1	Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
c.	Program Penataan Kawasan, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman		
1	Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
2	Sub Pusat Pelayanan Kota Hamparan Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	
3	Sub Pusat Pelayanan Kota Kumun Debai	Kecamatan Kumun Debai	
4	Sub Pusat Pelayanan Kota Pesisir Bukit	Kecamatan Pesisir Bukit	
5	Sub Pusat Pelayanan Kota Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	
6	Pusat Pelayanan Lingkungan Renah Kayu Embun	Kecamatan Kumun Debai	
7	Pusat Pelayanan Lingkungan Debai	Kecamatan Kumun Debai	
8	Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	
9	Pusat Pelayanan Lingkungan Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	
10	Pusat Pelayanan Lingkungan Dujung Sakti	Kecamatan Koto Baru	
d.	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kota Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
e.	Pemeliharaan/ Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
f.	Peningkatan Konektivitas Antara Pusat Pelayanan		
1	Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
2	Sub Pusat Pelayanan Kota Hamparan Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	
3	Sub Pusat Pelayanan Kota Kumun Debai	Kecamatan Kumun Debai	
4	Sub Pusat Pelayanan Kota Pesisir Bukit	Kecamatan Pesisir Bukit	
5	Sub Pusat Pelayanan Kota Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	
6	Pusat Pelayanan Lingkungan Renah Kayu Embun	Kecamatan Kumun Debai	
7	Pusat Pelayanan Lingkungan Debai	Kecamatan Kumun Debai	



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
8	Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	
9	Pusat Pelayanan Lingkungan Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	
10	Pusat Pelayanan Lingkungan Dujung Sakti	Kecamatan Koto Baru	
<b>2 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi</b>			
<b>2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan arteri sekunder		
1	Jl. Depati Singo Lago	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
2	Jl. H. Fauzi Si'in	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
3	Jl. H. Miftah Yunus	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
4	Jl. M.H. Thamrin	Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
5	Jl. Mayjen A. Thalib	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
6	Jl. Syech Abdurrahman	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
7	Jl. Tanjung	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
b.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan arteri sekunder		
1	Jl. Lingkar Dalam	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan kolektor primer		
1	Jl. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
2	Jl. Depati Parbo (Sungai Penuh)	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi
3	Jl. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu Pkk - Sp. Ahmad Yani)	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
4	Jl. Jembatan II (Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan))	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR
5	Jl. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu Pkk)	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
6	Jl. Muradi (Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W)	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR



Pemerintah Kota Sungai Penuh

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
7	Jl. Pancasila (Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata))	Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Tanah Kampung	Kementerian PUPR
8	Jl. Puncak (Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan))	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR
9	Jl. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
10	Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi
11	Simp. Debai - Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebukar	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi
12	Simpang Tugu Macan (Km. 14) - Batas Sungai Penuh/Kerinci (Batu Kurik)	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Provinsi
d.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan kolektor sekunder		
1	Jl. Jendral Sudirman	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
2	Jl. Prof. M. Yamin, SH	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
3	Jl. Protokol	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
4	Jl. Arif Rahman Hakim	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
5	Jl. Depati Dua Nenek	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
6	Jl. Gajah Mada	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
7	Jl. H. Bakri	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
8	Jl. H. Rusdi Sayuti	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
9	Jl. Hos Cokro Aminoto	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
10	Jl. Jendral Basuki Rachmat	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
11	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
12	Jl. Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
13	Jl. M. Rasul Depati	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
14	Jl. Pendidikan	Kecamatan Tanah Kampung	
15	Jl. Pendung Koto Padang	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
16	Jl. Soetomo	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
17	Jl. Sriwijaya	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
18	Jl. Sultan Thaha	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
19	Jl. Sungai Beremas	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Pondok Tinggi	
20	Jl. Syech H. Mhd. Sekin	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
21	Jl. Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
22	Jl. Yos Sudarso	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Sungai Bungkal	
		Kecamatan Sungai Penuh	
e.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan kolektor sekunder		
1	Jl. Lingkar Luar	Kecamatan Hampan Rawang	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Koto Baru	
		Kecamatan Pesisir Bukit	
		Kecamatan Tanah Kampung	
f.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan lokal sekunder	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kota
g.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan lingkungan primer	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kota
h.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B		
1	Terminal Sungai Penuh	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas Perhubungan Provinsi
i.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Barang		
1	Terminal Barang Kumun (Desa Kumun Mudik Kec. Kumun Debai)	Kecamatan Kumun Debai	Dinas Perhubungan Kota
j.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan		
1	Jembatan Debai (Provinsi)	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
2	Jembatan I (Nasional)	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
3	Jembatan II (Nasional)	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
4	Jembatan Pahlawan (Nasional)	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
5	Jembatan Pemuda	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
6	Jembatan Puskesmas Kumun (Provinsi)	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota





## Pemerintah Kota Sungai Penuh

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
7	Jembatan Simpang Empat Kumun (Provinsi)	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
8	Jembatan Sungai Air Hitam	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
9	Jembatan Sungai Air Sempit I	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
10	Jembatan Sungai Air Sempit II	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
11	Jembatan Sungai Air Sempit V	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
12	Jembatan Sungai Air Sesat	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
13	Jembatan Sungai Batang Merao I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
14	Jembatan Sungai Batang Merao III	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
15	Jembatan Sungai Batang Merao IV	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
16	Jembatan Sungai Batang Merao IX	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
17	Jembatan Sungai Batang Merao V	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
18	Jembatan Sungai Batang Merao VI	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
19	Jembatan Sungai Batang Merao VII	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
20	Jembatan Sungai Batang Merao VIII	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
21	Jembatan Sungai Batang Merao X	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
22	Jembatan Sungai Batang Merao XI	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
23	Jembatan Sungai Batang Merao XII	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
24	Jembatan Sungai Batang Merao XIII	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
25	Jembatan Sungai Batang Merao XIV	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
26	Jembatan Sungai Batang Merao XV	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
27	Jembatan Sungai Batang Merao XVI	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
28	Jembatan Sungai Batang Sangkir I	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
29	Jembatan Sungai Batang Sangkir II	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
30	Jembatan Sungai Batang Sangkir IV	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
31	Jembatan Sungai Batang Sangkir IX	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
32	Jembatan Sungai Batang Sangkir V	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
33	Jembatan Sungai Batang Sangkir VI	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
34	Jembatan Sungai Batang Sangkir VII	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
35	Jembatan Sungai Batang Sangkir VIII	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
36	Jembatan Sungai Bungkal IV	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
37	Jembatan Sungai Bungkal V	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
38	Jembatan Sungai Bungkal VI	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
39	Jembatan Sungai Bungkal VII	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
40	Jembatan Sungai Bungkal X	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
41	Jembatan Sungai Bungkal XI	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
42	Jembatan Sungai Jernih I	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
43	Jembatan Sungai Jernih II	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
44	Jembatan Sungai Jernih III	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
45	Jembatan Sungai Mancik I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
46	Jembatan Sungai Mancik II	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
47	Jembatan Sungai Mancik III	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
48	Jembatan Sungai Mancik IV	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
49	Jembatan Sungai Ning IX	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
50	Jembatan Sungai Ning V	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
51	Jembatan Sungai Ning VI	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
52	Jembatan Sungai Ning VII	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
53	Jembatan Sungai Ning X	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
54	Jembatan Sungai Ning XI	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
55	Jembatan Sungai Ning XII	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
56	Jembatan Sungai Renah Kayu Embun I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
57	Jembatan Sungai Renah Kayu Embun II	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
58	Jembatan Sungai Talang Lindung I	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
59	Jembatan Sungai Talang Lindung II	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
60	Jembatan Sungai Talang Lindung IV	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
61	Jembatan Sungai Talang Lindung V	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
62	Jembatan Sungai Talang Lindung VI	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
63	Jembatan Sungai Terung	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
64	Jembatan Sungai Ulu Air I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
65	Jembatan Sungai Ulu Air II	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
66	Jembatan Sungai Ulu Air III	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
67	Jembatan Sungai Ulu Air IV	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
68	Jembatan Sungai Ulu Air IX	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
69	Jembatan Sungai Ulu Air V	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
70	Jembatan Sungai Ulu Air VI	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
71	Jembatan Sungai Ulu Air VII	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
72	Jembatan Tanah Kampung I (Nasional)	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
73	Jembatan Tanah Kampung II (Nasional)	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
74	Jembatan Tanah Kampung III (Nasional)	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
75	Jembatan Tanah Kampung IV (Nasional)	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
76	Jembatan Tuan Luak (Provinsi)	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
<b>3 Perwujudan Sistem Jaringan Energi</b>			
<b>3.1 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>			
a. Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung			
1	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Koto Lolo	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung			
1	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan TransMisi Tenaga Listrik Antar Sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Interkoneksi Merangin	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
2	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan TransMisi Tenaga Listrik Antar Sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTP Sungai Penuh - Sungai Penuh	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Merangin - Interkoneksi Arah Sungai Penuh	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
3	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kampung	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kecamatan Hamparan Rawang	



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kecamatan Koto Baru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
		Kecamatan Kumun Debai	
		Kecamatan Pesisir Bukit	
		Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
		Kecamatan Sungai Bungkal	
		Kecamatan Sungai Penuh	
		Kecamatan Tanah Kampung	
		Kecamatan Hamparan Rawang	
		Kecamatan Koto Baru	
		Kecamatan Kumun Debai	
		Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
		Kecamatan Pondok Tinggi	
		Kecamatan Sungai Bungkal	
		Kecamatan Sungai Penuh	
		Kecamatan Tanah Kampung	
		Kecamatan Hamparan Rawang	
		Kecamatan Koto Baru	
		Kecamatan Kumun Debai	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
		Kecamatan Pesisir Bukit	
		Kecamatan Pondok Tinggi	
		Kecamatan Sungai Bungkal	
		Kecamatan Sungai Penuh	
		Kecamatan Tanah Kampung	
		Kecamatan Pesisir Bukit	
4	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gardu Listrik		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN
5	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Koto Baru Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal	



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kecamatan Tanah Kampung Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ BUMN/ Swasta
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Tanah Kampung	
c.	Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan		
1	Peningkatan Keandalan Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Kota Sungai Penuh	BUMN/ Swasta
<b>4 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>			
<b>4.1 Perwujudan Jaringan Tetap</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap	Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian Komunikasi dan Informatika/ BUMN/ Swasta
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Tetap	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika/ BUMN/ Swasta
c.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika/ BUMN/ Swasta
<b>4.2 Perwujudan Jaringan Bergerak</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika/ BUMN/ Swasta
<b>5 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>			
<b>5.1 Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi primer	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi sekunder	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
d.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan irigasi primer	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota





No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
e.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan irigasi sekunder	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
f.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	Terdapat Diseluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
<b>5.2 Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir</b>			
a.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Bangunan pengendalian banjir		
1	Kolam Retensi	Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan pengendalian banjir		
1	Chek dam Bungkal	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
2	Chek dam Sungai Bungkal	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
3	Chek dam Sungai Ning I	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
4	Chek dam Sungai Ning II	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
5	Chek dam Sungai Penuh	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
6	Chek dam Talang Lindung	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan sumber daya air		
1	Bendung Air Sesat	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
2	Bendung Batang Bungkal	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
3	Bendung Batu Lumut	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
4	Bendung Cangkin	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
5	Bendung Dusun Baru	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
6	Bendung Intake Paling Serumpun	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
7	Bendung Jembatan Serong	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
8	Bendung Koto Beringin	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
9	Bendung Muara Jaya I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
10	Bendung Muara Jaya II	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
11	Bendung Muara Jaya III	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
12	Bendung Pengasah	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
13	Bendung Sumur Anyir	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
14	Bendung Sungai Ampuh	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
15	Bendung Sungai Jernih	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
16	Bendung Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
17	Bendung Taruko	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
18	Bendung Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
19	Free Intake Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
20	Pintu Air Air Sesat	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
21	Pintu Air Batang Bungkal	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
22	Pintu Air Batu Lumut	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
23	Pintu Air Cangkin	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
24	Pintu Air Dusun Baru	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
25	Pintu Air Intake Paling Serumpun	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
26	Pintu Air Jembatan Serong	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
27	Pintu Air Koto Beringin	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
28	Pintu Air Muara Jaya I	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
29	Pintu Air Muara Jaya II	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
30	Pintu Air Muara Jaya III	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
31	Pintu Air Pengasah	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
32	Pintu Air Sumur Anyir	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
33	Pintu Air Sungai Ampuh	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
34	Pintu Air Sungai Jernih	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
35	Pintu Air Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
36	Pintu Air Taruko	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
37	Pintu Air Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
d.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Bangunan sumber daya air		
1	Embung Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
<b>Perwujudan Infrastruktur Perkotaan</b>			
<b>6.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>			
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Perpipaan		
1	Unit Air Baku		
	Intake Sungai Ampuh	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Intake Sungai Jernih	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Intake Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Intake Debai	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Intake Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
2	Unit Produksi		
	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kumun Debai	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Jernih	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pelayang Raya	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
3	Unit Distribusi	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
c.	Pembangunan Desa Terpadu		
1	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kota Sungai Penuh	Kementerian Desa PDTT
<b>6.2 Perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)</b>			
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		
1	IPAL Sandaran Galeh	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
2	IPAL Koto Renah	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
3	IPAL Aur Duri	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
4	IPAL Koto Tengah	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
5	IPAL Mekar Jaya	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		
1	Jaringan IPAL Aur Duri	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
2	Jaringan IPAL Koto Renah	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
3	Jaringan IPAL Koto Tengah	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
4	Jaringan IPAL Mekar Jaya	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
d.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik		
1	Jaringan IPAL Sandaran Galeh	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
<b>6.3 Perwujudan Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>			



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
1	RSU M.H Thalib	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota/ Swasta
2	RSUD H. Bakri	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota/ Swasta
<b>6.4 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan</b>			
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Pengolahan Sampah	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)		
1	TPS3R Desa Air Teluh	Kecamatan Kumun Debai	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
2	TPS3R Desa Dujung Sakti	Kecamatan Koto Baru	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
3	TPS3R Desa Gedang	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
4	TPS3R Desa Karya Bakti	Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
5	TPS3R Desa Koto Dumo Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
6	TPS3R Desa Koto Duo	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
7	TPS3R Desa Koto Tengah	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
8	TPS3R Desa Koto Tinggi	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
9	TPS3R Desa Lawang Agung	Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
10	TPS3R Desa Muara Jaya	Kecamatan Kumun Debai	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
11	TPS3R Desa Paling Serumpun	Kecamatan Hamparan Rawang	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
12	TPS3R Desa Pelayang Raya	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
13	TPS3R Desa Sandaran Galeh	Kecamatan Kumun Debai	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
14	TPS3R Desa Sri Menanti	Kecamatan Koto Baru	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
15	TPS3R Desa Sumur Anyir	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
16	TPS3R Desa Sumur Gedang	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
17	TPS3R Desa Sungai Ning 1	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
18	TPS3R Desa Sungai Ning 2	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
19	TPS3R Desa Ulu Air	Kecamatan Kumun Debai	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
20	TPS3R RPT Skala Kawasan 3 Desa Sungai Ning	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
21	TPS3R RPT Skala Kawasan 4 Desa Sungai Ning	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
22	TPS3R RPT Skala Kawasan 5 Desa Sungai Ning	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
23	TPS3R Skala Kawasan 1 Desa Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
24	TPS3R Skala Kawasan 2 Desa Talang Lindung	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kota
d.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		
1	TPA Desa Sungai Ning	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Provinsi
e.	Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		
1	TPST RPT Desa Sungai Ning	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota
<b>6.5 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana		
1	SD 30/XI Koto Baru	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas Pendidikan Kota
2	Stadion Koni Kumun	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
3	Lapangan Pemda Kabupaten	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
4	Kampus IAIN Kerinci	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas Pendidikan Kota
5	Lapangan Merdeka	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
6	Stadion Koni Debai	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
7	Lapangan Koni Tanah Kampung	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
<b>6.6 Perwujudan Sistem drainase</b>			
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem drainase	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sistem drainase		
1	Jaringan drainase primer	<u>Kecamatan Kumun Debai</u> <u>Kecamatan Pesisir Bukit</u> <u>Kecamatan Pondok Tinggi</u> <u>Kecamatan Sungai Bungkal</u> <u>Kecamatan Sungai Penuh</u> <u>Kecamatan Tanah Kampung</u>	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
2	Jaringan drainase sekunder	<u>Kecamatan Hamparan Rawang</u> <u>Kecamatan Koto Baru</u> <u>Kecamatan Pondok Tinggi</u> <u>Kecamatan Sungai Bungkal</u> <u>Kecamatan Sungai Penuh</u>	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota





No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Jaringan drainase tersier	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Tanah Kampung	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
c. Pembangunan, Pengembangan, Operasi, dan Pemeliharaan Sistem drainase			
1	Jaringan drainase primer	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
2	Jaringan drainase sekunder	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
3	Jaringan drainase tersier	Terdapat di Seluruh Kecamatan	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas PUPR Kota
<b>6.7 Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki</b>			
a. Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki			
1	Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Provinsi
2	Jl. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh)	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
3	Jl. Arif Rahman Hakim	Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
4	Jl. Depati Dua Nenek	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
5	Jl. Depati Singo Lago	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
6	Jl. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu Pkk - Sp. Ahmad Yani)	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
7	Jl. Dr. Wahidin. S.H	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
8	Jl. Gajah Mada	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
9	Jl. H. Bakri	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
10	Jl. H. Fauzi Si'in	Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
11	Jl. H. Miftah Yunus	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
12	Jl. H. Muhammad Rusli	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
13	Jl. H. Rusdi Sayuti	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota
14	Jl. Hos Cokro Aminoto	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
15	Jl. Imam Bonjol	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
16	Jl. Jendral Basuki Rachmat	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
17	Jl. Jendral Sudirman	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
18	Jl. K.H. Wahid Hasyim	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
19	Jl. Kapten Pattimura	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
20	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
21	Jl. Koto Lolo	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
22	Jl. Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
23	Jl. Larik Baru	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
24	Jl. Larik Rio Mendiho I	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
25	Jl. Larik Rio RT 10	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
26	Jl. M.H. Thamrin	Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
27	Jl. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu Pkk)	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
28	Jl. Mayjen A. Thalib	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
29	Jl. Muradi (Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W)	Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR
30	Jl. Pancasila (Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata))	Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Tanah Kampung	Kementerian PUPR
31	Jl. Pemangku Rajo	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
32	Jl. Pendidikan	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
33	Jl. Pendung Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
34	Jl. Prof. M. Yamin, SH	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
35	Jl. Proklamasi	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
36	Jl. Protokol	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
37	Jl. Sisingamangaraja	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
38	Jl. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh)	Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian PUPR
		Kecamatan Sungai Penuh	
39	Jl. Soetomo	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
40	Jl. Sultan Thaha	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota
41	Jl. Sungai Beremas	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Pondok Tinggi	
42	Jl. Syech Abdurrahman	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
43	Jl. Syech H. Mhd. Sekin	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
44	Jl. Tanah Mendapo	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
45	Jl. Tanjung	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Tanah Kampung	
46	Jl. Teuku Umar	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
47	Jl. Yos Sudarso	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Sungai Bungkal	
		Kecamatan Sungai Penuh	
48	Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi
49	Simp. Debai - Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebukar	Kecamatan Kumun Debai	Dinas PUPR Provinsi
		Kecamatan Tanah Kampung	
<b>B Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota</b>			
<b>1 Perwujudan Kawasan lindung</b>			
<b>1.1 Perwujudan Badan air</b>			
a.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Pelestarian/ Perlindungan Badan Air	Kecamatan Hamparan Rawang	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota
		Kecamatan Kumun Debai	
		Kecamatan Pondok Tinggi	
		Kecamatan Tanah Kamung	
b.	Pemantauan dan Pengendalian Terhadap Bangunan di Badan air	Kecamatan Hamparan Rawang	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Tanah Kamung	
<b>1.2 Perwujudan Kawasan perlindungan setempat</b>			
a.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Pelestarian/ Perlindungan Kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kamung	Kementerian PUPR
b.	Pemantauan dan Pengendalian Terhadap bangunan di Perlindungan Setempat	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kamung	Kementerian PUPR
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1 Pengendalian Kawasan perlindungan setempat	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
d.	Pengendalian Tata Air Sebagai Upaya Pelestarian Habitat Flora dan Fauna, Meningkatkan Nilai Estetika lingkungan Perkotaan dan Kenyamanan Kehidupan Di Kota.	Kota Sungai Penuh	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi
e.	Penyediaan Ruang Yang Cukup Bagi Resapan Air Hujan Pada Kawasan Resapan Air Untuk Keperluan Penyediaan Kebutuhan Air Tanah dan Penanggulangan Banjir	Kota Sungai Penuh	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi
<b>1.3 Perwujudan Ruang Terbuka Hijau</b>			
a.	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
b.	Perwujudan Taman Kota 1 Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
c.	Perwujudan Taman Kecamatan 1 Pemeliharaan dan Penataan Taman Kecamatan	Kecamatan Tanah Kamung	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
d.	Perwujudan Taman Kelurahan		
1	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kelurahan RTH Koto Padang	Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
	Taman Kelurahan	Kecamatan Pesisir Bukit	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
e.	Perwujudan Taman RW		
1	Pemeliharaan dan Penataan Taman RW	Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
f.	Perwujudan Taman RT		
1	Pemeliharaan dan Penataan Taman RT	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
g.	Perwujudan Pemakaman		
1	Pemeliharaan, Pengembangan dan Penataan Pemakaman	Kecamatan Kumun Debai Kecamatan Pesisir Bukit Kecamatan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
<b>1.4 Perwujudan Kawasan konservasi</b>			
a.	Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)		
1	Penetapan Batas Kawasan	Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi
2	Pemantapan Fungsi Tiap Zona Kawasan		
3	Pelaksanaan Rehabilitasi pada Area Mengalami Kerusakan		
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Taman Nasional		
5	Pengendalian dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi		
b.	Perlindungan Keanekaragaman Biota, Tipe Ekosistem, Gejala Keunikan Alam di Kawasan Suaka Alam, Koridor Satwa Untuk Kepentingan Plasma Nuftah, Keperluan Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan pada Umumnya	Kota Sungai Penuh	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi
<b>1.5 Perwujudan Kawasan cagar budaya</b>			
a.	Pengolahan Kawasan cagar budaya		



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Masjid Raya Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/ Dinas Pendidikan
2	Masjid Agung Pondok Tinggi	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/ Dinas Pendidikan
b.	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan cagar budaya		
1	Masjid Raya Rawang	Kecamatan Hamparan Rawang	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
2	Masjid Agung Pondok Tinggi	Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
c.	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi Permukiman Tradisional	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
d.	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pariwisata	Kecamatan Hamparan Rawang Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
e.	Pelestarian Fungsi Lindung Dan Tataan Lingkungan Kawasan Berupa Peningkatan Kualitas Lingkungan Sekitarnya Dan Perlindungan Dari Pencemaran, Pengembangan Pendidikan, Rekreasi Dan Pariwisata	Kota Sungai Penuh	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi
<b>2 Perwujudan Kawasan budi daya</b>			
<b>2.1 Perwujudan Badan Jalan</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Badan jalan	Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kota
b.	Pembangunan dan Pemeliharaan Badan jalan		Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kota
<b>2.2 Perwujudan Kawasan Hutan Produksi</b>			
a.	Perwujudan Kawasan hutan produksi tetap		
1	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti Komoditi Rotan, Tanaman Obat dan Sutera Alam	Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi
2	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pengembangan Kawasan hutan produksi tetap		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi
3	Pengembangan Tanaman Hutan atau Tanaman Obat-Obatan pada Lahan Partisipasi Masyarakat		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi





No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan hutan produksi tetap dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi
<b>2.3 Perwujudan Kawasan pertanian</b>			
a. Perwujudan Kawasan tanaman pangan			
1	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota
2	Peningkatan Penguasaan Lahan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)		
3	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Aksesibilitas Kawasan tanaman pangan		
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)		
b. Perwujudan Kawasan hortikultura			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan, Pengolahan, dan Pengembangan Kawasan hortikultura	Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas Ketahanan Pangan Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota
2	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Aksesibilitas Kawasan hortikultura		
c. Perwujudan Kawasan Perkebunan			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan, Pengolahan, dan Pengembangan Kawasan perkebunan	Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal	Dinas Ketahanan Pangan Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota
2	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Aksesibilitas Kawasan perkebunan		
3	Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi	Kota Sungai Penuh	Kementerian Pertanian
d. Peningkatan Aksesibilitas Kawasan pertanian			
		Kota Sungai Penuh	Kementerian Pertanian/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi/ Dinas Ketahanan Pangan Kota/ Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kota
e. Pengolahan Budidaya Perikanan Air Tawar			
		Kota Sungai Penuh	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Dinas Peternakan dan Perikanan Kota
<b>2.4 Perwujudan Kawasan pariwisata</b>			



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
a.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
b.	Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
c.	Pembangunan Daya Tarik Wisata		
1	Pengembangan Wisata Alam dan Ekowisata	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
	- Bukit Khayangan		
	- Bukit Sentiong		
	- Bukit Simancik		
	- Panorama Bukit Tapan		
	- Air Terjun Tiga Beradik		
2	Pengembangan Wisata Edukasi dan Budaya	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
	- Kawasan Masjid Agung Pondok Tinggi		
	- Masjid Raya Rawang		
	- Museum Tanah Sablingkeh		
	- Tanah Mandapo		
	- Makam Siak Lengih		
	- Makam Siak Alam		
	- Makam Syeh H. Muhammad Sekin		
	- Batu Sorban		
	- Batu Gong Nenek Betung		
	- Kenduri SKO		
	- Tulisan Batu Incung		
	- Gong Bisu		
	- Kesenian Tradisional		
3	Pengembangan Wisata Buatan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
	- Taman Bunga Puti Senang		
	- Bukit Impian		
	- Panorama Puncak		
	- Jembatan Kerinduan		
	- Lapangan Merdeka		
d.	Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
e.	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas di Kawasan pariwisata	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
f.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
g.	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
h.	Pembangunan Pemasaran Pariwisata	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
i.	Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Area Yang Mengalami Kerusakan	Kota Sungai Penuh	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Kehutanan Provinsi
<b>2.5 Perwujudan Kawasan permukiman</b>			
a.	Perwujudan Kawasan perumahan		
1	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
3	Pengembangan Kawasan Perumahan Baru dengan Konsep Hunian Berimbang	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
4	Revitalisasi Kawasan Permukiman Tradisional/ Etnis/ Bersejarah yaitu Kawasan yang Mempunyai Bangunan Bersejarah yang Bernilai dan Bermakna Penting	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
5	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan perumahan Sesuai dengan Arahkan Kepadatan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
6	Penataan Kawasan perumahan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
7	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kawasan perumahan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
8	Penanganan Kawasan Kumuh Melalui Pencegahan Kawasan Rawan Kumuh, Pemugaran, Peremajaan dan/ atau Permukiman Kembali dengan Mempertimbangkan Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
b.	Perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial		



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
2	Pembangunan/ Pengembangan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara Merata dan Proporsional sesuai Skala Pelayanan	Kota Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
c.	Pengolahan Budidaya Perikanan Air Tawar	Kota Sungai Penuh	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Dinas Peternakan dan Perikanan Kota
d.	Perbaikan Sarana Permukiman Perdesaan		
	Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Tertinggal	Kota Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi/ Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
e.	Penataan Kawasan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Kota Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ BNPB/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi/ BPBD Provinsi/ Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota/ BPBD Kota
f.	Pembangunan Desa Terpadu		
	Penetapan Batas Desa	Kota Sungai Penuh	Kementerian Dalam Negeri/ SETDA
<b>2.6 Perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa</b>			
a.	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa	Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
b.	Pengaturan dan Penataan Pasar yang Masih sesuai dengan Peruntukannya di Seluruh Kecamatan		Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
c.	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan perdagangan dan jasa		Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
d.	Pengendalian Perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Linier di Sepanjang Jalan arteri dan jalan kolektor		Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
e.	Pengembangan dan Penataan Sentra-Sentra PKL		Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
f.	Pengendalian dan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima pada Ruang Publik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		Dinas PUPR Kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
g.	Pengaturan Sistem Perparkiran Kendaraan Pada Kawasan perdagangan dan jasa		Dinas Perhubungan Kota
<b>2.7 Perwujudan Kawasan Perkantoran</b>			
a.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Kumun	Dinas PUPR Kota
b.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kawasan Perkantoran Swasta	Debai, Kecamatan Pesisir	Dinas PUPR Kota
c.	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Kawasan perkantoran	Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai	Dinas PUPR Kota
d.	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkantoran	Bungkal, Kecamatan Sungai	Dinas PUPR Kota
e.	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan perkantoran	Penuh, dan Kecamatan Tanah Kampung	Dinas PUPR Kota
<b>2.8 Perwujudan Kawasan transportasi</b>			
a.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan transportasi	Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh	Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kota
b.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang pada Kawasan transportasi		Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kota
c.	Penyediaan Fasilitas Parkir Perpindahan Moda yang Terintegrasi		Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kota
d.	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan transportasi		Dinas Perhubungan Provinsi/ Dinas Perhubungan Kota
<b>2.9 Perwujudan Kawasan Pertanahan dan keamanan</b>			
a.	Pemeliharaan dan Penataan Kawasan Pertanahan dan keamanan		
1	Koramil	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Pertanahan/ Dinas PUPR Kota
2	Kodim	Kecamatan Sungai Penuh	Kementerian Pertanahan/ Dinas PUPR Kota
b.	Mempertahankan Fungsi Utama Pertanahan dan Keamanan pada Kawasan Pertanahan dan keamanan	Kota Sungai Penuh	Kementerian Pertanahan/ Dinas PUPR Kota
c.	Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Pertanahan dan keamanan	Kota Sungai Penuh	Kementerian PUPR/ Kementerian Pertanahan/ Dinas PUPR Provinsi/ Dinas Perumahan dan



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**

No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
Kawasan Permukiman Provinsi/ Dinas PUPR Kota/ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota			
<b>3</b>	<b>Perwujudan Aksi Penanggulangan Bencana</b>		
a.	Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana		
1	Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Induk Ketahanan Wilayah Terhadap Bencana Banjir	Kota Sungai Penuh	Kementerian PUPR
b.	Program Penanggulangan Bencana		
1	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Kota Sungai Penuh	BPBD Kota
2	Penyusunan Dokumen Kawasan Rawan Bencana	Kota Sungai Penuh	BPBD Kota
<b>C</b>	<b>Perwujudan Rencana Kawasan strategis kota</b>		
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Kota Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>		
a.	Kawasan Pariwisata		
1	Pengembangan Kegiatan Wisata Alam Terbatas	Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
2	Pengendalian Pembangunan Kawasan Terbangun		
3	Pengendalian Kegiatan yang Mengganggu Fungsi Utama Pelestarian Lingkungan		
4	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Kawasan Pariwisata		
5	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pariwisata		
6	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pariwisata		
b.	Kawasan Pusat Kota		
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan	Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota
2	Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan dan Bangunan		
3	Peremajaan dan Revitalisasi Kawasan Komersial		
4	Pengembangan dan Penataan Sentra-Sentra PKL		
5	Pengembangan RTH		
6	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pusat Kota		
7	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pusat Kota		





No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Kota Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya</b>		
a.	Kawasan Cagar Budaya		
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan	Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Dinas Pendidikan
2	Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan dan Bangunan		
3	Pelestarian Bangunan Cagar Budaya		
4	Revitalisasi Kawasan Permukiman Tradisional/ Etnis/ Bersejarah yaitu Kawasan yang Mempunyai Bangunan Bersejarah yang Bernilai dan Bermakna Penting		
5	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pariwisata		
6	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Cagar Budaya		
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan, Pengolahan, dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya		
b.	Kawasan Rumah Adat		
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan	Kecamatan Sungai Penuh	Dinas PUPR Kota/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Dinas Pendidikan
2	Penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan dan Bangunan		
3	Pelestarian Bangunan Rumah Adat		
4	Revitalisasi Kawasan Permukiman Tradisional/ Etnis/ Bersejarah yaitu Kawasan yang Mempunyai Bangunan Bersejarah yang Bernilai dan Bermakna Penting		
5	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pariwisata		
6	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Rumah Adat		
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan, Pengolahan, dan Pengembangan Kawasan Rumah Adat		
c.	Kawasan Pendidikan		
1	Peningkatan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pendidikan	Kecamatan Pesisir Bukit	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Dinas PUPR Kota/ Dinas Pendidikan
2	Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pendidikan		



No	Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
----	---------------	--------	--------------------

3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan, Pengolahan, dan Pengembangan Kawasan Pendidikan		
---	--	--	--

Sumber: RTRW Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044



### BAB III

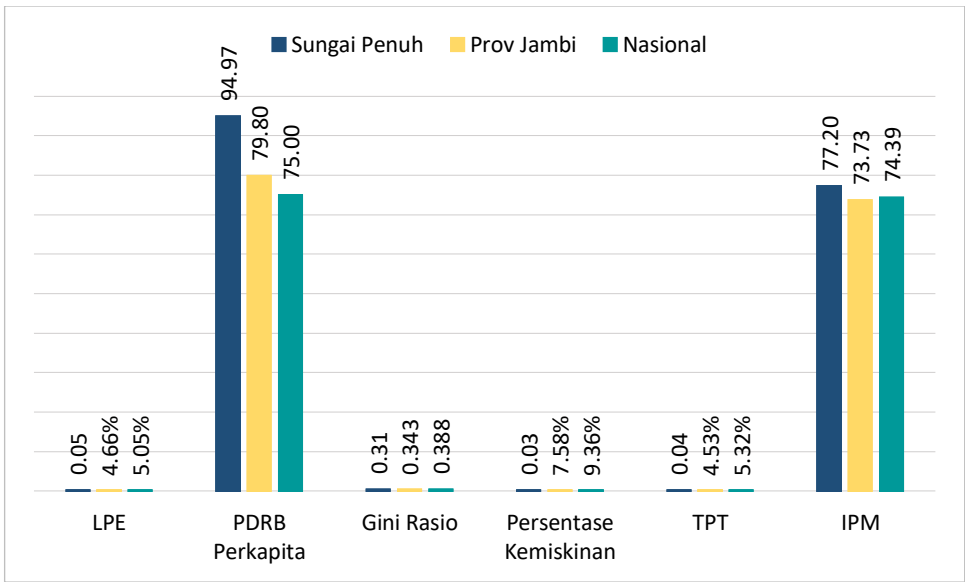
## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kota Sungai Penuh, sebagai pusat kehidupan masyarakat yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan potensi luar biasa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Namun, di balik pesonanya, terdapat tantangan yang perlu dihadapi agar pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud.

Bab ini mengeksplorasi lebih jauh permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Sungai Penuh. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan ini diharapkan dapat merumuskan solusi yang tepat guna mencapai perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dapat bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik untuk Kota Sungai Penuh.

### 3.1 Gambaran Indikator Makro Sosial Ekonomi

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro sosial ekonomi yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks gini (Gini Ratio).



Sumber: BPS: diolah oleh Bappeda, 2024  
(IPM tahun 2023: UHH Hasil Long Form SP2020)

**Gambar III.1**  
**Indikator Makro Sosial Ekonomi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2023**

Tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, indeks gini (gini ratio) dan PDRB perkapita Kota Sungai Penuh tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih baik jika dibandingkan capaian Provinsi Jambi dan nasional. Namun demikian, Perekonomian Kota Sungai Penuh tahun 2023 yang tumbuh

sebesar 4,92%, dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,05%) dan diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (4,66%).

### 3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 yang dijelaskan pada sub bab 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, menjadi pedoman penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis dalam penyusunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi: (1) daya saing perekonomian; (2) pembangunan pendidikan dan kualitas SDM; (3) tingkat kemiskinan dan pengangguran; (4) pengelolaan kesehatan; (5) pembangunan kesejahteraan sosial; (6) penanganan persampahan; (7) banjir dan genangan; (8) ketersediaan, cakupan, serta kualitas sarana dan prasarana; (9) kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan kebencanaan; (10) permukiman kumuh; dan (11) tata kelola pemerintahan.

#### 3.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Aspek Pembangunan

##### 3.2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### A. Aspek Geografi

Pada aspek geografi, permasalahan pembangunan mencakup aspek kondisi dan pemanfaatan fisik ruang serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

**Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral & strategis diantara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Namun, posisi ini belum didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai,** untuk mempersingkat jarak tempuh menuju PKN, PKL, dan PKW dalam rangka aksesibilitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. PKN yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah Kota Padang yang jalur lintasnya melalui PKL Siulak dan PKL Padang Aro, atau PKL Painan. Jalur lintas menuju PKN Kota Jambi ditempuh melalui PKL Sanggaran Agung, PKL Bangko, PKW Sarolangun, dan PKW Muaro Bulian. Selain itu, PKN Bengkulu ditempuh melalui PKW Muko Muko.

**Pengendalian pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan.** Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Sungai Penuh sudah optimal yakni sebesar 98%. Namun, masih dibutuhkan penataan khususnya pada pengendalian pemanfaatan ruang berupa bangunan lama, kawasan permukiman, sempadan sungai, sempadan jalan, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perizinan pembangunan gedung. Selain itu, luas lahan budidaya semakin berkurang dengan perubahan batas kawasan hutan. Hal ini menjadi kendala dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan.

**Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa, menjadikan pusat kota sebagai kawasan padat penduduk. Hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap permasalahan perkotaan, lingkungan hidup dan penurunan kualitas kawasan permukiman, seperti persampahan, sanitasi, banjir, kemacetan dan ketertiban sebagai bagian dari wajah kota.** Perkembangan di kawasan padat ini membutuhkan alternatif lain seperti pembangunan rumah susun, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa secara vertikal, dengan tetap mempertimbangkan hunian yang layak dan ketahanan terhadap bencana.

**Pembangunan sektor pertanian perkotaan (*urban farming*) belum mengoptimalkan pemanfaatan lahan marginal (tidak produktif) seperti lahan rawa arah 100, semak belukar, dan lahan terbuka lainnya.** Sebagian lahan marginal merupakan area cekungan yang rentan terdampak banjir/genangan. Hal ini membutuhkan alternatif pola pertanian non-konvensional, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Tingginya risiko kebencanaan belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.** Indeks Risiko Bencana Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 dengan kategori sedang. Pencapaian tersebut masih perlu dioptimalkan terutama pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

**Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup.** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh tahun 2020 sebesar 87,82 menurun menjadi 75,13 di tahun 2023, khususnya kualitas air. Pengelolaan dan penanganan sampah dan limbah belum optimal, pencemaran sungai yang disebabkan masih lemahnya pengendalian pengawasan serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor industri, belum adanya *reward and punishment* terkait pencemaran lingkungan hidup.

**Sistem pangan masih rentan oleh perubahan faktor internal dan eksternal,** dikarenakan oleh sistem logistik belum tertata dengan baik, keterjangkauan pangan belum menjangkau keseluruhan masyarakat khususnya masyarakat rentan, serta tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras. Selanjutnya, seiring dengan intensitas perubahan iklim yang semakin menguat dan berdampak pada ancaman menurunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, potensi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun oleh banjir dan kekeringan. Upaya pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim masih terbatas.

**Belum optimalnya pengembangan jasa wisata secara terpadu.** Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya amenitas pariwisata (segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan), seperti fasilitas *showcase* dan galeri secara tertata



serta pengembangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Pengembangan jasa wisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi berbasis kawasan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif.

**Potensi pariwisata di kawasan hutan belum dikembangkan secara optimal.** Kota Sungai Penuh telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Hal ini membutuhkan persiapan dan perencanaan secara holistik, mulai dari kerja sama dengan KLHK terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan *Geopark*, sampai pada pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi dengan jasa wisata.

**Kesejahteraan petani belum sepenuhnya didukung dengan pengembangan rantai nilai tambah (*add value chain*) berbasis pertanian.** Tingkat kesejahteraan petani khususnya pangan masih perlu ditingkatkan. Meskipun Nilai NTP pada tahun 2023 mencapai 102,50 poin, yang mengindikasikan sisi pendapatan petani lebih tinggi dari pengeluarannya.

## B. Aspek Demografi

**Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, alam dan ruang.** Meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang.

**Tren penduduk usia produktif Kota Sungai Penuh cenderung meningkat, yang berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan.** Komposisi penduduk Kota Sungai Penuh sudah menuju pada kondisi *ageing population* dimana penduduk lansia mencapai 9,74 % di tahun 2023 dan diproyeksikan sebesar 14,59% di tahun 2045. Tren rasio ketergantungan penduduk Kota Sungai Penuh terus meningkat, tahun 2023 sebesar 45,35 bahkan proyeksi rasio ketergantungan tahun 2045 mencapai 52,12. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif untuk menghasilkan penduduk usia produktif sebagai pelaku pembangunan yang berkualitas, dan terciptanya penduduk lanjut usia produktif (lansia produktif).

### 3.2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

#### A. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi terkait dengan akses masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

**Infrastruktur transportasi sebagai tulang punggung jaringan logistik menuju Kota Sungai penuh masih perlu ditingkatkan,** untuk



mendorong percepatan pembangunan wilayah dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi khususnya perdagangan dan jasa, agribisnis dan sektor pariwisata.

**Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa.** Tantangan pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah pengendalian inflasi, harga di tingkat konsumen yang rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok maupun faktor internal stabilitas pasokan.

**Kemiskinan yang cenderung stagnan,** belum optimalnya akses dan infrastruktur, sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah, program jaminan sosial yang belum optimal, stabilitas pasokan pangan dan sistem rantai pasok yang belum optimal.

**Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja yang rendah.** Gini rasio Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 di angka 0,31 kategori sedang. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan di sektor lapangan usaha secara optimal, serta kinerja sektor *agriculture* yang belum optimal.

**Akses dan pemerataan pembangunan ekonomi masih perlu ditingkatkan.** Realisasi investasi belum optimal, belum sepenuhnya dapat menumbuhkan dan menarik sektor IKM menjadi bagian dari kesatuan rantai pasok industri. Faktor lainnya adalah UMKM masih dihadapkan pada akses permodalan yang belum optimal, rendahnya manajemen pengelolaan, serta rendahnya produktivitas dan akses pemasaran. Pariwisata sebagai sektor ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa, akomodasi makan dan minuman, UMKM dan ekonomi kreatif pertumbuhannya perlu ditingkatkan dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

**Tingkat pengangguran masih perlu diturunkan.** Masih rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran. lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka disumbang paling banyak dari lulusan tingkat SMA/ sederajat. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wirausaha mandiri, belum optimalnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, kerjasama dengan perusahaan dan sistem informasi pencari kerja, kualifikasi tenaga kerja belum sesuai dengan pasar tenaga kerja, terbatasnya jumlah dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mendorong peningkatan akses angkatan kerja terhadap lapangan kerja. Selain itu, belum optimalnya perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa berbasis sumber daya pertanian.

**Tantangan baru sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Kota Sungai Penuh meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.** Kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi lebih ditingkatkan agar kelompok masyarakat usia tua tidak hidup menderita dalam kemiskinan. Permasalahan selanjutnya adalah kenaikan angka harapan sekolah dan

rata-rata lama sekolah masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.

**Dalam jangka panjang, kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur akan semakin menurun seiring dengan masifnya penerapan otomasi, digitalisasi, serta penggunaan *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan).** Munculnya lapangan usaha baru berbasis digitalisasi pada gilirannya menuntut SDM agar lebih berkualitas yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan sektor IKM, UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing menjadi hal yang mendesak dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor lapangan usaha.

## **B. Kesejahteraan Sosial Budaya**

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial budaya terkait dengan akses terhadap hak-hak dasar di sektor-sektor sosial dan budaya dalam rangka mencapai kesejahteraan.

**Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif.** Akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya akses layanan kesehatan disebabkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana.

**Meskipun Indeks Kesehatan mengalami peningkatan,** Kota Sungai Penuh dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memengaruhi kualitas hidup yaitu akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungan.

**Permasalahan tingkat kesehatan ibu dan bayi, kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.** Faktor kesehatan lingkungan, pemeliharaan antenatal dan kelahiran, serta gizi yang belum sepenuhnya optimal serta cakupan bayi mendapatkan ASI Eksklusif.

**Permasalahan kualitas keluarga, ketahanan sosial masyarakat belum optimal.** Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebesar 55,72 (kategori berkembang). Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan serta perlindungan anak menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

**Belum optimalnya kualitas anak, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebesar 64,52.** Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak yang belum optimal (37,40).

**Ketimpangan gender masih perlu diturunkan, indeks ketimpangan gender sebesar 0,758 di tahun 2023.** Dari berbagai indikator IKG, penyebab tingginya ketimpangan gender karena belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, terutama dalam hal kesempatan kerja dan penghasilan. Ketimpangan gender yang tinggi di Kota Sungai Penuh lebih disebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.

**Peran pemuda dalam pembangunan yang belum optimal.** Kota Sungai Penuh dengan jumlah pemuda yang banyak belum sepenuhnya berperan dalam pembangunan yang disebabkan belum optimalnya ruang bagi pemuda dalam berkreasi dan berinovasi, belum adanya wadah bagi pembangunan pemuda serta belum optimalnya program kewirausahaan untuk pemuda.

**Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan, pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan objek budaya.** Pemajuan kebudayaan untuk menggerakkan perekonomian daerah belum sepenuhnya dikembangkan. Keanekaragaman budaya (*tangible intangible*) Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya dikemas menjadi atraksi wisata dan destinasi wisata. Pusat budaya serta arena ruang publik untuk pagelaran seni dan budaya perlu dikembangkan dalam rangka pelestarian dan pemajuan kebudayaan Kota Sungai Penuh.

### 3.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pada aspek daya saing daerah mencakup permasalahan terkait dengan ekosistem inovasi, penguatan/ *enabling environment*, kualitas SDM, infrastruktur dan iklim investasi.

#### A. Daya Saing Ekonomi

**Upaya penciptaan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan memerlukan sumber daya investasi yang besar.** Terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan masih belum menjangkau keseluruhan angkatan kerja. Selain faktor pendidikan, masih rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat antara lain disebabkan oleh kapasitas teknologi dalam menghasilkan nilai tambah belum optimal. Pada tahun 2023 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,50 % dan minus 8,30 %. Disamping itu, berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah, sektor-sektor tersebut antara lain pariwisata, UMKM, industri pengolahan dan ekonomi kreatif.

**Kapasitas usaha dan daya saing IKM dan UMKM masih perlu ditingkatkan.** Kapasitas usaha, termasuk di dalamnya kapasitas teknologi dan akses pembiayaan, intervensi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif baik sebagai regulator, fasilitator maupun promotor (*enabling environment*) dalam penciptaan wirausaha baru maupun peningkatan skala usaha belum optimal.

**Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya.** Sektor basis prospektif yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan, dihadapkan belum optimalnya infrastruktur, fasilitas lainnya. Di samping itu, terdapat beberapa sektor yang memiliki keunggulan komparatif belum dikembangkan secara optimal.

**Kinerja ekosistem ekonomi digital belum optimal.** Digitalisasi ekonomi yang telah terakselerasi oleh pandemi *Covid-19* dalam perjalanannya cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, diindikasikan oleh penurunan pertumbuhan sektor lapangan usaha informatika dan komunikasi dari 5,85 % pada tahun 2020 menjadi 4,85 % di tahun 2023. Sektor UMKM masih belum terdigitalisasi secara optimal yang disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur digital serta belum optimalnya literasi digital pelaku UMKM.

**Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan.** Realisasi investasi belum dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal.

**Pembangunan ekonomi inklusif Kota Sungai Penuh belum optimal,** khususnya pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi daerah dihadapkan 3 (tiga) permasalahan keterbatasan yaitu: (1) keterbatasan kapasitas; mencakup keterbatasan kapasitas SDM, sumber daya modal, keterbatasan akses dan keterbatasan menghadapi perubahan yang cepat; (2) keterbatasan daya saing daerah; meliputi keterbatasan promosi daerah, keterbatasan keterkaitan antar daerah; dan (3) keterbatasan pengembangan iklim usaha dan investasi serta keterbatasan kualitas komoditas.

**Rasio kewirausahaan Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 2,79%, menurun jika dibandingkan tahun 2020 (4,85%).** Menunjukkan menurunnya penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha dan terjadinya perlambatan usaha.

**Kinerja sektor *agriculture* masih perlu ditingkatkan,** Pada tahun 2022 total produktivitas sektor *primer* (24,72 juta rupiah/jiwa) lebih rendah jika dibandingkan sektor *sekunder* (120,15 juta rupiah/jiwa) dan *tersier* (151,10 juta rupiah/jiwa). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya daya saing sektor pertanian, dan komoditas belum bernilai tambah tinggi.

## **B. Daya Saing SDM**

**Permasalahan selanjutnya adalah kenaikan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.** Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah idealnya memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan memiliki Pendidikan yang lebih rendah.

**Belum optimalnya layanan pendidikan bermutu.** Angka Partisipasi murni SD/Sederajat, SMP/Sederajat, hingga SMA/Sederajat tahun 2023 Kota Sungai Penuh masing-masing sebesar 98,55%, 84,44% dan 73,18%. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana pendukung, belum berkembangnya teknologi pembelajaran, dan kurikulum yang belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja global serta belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

**Mutu pendidikan berdasarkan SNP masih perlu ditingkatkan.**

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud tahun 2022, sebanyak 8 SD (10,81%) akreditasinya masih C (Cukup) dan 2 SD (2,70%) belum terakreditasi, pada tingkat SMP sebanyak 4 SMP (28,57%) akreditasinya masih C (Cukup). Selanjutnya 70 PAUD (56,45%) akreditasinya masih C (Cukup) dan 32 PAUD belum terakreditasi (25,81%). Pusat kegiatan belajar masyarakat dan sanggar kegiatan belajar hanya 33,33 % yang terakreditasi B (Baik), selebihnya memiliki akreditasi C dan belum terakreditasi. Sedangkan lembaga kursus dan pelatihan baru mencapai akreditasi C sebesar 40,74 % dan sisanya belum terakreditasi.

**Literasi dan numerasi masih perlu ditingkatkan.**

Skor literasi SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2023 sebesar 72,87 dan 73,90. Sedangkan skor numerasi SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2023 sebesar 63,35 dan 65,59.

**Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sungai Penuh masih perlu ditingkatkan,** terutama pada unsur pemerataan layanan perpustakaan. Indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Sungai Penuh tahun 2022 sebesar 70,69 (kategori sedang), yang menunjukkan capaian yang cukup baik.

**Infrastruktur digital belum merata.**

Berdasarkan data masyarakat yang mengakses internet tahun 2022 di Kota Sungai Penuh, yang dapat merefleksikan penggunaan layanan digital, baru mencapai 66,68% dan masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses internet secara optimal.

**Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM.** Indeks Masyarakat Digital Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 41,07 (klasifikasi C) dibawah capaian Provinsi Jambi (42,78) dan nasional (43,18). Belum optimalnya infrastruktur dan ekosistem digital, pekerjaan yang berfokus pada keahlian digital belum optimal.

**Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan angkatan kerja. keterkaitan yang lemah (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja masih perlu ditingkatkan.** Lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka disumbang paling banyak dari lulusan tingkat SMA/ sederajat yaitu sebesar 45,78%. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wirausaha mandiri, serta belum adanya wadah untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

**SDM yang berkompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu ditingkatkan.** Keterserapan tenaga kerja penduduk dilihat dari kualifikasi pendidikan di Kota Sungai Penuh masih rendah. Pada tahun 2023 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan didominasi tenaga kerja yang berpendidikan lulusan SMA/ sederajat sebesar 33,47%, diikuti lulusan perguruan tinggi sebesar 27,91%, ≤sekolah dasar sebesar 21,87%, tingkat Pendidikan ≤SD/ sederajat



sebesar 21,87% dan lulusan SMP/ sederajat sebesar 16,74%. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, kurangnya SDM yang kompeten juga disebabkan oleh keterbatasan keberadaan BLK yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih/instruktur yang kompeten serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.

**Berdasarkan data BPS pekerja informal sebesar 30.501 jiwa lebih banyak dari pekerja formal yang sebesar 19.635 jiwa, median upah pekerja formal lebih tinggi dibandingkan pekerja informal.** Perkembangan sektor informal tak terlepas dari jumlah lapangan kerja yang terbatas. Kondisi ini menggambarkan rendahnya kualitas investasi. Kenaikan penanaman modal tidak diikuti dengan pembukaan lapangan kerja yang optimal.

**Meningkatnya angka ketergantungan (*dependency ratio*).** Pada tahun 2023 sebesar 45,35% meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 43,29. Semakin besar angka beban ketergantungan maka berdampak pada beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

### C. Daya Saing Infrastruktur

**Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat dan perkembangan perkotaan berkelanjutan.** Hal ini disebabkan belum optimalnya pembangunan infrastruktur konektivitas dalam mengimbangi perkembangan kegiatan ekonomi. Adapun salah satu komponen pembentuk infrastruktur konektivitas adalah sebaran dari hub-hub penghubung yang menjadi titik simpul transportasi. Transportasi perkotaan masih belum terintegrasi dengan seluruh moda yang ada, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih kecil.

**Ketersediaan infrastruktur konektivitas belum memadai dan memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang,** yang berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator penting adalah proporsi kemandapan jalan, yang baru mencapai 74,00% di tahun 2023.

**Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur jalan dihadapkan pada persoalan alih fungsi sebagian kawasan hutan dan lahan sawah dilindungi (LSD),** alih fungsi lahan pertanian (termasuk didalamnya lahan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur, industri dan permukiman.

**Dari aspek infrastruktur sumber daya air, kinerja layanan jaringan irigasi belum sepenuhnya menopang peningkatan produktivitas pertanian.** Meskipun jaringan irigasi (kewenangan kota) dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 51,27% di tahun 2020



menjadi 56,30% di tahun 2023, faktor bencana alam, umur bangunan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian.

**Pengelolaan dan pemeliharaan drainase belum optimal**, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase menyebabkan meluapnya air ke permukaan jalan ketika terjadi hujan.

**Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman masih perlu ditingkatkan.** Kinerja akses sanitasi layak dan akses air minum layak tahun 2023 sebesar 83,52%, 90,74%. Masih adanya praktik BABS, belum optimalnya infrastruktur pengolahan limbah. Disamping itu peningkatan jumlah pelanggan air bersih tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas, minimnya ketersediaan lahan di perkotaan untuk pengembangan perumahan.

**Kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan.** Disamping belum memiliki TPA sampah, program penanganan sampah secara terpadu melalui *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) dari hulu ke hilir belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga belum dapat menurunkan volume timbunan sampah secara signifikan.

**Akses listrik belum merata ke seluruh wilayah.** Masih belum optimalnya dari aspek stabilitas pasokan dan kualitasnya. pemerataan listrik perdesaan untuk mewujudkan energi berkeadilan perlu ditingkatkan.

#### **D. Daya Saing Iklim Investasi**

**Belum optimalnya peran dan fungsi Linmas desa/kelurahan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kapasitas SDM (PPNS).** Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

**Belum efektifnya implementasi peraturan pendukung iklim usaha**, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, untuk menarik atau merangsang investasi di daerah dalam rangka menciptakan akses dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, namun belum terimplementasi secara optimal.

**Insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi dan penanaman modal daerah.** Model-model inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beberapa daerah lainnya dalam menyediakan skema insentif perlu diimplementasikan di Kota Sungai Penuh.

**Peran nilai agama belum sepenuhnya optimal membentuk nilai-nilai, motivasi dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat.** Kerukunan umat beragama belum sepenuhnya menjadi modal dasar dalam pembangunan. Selain itu, kerukunan umat beragama sebagai modal penting dalam menarik minat investasi di Kota Sungai Penuh.

**Daya Saing Daerah Kota Sungai Penuh yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah masih perlu ditingkatkan.** Belum optimalnya kapabilitas inovasi dan dinamisme bisnis (ekosistem inovasi), infrastruktur yang belum memadai (lingkungan pendukung), dan sistem keuangan (pasar).

**Belum optimalnya kepastian ruang untuk Investasi.** Rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya mendorong peningkatan investasi dan sebagai pedoman bagi investor menanamkan investasinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing Kota Sungai Penuh. Alokasi ruang untuk investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung.

**Kenaikan jumlah desa mandiri masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas desa mandiri yang sesungguhnya.** Pengembangan kewirausahaan desa untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi desa belum optimal. Kolaborasi pemangku kepentingan dan kerjasama dengan masyarakat desa guna menumbuhkan kewirausahaan desa yang tangguh dan berinovasi belum optimal.

#### **3.2.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

**Birokrasi belum adaptif dengan dinamika global yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.** Kapasitas birokrasi di Kota Sungai Penuh menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan serta menghadapi disrupsi global. Kelembagaan yang adaptif dan jangkauan pelayanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan perlu ditingkatkan, termasuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta akademisi.

**Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.** Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, integritas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas di Kota Sungai Penuh yaitu pembangunan integritas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal, sistem tata kelola pemerintahan yang belum terpadu, profesionalitas ASN dan kapabilitas serta sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal.

**Pelayanan publik masih memerlukan penguatan yang berkesinambungan.** Penguatan tersebut terkait sistem manajemen pelayanan agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan publik secara terintegrasi berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan.

**Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam penguatan sistem pelayanan publik.** Belum optimalnya pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi digital, belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik serta kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi perlu ditingkatkan.



**Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan inovasi daerah.** Indeks inovasi daerah Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 46,50. Diperlukan peningkatan difusi pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang lebih cepat kepada masyarakat, baik secara aktor-aktor inovasi maupun dari sisi keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi untuk sektor layanan publik dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian belum optimal. Kolaborasi untuk memperkuat sistem inovasi yang melibatkan institusi riset, akadeMisi dan sektor swasta perlu ditingkatkan.

**Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar 9,17%.** Rendahnya kemandirian keuangan daerah berdampak dalam pembiayaan pembangunan. Pembiayaan masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat. Belum optimalnya upaya peningkatan dan perluasan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah belum maksimal, serta kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan.

### 3.2.2 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan hasil analisis dan kondisi eksisting, berikut disajikan perumusan permasalahan pembangunan Kota Sungai Penuh.

**Tabel III.1**  
**Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

<b>1. Permasalahan SDM yang belum optimal</b>
<b>Permasalahan daerah:</b>
<b>1) Kualitas layanan pendidikan belum merata</b> Sarana dan prasarana yang mendukung kualitas pendidikan, serta tenaga kependidikan yang berkompeten dan teknologi pembelajaran perlu ditingkatkan.
<b>2) Belum optimalnya keterampilan dan keahlian</b> Penguatan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki kompetensi yang relevan baik lokal maupun nasional perlu ditingkatkan.
<b>3) Kesehatan dan kesejahteraan SDM</b> Kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah.
<b>4) Belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur pendukung</b> Fasilitas umum dan infrastruktur pendukung, transportasi dan teknologi informasi perlu ditingkatkan, untuk mendorong konektivitas, aksesibilitas informasi dan daya saing daerah.



---

## **2. Permasalahan daya saing perekonomian yang berkelanjutan belum optimal**

---

### **Permasalahan daerah:**

---

#### **1) Infrastruktur masih perlu ditingkatkan**

Infrastruktur transportasi dan konektivitas menjadi salah satu hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas perlu ditingkatkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.

#### **2) Belum optimalnya diversifikasi dan hilirisasi ekonomi**

Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dapat menimbulkan risiko, dan rentan terhadap perubahan pasar global. Oleh karena itu, diversifikasi dan hilirisasi serta pengembangan produk perlu ditingkatkan.

#### **3) Pemerataan pembangunan antar wilayah**

Pemerataan pembangunan antar wilayah perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan distribusi manfaat ekonomi.

#### **4) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi**

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, yang menghambat upaya pencapaian pertumbuhan yang inklusif.

---

## **3. Permasalahan tata kelola pemerintahan belum optimal**

---

### **Permasalahan daerah:**

---

#### **1) Kelembagaan dan akuntabilitas**

Struktur kelembagaan yang belum efektif, regulasi dan tata kelola serta akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

#### **2) Sumber daya manusia yang kompeten perlu ditingkatkan**

Pelatihan dan pengembangan keterampilan aparatur perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan keterampilan yang memadai, aparatur dapat memberikan layanan yang lebih efektif, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.

#### **3) Pengelolaan keuangan daerah belum optimal**

Pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, keadilan, efisiensi, dan efektivitas perlu ditingkatkan, termasuk upaya peningkatan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah.

#### **4) Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan**

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah perlu ditingkatkan agar perumusan dan evaluasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, serta implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

---



---

#### **4. Permasalahan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam belum optimal**

---

##### **Permasalahan daerah:**

---

##### **1) Kesimbangan pembangunan sosial masih perlu ditingkatkan**

Keseimbangan dalam distribusi manfaat pembangunan sosial perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesetaraan di antara berbagai lapisan masyarakat.

##### **2) Ancaman terhadap warisan budaya**

Urbanisasi dan modernisasi mengancam warisan budaya Kota Sungai Penuh, dan berpotensi menghilangkan nilai-nilai tradisional, seni, dan kearifan lokal.

##### **3) Tantangan dalam pelestarian budaya lokal**

Kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya, perubahan gaya hidup yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal, serta dukungan untuk inisiatif pelestarian perlu ditingkatkan.

##### **4) Degradasi lingkungan dan ekosistem**

Aktivitas pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan ekosistem. Penggunaan lahan dan penebangan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan di Kota Sungai Penuh.

##### **5) Belum optimalnya penanganan sampah dan sanitasi**

Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terintegrasi dan sanitasi yang mengakibatkan polusi lingkungan dan menjadi risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

##### **6) Kolaborasi dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) perlu ditingkatkan**

Belum optimal pemanfaatan/pengelolaan jasa lingkungan Taman Nasional Kerinci Seblat.

---

#### **5. Permasalahan infrastruktur perkotaan belum optimal**

---

##### **Permasalahan daerah:**

---

##### **1) Jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan**

Jaringan jalan dan transportasi yang belum sepenuhnya memadai, kemacetan lalu lintas dan moda transportasi publik yang belum optimal, menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang.

##### **2) Sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan**

Belum optimalnya sarana dan prasarana publik, seperti taman kota, tempat rekreasi, dan ruang terbuka hijau, dapat memengaruhi kualitas hidup penduduk. Fasilitas umum yang belum optimal menghambat kegiatan sosial dan budaya.

##### **3) Belum optimalnya infrastruktur pengendali banjir**

Belum optimalnya infrastruktur pengendali banjir berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Beberapa infrastruktur penting, seperti kolam retensi atau penampungan,

---

pembuatan *check dam*, serta perbaikan dan peningkatan kapasitas sungai, masih perlu dikembangkan, untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi lingkungan serta kehidupan masyarakat.

**4) Belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi**

Infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet dan akses ke teknologi digital, untuk mendorong kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan Pendidikan perlu ditingkatkan.

---

**6. Permasalahan pengembangan wilayah yang belum optimal**

**Permasalahan daerah:**

**1) Belum optimalnya pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang**

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan untuk mendorong pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Selain itu, rencana infrastruktur sebagai turunan dari perencanaan tata ruang harus diformalkan melalui penyusunan dan penetapan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, yang mengacu pada RPJPD, RTRW, dan RPJMD.

**2) Tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi**

Kesetaraan dalam pembangunan ekonomi dan investasi agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat yang sama dan menciptakan lapangan kerja perlu ditingkatkan.

**3) Akses ke sumber daya dan pelayanan masih perlu ditingkatkan**

Kesetaraan dalam penyediaan pelayanan dasar, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar untuk mendorong perkembangan wilayah secara keseluruhan perlu ditingkatkan.

**4) Dukungan pengembangan sektor ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan**

Dukungan dan investasi dalam pengembangan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah perlu ditingkatkan. Ketergantungan pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi.

---

**7. Permasalahan ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah belum optimal**

**Permasalahan daerah:**

---





---

**1) Tingkat kriminalitas dan masih kurangnya kesadaran masyarakat**

Tingkat kriminalitas menjadi ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman, ketertiban umum, serta peraturan yang berlaku, seperti praktik membuang sampah sembarangan, pengrusakan fasilitas aset daerah di ruang publik, dan minimnya kesadaran tertib berlalu lintas.

**2) Ketidakstabilan sosial**

Pemerataan ekonomi dan keadilan sosial perlu menjadi perhatian dalam menciptakan kestabilan sosial. Selain itu, kebijakan yang melindungi kelompok-kelompok rentan perlu ditingkatkan.

**3) Ketidakpastian di lingkungan bisnis**

Iklim usaha yang kondusif perlu ditingkatkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

**4) Tantangan dalam penanganan bencana alam**

Kondisi geografis Kota Sungai Penuh rentan terhadap bencana, oleh karena itu penerapan sistem manajemen bencana yang tangguh menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon masyarakat terhadap bencana.

**5) Stabilitas ekonomi makro masih perlu ditingkatkan**

Untuk mewujudkan kesinambungan fiskal serta menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian daerah, diperlukan kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

---

**8. Kesinambungan pembangunan belum optimal**

---

**Permasalahan daerah:**

---

**1) Pengendalian pembangunan belum optimal**

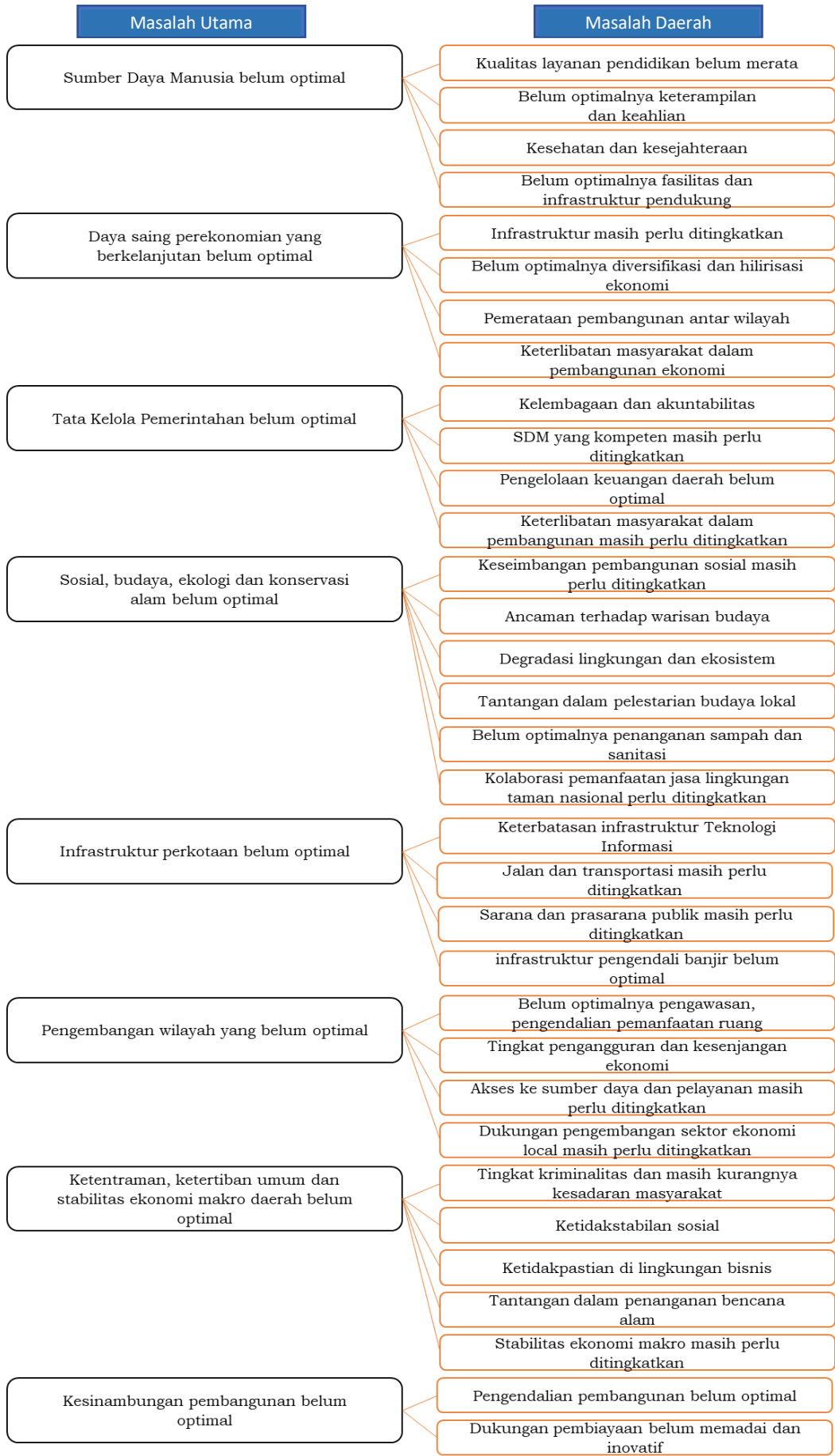
Pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko, tata kelola data pembangunan dan pemanfaatan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perlu ditingkatkan.

**2) Dukungan pembiayaan belum memadai dan inovatif**

Pembiayaan inovatif untuk mengatasi hambatan ketersediaan sumber dana, investasi yang ditunjang dengan inovasi perlu ditingkatkan.

---

*Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024*



**Gambar III.2**  
**Diagram Permasalahan Pembangunan Daerah**

### 3.3 Isu Strategis Pembangunan

Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital:

1. Urbanisasi dunia: Penduduk dunia di Perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65% (2045).
2. Demografi: Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015.
3. Peranan *emerging economies*; *output* negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71% dari total *output* dunia.
4. Perdagangan internasional: Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4% per tahun.
5. Keuangan internasional: Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*.
6. Kelas menengah: Pada tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84%.
7. Persaingan sumber daya alam: Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi permintaan yang meningkat.
8. Perubahan iklim: Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang.
9. Teknologi: Tren perubahan teknologi kedepan akan didominasi oleh teknologi IT, EBT, Kesehatan, Otomasi dan AI.
10. Perubahan geopolitik: Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan.

#### 3.3.1 Isu Global

##### 3.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045, menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Sungai Penuh yang telah dilaksanakan dan mencapai target mencapai 20% (21 dari total 106 indikator), yang sudah terlaksana dan belum mencapai target (13%), TPB yang sudah terlaksana dan tidak ada target (24%). Proporsi pelaksanaan TPB di Kota Sungai Penuh secara umum didominasi oleh ketidaktersediaan data/belum dilaksanakan (43%). Beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang dianggap paling strategis, meliputi: (1) tata guna lahan; (2) kualitas air; (3) kualitas udara;

(4) resiko bencana; (5) persampahan; (6) pembangunan ekonomi dan infrastruktur; dan (7) peningkatan SDM/tata kelola birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk pencapaian sasaran TPB daerah, gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing.

#### **3.3.1.2 Demografi Global dan Bonus Demografi**

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 di Kota Sungai Penuh mencapai 118.311 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 65,74% dengan rasio ketergantungan sebesar 52,12% di tahun 2045. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial serta peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

#### **3.3.1.3 Geopolitik dan Geoekonomi**

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi strategis Kota Sungai Penuh menjadi potensi mendorong akselerasi ekonomi untuk berkembang. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kota Sungai Penuh. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tidak ada lagi hambatannya.

#### **3.3.1.4 Perkembangan Teknologi**

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor

manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

### **3.3.1.5 Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon**

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan eMisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan eMisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; dan (5) peningkatan produktivitas lahan. ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh.

### **3.3.2 Isu Strategis Nasional**

#### **3.3.2.1 Perpindahan IKN**

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor dan ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Perpindahan Ibu Kota Negara akan meningkatkan perdagangan antar-wilayah. Saat ini proses perdagangan setiap sektor masih terpusat di pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh proses mobilitas untuk menjangkau ke luar pulau Jawa masih cukup sulit dan biaya yang diperlukan juga besar. Ketika pemindahan IKN ini sudah terlaksana diharapkan akan meningkatkan mobilitas untuk menjangkau luar pulau Jawa semakin mudah. Tentunya, hal ini akan membuat proses perdagangan antar wilayah di Indonesia semakin tinggi, dan berdampak terhadap harga jual ke masyarakat yang lebih terjangkau.

Namun, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan menyebabkan meningkatnya nilai APBN. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan IKN. Kondisi ini berdampak terhadap alokasi anggaran pembangunan di Kota Sungai Penuh yang sangat bergantung dari APBN.

### 3.3.2.2 Bonus Demografi

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN.

Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50% yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia. *Consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat *consuming class* ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

### 3.3.2.3 Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi *Covid-19* namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggungnya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.



Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (1) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (2) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (3) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (4) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (5) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (6) penerapan ekonomi sirkular; (7) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk produk turunannya secara berkelanjutan; (8) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk produk hijau, melalui pengembangan *green financing*; dan (9) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

#### **3.3.2.4 Konektivitas dan Infrastruktur Dasar**

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan - perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat

tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

#### **3.3.2.5 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana**

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp. 22,8 triliun per tahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp. 544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan EMisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Kontribusi eMisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk, diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

Daya dukung sumber daya alam diperkirakan akan terus menurun. Daya dukung lahan hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta ha dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU) yang dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu ha selama kurun waktu Tahun 2020-2045 serta pengurangan luas lahan sawah sehingga diproyeksikan akan menurun hingga 7 juta ha diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/ha/tahun akibat degradasi tanah. Selain itu, daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan, sampai dengan tahun 2045 tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa sudah berada pada tingkat langka atau kritis sehingga berdampak pada ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan yang diprediksi akan mengalami penurunan. Adapun, daya dukung ekosistem laut yang diprediksi akan

mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari, selain itu naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem yang mengancam pemutihan pada ekosistem terumbu karang.

Daya tampung kualitas air, lahan, dan lingkungan laut diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen IKA nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata Tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK 2021) nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44% akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim namun pengelolaan yang berkelanjutan yang disebabkan aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi dan sampah laut masih rendah. Namun disisi lain, daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu saat ini konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

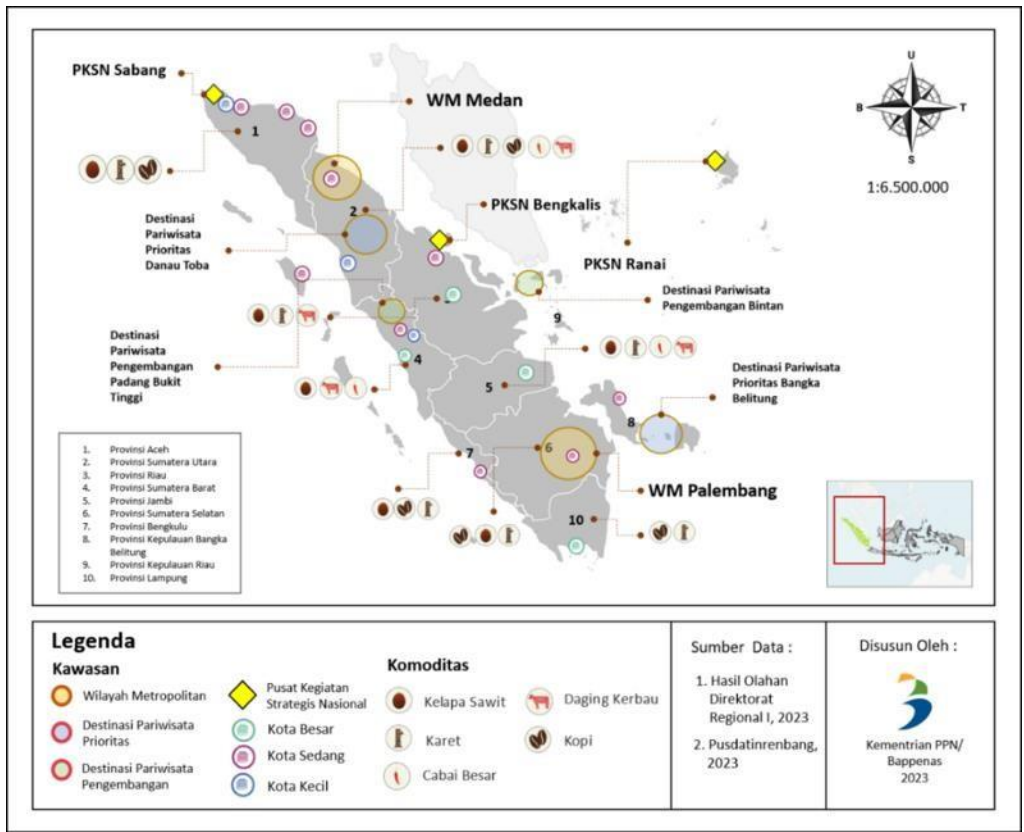
#### **3.3.2.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan trend pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

#### **3.3.3 Isu dan Potensi Wilayah Sumatera**

Isu wilayah Sumatera dalam RPJPN Tahun 2025-2045 mencakup:

1. Wilayah Sumatera memiliki ragam sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pertambangan dan migas.
2. ALKI I dan jalur perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi Wilayah Sumatera untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
3. Secara umum, berdasarkan analisis *growth diagnostics*, faktor, penghambat pembangunan ekonomi antara lain: infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dan Riau; regulasi dan institusi di Provinsi Sumatera Utara; SDM pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung; isu makro dan fiskal di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu; serta pembiayaan di Provinsi Aceh.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

**Gambar III.3**  
**Peta Potensi Wilayah Sumatera**

### Ekonomi

Isu utama ekonomi di Wilayah Sumatera mencakup: (1) kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya belum beroperasi optimal; (2) komoditas unggulan baik berupa pertanian dan perikanan maupun tambang belum bernilai tambah tinggi; (3) jumlah turis asing terbatas akibat tidak terpadunya atraksi, aksesibilitas, amenities dan ansilari; dan (4) sumber daya manusia yang melakukan kegiatan ekonomi masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA. Isu ekonomi selanjutnya adalah:

1. Masih terdapat ketimpangan ekonomi antara pantai timur dan pantai barat wilayah Sumatera.

2. Isu kemaritiman khususnya perikanan tangkap dan perikanan laut, juga menjadi permasalahan penting.
3. Stabilitas makro terutama inflasi perlu dijaga.

### **Sosial**

Isu sosial di wilayah Sumatera mencakup:

1. Kesenjangan sosial di wilayah Sumatera masih terlihat dengan tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di beberapa provinsi, terutama kemiskinan ekstrem di daerah afirmasi 3T seperti di Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano.
2. Capaian kesehatan ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting tahun 2022 terutama di Provinsi Aceh.
3. Penyediaan layanan kesehatan belum merata, khususnya di daerah afirmasi 3T.
4. Penyediaan layanan Pendidikan belum merata, khususnya di daerah afirmasi 3T.
5. Sebagian besar perguruan tinggi di Sumatera masih terakreditasi rendah atau belum terakreditasi.
6. Layanan ketenagalistrikan di Wilayah Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau cadangan di beberapa sistem, pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar.
7. Jangkauan jaringan seluler di wilayah Wilayah Sumatera belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi).
8. Wilayah Sumatera juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T.
9. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) dan Wilayah Metropolitan Palembang (Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin) masih menghadapi isu permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup.

### **Desentralisasi dan Otonomi Daerah:**

1. Beberapa permasalahan tata kelola kewilayahan dikarenakan oleh kualitas aparatur daerah yang rendah.
2. Integritas tata kelola pemerintahan daerah dan desa masih rentan praktik korupsi.
3. Sistem merit pada beberapa provinsi di wilayah Sumatera belum baik.
4. Kemandirian fiskal di wilayah Sumatera masih perlu menjadi perhatian.



**Stabilitas Pertahanan dan Keamanan:**

Beberapa daerah di Wilayah Sumatera berbatasan dengan negara lain sehingga keamanan laut berpotensi menjadi ancaman.

**Sosial Budaya dan Ekologi:**

1. Isu sosial budaya mencakup aspek keluarga, kesetaraan gender, penyandang disabilitas, kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan.
2. Isu lingkungan di Wilayah Sumatera secara garis besar meliputi deforestasi, tata kelola wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), habitat satwa endemik wilayah, serta kerentanan pesisir.
3. Wilayah Sumatera berpotensi untuk menerapkan konsep *circular economy*.

**3.3.4 Isu Strategis RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045**

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

**1. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata**

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi-institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerja sama dengan para pelaku usaha maupun *stakeholder* lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menekan angka kematian ibu, stunting, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi *Covid-19* sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas



dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

## **2. Bonus Demografi dan *aging population* yang belum terkelola dengan baik**

Saat ini Provinsi Jambi berada pada fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih mendominasi keseluruhan penduduk. Namun demikian, jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran dan serapan tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, maka terlihat bahwa bonus demografi tersebut belum termanfaatkan/ terkelola dengan baik. Sementara itu, proyeksi penduduk Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa mulai tahun 2028 Provinsi Jambi mulai memasuki *aging population* atau penuaan, dimana proporsi penduduk lansia berada di atas 7 persen. Bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik dengan jumlah lansia yang meningkat jika tidak segera ditangani akan menjadi beban Provinsi Jambi kedepan.

## **3. Degradasi Lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal**

Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategis yang lebih baik melalui pengelolaan satu data – satu peta. Perencanaan tata guna lahan tampak belum cukup mengatur alokasi lahan produktif. Rencana induk perkebunan hanya dimiliki komoditas tertentu sementara masih banyak komoditas strategis lainnya. Perluasan perkebunan yang berlebihan perlu dikendalikan sehingga tidak merusak dan mengganggu lahan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan yang minim pada lahan mengakibatkan konflik pada areal hutan lindung gambut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka peluang pelanggaran terhadap penguasaan lahan. Persoalan pemetaan ini juga terjadi pada lahan pertanian yang belum dilengkapi dengan peta kesesuaian lahan pertanian. Budidaya padi merupakan sektor yang masih perlu untuk didorong mengingat produktivitasnya masih dibawah rata-rata nasional. Perluasan lahan pertanian, meskipun sudah didorong oleh pemerintah daerah melalui penegasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), masih membutuhkan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini perlu didukung oleh pengelolaan data yang lebih baik mulai dari pengumpulan data, data *cleaning*, penyebarluasan data dan pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik. Provinsi Jambi menjadi lokasi berbagai ekosistem penting secara internasional, nasional, dan lokal, yang menjadikannya bagian dari isu-isu strategis seperti perubahan iklim terkait upaya mitigasi dan adaptasi, kebakaran hutan dan lahan serta isu-isu berkaitan seperti kualitas udara/asap lintas negara Asia Tenggara, keanakeragaman hayati *terrestrial* dan *below water*, dan kualitas perairan yang penting terkait mikroplastik dan sampah-sampah di lautan. Terkait perubahan iklim

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki peranan dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK).

#### **4. Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum optimal**

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana;
- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar;
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau;
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara; dan
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **3.3.5 Isu dan Tantangan RPJPN Tahun 2025-2045**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Inovasi (IPTEKIN).
3. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal,
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
11. Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
12. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.
13. Isu dan tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.
14. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
16. Kualitas pendidikan yang masih rendah.
17. Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
18. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
20. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
21. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.
23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
24. Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
25. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah.
26. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
27. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
28. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya diurusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

29. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
30. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.
31. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.
32. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
33. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya, diantaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
34. Selanjutnya, ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
35. ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi.
36. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya.
37. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
38. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
39. kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

### **3.3.6 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) didasarkan pada prinsip pembangunan rendah karbon, partisipatif dan kerja sama. Keterbatasan ruang sebagai tantangan untuk memanfaatkan ruang secara efektif, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilihan pengembangan usaha ekowisata berbasis keanekaragaman hayati dan kolaborasi dengan TNKS perlu dipersiapkan secara optimal.

Masalah yang umum terjadi di daerah perkotaan yang baru berkembang seperti tingginya timbunan sampah, pencemaran air dan kemacetan lalu lintas perlu diatasi melalui kebijakan yang cerdas seperti



pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi, daur ulang limbah dan pengembangan permukiman yang ramah lingkungan, reduksi eMisi dengan penggunaan transportasi umum dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

Isu prioritas lingkungan hidup dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052, yaitu: (1) peningkatan timbunan sampah; (2) penurunan kualitas air; (3) banjir; (4) degradasi kualitas hutan; (5) kurangnya pengolahan limbah cair domestik; (6) alih fungsi lahan untuk pemukiman; (7) kemacetan dan tata kota; dan (7) penataan pasar yang tidak teratur.

### **3.3.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Kajian ini juga menetapkan isu-isu berdasarkan masalah dan potensi daerah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Frekuensi Banjir dan Bencana Lainnya**

Pada tahun 2022 Kota Sungai Penuh memiliki beberapa bencana yaitu gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, bencana alam yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu banjir dan tanah longsor. Bencana banjir merupakan jenis bencana terbesar dan rutin terjadi setiap tahunnya. Penyebab terjadinya banjir ini adalah:

- a. Curah hujan yang relatif tinggi;
- b. Tingginya debit air larian (*run off*) akibat pembukaan lahan kawasan hulu;
- c. Perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan saluran drainase; dan
- d. Penurunan kapasitas Batang Merao akibat sedimentasi.

#### **2. Penurunan Kualitas Air**

Pencemaran limbah menjadi penyebab utama penurunan kualitas air di Kota Sungai Penuh. Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air limbah yang ada saat ini masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas air secara efektif.

### **3. Peningkatan Timbunan Sampah**

Peningkatan timbunan sampah sudah menjadi salah satu isu strategis di Kota Sungai Penuh dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa permasalahan persampahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Gaya hidup konsumtif dan laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam meminimalisir timbunan sampah;
- b. Peran Kota Sungai Penuh sebagai pusat perdagangan dan jasa yang mempunyai pasar induk yang melayani dua wilayah administratif (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) sehingga meningkatkan timbunan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa; dan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan belum adanya lokasi permanen untuk TPA.

### **4. Penurunan ekonomi masyarakat setelah Covid-19**

Pandemi *Covid-19* yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Turunnya kinerja ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020, yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 dan kembali menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS, selama pandemi *Covid-19*, terdapat tiga sektor tertinggi yang memberhentikan pekerja dalam waktu singkat yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi dan akomodasi serta makan dan minum. Sektor-sektor tersebut merupakan jenis lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kota Sungai Penuh. Pemutusan hubungan kerja pada sektor tersebut akan berdampak terhadap perekonomian Kota Sungai Penuh.

### **5. Tingginya intensitas alih fungsi lahan**

Beberapa isu penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh adalah:

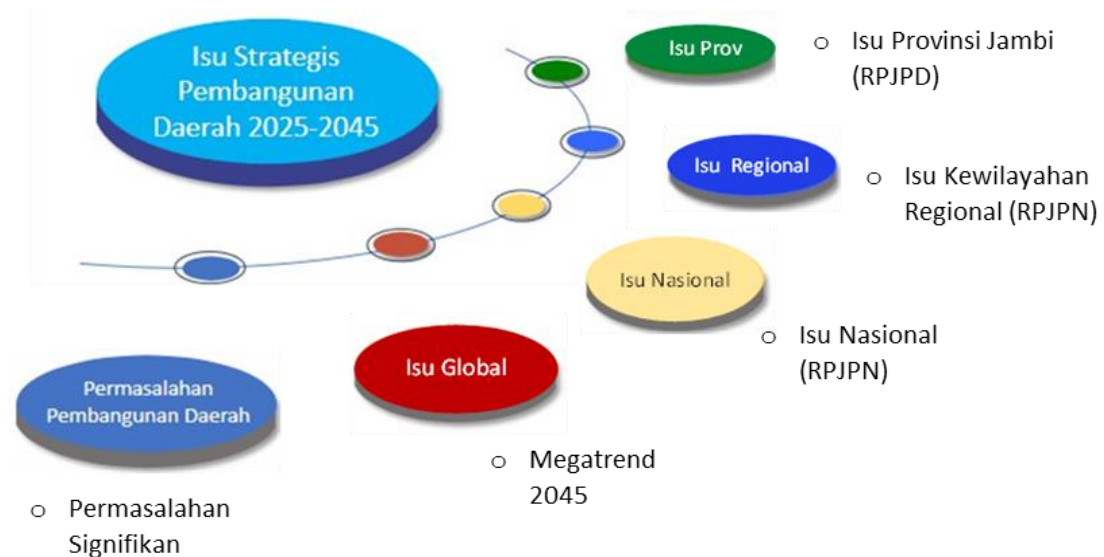
- a. Luas kawasan lindung yang jauh lebih besar dari kawasan budidaya sehingga semakin terbatas penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktivitas penduduk dan meningkatnya alih fungsi lahan;
- b. Peningkatan luas lahan kritis; dan
- c. Tingginya kawasan rawan bencana banjir dan rawan bencana gempa bumi.

Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan menjadi salah satu isu strategis di Kota Sungai Penuh. Dinamika pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi membutuhkan lahan untuk mendukung berbagai aktivitas. Upaya-upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan dengan pemantauan berkala dan sosialisasi serta kerja sama dengan pemangku kepentingan perlu menjadi perhatian.



### 3.3.8 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan signifikan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode tahun 2025-2045. yaitu isu global, nasional, regional Sumatera dan Provinsi Jambi sebagaimana skema pada gambar berikut.



**Gambar III.4**  
**Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

Perumusan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2025-2045 secara lebih rinci sebagaimana diuraikan pada Tabel III.2. Isu strategis pembangunan daerah Kota Sungai Penuh tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pembangunan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk usia produktif di Kota Sungai Penuh diperkirakan akan meningkat pada tahun 2045, sementara rasio ketergantungan dan jumlah penduduk lanjut usia juga meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Sungai Penuh untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas hidup, pengembangan SDM yang produktif, serta penyediaan layanan sosial yang inklusif.

Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan kunci untuk mencapai kemajuan di era global. Pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, serta pengembangan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan dan etika akan menciptakan individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sumber daya manusia Kota Sungai Penuh yang berdaya saing dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara

pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

## **2. Daya Saing Perekonomian yang Berkelanjutan**

Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian di Kota Sungai Penuh masih belum sebanding dengan potensinya. Daya saing perekonomian yang berkelanjutan merupakan pondasi penting untuk kemajuan Kota Sungai Penuh. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Perekonomian dan sektor-sektor produksi harus mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan membangun struktur ekonomi yang tangguh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta resiliensi terhadap guncangan terhadap faktor internal dan eksternal. Pengembangan sektor-sektor perekonomian yang berbasis sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Selain itu, penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, yang didukung oleh inovasi, diversifikasi sektor ekonomi, dan pengembangan industri ramah lingkungan, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## **3. Penataan Ruang yang Berkelanjutan**

Pemanfaatan ruang di Kota Sungai Penuh memerlukan penataan yang lebih baik, terutama dalam mengendalikan penggunaan ruang terkait bangunan lama, kawasan permukiman, sempadan sungai, dan sempadan jalan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perizinan pembangunan gedung juga sangat penting. Di sisi lain, luas lahan budidaya semakin berkurang akibat perubahan batas kawasan hutan menjadi kendala dalam pemanfaatan ruang, terutama untuk pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Selain itu, pemanfaatan ruang untuk pembangunan sektor pertanian perkotaan (*urban farming*) belum mengoptimalkan pemanfaatan lahan marginal (tidak produktif) seperti lahan rawa arah 100.

Pengaturan ruang yang efektif dan strategi pengendalian yang tepat menjadi krusial untuk mendorong pembangunan Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan. Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkualitas, di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Di samping itu, penyediaan utilitas dasar yang memadai dan menjangkau semua penduduk menjadi hal penting di Kota Kota Sungai Penuh, mengingat jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang

terus meningkat. Dalam konteks ini, penataan ruang yang cerdas dapat memastikan distribusi utilitas dasar yang merata, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi disparitas antar wilayah.

#### **4. Pemerataan dan Daya Saing Infrastruktur**

Pemerataan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan didukung oleh penguatan konektivitas, akan berkontribusi pada pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Sungai Penuh. Namun, peningkatan infrastruktur dan penguatan konektivitas dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan. Di sisi lain, pertumbuhan yang cepat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.

#### **5. Kualitas Lingkungan Hidup**

Isu penanganan sampah di Kota Sungai Penuh yang belum optimal menjadi perhatian penting untuk dua puluh tahun ke depan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah terus meningkat, sehingga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, dapat diciptakan siklus ekonomi yang lebih efisien, dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan proses daur ulang. Namun, tantangan muncul ketika sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih belum memadai akibat terbatasnya lahan (TPAS). Oleh karena itu, pemerintah Kota Sungai Penuh perlu fokus pada peningkatan strategi dan teknologi pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana persampahan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah guna mendukung transisi menuju sistem ekonomi sirkuler.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sungai Penuh menunjukkan tren penurunan, dari 87,82 pada tahun 2020 menjadi 75,13 pada tahun 2023. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas air. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini antara lain pengelolaan limbah rumah tangga dan industri, pengelolaan sampah, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida, serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan masalah penting yang dihadapi saat ini. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi solusi utama untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Penggunaan sumber daya energi konvensional tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menurunkan kualitas hidup



di perkotaan. Oleh karena itu, meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sangat penting untuk menciptakan kota yang berkelanjutan.

Di sisi lain, belum optimalnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi risiko yang perlu segera ditangani. Meskipun Indeks Risiko Bencana Kota Sungai Penuh menunjukkan tren menurun, penting bagi Kota Sungai Penuh untuk mengembangkan infrastruktur yang tangguh dan adaptif untuk memitigasi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

#### **6. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif menjadi isu krusial untuk mengoptimalkan prinsip-prinsip *good governance*. Penggunaan data yang berkualitas dan penerapan manajemen data terkini dalam pelayanan publik serta pengembangan program pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital melalui *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemerintah.

Koordinasi antar instansi dan perangkat daerah, ditunjang dengan peningkatan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang efektif antar lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tugas tertentu, akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.



Tabel III.2  
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
	Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
<b>3.2.1.1 A. Aspek Geografi Dan Demografi Geografi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral &amp; strategis diantara Prov. Sumbar, Provinsi Jambi dan Prov. Bengkulu. Namun, posisi ini belum didukung dengan infrastruktur transportasi dan konektivitas serta aksesibilitas yang memadai.</li><li>- Pengendalian pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan.</li><li>- Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa, menjadikan pusat kota sebagai kawasan padat penduduk yang mengakibatkan kerentanan terhadap permasalahan perkotaan, lingkungan hidup dan penurunan kualitas kawasan permukiman.</li><li>- Pembangunan sektor pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>) belum optimal. pemanfaatan lahan marginal (tidak produktif).</li><li>- Tingginya risiko kebencanaan belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.</li><li>- Kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan.</li><li>- Kota Sungai Penuh rentan terhadap perubahan iklim.</li><li>- Ketahanan ekologi perlu ditingkatkan</li><li>- Sistem pangan masih rentan oleh perubahan faktor internal dan eksternal.</li></ul>	Krisis iklim dan pembangunan rendah karbon	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana	(1) Isu lingkungan di Wilayah Sumatera secara garis besar meliputi deforestasi, tata kelola wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), habitat satwa endemik wilayah, serta kerentanan pesisir; (2) Jumlah turis asing terbatas akibat tidak terpadunya atraksi, aksesibilitas, amenitas dan ansilari	(1) Degradasi Lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal; (2) Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata	1) Pemerataan dan daya saing infrastruktur; (2) Penataan ruang yang berkelanjutan; (3) Kualitas lingkungan hidup; (4) Daya Saing perekonomian yang berkelanjutan



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
	Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya pengembangan jasa wisata secara terpadu.</li><li>- Potensi pariwisata di kawasan hutan belum dikembangkan secara optimal.</li><li>- Kolaborasi/pemanfaatan jasa lingkungan taman nasional perlu ditingkatkan.</li><li>- Kesejahteraan petani belum sepenuhnya didukung dengan pengembangan rantai nilai tambah (<i>add value chain</i>) berbasis pertanian.</li></ul>					
<b>B. Demografi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, alam dan ruang.</li><li>- Tren penduduk usia produktif Kota Sungai Penuh cenderung meningkat yang berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan.</li></ul>	Demografi global dan bonus demografi	Bonus demografi	(1) Penyediaan layanan kesehatan belum merata: (2) Penyediaan layanan pendidikan belum merata	Bonus Demografi dan <i>aging population</i> yang belum terkelola dengan baik	Pembangunan dan daya saing sumber daya manusia
<b>3.2.1.2 A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Infrastruktur transportasi sebagai tulang punggung jaringan logistik menuju Kota Sungai penuh belum optimal.</li><li>- Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa.</li><li>- Kemiskinan masih perlu diturunkan.</li><li>- Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal.</li><li>- Akses dan pemerataan pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan.</li><li>- Tingkat pengangguran masih perlu diturunkan.</li></ul>	Perkembangan teknologi	Ekonomi hijau dan ekonomi biru	(1) Komoditas unggulan baik berupa pertanian dan perikanan maupun tambang belum bernilai tambah tinggi (2) Wilayah Sumatera berpotensi untuk menerapkan konsep <i>circular economy</i>	Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata	Daya Saing perekonomian yang berkelanjutan





Permasalahan		Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
		Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tantangan baru sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Kota Sungai Penuh meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.</li><li>- Dalam jangka panjang, kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur akan semakin menurun seiring dengan masifnya penerapan otomasi, digitalisasi, serta penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (kecerdasan buatan).</li></ul>					
<b>B.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial Budaya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif.</li><li>- Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungan.</li><li>- Tingkat kesehatan ibu dan bayi, kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi perlu ditingkatkan.</li><li>- Kualitas keluarga, ketahanan sosial masyarakat perlu ditingkatkan.</li><li>- Perlindungan sosial masih perlu ditingkatkan</li><li>- Belum optimalnya kualitas anak,</li><li>- Ketimpangan gender masih tinggi,</li><li>- Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal.</li><li>- Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan.</li><li>- Ketahanan sosial budaya perlu ditingkatkan.</li></ul>	Tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>sustainable development goals</i>	Konektivitas dan infrastruktur dasar	(1) Kesenjangan sosial di Wilayah Sumatera masih terlihat dengan tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran; (2) Capaian kesehatan ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting tahun 2022; (3) Penyediaan layanan kesehatan belum merata; (4) Penyediaan layanan Pendidikan belum merata	Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata	Pembangunan dan daya saing sumber daya manusia



Permasalahan		Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
		Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
<b>3.2.1.3</b>	<b>A. Aspek Daya Saing Daerah Daya Saing Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya penciptaan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan memerlukan sumberdaya investasi yang besar.</li><li>- Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM perlu ditingkatkan.</li><li>- Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya.</li><li>- Hilirisasi SDA, penguatan riset inovasi masih perlu ditingkatkan</li><li>- Kinerja ekosistem ekonomi digital belum optimal.</li><li>- Realisasi investasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah</li><li>- Pembangunan ekonomi inklusif belum optimal.</li><li>- Rasio kewirausahaan perlu ditingkatkan.</li><li>- Kinerja sektor <i>agriculture</i> perlu ditingkatkan</li><li>- Penguatan ekonomi dengan jaringan rantai daerah dan global perlu ditingkatkan</li></ul>	Geopolitik dan geoekonomi	(1) Perpindahan IKN; (2) Ekonomi hijau dan ekonomi biru	(1) Komoditas unggulan baik berupa pertanian dan perikanan maupun tambang belum bernilai tambah tinggi; (2) Stabilitas makro terutama inflasi perlu dijaga; (3) Jangkauan jaringan seluler di wilayah Wilayah Sumatera belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif; (4) Wilayah Sumatera berpotensi untuk menerapkan konsep <i>circular economy</i>	Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata	Daya Saing perekonomian yang berkelanjutan
	<b>B. Daya Saing SDM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kenaikan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.</li><li>- Mutu pendidikan berdasarkan SNP perlu ditingkatkan.</li></ul>					
		Demografi global dan bonus demografi	Bonus demografi	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan ekonomi masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA	Bonus Demografi dan <i>aging population</i> yang belum terkelola dengan baik	Pembangunan dan daya saing sumber daya manusia



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
	Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
- Literasi dan Numerasi perlu ditingkatkan. - Pembangunan literasi masyarakat perlu ditingkatkan Infrastruktur digital perlu ditingkatkan. - Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM. - Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan angkatan kerja. Keterkaitan yang lemah ( <i>link and match</i> ) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja masih perlu ditingkatkan. - SDM yang berkompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perlu ditingkatkan. - Pekerja informal lebih banyak dari pekerja formal dan median upah pekerja formal lebih tinggi dibandingkan pekerja informal - Angka ketergantungan ( <i>dependency ratio</i> ) menunjukkan tren yang meningkat.					
<b>C. Daya Saing Infrastruktur</b> - Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat dan perkembangan perkotaan. - Ketersediaan infrastruktur konektivitas belum memadai dan memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang. - Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur jalan dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan.	Tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>sustainable development goals</i>	Konektivitas dan infrastruktur dasar	(1) Wilayah Sumatera juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah; (2) Layanan ketenagalistrikan di	Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum baik dan merata	(1) Pemerataan dan daya saing infrastruktur; (2) Penataan ruang yang berkelanjutan



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
	Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kinerja layanan jaringan irigasi dalam menopang peningkatan produktivitas pertanian perlu ditingkatkan.</li><li>- Infrastruktur pengendali banjir masih perlu ditingkatkan</li><li>- Pengelolaan dan pemeliharaan drainase belum optimal.</li><li>- Ketersediaan dan layanan infrastruktur dasar masyarakat perlu ditingkatkan.</li><li>- Kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah/3R masih perlu ditingkatkan</li><li>- Belum adanya TPA sampah yang permanen</li><li>- Akses listrik yang berkualitas perlu ditingkatkan.</li></ul>			Wilayah Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau cadangan di beberapa sistem, pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar		
<b>D. Daya Saing Iklim Investasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya peran dan fungsi linmas desa/kelurahan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kapasitas SDM (PPNS).</li><li>- Supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah perlu ditingkatkan</li><li>- Belum efektifnya implementasi peraturan pendukung iklim usaha.</li><li>- Insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi dan penanaman modal daerah.</li><li>- Peran nilai agama belum sepenuhnya optimal membentuk nilai-nilai, motivasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat.</li></ul>	Tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>sustainable development goals</i>	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya belum beroperasi optimal	Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum optimal	(1) Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas; (2) Penataan ruang yang berkelanjutan



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis Kota Sungai Penuh
	Global	Nasional	Regional	Prov. Jambi	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Daya Saing Daerah yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah masih perlu ditingkatkan.</li><li>- Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi.</li><li>- Desa mandiri masih bersifat kuantitas dan belum mencerminkan kualitas desa mandiri yang sesungguhnya.</li></ul>					
<b>3.2.1.4 Aspek Pelayanan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Birokrasi (regulasi, kelembagaan) belum adaptif dengan dinamika global yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.</li><li>- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas</li><li>- Pelayanan publik memerlukan penguatan yang berkesinambungan.</li><li>- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditingkatkan</li><li>- Digitalisasi layanan publik masih perlu dioptimalkan</li><li>- Kualitas ASN perlu ditingkatkan</li><li>- Kerja sama daerah perlu ditingkatkan</li><li>- Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan inovasi daerah</li><li>- Pengelolaan keuangan daerah belum optimal</li><li>- Kemandirian keuangan daerah masih harus ditingkatkan</li></ul>	Tujuan pembangunan berkelanjutan/ <i>sustainable development goals</i>	Desentralisasi dan otonomi daerah	(1) Beberapa permasalahan tata kelola kewilayahan dikarenakan oleh kualitas aparatur daerah yang rendah; (2) Integritas tata kelola pemerintahan daerah dan desa masih rentan praktik korupsi; (3) Sistem merit pada beberapa provinsi di Wilayah Sumatera belum baik; (4) Kemandirian fiskal di Wilayah Sumatera masih perlu menjadi perhatian	Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

## BAB IV

### VISI DAN MISI DAERAH

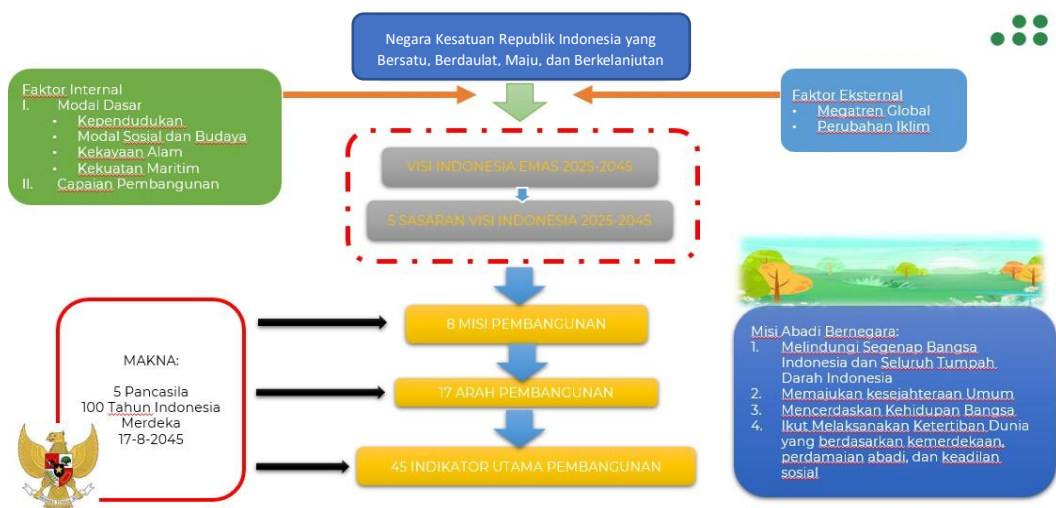
Pada hakikatnya pembangunan merupakan transformasi secara menyeluruh menuju arah yang lebih baik dan menyentuh segala aspek. Melalui transformasi, daerah dalam melaksanakan pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### 4.1 Visi

##### 4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tergambar dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar IV.1  
Visi Indonesia Emas 2045





Visi Abadi Indonesia diterjemahkan kedalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Gambar IV.1).

4.1.2 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

Visi pembangunan daerah Kota Sungai Penuh merupakan pandangan jangka panjang yang diharapkan dapat membawa perubahan positif untuk masa depan. Visi ini mencerminkan gambaran ideal tentang pengembangan kota dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pemerintahan, dan infrastruktur. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 menegaskan kondisi yang diinginkan sebagai tujuan akhir pembangunan jangka panjang.

Visi ini bukan hanya sekedar impian dan cita-cita, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk merancang dan mengelola transformasi dalam mencapai tujuan berdasarkan permasalahan daerah, isu strategis, dan kondisi ideal yang diharapkan. Selain itu, Visi ini berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan untuk dua dekade mendatang, dengan mengidentifikasi pokok-pokok Visi berdasarkan masalah utama pembangunan Kota Sungai Penuh yang tercantum dalam Tabel IV.1 berikut.

Tabel IV.1  
Perumusan Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Sumber daya manusia belum optimal	Bertakwa, Maju, Berkelanjutan	<b>Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan</b>
2.	Daya saing perekonomian yang berkelanjutan belum optimal	Maju, Berkelanjutan	
3.	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal	Maju, Berkelanjutan	
4.	Sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam belum optimal	Bertakwa, Maju, Berkelanjutan	
5.	Infrastruktur perkotaan belum optimal	Maju, Berkelanjutan	
6.	Pengembangan wilayah belum optimal	Maju, Berkelanjutan	
7.	Ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah belum optimal	Bertakwa, Maju, Berkelanjutan	
8.	Kesinambungan pembangunan belum optimal	Maju, Berkelanjutan	

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah Kota Sungai Penuh, permasalahan dan potensi yang ada serta isu strategis, maka Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

**“Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan”**



Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan, dijelaskan sebagai berikut:

1. **Bertakwa;** Bagian integral identitas dan kehidupan masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh yang plural, terciptanya keharmonisan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama, memahami perintah dan larangan serta taat menjalankan ajaran agama. Bertakwa sebagai landasan memajukan pembangunan yang berkelanjutan:
  - a. Kemajemukan kearifan lokal Kota Sungai Penuh diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan bertakwa sebagai satu kesatuan identitas dan kebanggaan bersama.
  - b. Kebudayaan dalam pembangunan yang berlandaskan bertakwa sebagai penggerak transformasi masyarakat.
  - c. Bertakwa sebagai landasan dalam melaksanakan 8 Misi (agenda) pembangunan jangka panjang daerah. Mengintegrasikan nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, untuk menciptakan karakter yang kuat dan berintegritas tinggi, masyarakat yang maju dengan nilai-nilai ketakwaan dan meraih keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. **Maju;** Mengandung makna terwujudnya kemajuan Kota Sungai Penuh dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, infrastruktur, sosial maupun budaya:
  - a. Kota Sungai Penuh yang unggul, berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
  - b. Kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK dengan tetap menjaga tradisi dan warisan leluhur, namun tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan zaman.
  - c. Perekonomian yang maju dan berkelanjutan.
  - d. Infrastruktur yang modern dan efisien.
  - e. Penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel.
  - f. Kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. **Berkelanjutan;** Pembangunan Kota Sungai Penuh yang ramah lingkungan dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang:
  - a. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
  - b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk keberlanjutan ekologi.
  - c. Pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  - d. Pengendalian dan pengurangan limbah dan emisi melalui pembangunan yang ramah lingkungan.



- e. Pemberdayaan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal.
- f. Ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim, ketangguhan ekonomi, keadilan dan kesetaraan,
- g. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 memiliki keselarasan dengan Visi pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Tabel IV.2).

Tabel IV.2  
Penyelarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Jambi  
dan Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Nasional	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Jambi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025-2045

4.1.3 Sasaran Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

Visi Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045 tercermin dalam lima sasaran Visi, yaitu: (1) pendapatan per kapita meningkat; (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) daya saing daerah meningkat; (4) SDM yang berdaya saing, bertakwa dan berkelanjutan mencapai generasi emas; dan (5) penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

**Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Kota Sungai Penuh diperkirakan sekitar 451,37-500,24 juta/kapita, kontribusi PDRB sektor tersier pada kisaran 85,67%, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan diperkirakan sebesar 0,60% pada tahun 2045.

**Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan perkapita meningkat, sehingga tingkat kemiskinan diperkirakan pada kisaran 0,58%-0,77%, gini rasio pada kisaran 0,29-0,30, kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi pada kisaran 3,57% dan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,53%-6,68% tahun 2045.

**Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih Kota Sungai Penuh, daya saing daerah meningkat yang diukur dengan indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah, masing-masing diperkirakan pada kisaran 65,01 dan 4,01 pada tahun 2045.

**Sasaran keempat**, adalah SDM yang berdaya saing, bertakwa dan berkelanjutan mencapai generasi emas, yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan Kesehatan. SDM yang



tidak hanya unggul secara akademis dan profesional tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas, untuk stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan. Utamanya diukur melalui peningkatan indeks pembangunan manusia dan diperkirakan berkisar 85,50-86,22 pada tahun 2045. Dalam upaya mencapai generasi emas, integrasi nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan menjadi kunci untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh integritas, berkarakter dan komitmen terhadap kebaikan bersama.

**Sasaran kelima**, dalam mewujudkan Kota Sungai Penuh menuju *net zero emission*. Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh penurunan intensitas emisi GRK (kumulatif) diperkirakan pada kisaran 592.928,69 (Ton CO<sub>2</sub>e) tahun 2045, dan capaian indeks kualitas lingkungan hidup pada kisaran 84,91 tahun 2045.

1

Pendapatan Per Kapita Meningkat

	2025 Baseline	2045 Target
PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	96,96-98,93	451,37-500,24
Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	83,07	85,67
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,58	0,60

2

Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

	2025 Baseline	2045 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	2,87-2,93	0,58-0,75
Rasio Gini (Indeks)	0,30-0,31	0,29-0,30
Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi (%)	3,37	3,57
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-5,13	5,53-6,68

3

Daya Saing Daerah Meningkat

	2025 Baseline	2045 Target
Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	45,96	65,01
Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,57	4,01

4

SDM yang Berdaya Saing, Bertakwa dan Berkelanjutan Mencapai Generasi Emas

	2025 Baseline	2045 Target
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,53-77,84	85,50-86,22

5

Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

	2025 Baseline	2045 Target
Intensitas Emisi GRK (Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen) (kumulatif)	226.371,73	592.928,69
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	80,68	84,91

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov Jambi Tahun 2025-2045  
)\* Baseline 2025 merupakan proyeksi target

. **Gambar IV.2**  
**Sasaran Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**



**Tabel IV.3**  
**Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jambi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2045				RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASLINE 2025*	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASLINE 2025*	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASLINE 2025*	TARGET 2045
1	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	GNI Per Kapita (USD)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	86,18 – 86,65	555,68 – 652,01	Pendapatan Per Kapita Meningkat	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	96,96-98,93	451,37-500,24
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,10	15,00		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26	42,44		Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	83,07	85,67
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,80	28,00		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan(%)	9,98 – 10,12	13,22 – 13,35		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,58	0,60
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,30-6,80	0,07-0,57	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	2,87-2,93	0,58-0,75
		Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,337 – 0,341	0,275 – 0,326		Rasio gini (Indeks)	0,30-0,31	0,29-0,30
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,40	28,50		Kontribusi PDRB Provinsi Jambi (%)	1,42	1,70		Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi (%)	3,37	3,57
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81-5,11	5,55-7,00		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-5,13	5,53-6,68
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peringkat Indeks Inovasi Daerah (peringkat)	27	18	Daya saing Daerah Meningkat	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	45,96	65,01
						Peringkat Daya Saing Daerah Secara Nasional (peringkat)	30	15		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,57	4,01
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,55	0,71	SDM yang Berdaya Saing, Bertakwa dan Berkelanjutan Mencapai Generasi Emas	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,53-77,84	85,50-86,22



Pemerintah Kota Sungai Penuh

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2045				RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025*	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025*	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025*	TARGET 2045
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,60	93,50	Penurunan Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,50	97,88	Penurunan Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2e) (Kumulatif)	226.371,73	592.928,69
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	73,71	80,88		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	80,68	84,91

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025-2045  
)\* Baseline 2025 merupakan proyeksi target



4.2 Misi

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045

Berdasarkan Visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.3 berikut.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar IV.3  
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Delapan Misi (agenda) pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;



5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam proses pencapaian Misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana Misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan Misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

4.2.2 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan Misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045. Misi Kota Sungai Penuh dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan daerah dan isu strategis yang telah dirumuskan. Perumusan Misi pembangunan jangka panjang Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.4  
Perumusan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Daerah	Misi
1.	Sumber daya manusia belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas layanan pendidikan belum merata</li><li>• Keterbatasan keterampilan dan keahlian</li><li>• Kesehatan dan kesejahteraan SDM</li></ul>	Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM yang unggul, bertakwa, dan berkelanjutan



No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Daerah	Misi
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur pendukung</li></ul>	
2.	Daya saing perekonomian yang berkelanjutan belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur masih perlu ditingkatkan</li><li>• Belum optimalnya diversifikasi dan hilirisasi ekonomi</li><li>• Pemerataan pembangunan antar wilayah</li><li>• Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi</li></ul>	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
3.	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelembagaan dan akuntabilitas</li><li>• SDM yang kompeten perlu ditingkatkan</li><li>• Pengelolaan keuangan daerah belum optimal</li><li>• Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan</li></ul>	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah
4.	Ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kriminalitas dan masih kurangnya kesadaran masyarakat</li><li>• Ketidakstabilan sosial</li><li>• Ketidakpastian di lingkungan bisnis</li><li>• Tantangan dalam penanganan bencana alam</li><li>• Stabilitas ekonomi makro masih perlu ditingkatkan</li></ul>	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5.	Sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keseimbangan pembangunan sosial masih perlu ditingkatkan</li><li>• Ancaman terhadap warisan budaya</li><li>• Tantangan dalam pelestarian budaya lokal</li><li>• Degradasi lingkungan dan ekosistem</li><li>• Belum optimalnya penanganan sampah dan sanitasi</li></ul>	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam



No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Daerah	Misi
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolaborasi dengan TNKS perlu ditingkatkan</li></ul>	
6.	Pengembangan wilayah belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>• Tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi</li><li>• Akses ke sumber daya dan pelayanan masih perlu ditingkatkan</li><li>• Dukungan pengembangan sektor ekonomi local masih perlu ditingkatkan</li></ul>	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas
7.	Infrastruktur perkotaan belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan</li><li>• Sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan</li><li>• Belum optimalnya infrastruktur pengendali banjir</li><li>• Belum optimalnya infrastruktur Teknologi Informasi</li></ul>	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.	Kesinambungan pembangunan belum optimal	Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian pembangunan belum optimal</li><li>• Daya saing daerah belum optimal</li><li>• Dukungan pembiayaan belum memadai dan inovatif</li></ul>	Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 dan Misi pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 memiliki keselarasan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.5 berikut.



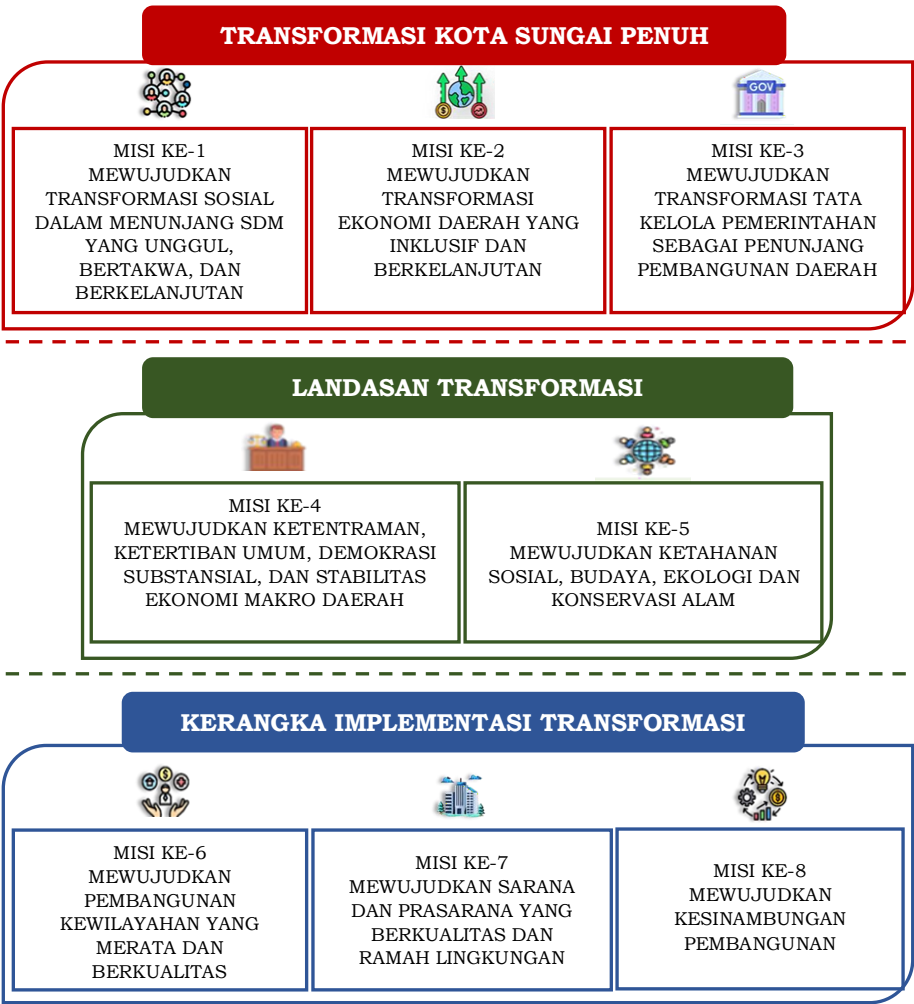
Tabel IV.5  
Penyelarasan Misi RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Jambi  
dan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Agenda	Nasional	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh
Transformasi	Misi 1: Transformasi Sosial	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang Sumber Daya Manusia yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan
	Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Transformasi Tata Kelola Pemerintah	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah
Landasan Transformasi	Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 4: Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4: Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7: Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Daerah	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
	Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 8: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025-2045



Berdasarkan Visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Visi Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan, ditetapkan 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan daerah yaitu mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang sumber daya manusia yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan, mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam, yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan. Secara lebih rinci ditunjukkan pada gambar IV.4 berikut ini.



Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025-2045

**Gambar IV.4**  
**Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

Misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045, dijelaskan sebagai berikut:





## **1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang Sumber Daya Manusia yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan**

Transformasi sosial yang menyeluruh untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan Sejahtera. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan pra sekolah sesuai dengan standar nasional. Menjamin akses yang merata dan berkualitas terhadap pelayanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan primer dan layanan 1000 hari pertama kehidupan. Membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan jaring pengaman sosial yang mampu menanggapi tantangan sosial dan ekonomi yang berkembang.

### **Sumber Daya Manusia yang Unggul:**

Pengembangan SDM yang berkualitas tinggi, kompeten, dan berdaya saing global, tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan serta kemampuan berinovasi, yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

### **Bertakwa:**

Pembangunan SDM yang tidak hanya unggul secara akademis dan profesional tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas, untuk stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.

### **Berkelanjutan:**

Pengembangan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dapat terus berfungsi dan berkembang untuk generasi mendatang.

## **2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Transformasi ekonomi yang dilakukan tidak hanya fokus pada peningkatan *output* ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, ekonomi hijau, dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas serta integrasi ekonomi dalam skala domestik dan global.

### **Inklusif:**

Menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

### **Berkelanjutan:**

Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam proses pembangunan ekonomi. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



**3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah**

Transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang lebih responsif dan kolaboratif. Penyederhanaan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan ramah investasi. Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam setiap aspek pemerintahan. Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pengembangan kapasitas dan keterampilan aparatur pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan integritas. Meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

**4. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**

Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai dan stabil secara ekonomi sebagai dasar untuk pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, mencakup penegakan hukum yang adil dan efektif serta membangun ketaatan hukum. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kondisi ekonomi yang stabil yang mencakup pengendalian inflasi, pembiayaan daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam**

Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kolaborasi dalam konservasi alam dengan keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan langkah strategis untuk menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Ketahanan sosial dan budaya menjadi landasan untuk mewujudkan ketakwaan, menciptakan masyarakat yang tidak hanya tangguh secara sosial, tetapi juga beretika dan beradab.

**6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas**

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas dengan mengoptimalkan penggunaan lahan secara bijaksana serta membangun dan mengembangkan kawasan aktivitas ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan dan jasa untuk merangsang



pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dengan pendekatan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Keterpaduan penataan ruang untuk menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan. dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Memperkuat konektivitas terintegrasi untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat konektivitas Kawasan Puncak Andalas

7. **Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum secara merata, guna mendukung pengembangan wilayah. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi pembangunan dengan memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar.

8. **Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**

Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan diwujudkan dengan penerapan manajemen risiko melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan, serta konsistensi perencanaan, penganggaran dan pembangunan.

Visi, Sasaran Visi dan Misi (agenda) RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 disajikan pada Tabel IV.6 berikut ini.

**Tabel IV.6**  
**Visi, Sasaran Visi dan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2025-2045**

Visi	5 Sasaran Visi	8 Misi (Agenda)
Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	<div>1. Pendapatan per kapita meningkat</div> <div>2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang</div> <div>3. Daya saing daerah meningkat</div> <div>4. SDM yang berdaya saing, bertakwa dan berkelanjutan mencapai generasi emas</div> <div>5. Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></div>	<div>1. Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang sumber daya manusia yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan;</div> <div>2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;</div> <div>3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah;</div>



Visi	5 Sasaran Visi	8 Misi (Agenda)
		4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
		5. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam;
		6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas;
		7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
		8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024  
Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Prov. Jambi Tahun 2025-2045

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

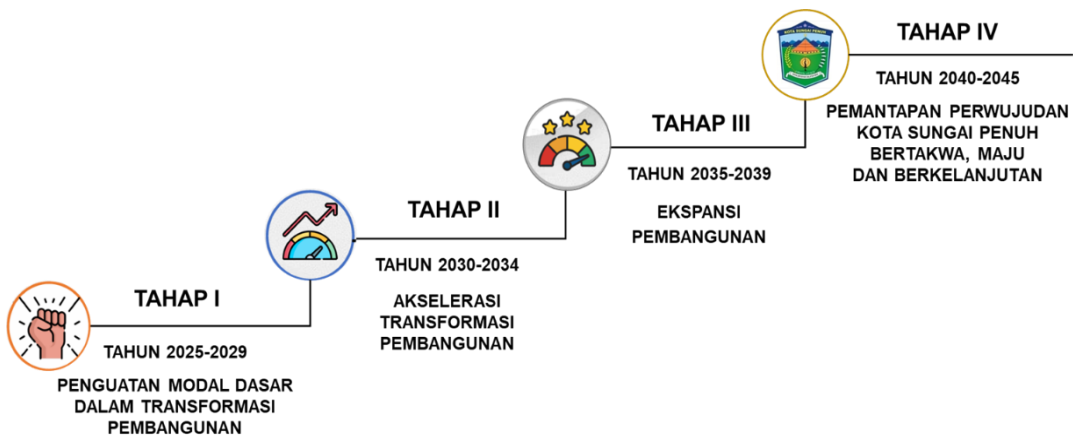
Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 maka ditentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2025-2045.

**5.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan RPJPD adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045.

**5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan Kota Sungai Penuh selama 20 (dua puluh) tahun untuk mencapai target kinerja secara terukur dan konsisten, maka arah kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan (Gambar V.1). Setiap tahapan ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa RPJPD dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan tahapan-tahapan ini, RPJPD berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara berkesinambungan.



Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar V.1**  
**Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2025-2045**

Fokus kebijakan dalam penentuan arah kebijakan sebagai tema makro pembangunan setiap periode, yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan tahapan pembangunan. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan

selama 20 (dua puluh) tahun dalam mencapai sasaran pokok tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD, maka berikut arah kebijakan pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045.

#### **5.1.1.1 Tahap I Tahun 2025-2029, Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan**

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar dalam transformasi pembangunan. Penguatan modal dasar dalam transformasi pembangunan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru; penguatan riset dan inovasi; penguatan kapasitas daerah dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup, sumber daya alam, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pada tahap pertama ini, penguatan modal dasar dalam transformasi pembangunan dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 untuk menjawab arah kebijakan periode pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 berupa perkuatan fondasi transformasi.

#### **5.1.1.2 Tahap II Tahun 2030-2034, Akselerasi Transformasi Pembangunan**

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap pertama, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan akselerasi transformasi pembangunan. Akselerasi transformasi pembangunan diwujudkan melalui penguatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas; peningkatan kapasitas perlindungan sosial bagi masyarakat; pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; penguatan kolaborasi antar sektor dan *stakeholder*; peningkatan investasi dan penanaman modal; peningkatan produktivitas dan daya saing daerah; peningkatan diversifikasi dan konservasi energi; peningkatan kerja sama multipihak; pengintegrasian infrastruktur antar permukiman dan antar kawasan; peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Pada tahap kedua ini, akselerasi transformasi pembangunan dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 guna menjawab arah kebijakan periode kedua RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 berupa akselerasi transformasi.

#### **5.1.1.3 Tahap III Tahun 2035-2039, Ekspansi Pembangunan**

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap kedua, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan ekspansi pembangunan. Ekspansi pembangunan diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengoptimalan kapasitas daerah dalam pelayanan publik; dan penguatan





pengintegrasian pusat-pusat pelayanan. Pada tahap ketiga ini, ekspansi pembangunan dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 untuk menjawab arah kebijakan periode ketiga RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 berupa ekspansi global.

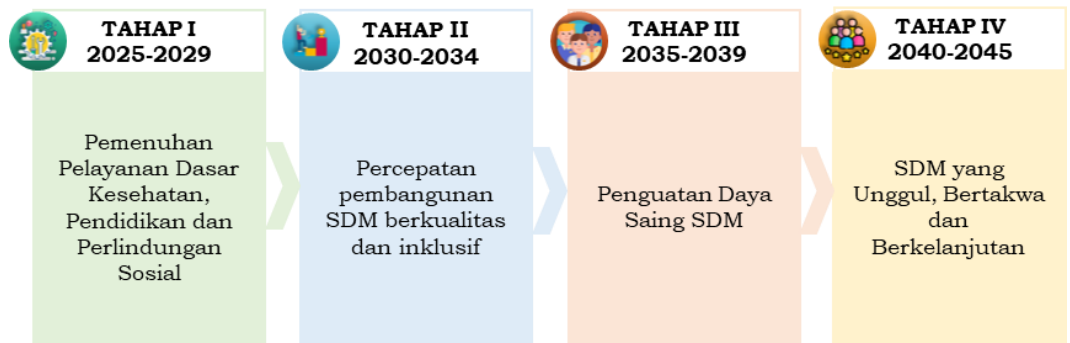
**5.1.1.4 Tahap IV Tahun 2040-2045, Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah**

Pemantapan perwujudan Visi pembangunan daerah Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan diwujudkan melalui pemantapan kondisi sarana dan prasarana; pengoptimalan kapasitas dan kompetensi SDM; perlindungan sosial yang adaptif; pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, daya saing tinggi; pemantapan kualitas desentralisasi fiskal; pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan; pemberdayaan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan; pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah; pemantapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan pemantapan tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahap keempat RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode keempat RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 berupa Perwujudan Indonesia Emas dan Perwujudan Jambi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

**5.1.2 Arah Kebijakan pada Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

**5.1.2.1 Misi 1, Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan**

Untuk dapat mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang sdm yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya. Sementara itu tahapan arah kebijakan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

**Gambar V.2**  
**Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-1 RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045**

5.1.2.2 Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk dapat mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya. Sedangkan tahapan arah kebijakan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.

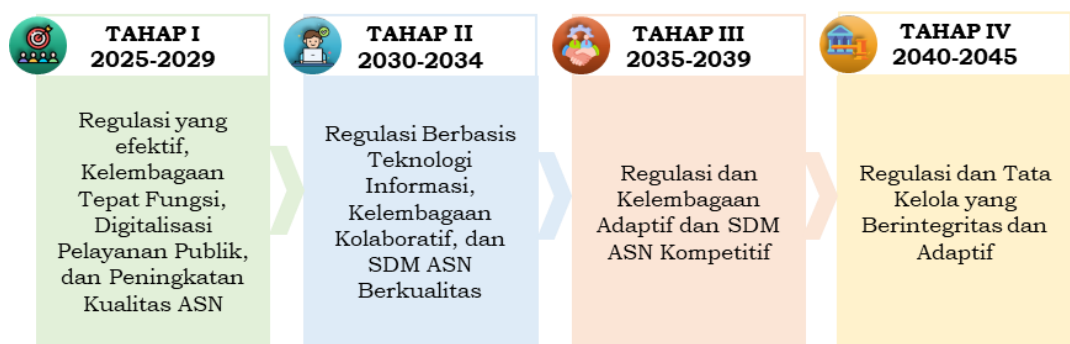


Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar V.3  
Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-2 RPJPD Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

5.1.2.3 Misi 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah

Untuk dapat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya. Sementara itu tahapan arah kebijakan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar V.4  
Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-3 RPJPD Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

5.1.2.4 Misi 4, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Untuk dapat mewujudkan ketentraman ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah

kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya. Sedangkan tahapan arah kebijakan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar V.5  
Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-4 RPJPD Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

5.1.2.5 Misi 5, Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi, dan Konservasi Alam

Untuk dapat mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya. Sementara itu tahapan arah kebijakan pembangunan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024

Gambar V.6  
Tahapan Arah Kebijakan Misi ke-5 RPJPD Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

5.1.2.6 Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

Untuk dapat mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, dirumuskan arah kebijakan kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pelayanan baru untuk mendukung ekonomi daerah, distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konektivitas;

2. Penguatan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas antar daerah melalui Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat konektivitas kawasan Puncak Andalas;
3. Pembangunan sistem transportasi kota yang terintegrasi dan kolaboratif dan berkelanjutan.
4. Penguatan integrasi antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang;
5. Optimalisasi pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien untuk mendukung perkembangan fungsi kota;
6. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta optimalisasi pembangunan wilayah terbangun;
7. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional;
8. Pengembangan kawasan strategis kota;
9. Penguatan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang tegas dan konsisten; dan
10. Kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah.

#### **5.1.2.7 Misi 7, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Untuk dapat mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dirumuskan arah kebijakan kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana, utilitas umum dan penyelenggaraan jalan hingga ke jalan lingkungan;
2. Pengintegrasian infrastruktur antar permukiman dan antar kawasan;
3. Penguatan fungsi infrastruktur dalam penciptaan kawasan baru dan pemantapan fungsi sarana dan prasarana utilitas umum;
4. Pembangunan dan pengembangan rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh;
5. Penguatan penyelenggaraan penataan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Peningkatan kota kolaboratif dan inovatif serta penguatan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana desa serta pengembangan kawasan desa berbasis komoditas ekonomi lokal yang didukung manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas; dan
8. Peningkatan dan penguatan infrastruktur distribusi rantai pasok.



#### **5.1.2.8 Misi 8, Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**

Untuk dapat mewujudkan kesinambungan pembangunan, dirumuskan arah kebijakan sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.1. Arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Jambi dan nasional;
2. Peningkatan sinergi perencanaan, penganggaran dan pembangunan Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar;
3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan sasaran prioritas nasional dan peningkatan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola data pembangunan; dan
5. Pengembangan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*.

Arah Kebijakan untuk setiap tahapan atau periode pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 disajikan pada Tabel V.1 di bawah ini.



Tabel V.1  
Arah Kebijakan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan primer kesehatan yang memadai dan terjangkau	Penguatan akses pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan berbasis teknologi tingkat kelurahan dan desa	Penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi	Pemantapan perwujudan transformasi kesehatan
		Pendampingan lintas sektor kesehatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan gizi khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan	Peningkatan kesadaran dan mendorong kemauan masyarakat berperilaku hidup sehat serta peningkatan jaminan gizi khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan	Penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi serta jaminan gizi khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan	Pemantapan budaya hidup sehat dan jaminan gizi khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan
		Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat	Penyediaan jaminan kesehatan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan standar pelayanan minimum	Menjaga ketercukupan jaminan kesehatan nasional yang adil, efektif dan efisien





VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendidikan yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar yang memadai dan terjangkau sesuai standar nasional	Penguatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendidikan yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang memadai dan terjangkau sesuai standar nasional dan digitalisasi pendidikan sesuai standar nasional	Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendidikan yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi yang memadai dan terjangkau sesuai standar nasional dan digitalisasi pendidikan sesuai standar nasional	Pemantapan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi yang berkualitas, serta pemantapan kualitas SDM pendidikan yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan berorientasi standar internasional
		Peningkatan akses terhadap pendidikan usia dini dan dasar bagi semua kalangan masyarakat	Penguatan dan pemerataan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi bagi semua kalangan masyarakat	Peningkatan pemerataan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi bagi semua kalangan masyarakat	Pemantapan pemerataan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi bagi semua kalangan masyarakat
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan non formal dan vokasi	Penguatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan non formal dan vokasi	Diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan non formal dan vokasi	Pemantapan layanan pendidikan dan pelatihan non formal dan vokasi



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Membangun minat dan budaya membaca masyarakat dan peningkatan kuantitas sarana prasarana perpustakaan tingkat kelurahan, desa dan sekolah	Peningkatan minat dan budaya literasi masyarakat dan peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan tingkat kelurahan, desa dan sekolah	Pengembangan <i>generasi zero illiteracy</i> yang tangguh dan analitik dan budaya membaca	Penguatan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat
		Pemerataan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah dan tinggi	Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah dan tinggi	Pengembangan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah dan tinggi	Pemantapan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah dan tinggi
		Peningkatan kesadaran terhadap hak atas perlindungan sosial bagi masyarakat dan keterjaminan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat serta Peningkatan keterjaminan kesejahteraan tenaga kerja	Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan keterjaminan kesejahteraan tenaga kerja	Pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat serta penanggulangan masalah sosial dan keterjaminan kesejahteraan tenaga kerja
		<b>2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing komoditas	Penguatan dan integrasi konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong akselerasi hilirisasi komoditas
				Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong akselerasi hilirisasi komoditas	Penguatan kawasan strategis, pertumbuhan ekonomi yang stabil



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan riset inovasi dan hilirisasi SDA untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas	Optimalisasi riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas berorientasi perdagangan nasional	Pengarusutamaan digitalisasi dan inovasi teknologi atas komoditas berorientasi ekspor	Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan kegiatan ekonomi bernilai tambah
		Penguatan integrasi konektivitas pariwisata domestik dan global yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif	Penguatan kemudahan berusaha pada investasi pariwisata	Penguatan <i>trademark</i> dan diferensiasi atraksi wisata berdasarkan kekhasan daerah bercitra rasa global	Pemantapan amenitas pada destinasi wisata sesuai standar global
		Penguatan integrasi dan daya saing promosi pariwisata dan investasi yang didukung oleh sumber daya manusia pariwisata berdaya saing global	Peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman, atraksi alam dan budaya yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi wilayah	Penguatan budaya ramah wisatawan pada masyarakat	Pemantapan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan berbasis digitalisasi dan teknologi
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan	Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual	Pengembangan hub ekonomi kreatif dan digital yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif, global dan berkelanjutan	Pemantapan pertumbuhan <i>startup</i> kreatif dan digital berbasis seni dan budaya Kota Sungai Penuh



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Membangun kerja sama ekonomi serta penguatan ekosistem dan kepastian hukum dalam mendorong pengembangan usaha di sektor jasa dan perdagangan	Optimalisasi usaha di sektor jasa dan perdagangan melalui kolaborasi, alih pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas	Penguatan ketahanan ekonomi dan kerja sama untuk meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, ekspor dan daya saing perekonomian	Pemantapan Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan kawasan Puncak Andalas
		Penguatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian	Perluasan kesempatan berusaha melalui penguatan sinergi riset dan industri dalam hilirisasi industri	Peningkatan akses ruang bagi usaha kecil dan menengah pada kawasan industri	Pemantapan kolaborasi pendanaan dan pemasaran melalui integrasi dan partisipasi dalam rantai pasok domestik dan rantai pasok global
		Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi serta mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif	Pengembangan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Penguatan dan pemerataan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Pemantapan industri kecil dan menengah yang berdaya saing



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi, serta kejelasan sasaran pembinaan koperasi berdasarkan standar klasifikasi	Penguatan akses permodalan, pemasaran, dan pembinaan bagi koperasi	Penguatan Kemitraan dan kewirausahaan koperasi	Pemantapan koperasi yang adaptif dan modern
		Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD	Penguatan produktivitas dan efisiensi BUMD	Pengoptimalan produktivitas dan efisiensi BUMD	Pemantapan produktivitas dan efisiensi BUMD
		Mengembangkan basis kegiatan ekonomi dan potensi lokal perhutanan sosial	Peningkatan program pemberdayaan dan kegiatan ekonomi serta memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial	Penguatan kegiatan ekonomi dan kemitraan	Pemantapan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja yang banyak
		Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan, dan kewirausahaan.	Peningkatan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja dengan memanfaatkan teknologi seperti keterampilan digital	Peningkatan fasilitasi mobilitas pekerja dan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar kerja global	Peningkatan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, dan digital



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan kesadaran kesamaan hak dalam akses pekerjaan kepada masyarakat	Peningkatan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja perempuan dengan memanfaatkan teknologi seperti keterampilan digital	Dukungan fasilitasi mobilitas pekerja perempuan untuk mengisi pasar kerja	Pengadvokasian tempat kerja ramah perempuan pada dunia usaha dan dunia industri
		Peningkatan kualitas, percepatan fondasi dan arah kebijakan penataan kelembagaan dan regulasi pengembangan daya saing daerah dan inovasi daerah	Peningkatan SDM riset yang unggul dan berdaya saing global	Pengembangan penerapan riset, inovasi dan daya saing daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global
		Peningkatan efisiensi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Penguatan dalam transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru	Penguatan ekonomi sirkular	Pemantapan penerapan ekonomi hijau di semua sektor
		Penerapan konservasi dan diversifikasi energi	Penyediaan EBT untuk kebutuhan daerah	Peningkatan penyediaan EBT untuk kebutuhan daerah	Pemantapan dalam pemanfaatan hasil transisi energi baru terbarukan
		Peningkatan investasi hijau	Penerapan ekonomi hijau pada sektor pariwisata	Penerapan ekonomi hijau di setiap sektor	Pemantapan penerapan ekonomi hijau yang mendorong akselerasi pembangunan





VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan infrastruktur dan ekosistem digital serta keterampilan dan kemampuan digital masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi	Peningkatan keterampilan dan kemampuan digital masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi	Peningkatan kerja sama dan kemitraan bersama swasta dan komunitas dalam rangka pengembangan dan implementasi TIK	Pemantapan keahlian digital masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi
	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah	Penataan regulasi dan pembentukan serta evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	Penguatan pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	Pengoptimalan pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	Perwujudan regulasi yang adaptif dan taat asas
		Penguatan koordinasi, perencanaan rumusan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan <i>collaborative governance</i> dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Peningkatan koordinasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintahan serta sinergitas seluruh perangkat daerah	Pengembangan kelembagaan tata kelola kolaboratif dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pengoptimalan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas	Pemantapan kapasitas kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah daerah	Penguatan internalisasi integritas pada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Penguatan kebijakan, profesionalisme ASN, Ketersediaan sarana dan prasarana, serta inovasi berbasis digital dalam rangka pelayanan publik	Peningkatan kebijakan, profesionalisme ASN, Ketersediaan sarana dan prasarana, serta inovasi berbasis digital dalam rangka pelayanan publik	Penguatan kompetensi SDM ASN dan kelembagaan yang adaptif.	Pemantapan kebijakan dan profesionalitas ASN
		Peningkatan rumusan kebijakan terkait trantibumlinmas	Penguatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana pendukung trantibumlinmas	Penguatan evaluasi implementasi kebijakan trantibumlinmas	Pemantapan trantibumlinmas yang berkelanjutan
	<b>4. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	Penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat	Pemantapan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat
		Peningkatan rumusan kebijakan terkait pembangunan hukum	Penguatan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM	Peningkatan pemenuhan akses dan terjaminnya masyarakat dalam menerima hak atas aspek sipil dan politik serta hak atas aspek ekonomi, sosial dan budaya	Pemantapan pemenuhan HAM secara adil dan merata



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui pengoptimalan sinergi antara kebijakan fiskal nasional, provinsi dengan APBD Kota	Pengoptimalan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang inovatif	Pengoptimalan pemanfaatan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien untuk pemenuhan pelayanan publik	Pemantapan kualitas derajat desentralisasi fiskal yang adil, transparan dan akuntabel
		Penguatan pengendalian inflasi daerah dan kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Peningkatan pengendalian inflasi daerah dan kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Pengoptimalan pengendalian inflasi daerah dan kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga	Pemantapan pengendalian inflasi daerah dan kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga
		Peningkatan sinergitas dan peran sektor keuangan dalam pembangunan	Penguatan sinergitas dan peran sektor keuangan dalam pembangunan	Pengoptimalan sinergitas dan peran sektor keuangan dalam pembangunan	Pemantapan sinergitas dan peran sektor keuangan dalam pembangunan
		Penguatan peran Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengkoordinasikan berbagai <i>stakeholder</i> dana pihak ketiga, peningkatan literasi pasar saham dan kredit	Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan dana pihak ketiga, pasar saham dan kredit	Penguatan koordinasi antar <i>stakeholder</i>	Penguatan digitalisasi untuk mendukung peningkatan dana pihak ketiga, ekosistem pasar saham dan kredit



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif	Pengoptimalan kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif	Pemantapan kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif
		Penguatan distribusi pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan	Peningkatan distribusi pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan	Pengoptimalan distribusi pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan	Pemantapan distribusi pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan
		Pengembangan sektor ekonomi lokal	Penguatan sektor ekonomi lokal	Pengoptimalan sektor ekonomi lokal	Pemantapan sektor ekonomi lokal
		Penguatan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam rangka penjajakan, perencanaan kerja sama dan penguatan kerja sama di berbagai bidang	Penguatan fasilitasi kerja sama di berbagai bidang	Penguatan skema kerja sama serta tindak lanjut hasil kerja sama	Pemantapan pemanfaatan hasil hubungan kerja sama Pemerintah Kota Sungai Penuh
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, yang berlandaskan adat istiadat dan bertakwa	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, yang berlandaskan adat istiadat dan bertakwa.	Pengoptimalan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, yang berlandaskan adat istiadat dan bertakwa	Pemantapan perwujudan Kota Sungai Penuh yang bertakwa
		Peningkatan rumusan kebijakan terkait implementasi kerukunan umat beragama	Peningkatan kolaborasi antara <i>stakeholder</i> dalam menjaga kerukunan umat beragama	Penguatan kolaborasi dan implementasi kebijakan kerukunan umat beragama	Penguatan penegakan terhadap pelanggaran kerukunan umat beragama



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan regulasi, perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan kebudayaan, cagar budaya dan permuseuman	Pengembangan dan pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan, cagar budaya dan permuseuman	Pemanfaatan aset budaya sebagai landasan moral budi pekerti dan perekonomian masyarakat	Pembinaan kesadaran berkebudayaan secara berkelanjutan
		Peningkatan pemahaman dalam membangun keluarga dan peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga berkualitas	Penguatan pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan	Pemantapan kondisi keluarga yang berkualitas
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan sosial, agama, kepemudaan dan budaya yang memadai	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan sosial, agama, kepemudaan dan budaya	Pengoptimalan sarana dan prasarana lingkungan sosial, agama, kepemudaan dan budaya dengan pemanfaatan teknologi	Pemantapan Sarana dan prasarana lingkungan sosial, keagamaan, kepemudaan dan budaya
		Penguatan kelembagaan kepengurusan anak	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak	Pengembangan kolaborasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan lembaga kesetaraan gender dan Internalisasi kesetaraan gender dalam pembangunan	Penguatan kapasitas gender dalam partisipasi pembangunan	Pengoptimalan pemberdayaan manusia berbasis gender	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
		Peningkatan kebijakan, inisiasi (tujuan dan rencana), identifikasi dan inventarisasi pengelolaan keanekaragaman dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati	Peningkatan ekosistem keanekaragaman hayati melalui identifikasi, inventarisasi, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal, kekhasan ekosistem, spasial dan kekayaan spesies	Penguatan partisipasi, kolaborasi dan pengembangan pembiayaan inovatif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Pemantapan inovasi pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis konservasi dan preservasi
		Konservasi sumber daya alam hayati, dan penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan teknologi sebagai sarana pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup	Pemantapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan





VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan advokasi, edukasi, sosialisasi penyehatan lingkungan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi aman yang terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan kelembagaan dan optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi infrastruktur sanitasi	Peningkatan pemerataan percepatan layanan akses sanitasi aman	Pemantapan dan optimalisasi layanan dan fasilitas sanitasi aman secara layak dan berkelanjutan
		Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah, jaringan pengangkutan sampah, kerja sama antar daerah dan kemitraan melalui melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Penerapan teknologi berkelanjutan untuk mengurangi sampah dari sumber penghasil sampah dan optimalisasi retribusi untuk mendukung pembiayaan persampahan	Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah serta pemantapan koordinasi antar lembaga	Pemantapan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku menuju gaya hidup berkelanjutan serta mewujudkan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan literasi dan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah di sumber serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan ekonomi sirkular masyarakat	Pemerataan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efektif dan efisien serta peningkatan infrastruktur dalam pengumpulan sampah yang terintegrasi didukung sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah	Peningkatan keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan sampah	Pemantapan pelayanan pengelolaan dan penanganan sampah yang berkelanjutan
		Peningkatan pemanfaatan listrik bagi masyarakat dan pengembangan energi terbarukan serta penerapan upaya dekarbonisasi energi	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	Peningkatan riset, inovasi teknologi dan kolaborasi pemanfaatan energi baru terbarukan	Pemantapan peran aktif terhadap transisi energi berkelanjutan melalui perwujudan bauran energi berfokus terhadap energi baru terbarukan dan pembangunan rendah karbon
		Penguatan ketahanan energi rendah emisi dengan mewujudkan transisi energi berbasis potensi lokal yang terjangkau dan inklusif	Peningkatan pemanfaatan energi rendah emisi	Penguatan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam pemanfaatan energi	Pemantapan pemanfaatan energi primer untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Perlindungan, pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian pangan	Pengoptimalan layanan infrastruktur pertanian dan diversifikasi pangan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan teknologi dan diversifikasi produk untuk menjamin kecukupan pangan	Penerapan teknologi baru, pengembangan produk pangan dan jaringan distribusi dalam upaya meningkatkan standar pangan	Peningkatan kerja sama dalam pengembangan jaringan distribusi, keterjangkauan dan ketersediaan produk pangan dalam rangka menjamin kemandirian pangan	Peningkatan kerja sama dalam pengembangan jaringan distribusi, keterjangkauan dan ketersediaan produk pangan dalam rangka menjamin kemandirian pangan
		Peningkatan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, kawasan resapan air, dan peningkatan penyelenggaraan SPAM	Peningkatan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM	Peningkatan implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasi sistem peringatan dini kualitas air	Pemantapan akses air minum yang dikelola secara aman dengan menerapkan teknologi dan inovasi
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air siap minum dengan mekanisme kerja	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum serta pemerataan akses layanan air siap minum	Percepatan pemerataan infrastruktur air baku dan air minum serta akses layanan air siap minum	Pemantapan wilayah strategis di Kota Sungai Penuh yang terakses layanan air siap minum



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		sama antar daerah dan kemitraan			
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana	Peningkatan pengendalian tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana	Peningkatan perbaikan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana	Pemantapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah yang berpotensi terjadi bencana
		Penguatan pengendalian risiko bencana banjir secara struktural dan non struktural, serta penguatan kerja sama regional melalui kolaborasi dengan wilayah-wilayah sekitar, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan banjir	Peningkatan pengendalian risiko bencana banjir secara struktural dan non struktural	Pengoptimalan pengendalian bencana risiko banjir secara struktural dan non struktural	Pemantapan pengendalian risiko bencana banjir secara struktural dan non struktural



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kapasitas masyarakat dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan <i>nature-based solution</i> sebagai upaya adaptasi-mitigasi krisis iklim dan pengoptimalan rehabilitas lahan dalam rangka pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan faktor risiko bencana dan krisis iklim	Peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan dan pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana dan krisis iklim yang efektif, efisien, andal dan terintegrasi	Pemantapan kolaborasi yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan krisis iklim
		Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air	Penguatan ruang terbuka hijau dan drainase sebagai pengendali banjir	Pengoptimalan ruang terbuka hijau yang juga berperan sebagai ruang kegiatan publik	Pemantapan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan
	6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Pengembangan pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan wilayah baru untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah, distribusi pendapatan dan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas	Pengintegrasian antar kawasan dan antar daerah untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama dalam pembangunan	Penguatan dan pengendalian pertumbuhan wilayah baru	Pemantapan kesesuaian ruang dan pusat pelayanan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		fungsi pada pusat pelayanan perizinan terpadu			
		Penguatan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas antar daerah	Peningkatan kualitas konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas antar daerah	Pengembangan konektivitas antar daerah melalui Kota Sungai Penuh	Pemantapan Kota Sungai Penuh sebagai pusat konektivitas kawasan Puncak Andalas
		Pembangunan sistem transportasi kota yang terintegrasi dan kolaboratif	Pengembangan transportasi kota dan angkutan massal yang berkelanjutan dan terintegrasi	Penguatan integrasi antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang	Pemantapan integrasi sarana transportasi kota
		Peningkatan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota	Penguatan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota	Pengoptimalan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota	Pemantapan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota





VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali serta optimalisasi pembangunan wilayah terbangun	Penguatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali serta optimalisasi pembangunan wilayah terbangun	Pengoptimalan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali serta optimalisasi pembangunan wilayah terbangun	Pemantapan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali serta optimalisasi pembangunan wilayah terbangun
		Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional	Penguatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional	Pengoptimalan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional	Pemantapan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional
		Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan agar berfungsi efektif	Penguatan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan agar berfungsi efektif	Pengoptimalan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan agar berfungsi efektif	Pemantapan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan agar berfungsi efektif
		Peningkatan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang tegas dan konsisten	Penguatan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang tegas dan konsisten	Pengoptimalan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang tegas dan konsisten	Pemantapan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang tegas dan konsisten



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Pengembangan kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah	Peningkatan kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah.	Pemantapan kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah.
	<b>7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	Peningkatan sarana dan prasarana, utilitas umum dan penyelenggaraan jalan hingga ke jalan lingkungan	Pengintegrasian infrastruktur antar permukiman dan antar kawasan	Penguatan fungsi infrastruktur dalam penciptaan kawasan baru	Pemantapan fungsi sarana dan prasarana utilitas umum
		Pembangunan dan pengembangan rumah tidak layak huni serta pengendalian permukiman kumuh	Penguatan penyelenggaraan penataan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan kota kolaboratif dan inovatif	Pemantapan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan
		Peningkatan sarana dan prasarana desa serta pengembangan kawasan desa berbasis komoditas ekonomi lokal yang didukung manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas	Penguatan sarana dan prasarana desa serta kapasitas kerberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	Pengoptimalan sarana dan prasarana desa dan kawasan desa berbasis komoditas ekonomi lokal	Pemantapan daya saing desa dan kawasan perdesaan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Penguatan logistik daerah yang efisien	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien dan penguatan daya saing pusat pertumbuhan	Penguatan logistik daerah melalui pemanfaatan teknologi digital	Pemantapan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan infrastruktur distribusi rantai pasok	Penguatan infrastruktur distribusi rantai pasok	Penguatan fasilitas infrastruktur dan fasilitasi keuangan distribusi rantai pasok	Pemantapan fasilitas infrastruktur dan fasilitasi keuangan distribusi rantai pasok
		Peningkatan efisiensi rantai distribusi komoditas	Peningkatan efisiensi rantai distribusi komoditas berorientasi perdagangan nasional	Penguatan efisiensi rantai distribusi komoditas berorientasi ekspor	Pemantapan efisiensi distribusi komoditas berorientasi perdagangan nasional dan ekspor
	8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Peningkatan sinergi perencanaan, penganggaran dan pembangunan Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar	Penguatan sinergi perencanaan, penganggaran dan pembangunan Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar	Pengoptimalan sinergi perencanaan, penganggaran dan pembangunan Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar	Pemantapan sinergi pembangunan Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar
		Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Penguatan manajemen risiko pembangunan	Pengoptimalan manajemen risiko pembangunan	Pemantapan manajemen risiko pembangunan dan kestinambungan pembangunan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHUN 2025-2029 (Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Pembangunan)	TAHUN 2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	TAHUN 2040-2045 (Pemantapan Perwujudan Visi Pembangunan Daerah)
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan sasaran prioritas nasional	Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan sasaran prioritas nasional	Pengoptimalan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan sasaran prioritas nasional	Pemantapan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan sasaran prioritas nasional
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola data pembangunan serta sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Jambi dan nasional	Penguatan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola data pembangunan serta sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Jambi dan nasional	Pengoptimalan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola data pembangunan serta sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Jambi dan nasional	Pemantapan sistem elektronik terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola data pembangunan serta sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Kota Sungai Penuh dengan Provinsi Jambi dan nasional
		Pengembangan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau <i>Public Private Partnership (PPP)</i> .	Penguatan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau <i>Public Private Partnership (PPP)</i> .	Pengoptimalan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau <i>Public Private Partnership (PPP)</i> .	Pemantapan sumber pembiayaan baru yang inovatif sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau <i>Public Private Partnership (PPP)</i> .

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2024



## 5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan, dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok ini dijembatani oleh arah kebijakan.

### 5.2.1 Arah Pembangunan

Arah pembangunan daerah merupakan strategi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional. Dari 8 (delapan) Misi (agenda) yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang bersifat transformatif yang dituangkan sebagai Indonesia Emas (IE) 1 sampai dengan IE 17. Guna mengejawantahkan dan dukungan Kota Sungai Penuh untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, maka disusunlah arah pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, yang disajikan pada tabel di bawah ini (Tabel V.2).



Tabel V.2  
Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN, Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi  
dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

NO	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAMBI 2025-2045		RPJPD KOTA SUNGAI PENUH 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Transformasi Sosial	Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan (IE1)	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang Sumber Daya Manusia yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan	Kesehatan untuk Semua (IE1)
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan (IE2)		Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE2)
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan yang Adaptif dan Berkeadilan (IE3)		Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE3)
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (IE4)	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Iptek dan Inovasi yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Bernilai Tambah (IE4)
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau (IE5)		Penerapan Ekonomi Hijau yang Mendorong Akselerasi Pembangunan (IE5)
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital (IE6)		Transformasi Digital dalam Mendukung Ekonomi dan Pembangunan (IE6)
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Daerah dan Global (IE7)		Integrasi Ekonomi Daerah dan Global (IE7)
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan dan Perdesaan serta Kawasan Strategis Provinsi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE8)		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE8)





NO	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAMBI 2025–2045		RPJPD KOTA SUNGAI PENUH 2025–2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Tangguh, Berintegritas dan Adaptif (IE9)	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE9)
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum,	Keamanan dan Ketertiban Umum, Kerukunan Hidup serta Budaya Toleransi Masyarakat (IE10)	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum,	Keamanan dan Ketertiban Umum, Kerukunan Hidup serta Budaya Toleransi Masyarakat (IE10)
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Demokrasi Substansial, dan	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (IE11)	Demokrasi Substansial, dan	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (IE11)
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketimpangan antar Wilayah dan Pendapatan Berkurang (IE12)	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketangguhan Diplomasi dan Ketimpangan Pendapatan Berkurang (IE12)
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Memantapkan Ketahanan Sosial	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE13)	Mewujudkan Ketahanan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE13)
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Budaya dan Ekologi	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif (IE14)	Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif (IE14)
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Lingkungan Hidup Berkualitas (IE15)		Lingkungan Hidup Berkualitas (IE15)
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE16)		Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE16)



NO	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAMBI 2025–2045		RPJPD KOTA SUNGAI PENUH 2025–2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE17)		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE17)

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, Diolah oleh Bappeda, 2024



5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan transformasi daerah menggambarkan upaya transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah guna tercapainya Visi daerah. Untuk itu disusunlah arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil penyelarasan dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan pada Tabel V.3 di bawah ini.

Tabel V.3  
Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
No	DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
1.	Transformasi Sosial	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</p> <p>Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian Kesehatan.</p> <p>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian.</p> <p>Mewujudkan kapasitas infrastruktur kesehatan berskala nasional dan global seiring dengan terwujudnya kemandirian kesehatan masyarakat.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, kuat, profesional dan berdaya saing untuk kesehatan semesta.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas</p> <p>Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.</p> <p>Peningkatan Kualitas SDM kesehatan sehingga mampu berdaya saing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.</p>



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Dukungan kebijakan untuk upaya perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan.
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		Percepatan wajib belajar 13 tahun
		Peningkatan layanan melalui digitalisasi perpustakaan.
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
		Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		Mewujudkan SDM yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing.
		Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
		Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter.
		Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah.
		Penguatan kurikulum pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
		Penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).</p> <p>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.</p> <p>Revitalisasi pendidikan non formal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan <i>life skills</i>.</p> <p>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien.</p> <p>Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.</p>
2.	Transformasi Ekonomi	<p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna.</p> <p>Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan</p>



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
		Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring sesuai potensi wilayah
		Modernisasi sarana produksi perikanan.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah.
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan antara lain kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi.
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.).
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.





ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i>.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.</p> <p>Pembangunan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi.</p> <p>Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi.</p> <p><i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i>, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>Penguatan kelembagaan, destinasi dan promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Informasi.</p> <p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif serta pusat pelayanan terutama pada ruas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sungai Penuh - Tapan (<i>fly over</i>)</li><li>- Sungai Penuh - Kerinci - Merangin</li><li>- Sungai Penuh - Kerinci - Solok Selatan</li><li>- Sungai Penuh - Kerinci (Jujun)</li><li>- Sungai Penuh - Kerinci (Koto Lanang)</li></ul> <p>Mendorong pengembangan <i>multi-infrastructure backbone</i> yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i>.</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan desa.</p> <p>Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Muara Bulian-Sarolangun-Bangko.</li><li>- Muara Bulian-Muara Tebo-Muara Bungo.</li></ul> <p>Pembangunan jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.</p> <p>Mendorong Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas &amp; kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah.</p> <p>Penguatan Teknologi Tepat Guna melalui riset, inovasi dan SDM terampil guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi berkelanjutan.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p>



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>Penerapan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni budaya daerah, serta peningkatan partisipasi pada rantai pasok nasional dan global.</p> <p>Mendorong Koperasi dan UKM menghasilkan produk yang masuk rantai pasok ekspor</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
		Hilirisasi komoditas /sumber daya alam unggulan.
		Penyiapan infrastruktur dan SDM Industri.
		Penguatan ekosistem Industrialisasi.
		Pengelolaan sumber daya pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna.
		Peningkatan keragaman wisata.
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan <i>startup</i> kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif.
		Peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas.
		Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.
		Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, dan digital).
		Penguatan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta integrasi <i>soft skills</i> dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.
		Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
		Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas.
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas.
		Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan social.
		Penerapan ekonomi hijau.
		Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya.
		Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah.
		Penyiapan kebijakan dan kelembagaan.
		Akuntabel berbasis digital.
		Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis.
		Mengembangkan kebijakan perancangan ekosistem inovasi.
		Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja.
		Mengoptimalkan pendapatan asli daerah
		Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.
		Percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan.
		Penguatan ekosistem industri yang berkelanjutan.
		Penguatan kompleksitas produk industri.
		Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai destinasi unggulan regional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
		Peningkatan keterpaduan pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya.
		Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi.
		Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan.
		Perluasan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau dan digital)
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas.
		Optimalisasi teknik pengelolaan persetujuan perhutanan sosial melalui pengembangan komoditi unggulan.
		Optimalisasi penerapan ekonomi hijau.
		Penerapan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
		Pengembangan kawasan industri/hilirisasi sesuai potensi wilayah.
		Digitalisasi di semua sektor.
		Penyiapan sarana prasarana perhubungan.
		Perwujudan Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan, dan pusat konektivitas di Kawasan Puncak Andalas.
		Penguatan infrastruktur teknologi.
		Percepatan peningkatan produktivitas.
		Optimalisasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah.
		peningkatan daya saing produk hilirisasi.
		Akselerasi Industri produk jadi.
		Penguatan daya saing industri.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai destinasi unggulan nasional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
		Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai destinasi pariwisata alam, budaya dan pariwisata minat khusus.
		Peningkatan daya saing industri berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual.
		Peningkatan diversifikasi produk KUKM berkualitas ekspor.
		Peningkatan kualitas SDM pemuda yang adaptif dan berdaya saing global.
		Peningkatan kualitas SDM pemuda dan olahraga yang adaptif dan berdaya saing global.
		Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian.
		Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi/inkubator bisnis/ <i>technopark</i> .
		Instrumen kebijakan ekonomi hijau.
		Pengembangan sumber daya alam mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan sistem.
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
		Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik.
		Pemanfaatan digitalisasi.
		Peningkatan sarana prasarana perhubungan.
		Pemenuhan kebutuhan listrik publik, industri dan transportasi.
		Implementasi kemajuan teknologi untuk peningkatan produktivitas sumber daya secara berkelanjutan.
		Penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
		Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah.
		Perluasan pemasaran produk hilirisasi.
		Perluasan skala ekspansi industri.
		Pembangunan hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan, regulasi serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif.
		Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
		Pengembangan hub ekonomi kreatif dan digital yang didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan.
		KUKM tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
		Mewujudkan pemuda tangguh dan mandiri secara ekonomi.
		Terwujudnya pemuda tangguh dan olahraga maju
		Fasilitasi mobilitas pekerja termasuk untuk mengisi pasar kerja global.
		Penetapan upah minimum berbasis produktivitas dan berkeadilan.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
		Peningkatan pendapatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
		Penerapan ekonomi biru antara lain sektor perikanan, manajemen sumber daya air dsb.
		Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.
		Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
		Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
		penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik secara luas.
		Pemanfaatan digitalisasi.
		Penguatan integrasi antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang.
		Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.
3.	Transformasi Tata Kelola pemerintahan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
		Peningkatan kualitas pengelolaan diklat.
		Peningkatan kualitas ASN berbasis merit.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
		Regulasi berbasis teknologi informatif
		Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, proporsional dan berkompeten
		Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif
		Terwujudnya kelembagaan yang kredibel dan SDM ASN yang sejahtera.
		Pemenuhan dan penguatan infrastruktur dan SDM TIK.
		Mendorong inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
		Penyelenggaraan diklat yang kolaboratif.





ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas.
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pelayanan publik.
		Penyelenggaraan diklat yang adaptif dan kompetitif.
		Pengembangan pemanfaatan TIK di seluruh sektor
		Percepatan penerapan teknologi dalam pelayanan publik.
		Optimalisasi pemanfaatan TIK di seluruh sektor
		Terwujudnya integrasi satu data diantaranya data kependudukan.
		Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
4.	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta peningkatan kolaborasi dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
6.	Implementasi Transformasi	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
		Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim.
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C ( <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.



ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		
DALAM RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025 - 2045		
No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber: Hasil penyelarasan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, Diolah oleh Bappeda, 2024

5.2.3 Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada: (1) pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok; (2) percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non APBN; (3) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan (4) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (1) sentra pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai pusat produksi; (2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah diarahkan pada upaya mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan. Pembangunan kota yang berkelanjutan: (1) kota layak huni, aman dan nyaman; (2) kota hijau, berketahanan iklim dan bencana; dan (3) kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi/ *smart city*.

Penguatan kawasan strategis dan pengembangan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan guna menjamin ketahanan energi, air dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis



masyarakat. Pengembangan pariwisata diarahkan dengan memperhatikan adat istiadat, budaya Kota Sungai Penuh yang telah melekat dalam pola kehidupan masyarakat, sesuai adagium: “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan, membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan pendidikan antar wilayah dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai ketakwaan, serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.

Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul dan berdaya saing.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai Tahun 2020 Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengupayakan dan mengusulkan perubahan batas kawasan hutan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.863/Menhut-2/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi, dengan rincian sebagai berikut: (1) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 24.560,42 ha; (2) Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) seluas 940,13 ha; dan (3). Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 10.991,88 ha.

Adanya aspirasi berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan penggantian nama Kota Sungai Penuh menjadi Kota Kerinci, yang diharapkan memberi dampak yang positif serta penguatan identitas masyarakat dan rasa kepemilikan terhadap kota. Di sisi lain, tanah ulayat di Kota Sungai Penuh masih eksis keberadaannya, sehingga diperlukan identifikasi terhadap tanah ulayat tersebut, agar tidak diklaim oleh masyarakat sebagai tanah hak milik.

Kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya berada dalam batas dayang dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052 mengarahkan 4 (empat) muatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber



daya alam; (2); pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3); pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4); adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, yang mengarahkan pada peningkatan kontribusi daerah dalam menurunkan emisi GRK ke atmosfer, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

#### **5.2.4 Indikator Utama Pembangunan Daerah**

Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, disusun indikator utama pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan substansi muatan indikator utama RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Tabel V.4).



Tabel V.4  
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN, Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi  
dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
1 Kesehatan untuk semua (IE1)	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,40	80,00	Pemerataan akses dan kualitas kesehatan (IE1)	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,14	79,39	Kesehatan untuk semua (IE1)	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,43	80,02
	2 kesehatan ibu dan anak				2 Kesehatan ibu dan anak				2 Kesehatan ibu dan anak		
	a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16		a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130,00	15,00		a.Jumlah kematian ibu (kasus)	3-2	0-1
	b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,00		b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	11,90	3,50		b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	4,05	1,97-2,06
	3 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	76		3 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				3 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
					a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	66,00	95,00		a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	75,72	100,00
					b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment succes rate</i> ) (%)	91,77	98,00		b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment succes rate</i> ) (%)	96,65	100,00
	4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,00	99,50		4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,75	99,50		4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100,00	100,00





ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
2 Pendidikan berkualitas yang merata (IE2)	5 Hasil pembelajaran			Pemerataan akses dan kualitas pendidikan (IE2)	5 Hasil pembelajaran			Pendidikan berkualitas yang merata (IE2)	5 Hasil pembelajaran		
	a.Rata-rata nilai PISA				a.Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				a.Skor literasi dan numerasi SD		
	a-i Membaca	396	485		- literasi membaca	9,09	63,64-72,73		- Literasi SD (nilai)	73,87	83,87
	a.ii Matematika	404	490		- numerasi	9,09	63,64		- Numerasi SD (nilai)	64,35	74,35
	a.iii Sains	416	487								
	b. Rata-rata nilai asesmen nasional				b.Persentase SMA/SMK yang mencapai standar kompetensi minimum pd asesmen tingkat nasional:				b.Skor literasi dan numerasi SMP		
	b-i Literasi Membaca	62,89	75,73		- literasi membaca	35,20 – 37,20	65,31–67,31		- Literasi SMP (nilai)	74,90	84,90
b-ii Numerasi	54,36	68,72	- numerasi	24,25 – 26,25	59,55–61,55	- Numerasi SMP (nilai)	66,59	76,59			
c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)			c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)			c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)					
d.Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d.Harapan lama sekolah	13,32	14,75-14,78	d.Harapan lama sekolah	14,85	15,05			
						e.Indeks literasi			71,09	75,54	



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
3 Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)	6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94	60,00	Perindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan (IE3)	6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	10,21	10,21-11,39	Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)	6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	16,69	17,04
	7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00		7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	70,90	85,00		7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	75,53	79,53
	8 Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8		8 Tingkat kemiskinan (%)	6,30-6,80	0,07-0,57		8 Tingkat kemiskinan (%)	2,87-2,93	0,58-0,75
	9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	43,19	99,50		9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	36,41	81,44		9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	41,61	81,99
	10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,00	60,00		10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27,00	58,00		10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	4,05	31,08
4 Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi (IE4)	11 Produktivitas industri dan pertanian			Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi (IE4)	11 Rasio PDRB industri pengolahan (%)	9,98-10,12	13,22-13,35	Iptek dan inovasi yang mendorong produktivitas ekonomi bernilai tambah (IE4)	11 Rasio PDRB industri pengolahan (%)	0,58	0,60
	a.Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,80	28,00								
	b.Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2								
	12 Pengembangan pariwisata				12 Pengembangan pariwisata				12 Pengembangan pariwisata		



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
	a.Rasio PDB pariwisata (%)	4,60	8,00		a.Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	1,21	2,06		a.Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	1,12	1,25
	b.Devisa pariwisata (miliar USD)	22,10	100,00		b.Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	5,66	14,15		b.Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	560	1.500
	13 Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,92	11,00		13 Distribusi PDRB sektor tersier (%)	35,32	36,25		13 Kontribusi PDRB sektor tersier (%)	83,07	85,67
	14 Produktivitas UMKM, koperasi, BUMN				14 Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD				14 Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD		
	a.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,00		a.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)				a.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		
					- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	11,85	14,10		• Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	10,81	14,02
					- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	2,58	4,77		• Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	15,53	25,32
	b.Rasio kewirausahaan	3,14	8,00		b.Rasio kewirausahaan provinsi	5,19	12,00		b.Rasio kewirausahaan daerah	3,37	10,13
	c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,00		c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,71	3,13		c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	3,28
	d.Return on asset (ROA) BUMN (%)	3,40	5,60		d.Return on asset (ROA) BUMD (%)	3,37	4,05		d.Return on asset (ROA) BUMD (%)	2,10	3,62



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
	15 Penciptaan lapangan kerja yang baik				15 Penciptaan lapangan kerja yang baik				15 Penciptaan lapangan kerja yang baik		
	a.Tingkat pengangguran terbuka	4,50-5,00	4,00		a.Tingkat pengangguran terbuka	4,27 - 4,38	1,44-2,46		a.Tingkat pengangguran terbuka	3,68-3,73	1,44-2,46
	b.Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	35,00	80,00		b.Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	43,00	85,00		b.Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	41,66	50,06
	16 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,30	70,00		16 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,60	65,20		16 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54,69	64,69
	17 Tingkat Penguasaan IPTEK				17 Tingkat Penguasaan IPTEK				17 Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a.Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3		a.Pengeluaran iptek dan inovasi (% APBD)	0,32	0,45		a.Kapabilitas inovasi (indeks)	2,07	3,25
	b.Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar		b.Peringkat Indeks Inovasi Daerah (peringkat)	27	18		b.Indeks inovasi daerah (indeks)	44,96	65,01
5 Penerapan ekonomi hijau (IE5)	18 Tingkat penerapan ekonomi hijau			Penerapan ekonomi hijau (IE5)	18 Tingkat penerapan ekonomi hijau:			Penerapan ekonomi hijau yang mendorong akselerasi pembangunan (IE5)	18 Tingkat penerapan ekonomi hijau		
	a.Indeks ekonomi hijau	70,80	90,65		a.Indeks ekonomi hijau	73,61	92,80		a.Indeks ekonomi hijau	73,61	92,80
	b.Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20,00	70,00		b.Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	27,30	86,47		b.Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	27,30	86,47
6 Transformasi digital (IE6)	19 Indeks Daya saing digital di tingkat global (peringkat)	43	20 besar	Transformasi digital (IE6)	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (IE6)	5,90	7,30	Transformasi digital dalam mendukung ekonomi dan pembangunan (IE6)	19 Indeks masyarakat digital (indeks)	43,78	70,68
7 Integrasi ekonomi	20 Biaya logistik (%PDB)	13,50	8,00		20 Koefisien Variasi harga antar wilayah	7,78	4,96		20 Konektivitas terintegrasi dan		



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045			
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET		
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045	
domestik dan global (IE7)				Integrasi ekonomi daerah dan global (IE7)	tingkat provinsi (IE7)			Integrasi ekonomi daerah dan global (IE7)	penataan ruang yang optimal			
						a. Tingkat kemantapan jalan (%)	55,58		85,58			
						b. Cakupan konektivitas antar wilayah (indeks)	4,13		4,63			
						c. Indeks perkembangan harga	1,5-3,5		1,0-3,1			
						d. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	98,33		99,43			
	21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,10-30,20	27,20		21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	22,08	20,27		21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,34	29,50	
	22 Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,00-21,60	40,00		22 Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	26,00	18,78		22 Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	14,38	15,00	
8 Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	23 Kota maju, inklusif dan berkelanjutan			Perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	23 Kota maju, inklusif dan berkelanjutan			Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	23 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan			
	a. Kontribusi PDRB Wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92			a. Kontribusi PDRB PKN terhadap PDRB Provinsi (%)	13,90		14,50	a. Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi (%)	3,37	3,57
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100,00			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,84		100,00	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	92,04	98,10
	c. Persentase desa mandiri (%)	4,00	16,25			c. Persentase desa mandiri (%)	0,35		13,37	c. Persentase desa mandiri (%)	0,00	24,615



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045				ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045			
	INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR		TARGET		INDIKATOR		TARGET			
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045		
9 Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)	24 Indeks materi hukum	0,51	0,71		24 Indeks reformasi hukum	70,00	100,00			d.Persentase kawasan kumuh (%)	1,81	0,68	
	25 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00		25 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,85	5,00			24 Indeks reformasi hukum	60,46	75,46	
	26 Indeks pelayanan publik	3,68	5,00		26 Indeks pelayanan publik	3,33	5,00			25 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,11	5,00	
	27 Anti korupsi				27 Indeks integritas provinsi (hasil SPI)	73,97	89,11			26 Indeks pelayanan publik	3,66	5,00	
	a.Indeks integritas nasional	74,52	96,98							27 Birokrasi yang berintegritas dan profesional			
	b.Indeks persepsi korupsi	38,00	60,00							Indeks integritas kota (hasil SPI)	69,17	80,17	
										Indeks profesionalitas ASN	71,51	89,51	
10 Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial (IE10)	28 Indeks pembangunan hukum	0,69	0,89	Keamanan dan ketertiban umum, kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat (IE10)	28 Keamanan dan ketertiban daerah:			Keamanan dan ketertiban umum, kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat (IE10)	28 keamanan dan ketertiban daerah:				
					a.Persentase Perda yang ditegakkan	100,00	100,00			a.Penegakan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	
					b.Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	70,00	90,00			b.Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	100,00	100,00	
	29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,50	80,00		29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	65,56	82,94			29 Tingkat penyelesaian gangguan trantibum linmas (%)	100,00	100,00	





ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
	30 Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)		30 Indeks demokrasi	sedang	tinggi		30 Persentase konflik sosial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti(%)	100,00	100,00
11 Stabilitas ekonomi makro (IE11)	31 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,00-20,00	Stabilitas ekonomi makro daerah (IE11)	31 Rasio penerimaan daerah terhadap PDRB (%)			Stabilitas ekonomi makro daerah (IE11)	31 Rasio penerimaan daerah (%)		
					a.PAD terhadap pendapatan daerah (%)	44,64	48,80		a.PAD terhadap pendapatan daerah (%)	10,11	11,16
					b.Pajak Daerah terhadap PAD (%)	86,77	87,44		b.Pajak Daerah terhadap PAD (%)	25,07	30,53
					c.Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	0,87	1,20		c.Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	2,91	4,31
					d.Rasio pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,18	2,10		d.Rasio pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,101	0,151
	32 Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1		32 Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	1,0-3,1		32 Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	1,0-3,1
	33 Pendalaman/intermediasi sektor keuangan				33 Pendalaman/intermediasi sektor keuangan				33 Pendalaman/intermediasi sektor keuangan		
	a.Aset perbankan/PDB (%)	66,90	200,00		a.Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	18,50	56,00		a.Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	10,00	27,00
	b.Aset dana pensiun/PDB (%)	8,00	60,00		b.Jumlah peserta dana pensiun provinsi/jumlah angkatan kerja provinsi (%)	0,08	1,55				
					c.Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (rupiah)	4.219.124,01	37.035.817,67		b.Nilai transaksi saham per kapita (rupiah)	69.812,00	704.626,00
	c.Aset asuransi/PDB (%)	9,10	20,00		d.Total kredit/PDRB (%)	18,00	54,00		c.Total kredit/PDRB (%)	8,53	22,77
	d.Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,80	120,00								
	e.Total kredit/PDRB (%)	37,80	80-90								



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
	34 Inklusi keuangan (%)	91,00	98,00		34 Tingkat inklusi keuangan provinsi (%)	91,35	99,02		34 Inklusi keuangan (%)	91,35	99,02
12 Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan (IE12)	35 <i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	61,54	75,00-80,00	Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan berkurang (IE12)	35 Ketimpangan berkurang:			Ketangguhan diplomasi dan ketimpangan pendapatan berkurang (IE12)	35 Ketimpangan berkurang, daya saing infrastruktur meningkat:		
					a.Rasio Gini	0,337 – 0,341	0,275 – 0,326		a.Rasio Gini	0,30-0,31	0,29-0,30
					b.Indeks Williamson	0,365	0,34		b.Indeks daya saing infrastruktur	2,51	3,66
					c.Indeks daya saing infrastruktur	2,5	3,65				
	36 <i>Asia Power Index (Military Influence)</i>	16,00	45,00		36 Persentase implementasi kerja sama daerah dari kerja sama yang dibangun	100,00	100,00		36 Persentase implementasi kerja sama daerah dari kerja sama yang dibangun	100,00	100,00
13 Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,15-60,23	69,58-70,29	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,15-60,23	69,58-70,29
	38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20		38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,81-65,92	72,18-73,42		38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,81-65,92	72,18-73,42
14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif (IE14)	39 Indeks pembangunan kualitas keluarga	70,29	80,00	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif (IE14)	39 Keluarga berkualitas			Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (IE14)	39 Keluarga berkualitas		
					a.Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penduduk tumbuh seimbang: - Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,23	2,05				



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
					- Angka Prevalensi kontrasepsi modern <i>(Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)</i>	66,74	81,73				
					- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi <i>(Unmet Need)</i>	8,66	4,88				
					- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun <i>(Age Specific fertility Rate/ASFR 15-19 )</i>	26,12	20,25				
					b.Pembangunan keluarga berkualitas						
					- Indeks pembangunan kualitas keluarga	72,41-72,42	77,52-77,63				
					- Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	64,30	82,00				
					a. Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	64,39	86,07				
					b.Indeks perlindungan anak (indeks)	72,00	85,51				
					40 Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,425	0,15				
					40 Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,718	0,318				
15 Lingkungan hidup	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati Daerah	0,44	0,75	Lingkungan hidup	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati Daerah	0,562	0,684	Lingkungan hidup	41 Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0,562	0,684



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
berkualitas (IE15)	42 Kualitas lingkungan hidup			berkualitas (IE15)	42 Kualitas lingkungan hidup			berkualitas (IE15)	42 Kualitas lingkungan hidup		
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05		a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71	80,88		a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,68	84,91
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50								
	a.iii.Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74								
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77								
	b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12,50	70,00		b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	9,59	50,00		b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	8,64	50,25
	c.Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)		c.Pengelolaan sampah				c.Pengelolaan sampah		
					- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	17,00	85,00		- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	33,57	85,00
					- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	25,00	100,00		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	75,00	100,00
16 Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan (IE16)	43 .Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan			Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan (IE16)	43 Ketahanan energi, air dan pangan:			Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan (IE16)	43 Ketahanan energi, air dan pangan:		
	a.Ketahanan energi				a.Ketahanan energi				a.Ketahanan energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,77	8,24		- Konsumsi listrik perkapita (Kwh)	696,00	3.080,00		- Konsumsi listrik perkapita (Kwh)	1.012,59	1.069,51



ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPN TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN PROV. JAMBI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD PROV. JAMBI TAHUN 2025-2045			ARAH PEMBANGUNAN KOTA SUNGAI PENUH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045		
	INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET			INDIKATOR	TARGET	
		BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045			BASELINE 2025*	2045
					- Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	111,00	90,00		- Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	111,00	90,00
	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>prevalence of undernourishment</i> ) (%)	7,21	0,77		b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>prevalence of undernourishment</i> ) (%)	11,48	0,31		b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>prevalence of undernourishment</i> ) (%)	14,55	0,39
	c.Ketahanan air				c.Ketahanan air				c.Ketahanan air		
	- Kapasitas tampungan air (m <sup>3</sup> /kapita)	65,18	200,00		- Kapasitas air baku (m <sup>3</sup> /detik)	0,29	4,91		- Kapasitas air baku (m <sup>3</sup> /detik)	0,20	1,13
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20	100,00		- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	34,66	100,00		- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	69,68	100,00
17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	44 Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	44 Indeks Risiko Bencana Provinsi	122,51	104,33-88,73	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	44 Indeks Risiko Bencana	110,50	102,50
	45 Persentase penurunan emisi GRK (%)				45 Persentase penurunan emisi GRK (%)				45 Intensitas emisi GRK (Ton CO2 Ekuivalen)		
	- Kumulatif	28,12	51,51		- Kumulatif	20,63	44,53		- Kumulatif	226.371,73	592.928,69
	- Tahunan	36,65	80,98		- Tahunan	36,51	82,42				

Sumber: Hasil Penyelarasan IUP RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, Diolah oleh Bappeda, 2024  
)\* Baseline 2025 merupakan proyeksi target

### 5.2.5 Sasaran Pokok pada Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

#### 5.2.5.1 Misi 1, Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM yang Unggul, Bertakwa dan Berkelanjutan

Misi mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM yang unggul, bertakwa dan berkelanjutan diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

- ❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas**  
Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh
- ❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam pelayanan pendidikan secara inklusif dan berkualitas, bertakwa berkarakter dan berbudaya**  
Keberhasilan sasaran pokok ini ditandai dengan mutu pendidikan yang adaptif dengan dinamika perkembangan dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan global.
- ❖ **Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif**  
Keberhasilan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif ini ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya perlindungan sosial di Kota Sungai Penuh.

#### 5.2.5.2 Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

- ❖ **Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan Kawasan Puncak Andalas didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global**  
Peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan Kawasan Puncak Andalas didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global ditandai dengan meningkatnya rasio PDRB sektor tersier, industri pengolahan, PDRB sektor akomodasi makan dan minum, jumlah tamu wisatawan mancanegara, produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD, penciptaan lapangan kerja, partisipasi angkatan kerja perempuan dan tingkat penguasaan IPTEK.
- ❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam**  
Kota Sungai Penuh dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam ditandai dengan meningkatnya penerapan ekonomi hijau.



❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas**

Keberhasilan Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas ditandai dengan meningkatnya pembangunan masyarakat digital.

**5.2.5.3 Misi 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai Penunjang Pembangunan Daerah**

Misi mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang berintegritas, adaptif, dan profesional**

Tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang berintegritas, adaptif, dan profesional ditandai dengan semakin membaiknya reformasi hukum, meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kualitas pelayanan publik, serta birokrasi yang berintegritas didukung oleh ASN yang profesional.

**5.2.5.4 Misi 4, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**

Misi mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang aman, tentram dan tertib, demokratis, serta penghormatan hak asasi manusia**

Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang aman, tentram dan tertib, demokratis, serta penghormatan hak asasi manusia ditandai dengan semakin membaiknya pembangunan ketaatan hukum, konflik sosial yang ditindaklanjuti dan diselesaikan serta pelaksanaan aksi HAM.

❖ **Terwujudnya kestabilan perekonomian di Kota Sungai Penuh**

Kestabilan perekonomian di Kota Sungai Penuh ini ditandai dengan semakin membaiknya rasio penerimaan daerah, tingkat inflasi yang stabil, meningkatnya kinerja intermediasi sektor keuangan dan inklusi keuangan.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang kolaboratif dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**

Keberhasilan Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang kolaboratif dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan implementasi kerja sama yang dibangun, meningkatnya daya saing infrastruktur, dan menurunnya ketimpangan pendapatan.

**5.2.5.5 Misi 5, Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Ekologi dan Konservasi Alam**

Misi mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah beradab dan berbudaya**

Kota Sungai Penuh sebagai daerah beradab dan berbudaya ditandai dengan meningkatnya pembangunan kebudayaan di Kota Sungai Penuh.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah bertakwa yang menjadi landasan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan.**

Kota Sungai Penuh sebagai daerah bertakwa yang menjadi landasan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya kerukunan umat beragama.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif**

Kota Sungai Penuh sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif ditandai dengan semakin membaiknya kualitas pembangunan keluarga, perlindungan anak dan menurunnya ketimpangan gender.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan**

Kota Sungai Penuh yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, rumah tangga dengan akses sanitasi aman, penanganan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, berketahanan air dan transisi energi berkelanjutan**

Kota Sungai Penuh yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, berketahanan air dan transisi energi berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya ketahanan energi, menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan meningkatnya ketahanan air.

❖ **Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang maju dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**

Kota Sungai Penuh yang maju dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim ditandai dengan menurunnya risiko bencana daerah dan emisi gas rumah kaca.

**5.2.5.6 Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas**

Misi mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat konektivitas di Kawasan Puncak Andalas serta terkoneksi oleh hub logistik nasional**

Peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat konektivitas di Kawasan Puncak Andalas serta terkoneksi oleh hub logistik nasional ini ditandai semakin membaiknya tingkat kemantapan jalan,

meningkatnya konektivitas yang melalui Kota Sungai Penuh, perkembangan harga yang stabil, serta meningkatnya PMTB dan ekspor barang dan jasa.

❖ **Terwujudnya penataan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan**

Penataan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

**5.2.5.7 Misi 7, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Misi mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan nilai tambah, menumbuhkan hunian dan kawasan permukiman yang layak**

Peran strategis Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan nilai tambah, menumbuhkan hunian dan kawasan permukiman yang layak, ditandai dengan meningkatnya proporsi kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatnya desa mandiri dan menurunnya kawasan kumuh.

**5.2.5.8 Misi 8, Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**

Misi mewujudkan kesinambungan pembangunan diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan untuk pencapaian sasaran pokok:

❖ **Terwujudnya pengendalian pembangunan Kota Sungai Penuh melalui penerapan manajemen risiko**

Keberhasilan pengendalian pembangunan Kota Sungai Penuh melalui penerapan manajemen risiko ditandai dengan meningkatnya manajemen risiko indeks.



Tabel V.5  
Sasaran Pokok RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045							
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET					
				BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045	
1	Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas	Kesehatan untuk semua (IE1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,01	74,43	75,27	76,45	77,62	80,02
			Kesehatan ibu dan anak:						
			a. Jumlah kematian ibu (kasus)	3	2-3	2-3	2-3	1-2	0-1
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	4,10	4,05	3,79	3,04	2,54	1,97
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk):						
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	56,5	75,72	80,58	86,65	92,71	100,00
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment succes rate</i> ) (%)	96,31	96,65	97,33	98,18	99,03	100,00



INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045									
SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
					BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
	berkarakter dan berbudaya		d. Harapan lama sekolah	14,83	14,85	14,89	14,94	14,99	15,05
			e. Indeks literasi (IPLM)	70,69(2022)	71,09	71,49	72,49	73,74	75,54
			Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	16,66	16,69	16,76	16,85	16,94	17,04
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	75,13	75,53	76,33	77,33	78,33	79,53
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)	Tingkat kemiskinan (%)	3,00	2,87-2,93	2,61-2,67	2,18-2,26	1,63-1,73	0,58-0,75
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	34,91	41,61	49,69	59,78	69,88	81,99
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	4,05	4,05	9,46	16,22	22,97	31,08
4	Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat jasa dan perdagangan di Kawasan Puncak Andalas didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang	Iptek dan inovasi yang mendorong produktivitas ekonomi bernilai tambah (IE4)	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60
			Pengembangan pariwisata:						
			a. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	1,11	1,12	1,15	1,18	1,21	1,25
			b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	187	560	748	983	1.218	1.500
			Kontribusi PDRB sektor tersier (%)	82,81	83,07	83,59	84,24	84,39	85,67
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah:						
	- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	10,41	10,81	11,61	12,45	13,34	14,02		



INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045								
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
				BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
adaptif dengan perkembangan global		- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	14,10	15,53	18,14	21,04	23,58	25,32
		b. Rasio kewirausahaan daerah	2,79	3,37	4,53	5,98	7,43	10,13
		c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,19	1,22	1,42	1,84	2,42	3,28
		d. <i>Return on asset</i> (ROA) BUMD (%)	-3,16	2,10	2,95	3,20	3,43	3,62
		Penciptaan lapangan kerja baik:						
		a. Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,80	3,68-3,73	3,41-3,47	2,98-3,06	2,47-2,57	1,44-2,46
		b. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	39,16	41,66	42,06	43,31	45,56	50,06
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,69	54,69	56,69	59,19	61,69	64,69
		Tingkat Penguasaan IPTEK:						
		a. Kapabilitas inovasi	1,95	2,07	2,30	2,60	2,89	3,25
		b. Indeks inovasi daerah	42,96	44,96	48,96	53,98	58,99	65,01
5	Terwujudnya Kota Sungai Penuh dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien	Penerapan ekonomi hijau yang mendorong akselerasi pembangunan (IE5)	Penerapan ekonomi hijau:					
			a. Indeks ekonomi hijau	n.a	73,61	77,45	82,25	87,04
			b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	n.a	27,30	39,13	53,93	68,72





		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045							
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET					
				BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045	
	dalam pemanfaatan sumber daya alam								
6	Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas	Transformasi digital dalam mendukung ekonomi dan pembangunan (IE6)	Indeks masyarakat digital	41,09	43,78	49,16	55,88	62,61	70,68
7	Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh sebagai pusat konektivitas di Kawasan Puncak Andalas serta terkoneksi oleh hub logistik nasional	Integrasi ekonomi daerah dan global (IE7)	Konektivitas terintegrasi dan penataan ruang yang optimal:						
			a. Tingkat kemantapan jalan (%)	74	55,58	61,58	69,08	76,58	85,58
			b. Cakupan konektivitas antar wilayah (indeks)	4,13	4,13	4,25	4,38	4,50	4,63
			c. Indeks perkembangan harga	n.a	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,0-3,1
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,32	29,34	29,37	29,41	29,45	29,50
			Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	14,32	14,38	14,51	14,66	14,82	15,00
8.	Terwujudnya penataan ruang		Konektivitas terintegrasi dan penataan ruang yang optimal:						



INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045									
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET					
				BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045	
	yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Integrasi ekonomi daerah dan global (IE7)	d. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	98,22	98,33	98,55	98,83	99,10	99,43
9.	Terwujudnya peran strategis Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan nilai tambah, menumbuhkan hunian dan kawasan permukiman yang layak	Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan:						
			a. Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap Provinsi Jambi (%)	3,23	3,37	3,41	3,46	3,51	3,57
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	91,85	92,04	92,80	94,00	95,52	98,10
			c. Persentase kawasan kumuh (%)	1,87	1,81	1,58	1,30	1,02	0,68
			d. Persentase desa mandiri (%)	0,000	0,000	4,615	13,846	18,462	24,615
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang berintegritas, adaptif, dan profesional	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)	Indeks reformasi hukum	54,46	60,46	63,46	67,21	70,96	75,46
			Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,38	3,11	3,39	3,74	4,09	5,00
			Indeks pelayanan publik	3,53(2022)	3,66	3,93	4,27	4,60	5,00
			Birokrasi yang berintegritas dan profesional:						
			a. Indeks integritas kota (hasil SPI)	68,07	69,17	71,37	74,12	76,87	80,17
11.	Terwujudnya pengendalian pembangunan Kota Sungai Penuh melalui penerapan manajemen risiko	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)	b. Indeks profesionalitas ASN	35,7	71,51	74,71	78,71	85,51	89,51
			c. Manajemen risiko indeks	2,757	3,057	3,657	4,407	5,000	5,000



INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045								
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
				BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
12	Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang aman, tentram dan tertib, demokratis, serta penghormatan hak asasi manusia	Keamanan dan ketertiban umum, kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat (IE10)	Keamanan dan ketertiban daerah:					
			a. Penegakan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Tingkat penyelesaian gangguan trantibum linmas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Terwujudnya kestabilan perekonomian di Kota Sungai Penuh	Stabilitas ekonomi makro daerah (IE11)	Rasio Penerimaan Daerah:					
			a. PAD terhadap pendapatan daerah (%)	9,15	10,11	10,31	10,57	11,16
			b. Pajak daerah terhadap PAD (%)	13,10	25,07	26,08	27,39	30,53
			c. Retribusi daerah terhadap PAD (%)	31,19	2,91	3,15	3,47	4,31
			d. Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,096	0,101	0,111	0,123	0,136
			Tingkat Inflasi (%)	3,09	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
			Pendalaman /intermediasi sektor keuangan:					
			a. Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	8,30	10,00	13,40	17,65	21,90
			b. Nilai transaksi saham per kapita (rupiah)	61.477	69.812,00	119.013,00	238.420,00	416.847,00
			c. Total kredit/PDRB (%)	7,11	8,53	11,38	14,94	18,50
			Inklusi keuangan	n.a	91,35	92,88	94,80	96,72
14	Terwujudnya Kota Sungai	Ketangguhan diplomasi dan	Ketimpangan berkurang, daya saing infrastruktur meningkat:					



INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045									
SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
					BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
	Penuh sebagai daerah yang kolaboratif dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	ketimpangan pendapatan berkurang (IE12)	a. Rasio Gini	0,30	0,30-0,31	0,30-0,31	0,30-0,31	0,30-0,31	0,29-0,30
			b. Indeks daya saing infrastruktur	2,39	2,51	2,74	3,02	3,31	3,66
			Persentase implementasi kerja sama daerah dari kerja sama yang dibangun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah beradab dan berbudaya	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a	60,15-60,23	62,04-62,24	64,39-64,76	66,75-67,27	69,58-70,29
16	Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah bertakwa yang menjadi landasan dalam memajukan pembangunan berkelanjutan	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n.a	65,81-65,92	67,08-67,42	68,68-69,30	70,27-71,17	72,18-73,42
17	Terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (IE14)	Keluarga berkualitas:						
			a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,72(2022)	64,39	68,73	74,15	79,57	86,07
			b. Indeks perlindungan anak	64,52(2022)	72,00	74,40	78,21	79,41	85,51
			Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,758	0,718	0,638	0,538	0,438	0,318



SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045						
			INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
					BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
	masyarakat yang inklusif								
18	Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan	Lingkungan hidup berkualitas (IE15)	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	n.a	0,562	0,586	0,617	0,647	0,684
			Kualitas lingkungan hidup:						
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,13	80,68	81,52	82,58	83,64	84,91
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	8,73	8,64	8,69	32,41	41,93	50,25
			c. Pengelolaan Sampah:						
			- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	27,14	33,57	46,43	65,71	78,57	85,00
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
19	Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, berketahanan air dan transisi	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan (IE16)	Ketahanan energi, air dan pangan:						
			a. Ketahanan energi						
			- Konsumsi listrik per kapita (Kwh)	996,54	1.012,59	1.018,45	1.029,57	1.045,04	1.069,51
			- Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	n.a	111,00	106,80	101,55	96,30	90,00
			b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>prevalence of undernourishment</i> ) (%)	15,75	14,55	11,72	8,18	4,64	0,39
			c. Ketahanan air:						
			- Kapasitas air baku (m³/detik)	0,17	0,20	0,43	0,67	0,90	1,13
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	65,95	69,68	75,56	82,66	89,65	100,00



SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045						
			INDIKATOR	KONDISI AWAL 2023	TARGET				
					BASELINE 2025*	2029	2034	2039	2045
energi berkelanjutan									
20	Terwujudnya Kota Sungai Penuh yang maju dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	Indeks Resiko Bencana (IRB)	113,76	110,50	102,50	102,50	102,50	102,50
			Intensitas emisi GRK (Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen)						
			- Kumulatif	n.a	226.371,73	289.848,09	372.290,95	484.800,43	592.928,69

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, Diolah oleh Bappeda, 2024

\*) Baseline 2025 merupakan proyeksi target



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045, harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Upaya mewujudkan Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045 juga memerlukan lingkungan pendanaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

#### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

RPJPD menjadi acuan oleh seluruh pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan daerah sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045.

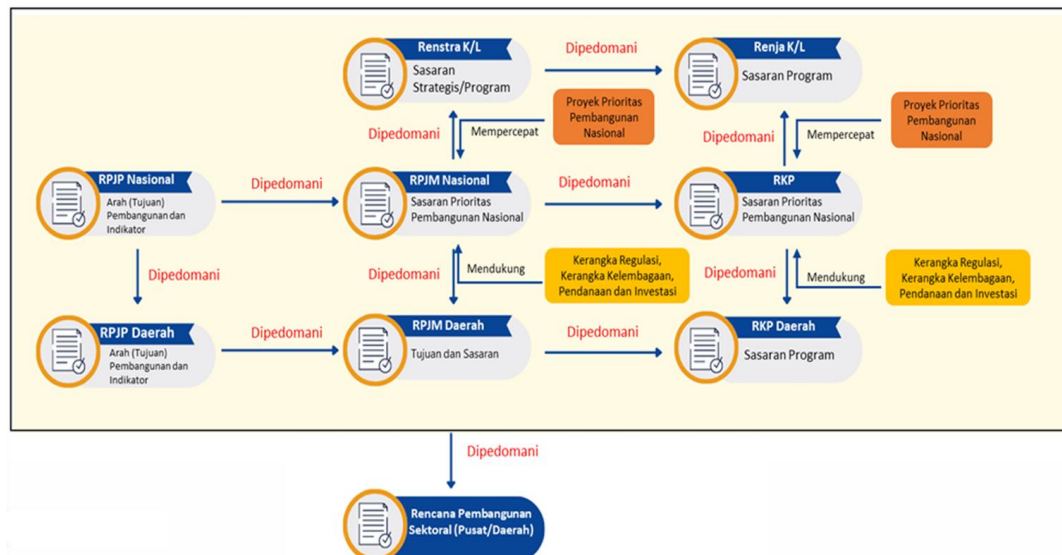
##### **6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

##### **6.1.1.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN dan Dokumen Rencana Lainnya**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar VI.1 berikut.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

**Gambar VI.1**  
**Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN dan Dokumen Rencana Lainnya**

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD dengan mempedomani RPJMN.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045. Hal-hal yang bersifat rencana strategis 5 (lima) tahunan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD.
3. Tujuan pembangunan daerah dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPD (Renstra SKPD).
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPD.
7. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Pembangunan sektoral, seperti rencana induk/ *master plan/grand design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman Visi, Misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon anggota DPRD.

#### **6.1.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek untuk perencanaan pemerintah daerah.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra SKPD.

#### **6.1.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran**

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah



maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja serta pendanaan dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, serta memanfaatkan sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk *blended financing* untuk pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian dan evaluasi didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 lebih detail sebagaimana Gambar VI.2.



Sumber : RPJPN 2025-2045 (modifikasi)

Gambar VI.2  
Kerangka Pengendalian RPJPD Kota Sungai Penuh  
Tahun 2025-2045

Pengendalian dan evaluasi RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan tahunan yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pengendalian dan evaluasi perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

Pengendalian dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Pengendalian dan evaluasi jangka menengah mencakup: (1) penjabaran perencanaan RPJPD ke dalam RPJMD dan RPJMD ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta RPJPD ke dalam dokumen rencana jangka menengah SKPD; (2) kesiapan desain program prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (4) identifikasi risiko dan mitigasinya.

Pengendalian dan evaluasi tahunan mencakup: (1) penjabaran perencanaan RPJMD ke dalam dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dalam dokumen rencana tahunan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta dokumen RKPD ke dalam dokumen Renja SKPD; (2) kesiapan desain program prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (4) identifikasi risiko dan mitigasinya.

## **2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan**

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (1) pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah; (2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (4) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program SKPD serta Pemerintah Desa yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dengan kinerja SKPD dan Pemerintah Desa yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja.

Kerangka kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal SKPD dan Pemerintah Desa. Dalam rangka penjaminan terpadu atas pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, dapat dilakukan melalui sinergi pengendalian dan pengawasan.

### **6.1.3 Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, kelompok masyarakat dan pelaku lainnya.



Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu menciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja SKPD dan Pemerintah Desa terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator-indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

#### 6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (1) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif dan profesional; (2) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; dan (3) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat.



Komunikasi kepada SKPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar SKPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada Pemerintah Desa dilakukan untuk membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

## 6.2 Pendanaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan 2045, memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan yang mencakup: (1) penguatan perencanaan pendanaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*); (2) perluasan kerja sama daerah dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (3) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (4) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal dan mendorong alih teknologi; dan (5) optimalisasi pemanfaatan aset.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor non publik dilakukan melalui: (1) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang; (2) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil; (3) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular; (4) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya; dan (5) penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan



untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non publik diperkuat dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pendanaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (1) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (2) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (3) penyelarasan prioritas investasi publik; (4) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (5) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (6) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (7) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.